

7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

7.a. PENDAHULUAN

Peningkatan akuntabilitas dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Semua proses pertanggungjawaban publik atas pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah harus dilaksanakan dalam kerangka dan mekanisme pertanggungjawaban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya segala upaya peningkatan akuntabilitas harus mengacu kepada landasan hukum yang mendasarinya dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Memenuhi tuntutan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang semakin kompleks, tata kelola keuangan daerah harus diselenggarakan dengan sebaik-baiknya. Hal ini berarti setiap aspek pengelolaan keuangan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas secara normatif. Sejalan dengan dinamika regulasi pengelolaan keuangan, diperlukan beberapa langkah antisipatif penyesuaian perangkat pengelolaan keuangan daerah menyikapi perkembangan regulasi yang ada tidak terbatas pada pemutakhiran dasar hukum pengelolaan, penataan kelembagaan dan pembenahan sistem dan prosedur, namun juga mencakup lingkungan sistem pengelolaan termasuk peningkatan profesionalisme dan kapabilitas sumber daya manusia di dalamnya. Mekanisme pencatatan dan pelaporan yang sebelumnya terbatas untuk pemenuhan kewajiban penyusunan laporan keuangan, secara bertahap disempurnakan untuk memaksimalkan hasil dari kinerja pencatatan.

Sebagai komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto dalam menerapkan Akuntansi Berbasis AkruaI sesuai dengan Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka serangkaian kebijakan implementasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto sebagai dasar pelaksanaan adalah antara lain Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Mojokerto (SAPD) dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah untuk mengakomodir perlakuan akuntansi berbasis akruaI. SAPD adalah merupakan pedoman penuh penerapan basis akruaI, sedangkan kebijakan akuntansi adalah penerapan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku berdasarkan kondisi operasional penyusunan suatu laporan keuangan. Secara umum pemenuhan terhadap standar akuntansi pemerintahan berbasis akruaI sesuai dengan PP 71 tahun 2010 dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah telah diupayakan semaksimal mungkin.

Laporan Keuangan adalah merupakan suatu bentuk penyajian informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, laporan operasional, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan. Secara spesifik informasi tersebut tidak hanya bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumberdaya, tapi juga berguna dalam pengambilan keputusan strategis lainnya serta menunjukkan tingkat akuntabilitas suatu entitas.

Laporan keuangan ini meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Selain laporan pokok tersebut di atas, laporan keuangan ini juga dilampiri dengan Laporan Keuangan BUMD, Ikhtisar Dana Desa, Ikhtisar Laporan Keuangan APB Desa dan Dana non-APBD Kabupaten Mojokerto (Dana Tugas Pembantuan dan Dana Bantuan Operasional Sekolah/BOS).

1) Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, serta membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2023 menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan pelaporan yang bermfaat bagi para pemakai (*user*) dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik, keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan cara:

- a) Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- b) Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- c) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah serta hasil-hasil yang dicapai;
- d) Menyediakan informasi mengenai bagaimana Pemerintah Daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- e) Menyediakan informasi posisi keuangan dan kondisi Pemerintahan Daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
- f) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Daerah apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Hal-hal yang dimaksud dapat dilihat dari posisi pendapatan, belanja, transfer, beban, dana cadangan, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dan arus kas Pemerintahan Kabupaten Mojokerto.

2) Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar hukum penyusunan laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

- d) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
- e) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- f) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- g) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- h) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
- i) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
- j) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010;
- k) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- l) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat;
- m) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- n) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
- o) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milk Negara/Daerah yang merupakan pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006;
- p) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- q) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah;
- r) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- s) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- t) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- u) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi barang Milik Daerah;
- v) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- w) Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- x) Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- y) Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- z) Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 24 Tahun 2022;
- aa) Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 57 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Mojokerto;
- ab) Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 96 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 97 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 96 tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
- ac) Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- ad) Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 42 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

3) Sistematika Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Pendahuluan
 - 1) Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
 - 2) Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
 - 3) Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan
- b. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD
 - 1) Ekonomi Makro
 - 2) Kebijakan Keuangan
 - 3) Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
- c. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
 - 1) Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
 - 2) Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan
- d. Kebijakan Akuntansi
 - 1) Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
 - 2) Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
 - 3) Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
 - 4) Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam SAP pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- e. Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan
 - 1) Laporan Realisasi Anggaran
 - 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
 - 3) Neraca

- 4) Laporan Operasional (LO)
- 5) Laporan Arus Kas
- 6) Laporan Perubahan Ekuitas
- f. Penjelasan Atas Informasi-informasi Keuangan Lainnya
 - 1) Dana Tugas Pembantuan
 - 2) Kompensasi Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21)
 - 3) Pelaksanaan APBDes
- g. Penjelasan Atas Informasi-informasi Non Keuangan
 - 1) Kondisi Geografis
 - 2) Batas Wilayah Kabupaten Mojokerto
 - 3) Pembagian dan Kebijakan Perwilayahan
 - 4) Penggabungan atau Pemekaran Entitas Akuntansi
 - 5) Penjelasan atas Barang Milik Daerah
- h. Penutup.

7.b. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

1) Ekonomi Makro

Kebijakan otonomi daerah merupakan langkah strategis dalam dua hal. Yang pertama, otonomi daerah merupakan jawaban atas permasalahan lokal yang dialami bangsa Indonesia berupa ancaman disintegrasi bangsa, kemiskinan, ketidakmerataan pembangunan serta rendahnya kualitas hidup masyarakat dan masalah pembangunan sumber daya manusia. Kedua, desentralisasi merupakan langkah strategis untuk menyongsong era globalisasi ekonomi dengan memperkuat basis perekonomian daerah. Dengan otonomi daerah diharapkan perekonomian daerah akan tumbuh semakin kuat dan mandiri. Sementara itu, keberhasilan perekonomian daerah akan sangat ditentukan oleh harmonisasi antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter di Daerah. Kebijakan fiskal daerah yang termanifestasikan melalui APBD dan perpajakan daerah harus didukung dengan kebijakan moneter melalui neraca pembayaran daerah dan perbankan daerah yang sehat dan kuat.

Seringkali angka pertumbuhan ekonomi dijadikan ukuran keberhasilan pembangunan pada suatu wilayah. Semakin tinggi angka pertumbuhan ekonomi maka dimaknai semakin berhasil pemerintahan dalam melaksanakan program-program pembangunan. Sehingga pertumbuhan ekonomi yang tinggi identik dengan sebuah prestasi. Tapi pada hakikatnya tidak demikian, pembangunan ekonomi yang berkualitas yang harus menjadi tujuan utama dan tidak hanya tinggi secara kuantitas.

Dalam konteks otonomi daerah dan kebijakan fiskal di daerah, untuk melihat kondisi makro ekonomi Daerah dapat dideskripsikan melalui beberapa variabel, meliputi:

- a) Pertumbuhan ekonomi daerah;
- b) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB);
- c) Perkembangan ekonomi sektoral, seperti pertanian, industri pengolahan, bangunan, perdagangan, hotel dan restoran, jasa angkutan dan komunikasi, jasa perusahaan, serta perbankan daerah;
- d) Laju inflasi di daerah (perkembangan harga-harga di daerah);
- e) Arus masuk investasi di daerah; dan
- f) APBD (Keuangan pemerintah daerah).

Salah satu indikator laju pertumbuhan ekonomi di suatu daerah adalah PDRB.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat didefinisikan sebagai total nilai produksi (output) barang dan jasa yang diproduksi di suatu wilayah tertentu dalam waktu tertentu biasanya satu tahun. PDRB atau statistik pedapatan regional merupakan gambaran perkembangan kondisi perekonomian suatu daerah. Sehingga data PDRB dapat memberikan gambaran mengenai peranan atau kontribusi masing-masing sektor terhadap jumlah output barang/jasa yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi pada suatu wilayah. Oleh sebab itu PDRB dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk mengetahui tingkat keberhasilan pertumbuhan ekonomi, tingkat kemakmuran, tingkat inflasi dan deflasi, struktur perekonomian serta potensi suatu daerah.

Angka PDRB Kabupaten Mojokerto atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) selama kurun waktu dua tahun terakhir masing-masing adalah 95.738.109,45 (2022) dan 104.364.000,24 (2023). Dengan adanya persentase kenaikan sebesar 8,26%, hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat produktifitas dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Mojokerto ditinjau dari aspek ekonomi terjadi peningkatan. Sedangkan PDRB Kabupaten Mojokerto atas Dasar Harga Konstan (ADHK) pada tahun 2022 menjadi 63.699.840,43, kemudian pada tahun 2023 mencapai 66.982.000,68 atau naik sebesar 4.9 %.

Distribusi PDRB atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Mojokerto menurut Lapangan Usaha (Distribusi ADHB) Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a) Sektor Pertanian Kehutanan dan Perikanan 7,57%
- b) Sektor Pertambangan dan Penggalian 0,89%
- c) Sektor Industri Pengolahan 57,17%
- d) Sektor Pengadaan Listrik dan Gas 0,06%
- e) Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 0,06%
- f) Sektor Konstruksi 7,59%,
- g) Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 10,41%
- h) Sektor Transportasi dan Pergudangan 1,53%
- i) Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 2,04%
- j) Sektor Informasi dan Komunikasi 5,32%
- k) Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi 1,44%
- l) Sektor Real Estate 1,34%
- m) Sektor Jasa Perusahaan 0,16%
- n) Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib 2,00%
- o) Sektor Jasa Pendidikan 1,15%
- p) Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 0,42%
- q) Sektor Jasa Lainnya 0,84%.

Distribusi PDRB atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Mojokerto menurut Lapangan Usaha (Distribusi ADHK) Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a) Sektor Pertanian Kehutanan dan Perikanan 6,20%
- b) Sektor Pertambangan dan Penggalian 0,83%
- c) Sektor Industri Pengolahan 57,02%
- d) Sektor Pengadaan Listrik dan Gas 0,07%
- e) Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 0,07%
- f) Sektor Konstruksi 7,75%

- g) Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 10,33%
- h) Sektor Transportasi dan Pergudangan 1,39%
- i) Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 1,83%
- j) Sektor Informasi dan Komunikasi 7,20%
- k) Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi 1,34%
- l) Sektor Real Estate 1,44%
- m) Sektor Jasa Perusahaan 0,15%
- n) Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib 1,86%
- o) Sektor Jasa Pendidikan 1,23%
- p) Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 0,44%
- q) Sektor Jasa Lainnya 0,89%.

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mojokerto sampai 2023 telah menunjukkan indikasi pemulihan ekonomi cukup signifikan, hal tersebut tidak terlepas dari kontribusi masing-masing sektor PDRB yang menunjukkan peningkatan positif, meski pada 2020 pertumbuhan ekonomi menjadi negatif akibat pandemi COVID-19, namun pada 2022 pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan yang cukup signifikan di angka 5,82%, dan sedikit menurun di angka 5,15% pada 2023. Pertumbuhan ekonomi dapat diukur dari perkembangan PDRB atas dasar harga konstan, sehingga angka pertumbuhan ekonomi tidak dipengaruhi oleh faktor perubahan harga, atau dapat diartikan riil disebabkan oleh kenaikan atau penurunan produksi (output) dari seluruh sektor ekonomi. Adapun laju pertumbuhan ekonomi Pemerintah Kabupaten Mojokerto sampai tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel b. 1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2019 - 2023

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,81	-1,11	4,12	5,82	5,15

Sumber : BPS Kabupaten Mojokerto

Dari tabel diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mojokerto mengalami kenaikan pada tahun 2019 mencapai 5,81%, dan semakin menurun pada tahun 2020 sebagai dampak dari Pandemi Covid 19, kemudian mulai merangkak naik kembali di Tahun 2021 sebesar 4,21%. Selanjutnya pada tahun 2022 meningkat lagi menjadi 5,82% dan sedikit menurun pada tahun 2023 sebesar 5,15%. Gambaran pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mojokerto selama tiga tahun terakhir dari masing-masing sektor PDRB ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel b. 2 persentase Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mojokerto Berdasarkan PDRB ADHK Tahun 2021-2023

NO	URAIAN	2021 (%)	2022* (%)	2023** (%)
1	Pertanian Kehutanan dan Perikanan	1.03	1,38	4,36
2	Pertambangan dan Penggalian	3.90	5,99	2,86
3	Industri Pengolahan	5.35	6,58	5,78
4	Pengadaan Listrik dan Gas	3.10	4,85	6,82
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6.38	3,89	3,43
6	Konstruksi	-2.08	6,01	2,10
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.99	5,20	5,82
8	Transportasi dan Pergudangan	6.40	13,17	10,41
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.34	10,51	6,14
10	Informasi dan Komunikasi	4.47	4,75	4,16
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0.54	1,40	4,90
12	Real Estate	0.25	4,53	0,69

NO	URAIAN	2021 (%)	2022* (%)	2023** (%)
13	Jasa Perusahaan	1.94		9,30
14	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	0.15	0,42	-0,07
15	Jasa Pendidikan	-0.24	0,69	6,30
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.87	4,86	7,38
17	Jasa Lainnya	3.06	15,81	6,81
	Total	4.12	5,82	5,15

Sumber : BPS Kabupaten Mojokerto

*angka sementara

** angka sangat sementara

Tabel di atas memperlihatkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mojokerto mengalami kenaikan pada tahun 2021 dari tahun 2020 dan meningkat lagi pada tahun 2022 dan menurun pada tahun 2023 sebesar 5,15 % yang berarti lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,05% di Tahun 2023.

Dari sisi moneter, seperti kestabilan nilai tukar rupiah, terkendalinya laju inflasi dan kestabilan tingkat suku bunga perbankan akan mempengaruhi prospek perekonomian di Kabupaten Mojokerto. Meski mengalami gejolak akibat krisis geopolitik di Timur Tengah, dari sisi moneter tidak terjadi perubahan nilai tukar yang ekstrim, namun akan berpengaruh pada meningkatnya laju inflasi. Dengan perkiraan relatif stabilnya nilai tukar rupiah dan suku bunga perbankan serta dukungan kebijakan moneter yang hati-hati, serta laju inflasi rata-rata diperkirakan pada kisaran 3,0+1% per tahun, maka prospek ekonomi Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 dan 2023 akan lebih baik dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya, sehingga pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mojokerto pada tahun 2024 diperkirakan akan meningkat lagi.

Di bidang perbankan, diharapkan bank di Kabupaten Mojokerto dapat terus meningkatkan dukungannya pada sektor riil dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui subsidi bunga dan pinjaman kredit kepada UMKM.

Disamping itu, kondisi ekonomi makro juga bisa dilihat dari Angka Pengangguran, Gini Ratio, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Tingkat Kemiskinan, dengan penjelasan sebagai berikut:

a) Angka Pengangguran

Indikator untuk mengukur pengangguran adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Pengangguran terbuka adalah orang yang mencari pekerjaan, atau yang sedang mempersiapkan usaha, atau yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin lagi mendapatkan pekerjaan, termasuk mereka yang baru mendapat kerja tapi belum mulai bekerja. Angka TPT dapat mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. Idealnya pencapaian hasil pembangunan disuatu wilayah apabila angka TPT nya semakin rendah. Angka Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Mojokerto pada tahun 2018-2022 sebagaimana tabel berikut:

Tabel b. 3 persentase Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2019-2023

URAIAN	2019	2020	Agustus 2021	Agustus 2022	Agustus 2023
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,68	5,75	5,54	4,83	4,67

Sumber : BPS Kabupaten Mojokerto

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja. TPT hasil

Agustus 2023 sebesar 4,67 persen. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar 5 orang menganggur. Pada Agustus 2022, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,83 persen, turun 0,71 poin dibandingkan dengan Agustus 2021. TPT laki-laki sebesar 4,48 persen, lebih rendah dibanding TPT perempuan yang sebesar 4,94 persen pada tahun 2023 (bulan agustus). Dibandingkan Agustus 2022, TPT laki-laki naik 0,85 persen poin dan TPT perempuan turun 1,66 persen poin.

Penduduk usia kerja merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas. Penduduk usia kerja di Kabupaten Mojokerto pada Agustus 2023 sebesar 893.299 orang, mengalami sedikit penurunan sekitar 13 ribu orang dibandingkan Agustus 2022. Sebagian besar penduduk usia kerja tersebut tergolong dalam angkatan kerja yaitu 647.752 orang (72,51 persen), sisanya termasuk bukan angkatan kerja (sekolah, mengurus rumah tangga, dan kegiatan lainnya).

Komposisi angkatan kerja di Kabupaten Mojokerto pada Agustus 2023 terdiri dari 617.533 orang bekerja dan 30.219 orang penganggur. Dibandingkan Agustus 2022, terjadi kenaikan jumlah angkatan kerja sebanyak 974 orang. Penduduk bekerja mengalami kenaikan sebanyak 1.976 orang dan penduduk dengan kategori pengangguran berkurang sebanyak 1.002 orang. Dibandingkan tahun sebelumnya, jumlah penduduk bekerja dan pengangguran cenderung bertambah seiring kenaikan jumlah angkatan kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada Agustus 2023 juga relatif meningkat sebesar 1,18 persen poin dibanding Agustus 2022. Hal ini sejalan dengan penambahan jumlah penduduk bekerja. TPAK Kabupaten Mojokerto pada Agustus 2023 tercatat sebesar 72,51 persen. Berdasarkan jenis kelamin, masih terdapat perbedaan mencolok diantara TPAK laki-laki dan TPAK perempuan. Pada Agustus 2023, TPAK laki-laki sebesar 87,24 persen, sedangkan TPAK perempuan, hanya sebesar 57,77 persen. Kesenjangan partisipasi angkatan kerja perempuan dan laki-laki masih sangat besar

Komposisi penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan utama dapat menggambarkan penyerapan tenaga kerja di pasar kerja untuk masing-masing sektor. Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2023, sektor pekerjaan di Kabupaten Mojokerto yang menyerap tenaga kerja paling banyak adalah Sektor Jasa sebesar 43,95 persen; Sektor Manufaktur sebesar 32,97 persen; dan Sektor Pertanian sebesar 23,08 persen. Polanya hampir sama dengan kondisi tahun-tahun sebelumnya. Dibandingkan Agustus 2022, Sektor Manufaktur mengalami peningkatan jumlah pekerja terbanyak yaitu bertambah sebesar 4.316 orang. Jumlah pekerja di Sektor Jasa juga meningkat sebanyak 3.564 orang. Sebaliknya, sektor Pertanian satu-satunya yang mengalami penurunan sebesar 5.904 orang.

Pada Agustus 2023, berdasarkan status pekerjaan utama, kegiatan penduduk bekerja dapat dikategorikan menjadi kegiatan formal dan informal. Penduduk yang bekerja di kegiatan formal mencakup status Berusaha Dibantu Buruh Tetap/Dibayar dan status Buruh/Karyawan/Pegawai, sedangkan mereka yang Berusaha Sendiri, Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap/Pekerja Keluarga, Pekerja Bebas (pertanian/nonpertanian), dan Pekerja Keluarga/Tak Dibayar dikategorikan bekerja pada kegiatan informal. Pada Agustus 2023, struktur kegiatan Kabupaten Mojokerto masih didominasi oleh kegiatan informal. Pada Agustus 2023 sebanyak

43,03 persen penduduk bekerja pada kegiatan formal atau sedikit mengalami kenaikan sebesar 1,65 persen poin dibandingkan keadaan Agustus 2022 (41,38 persen). Hal ini merupakan indikasi bahwa telah terjadi pemulihan perekonomian akibat pandemi covid-19 yang mendorong penyerapan tenaga kerja pada sektor formal.

Pada Agustus 2023, Tingkat pendidikan dapat mengindikasikan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja hingga Agustus 2023 masih didominasi oleh penduduk bekerja yang berpendidikan sekolah menengah (umum dan kejuruan), kemudian diikuti oleh penduduk bekerja yang berpendidikan SD ke bawah. Kondisi seperti ini juga terjadi pada periodeperiode sebelumnya di mana penduduk bekerja di Kabupaten Mojokerto masih cukup banyak yang berpendidikan relatif rendah. Mutu pendidikan tenaga kerja erat kaitannya dengan nilai produktivitas yang dihasilkan pada suatu wilayah. Semakin baik tingkat pendidikan dari penduduk yang bekerja, maka semakin tinggi nilai produktivitas yang bisa dihasilkan. Pada Agustus 2023, dari total penduduk bekerja di Kabupaten Mojokerto sekitar 40 persen berpendidikan Sekolah Menengah Atas (umum dan kejuruan) dan hampir sepertiganya masih berpendidikan SD ke bawah (31,33 persen). Sisanya, penduduk bekerja merupakan lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Perguruan Tinggi.

Penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19 dikelompokkan menjadi empat komponen yaitu: a) Pengangguran Karena COVID-19; b) Bukan Angkatan Kerja (BAK) Karena COVID-19; Sementara Tidak Bekerja Karena COVID-19; dan d) Penduduk Bekerja yang Mengalami Pengurangan Jam Kerja Karena COVID-19. Kondisi a) dan b) merupakan dampak pandemi COVID-19 pada mereka yang berhenti bekerja, sedangkan kondisi c) dan d) merupakan dampak pandemi COVID-19 yang dirasakan oleh mereka yang saat ini masih bekerja.

b) Gini Ratio

Salah satu indikator untuk mengukur tingkat pemerataan pendapatan penduduk adalah Indeks Gini (Gini Ratio). Nilai dari indeks ini berkisar antara 0 dan 1. Apabila Indeks Gini bernilai 0, maka pendapatan masyarakat merata (tidak timpang). Sementara, Indeks Gini bernilai 1 menunjukkan pendapatan timpang sempurna. Indeks Gini semakin mendekati 0 berarti tingkat ketimpangan/kesenjangan antar kelompok pengeluaran semakin rendah. Demikian juga sebaliknya, semakin mendekati 1 dapat diartikan bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok pengeluaran semakin tinggi. Indeks Gini Kabupaten Mojokerto dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel b. 4 Indeks Gini (Gini Ratio) Tahun 2018-2023

URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gini Ratio	0,306	0,270	0,325	0,294	0,327	0,338

Sumber : BPS Kabupaten Mojokerto

Indeks Gini Kabupaten Mojokerto periode tahun 2018 hingga 2022 berfluktuasi. Pada tahun 2018 ke 2019 cenderung menurun dari 0,306 menjadi 0,270 dan naik lagi menjadi 0,325 pada tahun 2020. Pada tahun 2021 turun kembali menjadi 0,294, kemudian naik kembali menjadi 0,327 pada tahun 2022. Dan pada tahun 2023 juga mengalami kenaikan menjadi 0,338 yang mana hal ini perlu menjadi perhatian meskipun jika dibandingkan dengan angka Nasional dan Provinsi Jawa Timur,

indeks gini Kabupaten Mojokerto masih dibawah angka Nasional 0,388 dan angka Provinsi Jawa Timur 0,387.

c) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Keberhasilan pembangunan dari perspektif kualitas hidup masyarakat dapat dilihat dari indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM dapat menentukan peringkat pembangunan suatu wilayah. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu: kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Angka IPM Kabupaten Mojokerto dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel b. 5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2018-2023

URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Umur Harapan Hidup (UHH)	72,24	72,43	72,53	72,59	72,93	74,74
Harapan Lama Sekolah (EYS)	15,53	12,61	12,88	12,95	12,96	12,97
Rata-rata Lama Sekolah	8,18	8,49	8,51	8,64	8,97	9,11
Pengeluaran per Kapita Riil Disesuaikan	12.454	12.860	12.779	12.844	13.051	13.467
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,64	73,53	73,83	74,15	74,89	76,23

Sumber : BPS Kabupaten Mojokerto

IPM Kabupaten Mojokerto terus mengalami kemajuan. IPM Kabupaten Mojokerto meningkat dari 68,71 pada tahun 2011 menjadi 74,89 pada tahun 2022. Dan pada tahun 2023 IPM Kabupaten Mojokerto adalah 76,23. Selama periode tersebut, IPM Kabupaten Mojokerto rata-rata tumbuh sebesar 0,89 persen poin per tahun dan masih bertahan di level “tinggi” sejak tahun 2014. Namun, sejak pandemi COVID-19 telah membawa sedikit perubahan dalam pencapaian pembangunan manusia Kabupaten Mojokerto. IPM tahun 2020 tercatat sebesar 73,83 atau tumbuh 0,40 persen poin, melambat dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya. Adapun capaian tahun 2022, IPM Kabupaten Mojokerto mencapai 74,89 poin atau tumbuh sebesar 0,99 persen poin terhadap tahun 2021. Dan capaian tahun 2023, kualitas sumber daya manusia meningkat tumbuh 2,21%

Selama periode 2011 hingga 2022, HLS Kabupaten Mojokerto meningkat dari 11,75 tahun pada 2011 menjadi 12,96 tahun pada 2021 atau naik sebesar 1,21 tahun. Sementara rata-rata lama sekolah juga meningkat dari 7,26 tahun pada 2011 menjadi 8,97 tahun pada 2022 atau naik 1,71 tahun. Ini berarti rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Mojokerto usia 25+ setara dengan tingkat pendidikan SMP kelas VIII. Angka HLS rata-rata tumbuh sebesar 1,03 persen per tahun. Meningkatnya angka harapan lama sekolah menjadi sinyal positif bahwa semakin banyak penduduk yang bersekolah. Di tahun 2022, harapan lama sekolah di kabupaten Mojokerto mencapai 12,96 tahun yang berarti bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan hingga lulus SMA. Sedangkan pada tahun 2023 Kualitas hidup penduduk Kabupaten Mojokerto semakin meningkat tumbuh 0,35 persen yaitu dari UHH 74,48 ke 74,74. Sedangkan Kualitas Pendidikan di Kabupaten Mojokerto semakin meningkat program wajib belajar 9 tahun terlampaui yang ditunjukkan dengan HLS tumbuh 0,08 persen dan RLS tumbuh 1,56 persen di tahun 2023. Pertumbuhan yang positif, baik RLS maupun HLS, menjadi modal manusia penting untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Mojokerto. Dengan kualitas sumber daya manusia yang semakin membaik dari sisi tingkat pendidikan, proses pembangunan secara umum juga akan berlangsung lebih baik.

Dimensi terakhir yang mewakili kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak yang direpresentasikan oleh pengeluaran per kapita (atas dasar harga konstan

2012) yang disesuaikan. Pada tahun 2022 pengeluaran per kapita masyarakat Kabupaten Mojokerto yang disesuaikan mencapai Rp13.051 ribu per tahun, naik tipis 1,61 persen dibanding tahun 2021 lalu. Jika dibandingkan dengan kondisi sebelum pandemi COVID-19 tahun 2019, pengeluaran per kapita yang disesuaikan Kabupaten Mojokerto tahun 2022 telah mengalami kenaikan sebesar 191 ribu rupiah. Sedangkan pada tahun 2023, Kualitas hidup layak di Kabupaten Mojokerto semakin meningkat tumbuh 3,19 persen yang ditunjukkan dengan Pengeluaran Per Kapita/tahun (Ribu Rupiah) dari 13.051 ke 13.467

d) Tingkat Kemiskinan

Pemerintah Kabupaten Mojokerto sebagaimana tertuang dalam visinya, Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang maju, adil, dan makmur melalui penguatan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Mojokerto. Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial terus berusaha meningkatkan dan menyempurnakan berbagai program penanggulangan kemiskinan, terutama program Jalinkesra (Kerjasama Lintas Sektor Peningkatan Kesejahteraan Rakyat). Upaya lain yang dilakukan yaitu dengan meningkatkan kemampuan dan pendapatan rumah tangga miskin melalui kemudahan akses modal untuk usaha kecil dan mikro dan keterlibatan penduduk miskin dalam kegiatan/proyek padat karya. Langkah lainnya yaitu pemberian bantuan langsung untuk pendidikan dan kesehatan melalui program PKH, KIP, KIS, serta program lainnya untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduk miskin seperti raskin, tambahan protein (pembagian telur), dan lainnya.

Kemiskinan Makro adalah konsep yang dipakai dalam mengukur kemiskinan. Pengukuran tingkat kemiskinan didasarkan pada kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar (makanan dan bukan makanan). Jadi, Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah Garis Kemiskinan (GK). Selama periode Maret 2021-Maret 2022, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Mojokerto berkurang sebanyak 9,51 ribu jiwa, dari 120,54 ribu jiwa pada Maret 2021 menjadi 111,03 ribu jiwa pada Maret 2022 atau mengalami penurunan sebesar 7,89 persen. Berdasarkan persentase penduduk miskin di Kabupaten Mojokerto dalam rentang waktu satu tahun, tersebut mengalami penurunan sebesar 0,91 persen, dari 10,62 persen pada Maret 2021 menjadi 9,71 persen pada Maret 2022. Faktor yang diduga terkait dengan kondisi kemiskinan di Kabupaten Mojokerto selama periode Maret 2022 yakni aktifitas perekonomian mulai pulih dari dampak pandemi covid-19. Masyarakat di Kabupaten Mojokerto mulai beraktivitas seperti biasanya. Sedangkan kondisi kemiskinan makro tahun 2023 adalah kemiskinan makro mengalami peningkatan yaitu menjadi 9,8 dengan jumlah penduduk miskin 112.860.

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Mojokerto dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel b. 6 Persentase Penduduk Miskin Tahun 2018-2023

URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Penduduk Miskin (1000)	111,55	108,81	118,80	120,54	111,03	112.860
Persentase Penduduk Miskin	10,08	9,75	10,57	10,62	9,71	9,8

Sumber : BPS Kabupaten Mojokerto

Secara umum, dalam periode 2018-2023 tingkat kemiskinan di Kabupaten Mojokerto cenderung mengalami penurunan, baik jumlah penduduk miskin maupun persentase penduduk miskin. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2003 sebesar 166,10 ribu jiwa, berkurang sebesar 55,07 ribu jiwa menjadi 111,03 ribu jiwa pada tahun 2022. Sementara itu, persentase penduduk miskin di Kabupaten Mojokerto pada tahun 2003 sebesar 17,18 persen, berkurang sebesar 7,47 persen atau menjadi 9,71 persen pada tahun 2022. Namun pada tahun 2023 mengalami kenaikan. Jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan/GK) di Kabupaten Mojokerto pada bulan Maret 2023 mencapai 112,86 ribu jiwa. Jumlah ini bertambah sebesar 1,83 ribu jiwa, bila dibandingkan dengan kondisi Maret 2022 yang sebesar 111,03 ribu jiwa. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Mojokerto juga mengalami kenaikan dari 9,71 persen pada bulan Maret 2022 menjadi sebesar 9,80 persen pada bulan Maret 2023.

Garis Kemiskinan merupakan suatu nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan nonmakanan yang harus dipenuhi sebagai batas untuk menentukan kategori miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan Kabupaten Mojokerto pada Maret 2022 adalah sebesar Rp445.608,00 per kapita per bulan. Dibandingkan Maret 2021, Garis Kemiskinan bertambah sebesar Rp27.824,00 per kapita per bulan. Garis Kemiskinan di Kabupaten Mojokerto pada bulan Maret 2023 sebesar Rp486.520,00 per kapita per bulan, bertambah sebesar Rp40.912,00 per kapita per bulan atau meningkat sebesar 9,18 persen, bila dibandingkan kondisi bulan Maret 2022 yang sebesar Rp445.608,00.

Masalah kemiskinan, sebenarnya tidak hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin saja. Namun ukuran lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan yang terjadi. Strategi pembangunan terutama yang bertujuan menurunkan jumlah penduduk miskin, harus melihat tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.

Selama periode 2003-2023, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Kabupaten Mojokerto fluktuatif. Pada tahun 2023 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Mojokerto Maret 2023 sebesar 0,73 mengalami peningkatan sebesar 0,36 poin dibandingkan Maret 2022 yaitu 0,37. Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) Kabupaten Mojokerto Maret 2023 sebesar 0,40 mengalami peningkatan sebesar 0,11 poin dibandingkan Maret 2022 yaitu 0,29

Ini menunjukkan bahwa perbedaan rata-rata tingkat pengeluaran per kapita per bulan penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan di Kabupaten Mojokerto, tidak terlalu besar. Berdasarkan hal ini dapat diperoleh dua informasi. Pertama, biaya yang diperlukan dalam upaya pengurangan kemiskinan, terutama yang bersifat cash transfer agar penduduk keluar dari Garis Kemiskinan tidak sebesar di tahun 2003 (berdasarkan Indeks Kedalaman Kemiskinan/P1) dan tidak memerlukan banyak program dikarenakan tingkat kemiskinan di Kabupaten Mojokerto relatif homogen dibandingkan kondisi tahun 2003 (berdasarkan Indeks Keparahannya Kemiskinan/P2)

2) Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Mojokerto sampai dengan akhir tahun anggaran yang berimplikasi terhadap perubahan posisi Neraca dan Arus Kas adalah bagian dari upaya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran dengan tetap memperhatikan unsur rasionalitas sesuai perkembangan yang ada dalam

kaitannya dengan tingkat pelayanan kepada masyarakat, sejalan dengan prosedur dan mekanisme tata laksana kerja secara berkesinambungan.

Sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai pijakan dalam mengelola atau mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah melalui pajak dan retribusi daerah, dimana Anggaran Pendapatan Daerah harus menjamin akan tersedianya dana dalam membiayai seluruh belanja daerah guna penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Oleh karena itu pendapatan dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah harus dikelola secara efisien dan optimal sesuai dengan kebutuhan daerah.

Arah Kebijakan Keuangan Daerah merupakan proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan yang akan menggambarkan perkembangan pendapatan dan proporsi sumber pendapatan Kabupaten Mojokerto. Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Daerah, Pemerintah Daerah telah mengambil kebijakan-kebijakan sebagai berikut:

- a) Penguatan produk hukum daerah yang mendasari pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
- b) Pelaksanaan pengkajian dan penguatan potensi pengembangan BUMD.
- c) Peningkatan Pelayanan Bidang Industri Perdagangan, Pariwisata dan Kesehatan
- d) Peningkatan Pelayanan Perizinan.
- e) Kerjasama dengan Aparat Penegak Hukum dalam Bidang Perpajakan.
- f) Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelola Pajak Daerah
- g) Peningkatan kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan.
- h) Peningkatan Manajemen Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah berbasis Teknologi Informasi.
- i) Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah yang bertujuan untuk mendorong implementasi ETPD guna meningkatkan transparansi keuangan daerah serta mendukung tata kelola dan mengintegrasikan sistem pengelolaan keuangan daerah dalam rangka optimalisasi PAD
- j) Pengembangan transaksi pembayaran digital dan mewujudkan keuangan yang inklusif serta meningkatkan integritas ekonomi dan keuangan digital.

Dari sisi belanja daerah, dalam rangka mendukung pemerataan pembangunan dan keseimbangan pemenuhan tuntutan pembangunan, maka perlu diambil langkah-langkah dan kebijakan strategis dalam sisi belanja daerah. Selain itu belanja daerah difokuskan untuk pemulihan ekonomi akibat pandemi covid-19. Langkah dan kebijakan tersebut antara lain:

- a) Belanja diarahkan pada program dan kegiatan yang benar-benar merupakan prioritas pembangunan daerah sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada.
- b) Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pencapaian target program dan kegiatan melalui perbaikan dalam sisi manajemen.
- c) Memperbaiki mekanisme pengadaan barang dan jasa, sehingga biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang atau jasa sepadan dengan jumlah dan kualitas barang atau jasa tersebut.
- d) Lebih meningkatkan asas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang

berlaku sehingga dapat dihindari adanya pengeluaran yang sifatnya tidak perlu atau belum menjadi prioritas.

- e) Untuk pengeluaran yang sifatnya dalam rangka memenuhi kebutuhan yang mendesak dilakukan analisa yang mendalam untuk menilai apakah memang kebutuhan tersebut benar-benar merupakan kebutuhan yang mendesak.
- f) Pada program dan kegiatan yang termasuk skala besar dan strategis dilakukan penelaahan dan analisis dalam segi waktu pelaksanaan, dalam arti mempertimbangkan waktu yang tepat yang dianggap akan memaksimalkan manfaat dari program atau kegiatan tersebut. Jika berdasarkan pertimbangan dalam berbagai hal perlu dilakukan penundaan atau penjadwalan ulang, maka tidak menutup kemungkinan sebuah program atau kegiatan akan ditunda pelaksanaannya.

Sedangkan dari sisi Pembiayaan Daerah, Kebijakan Pembiayaan Daerah Tahun 2023 diarahkan untuk meningkatkan manajemen pembiayaan daerah yang mengarah pada akurasi, efisiensi, efektivitas dan profitabilitas kebijakan pembiayaan daerah, dan tetap difokuskan pada:

- a) Dalam hal APBD diperkirakan surplus, akan dipergunakan untuk pembayaran pokok utang, penyertaan modal, melakukan pembentukan dana cadangan guna mendanai kegiatan yang menyediakan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam satu tahun anggaran.
- b) Dalam hal APBD diperkirakan defisit, perlu ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut, diantaranya dengan memanfaatkan perkiraan sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2022.
- c) Untuk mendukung terciptanya stabilitas keuangan daerah maka diupayakan agar selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan yang selanjutnya disebut pembiayaan *netto*, nilainya harus dapat menutup terjadinya defisit anggaran. Sehingga tidak menimbulkan hutang dan kesulitan likuiditas keuangan daerah.

Keadaan sosial, ekonomi yang selalu tumbuh dan berkembang sehingga menjadikan Pemerintah Daerah perlu melaksanakan kajian/evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Sebagaimana diketahui pada akhir-akhir ini di negara kita sering terjadi musibah yang secara tidak langsung akan mempengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat kita, oleh karena itu dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah memerlukan strategi, pengamatan yang cermat dan kehati-hatian dalam rangka upaya peningkatan pendapatan daerah khususnya yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah yang karena secara langsung sebagian pendapatan tersebut diperoleh dari masyarakat daerah setempat.

Pengelolaan keuangan daerah yang terstruktur dalam APBD dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, fokus, berkomitmen, partisipatif, terobosan, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasakeadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

3) Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Keberhasilan pencapaian target kinerja APBD yang tercermin dalam indikator keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023 menurut urusan pemerintahan daerah dan OPD Pengguna Anggaran dapat dijelaskan sebagaimana lampiran 1.

Mencermati tabel pada lampiran 1, dapat disimpulkan bahwa secara umum, indikator pencapaian target kinerja OPD menunjukkan trend efektivitas dan efisiensi program dan kegiatan yang telah dilaksanakan masing-masing OPD pada Tahun Anggaran 2023. Beberapa indikator target kinerja yang dapat diklaim telah menunjukkan efektivitas dan efisiensi program dan kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu adanya peningkatan kinerja pembangunan khususnya pembangunan infrastruktur gedung puskesmas dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, serta pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung kelancaran pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Mojokerto.

7.c. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

1) Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah yang dicerminkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana tahunan pemerintah daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah yang dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kurun waktu satu tahun. Pada tahun Anggaran 2023, Pemerintah Kabupaten Mojokerto telah melakukan beberapa kali perubahan atas Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dan perubahan atas Penjabaran PAPBD Tahun Anggaran 2023.

Selama Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Kabupaten Mojokerto telah melakukan 4 (empat) kali perubahan/pergeseran (perubahan atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD TA 2023) sesuai amanat peraturan perundang-undangan, dengan rincian sebanyak 3 kali setelah Penetapan APBD Tahun Anggaran 2023 dan sebanyak 1 kali setelah Penetapan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, rincian perubahan tersebut disajikan pada tabel berikut:

**Tabel c. 1 Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2022
Tentang Penjabaran APBD TA 2023**

(dalam rupiah)

Uraian	Perbub No 52 Tahun 2022 28 Desember 2022 (APBD Murni)	Perbub No 1 Tahun 2023 10 Pebruari 2023 (Perubahan I)	Perbub No 5 Tahun 2023 28 Maret 2023 (Perubahan II)	Perbub No 10 Tahun 2023 30 Mei 2023 (Perubahan III)
Pendapatan	2.506.313.727.464,00	2.506.377.727.464,00	2.506.103.712.585,00	2.508.039.162.585,00
- Pendapatan Asli Daerah	632.842.772.807,00	632.842.772.807,00	632.842.772.807,00	632.842.772.807,00
- Pendapatan Transfer	1.873.470.954.657,00	1.873.534.954.657,00	1.873.260.939.778,00	1.875.196.389.778,00
- Lain-lain Pendapatan yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja	2.706.223.707.844,00	2.706.287.707.844,00	2.706.013.692.965,00	2.707.949.142.965,00
Belanja Operasi	1.786.948.720.609,00	1.755.057.217.248,00	1.751.078.603.603,00	1.753.339.053.603,00
- Belanja Pegawai	988.336.632.126,00	991.949.100.126,00	991.937.100.126,00	991.937.100.126,00
- Belanja Barang dan Jasa	689.010.452.062,00	653.506.480.701,00	646.526.537.056,00	648.715.999.664,00
- Belanja Hibah	105.843.196.201,00	105.843.196.201,00	108.856.526.201,00	108.927.513.593,00
- Belanja Bantuan Sosial	3.758.440.220,00	3.758.440.220,00	3.758.440.220,00	3.758.440.220,00
Belanja Modal	364.955.094.705,00	396.910.598.066,00	400.615.196.832,00	400.290.196.832,00
- Belanja Modal Tanah	456.320.000,00	456.320.000,00	456.320.000,00	456.320.000,00
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.260.712.881,00	58.565.978.508,00	58.711.585.078,00	58.386.585.078,00
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	160.178.021.496,00	160.460.348.833,00	164.007.733.759,00	164.007.733.759,00
- Belanja Modal Jalan Jaringan dan Irigasi	177.491.679.958,00	176.859.590.355,00	176.859.590.355,00	176.859.590.355,00
- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	568.360.370,00	568.360.370,00	579.967.640,00	579.967.640,00

Uraian	Perbub No 52 Tahun 2022 28 Desember 2022 (APBD Murni)	Perbub No 1 Tahun 2023 10 Februari 2023 (Perubahan I)	Perbub No 5 Tahun 2023 28 Maret 2023 (Perubahan II)	Perbub No 10 Tahun 2023 30 Mei 2023 (Perubahan III)
Belanja Tidak Terduga	25.563.066.554,00	25.563.066.554,00	25.563.066.554,00	25.563.066.554,00
- Belanja Tidak Terduga	25.563.066.554,00	25.563.066.554,00	35.549.324.782,00	35.549.324.782,00
Belanja Transfer	528.756.825.976,00	528.756.825.976,00	528.756.825.976,00	528.756.825.976,00
- Belanja Bagi Hasil	36.771.297.658,00	36.771.297.658,00	39.419.727.434,00	39.419.727.434,00
- Belanja Bantuan Keuangan	491.985.528.318,00	491.985.528.318,00	453.959.990.318,00	453.959.990.318,00
Defisit	-199.909.980.380,00	-199.909.980.380,00	-199.909.980.380,00	-199.909.980.380,00
Pembiayaan Netto	199.909.980.380,00	199.909.980.380,00	199.909.980.380,00	199.909.980.380,00
SILPA	0,00	0,00	0,00	0,00

**Tabel c. 2 Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2023
Tentang Penjabaran PAPBD TA 2023**

(dalam rupiah)

Uraian	Perbub No 31 Tahun 2023 9 Oktober 2023 (APBD Perubahan)	Perbub No 42 Tahun 2023 8 Desember 2023 (Perubahan I)
Pendapatan	2.607.666.373.959,00	2.607.873.973.959,00
- Pendapatan Asli Daerah	673.662.919.222,00	673.662.919.222,00
- Pendapatan Transfer	1.934.003.454.737,00	1.934.211.054.737,00
- Lain-lain Pendapatan yang Sah	0,00	0,00
Belanja	2.962.901.828.944,00	2.963.109.428.944,00
Belanja Operasi	1.895.693.070.146,00	1.895.900.670.146,00
- Belanja Pegawai	1.010.134.694.569,00	1.010.134.694.569,00
- Belanja Barang dan Jasa	727.466.680.674,00	727.466.680.674,00
- Belanja Hibah	151.066.279.683,00	151.273.879.683,00
- Belanja Bantuan Sosial	7.025.415.220,00	7.025.415.220,00
Belanja Modal	431.374.888.077,00	431.374.888.077,00
- Belanja Modal Tanah	456.320.000,00	456.320.000,00
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	80.047.757.323,00	80.047.757.323,00
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	164.228.273.046,00	164.228.273.046,00
- Belanja Modal Jalan Jaringan dan Irigasi	185.883.151.355,00	185.883.151.355,00
- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	759.386.353,00	759.386.353,00
Belanja Tidak Terduga	38.559.268.266,00	38.559.268.266,00
- Belanja Tidak Terduga	38.559.268.266,00	35.549.324.782,00
Belanja Transfer	597.274.602.455,00	597.274.602.455,00
- Belanja Bagi Hasil	43.921.993.776,00	43.921.993.776,00
- Belanja Bantuan Keuangan	553.352.608.679,00	553.352.608.679,00
Defisit	-199.909.980.380,00	-199.909.980.380,00
Pembiayaan Netto	199.909.980.380,00	199.909.980.380,00
SILPA	0,00	0,00

Adapun penjelasan atas perubahan-perubahan anggaran tersebut adalah sebagai berikut:

A. Perubahan Peraturan Bupati setelah APBD Ditetapkan

Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, mengalami 3 (tiga) kali perubahan, yaitu:

1. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 10 Februari 2023 dalam Berita Daerah Nomor 1.
 - a. Dasar dan kebijakan dilakukannya perubahan anggaran adalah sebagai berikut:
 - (1) Dasar penerbitan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2023, yaitu:
 - Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur tanggal 16 Januari 2023 Nomor 412.2/304/112.3/2023 perihal Penyampaian Pagu Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023 untuk kegiatan Program Pemberdayaan BUM Desa, Pemberdayaan Desa Mandiri (Desa Berdaya), dan Pemberdayaan Usaha Perempuan (JATIM PUSPA) Tahun Anggaran 2023; serta

- Mengakomodasi kebutuhan perubahan/pergeseran rekening belanja pada beberapa Perangkat Daerah yang melakukan pergeseran baik dari sumber dana yang bersifat khusus/Earmarked maupun dari sumber dana yang bersifat umum untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan.

(2) Kebijakan penerbitan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2023

Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2023 mengakomodasi adanya perubahan/pergeseran anggaran terkait diterimanya Pagu Anggaran Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten/Kota Pada APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023 setelah ditetapkan sesuai Surat Gubernur Jawa Timur sebesar Rp1.046.125.000,00 dengan rincian :

- Pemberdayaan BUMDesa sebesar Rp700.000.000,00 untuk 7 desa;
- Pemberdayaan Desa Mandiri (Desa Berdaya) sebesar Rp200.000.000,00 untuk 2 desa;
- Pemberdayaan Perempuan (JATIM PUSPA) sebesar Rp146.125.000,00 untuk 2 desa, 49 PKM; dan
- BKK Kabupaten sebesar Rp64.000.000,00.

dan Perubahan/pergeseran rekening belanja pada beberapa Organisasi Perangkat Daerah yang melakukan pergeseran baik dari sumber dana yang bersifat khusus/ *Earmarked* maupun dari sumber dana yang bersifat umum.

b. Ringkasan perubahan/pergeseran anggaran adalah sebagai berikut:

- (1) Pendapatan Daerah bertambah sebesar Rp64.000.000,00 dari semula sebesar Rp2.506.313.727.464,00 menjadi sebesar Rp2.506.377.727.464,00.
- (2) Belanja Daerah bertambah sebesar Rp64.000.000,00 dari semula sebesar Rp2.706.223.707.844,00 menjadi sebesar Rp2.706.287.707.844,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - Belanja Operasi berkurang sebesar Rp31.891.503.361,00 dari semula sebesar Rp1.786.948.720.609,00 menjadi sebesar Rp1.755.057.217.248,00.
 - Belanja Modal bertambah sebesar Rp31.955,503.361,00 dari semula sebesar Rp364.955.094.705,00 menjadi sebesar Rp396.910.598.066,00.
 - Belanja Tidak Terduga tidak mengalami perubahan dari semula sebesar Rp25.563.066.554,00.
 - Belanja Transfer tidak mengalami perubahan dari semula sebesar Rp528.756.825.976,00.Defisit tidak mengalami perubahan dari semula sebesar Rp199.909.980.380,00.
- (3) Pembiayaan Daerah tidak mengalami perubahan dari semula sebesar Rp199.909.980.380,00 yang digunakan untuk menutup defisit anggaran.

2. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 28 Maret 2023 dalam Berita Daerah Nomor 5.
 - a. Dasar dan kebijakan dilakukannya perubahan anggaran adalah sebagai berikut:
 - (1) Dasar penerbitan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2023, yaitu:
 - Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 440/794/102.1/2023 tanggal 12 Januari 2023 perihal Pagu Anggaran Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Bidang Kesehatan kepada Kabupaten/Kota pada APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023;
 - Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 045.2/1010/201.4/2023 tanggal 13 Februari 2023 perihal Pagu Anggaran Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Bidang Pendidikan kepada Kabupaten/Kota pada APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023; serta
 - Mengakomodasi kebutuhan perubahan/pergeseran rekening belanja pada beberapa Perangkat Daerah untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan.
 - (2) Kebijakan penerbitan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2023 mengakomodasi adanya perubahan/-pergeseran anggaran terkait diterimanya Pagu Anggaran Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten/Kota setelah penetapan APBD Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2023 bidang kesehatan sebesar Rp274.425.121,00 dan bidang pendidikan sebesar Rp 4.195.600.000,00.
 - b. Ringkasan perubahan/pergeseran anggaran adalah sebagai berikut:
 - (1) Pendapatan Daerah berkurang sebesar Rp274.014.879,00 dari semula (Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2023) sebesar Rp2.506.377.727.464,00 menjadi sebesar Rp2.506.103.712.585,00, antara lain :
 - Pendapatan Asli Daerah tidak mengalami perubahan dari semula sebesar Rp632.842.772.807;
 - Pendapatan Transfer berkurang sebesar Rp274.014.879,00 dari semula sebesar Rp1.873.534.954.657,00 menjadi sebesar Rp1.873.260.939.778,00.
 - (2) Belanja Daerah berkurang sebesar Rp274.014.879,00 dari semula (Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2023) sebesar Rp2.706.287.707.844,00 menjadi sebesar Rp2.706.013.692.965,00, dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - Belanja Operasi berkurang sebesar Rp3.978.613.645,00 dari semula sebesar Rp1.755.057.217.248,00 menjadi sebesar Rp1.751.078.603.603,00.

- Belanja Modal bertambah sebesar Rp3.704.598.766,00 dari semula sebesar Rp396.910.598.066,00 menjadi sebesar Rp400.615.196.832,00.
 - Belanja Tidak Terduga tidak ada perubahan dari semula sebesar Rp25.563.066.554.
 - Belanja Transfer tidak ada perubahan dari semula sebesar Rp528.756.825.964.,00.
- Defisit tidak mengalami perubahan dari semula sebesar Rp199.909.980.380,00 yang ditutup dari Netto Pembiayaan sebesar Rp199.909.980.380,00.
- (3) Pembiayaan Daerah tidak ada perubahan dari semula sebesar Rp199.909.980.380,00 yang digunakan untuk menutup defisit anggaran.
3. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 10 Mei 2023 dalam Berita Daerah Nomor 10.
- a. Dasar dan kebijakan dilakukannya perubahan anggaran adalah sebagai berikut:
- (1) Dasar penerbitan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2023, yaitu:
- Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri tanggal 10 Maret 2023 Nomor 900.1.14.3/1483/SJ perihal Hasil Pemetaan, Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2023, Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi Tahun Anggaran 2023, dan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2023;
 - Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur tanggal 27 Maret 2023 Nomor 140/2812/112.2/2023 perihal Penyampaian Pagu Definitif Belanja Bantuan Keuangan ke Kabupaten dan Kota Batu untuk Honorarium Aparatur Pemerintah Desa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023; serta
 - Mengakomodasi kebutuhan perubahan/pergeseran rekening belanja pada Perangkat Daerah untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan.
- (2) Kebijakan penerbitan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2023 Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2023 mengakomodasi adanya perubahan/- pergeseran anggaran terkait diterimanya Pagu Anggaran Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus ke Kabupaten dan Kota Batu untuk Honorarium Aparatur Pemerintah Desa pada APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023 bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan memberikan honorarium bagi seluruh aparatur pemerintah desa untuk mencukupi kebutuhan data dimaksud sebanyak 2 (dua) kali dengan pagu definitif bantuan keuangan yang diterima kabupaten Mojokerto sebesar Rp1.935.450.000,00.

- b. Ringkasan perubahan/pergeseran anggaran adalah sebagai berikut:
- (1) Pendapatan Daerah bertambah sebesar Rp1.935.450.000,00 dari semula (Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2023) sebesar Rp2.506.103.712.585,00 menjadi sebesar Rp2.508.039.162.585,00 antara lain :
 - Pendapatan Asli Daerah tidak mengalami perubahan dari semula sebesar Rp632.842.772.807,00;
 - Pendapatan Transfer bertambah sebesar Rp1.935.450.000,00 dari semula sebesar Rp1.873.260.939.778,00 menjadi sebesar Rp1.875.196.389.778,00.
 - (2) Belanja Daerah bertambah sebesar Rp1.935.450.000,00 dari semula sebesar Rp2.706.013.692.965,00 menjadi sebesar Rp2.707.949.142.965,00, dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - Belanja Operasi bertambah sebesar Rp2.260.450.000,00 dari semula sebesar Rp1.751.078.603.603,00 menjadi sebesar Rp1.753.339.053.603,00.
 - Belanja Modal berkurang sebesar Rp325.000.000,00 dari semula sebesar Rp400.615.196.832,00 menjadi sebesar Rp400.290.196.832,00.
 - Belanja Tidak Terduga tidak ada perubahan dari semula sebesar Rp25.563.066.554,00.
 - Belanja Transfer tidak ada perubahan dari semula sebesar Rp528.756.825.976,00.Defisit tidak mengalami perubahan dari semula sebesar Rp199.909.980.380,00 yang ditutup dari Netto Pembiayaan sebesar Rp199.909.980.380,00.
 - (3) Pembiayaan Daerah tidak ada perubahan dari semula sebesar Rp199.909.980.380,00 yang digunakan untuk menutup defisit anggaran..

B. Perubahan Peraturan Bupati setelah Perubahan APBD Ditetapkan

Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, mengalami 1 (satu) kali perubahan, yaitu Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 18 Desember 2023 dalam Berita Daerah Nomor 42.

- a) Dasar dan kebijakan dilakukannya perubahan anggaran adalah sebagai berikut:
- (1) Dasar penerbitan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2023, yaitu:
 - Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur tanggal 9 Nopember 2023 Nomor 045.2/42880/201.1/2023 perihal Pagu Anggaran Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Bidang Pendidikan Kepada Kabupaten/Kota pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023; dan
 - Mengakomodasi kebutuhan perubahan/pergeseran rekening belanja pada Perangkat Daerah untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan.
 - (2) Kebijakan penerbitan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2023. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2023 dalam rangka menyesuaikan dengan Pagu Anggaran Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Bidang Pendidikan Kepada Kabupaten/Kota pada Perubahan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023 yang menyebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten Mojokerto mendapat alokasi anggaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Bidang Pendidikan sebesar Rp. 207.600.000,00 untuk

pemenuhan honorarium kinerja Kepala/Guru TK/PAUD Non PNS selama 6 bulan sebesar Rp195.600.000,00 dan pemenuhan honorarium kinerja Guru Non PNS selama 2 bulan sebesar Rp12.000.000,00.

- b) Ringkasan perubahan/pergeseran anggaran sebagai berikut:
- (1) Pendapatan Daerah bertambah sebesar Rp207.600.000,00 dari semula (Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2023) sebesar Rp2.607.666.373.959,00 menjadi sebesar Rp2.607.873.973.959,00 antara lain:
 - Pendapatan Asli Daerah tidak mengalami perubahan dari semula sebesar Rp673.662.919.222,00;
 - Pendapatan Transfer bertambah sebesar Rp 207.600.000,00 dari semula sebesar Rp1.934.003.454.737,00 menjadi sebesar Rp1.934.211.054.737,00 berasal dari Pendapatan Transfer Antar Daerah-Bantuan Keuangan Khusus Bidang Pendidikan dari Pemerintah Provinsi
 - (2) Belanja Daerah bertambah sebesar Rp207.600.000,00 dari semula (PAPBD) sebesar Rp2.962.901.828.944,00 menjadi sebesar Rp2.963.109.428.944,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - Belanja Operasi bertambah sebesar Rp207.600.000,00 dari semula sebesar Rp1.895.693.070.146,00 menjadi sebesar Rp1.895.900.670.146,00.
 - Belanja Modal tidak ada perubahan dari semula sebesar Rp431.374.888.077,00.
 - Belanja Tidak Terduga tidak ada perubahan dari semula sebesar Rp38.559.268.266,00.
 - Belanja Transfer tidak ada perubahan dari semula sebesar Rp597.274.602.455,00.
 - Defisit tidak mengalami perubahan dari semula sebesar Rp355.235.454.985,00 yang ditutup dari Netto Pembiayaan sebesar Rp355.235.454.985,00.
 - (3) Pembiayaan Daerah tidak ada perubahan dari semula sebesar Rp355.235.454.985,00 yang digunakan untuk menutup defisit anggaran.

Setelah beberapa kali perubahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Mojokerto terakhir menganggarkan pendapatan sebesar Rp2.607.873.973.959,00 dan terealisasi sebesar Rp2.608.549.958.903,54 atau 100,03%. Dibandingkan dengan realisasi pada Tahun Anggaran 2022 yang sebesar Rp2.537.235.424.067,77, realisasi pendapatan Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp71.314.534.835,77 atau sebesar 2,81% dari realisasi pendapatan tahun lalu. Sementara dari sisi belanja untuk Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Kabupaten Mojokerto menganggarkan sebesar Rp2.963.109.428.944,00 dan terealisasi sebesar Rp2.715.093.795.527,07 atau sebesar 91,63%. Dibandingkan dengan realisasi pada Tahun Anggaran 2022 yang sebesar Rp2.620.848.933.109,70, realisasi belanja Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp94.244.862.417,37 atau sebesar 3,60%.

Berikut ini disajikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2023 beserta realisasinya.

Tabel c. 3 Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2023*(dalam rupiah)*

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%
1.	Pendapatan	2.607.873.973.959,00	2.608.549.958.903,54	100,03
2.	Belanja Daerah	2.963.109.428.944,00	2.715.093.795.527,07	91,63
	a. Belanja Operasi	1.895.900.670.146,00	1.749.284.603.751,19	92,27
	b. Belanja Modal	431.374.888.077,00	368.834.887.917,88	85,50
	c. Belanja Tak Terduga	38.559.268.266,00	1.394.558.239,00	3,62
	d. Belanja Transfer	597.274.602.455,00	595.579.745.619,00	99,72

Dari tabel di atas diketahui dari total Belanja Daerah sebesar Rp2.715.093.795.527,07, sebesar 64,43% atau Rp1.749.284.603.751,19 digunakan untuk Belanja Operasi, sebesar 13,58% atau Rp368.834.887.917,88 digunakan untuk Belanja Modal dan sebesar 0,05% atau Rp1.394.558.239,00 untuk Belanja Tak Terduga, sedang sisanya sebesar Rp595.579.745.619,00 atau 21,94% digunakan untuk Belanja Transfer.

Anggaran dan realisasi pendapatan setiap OPD untuk Tahun Anggaran 2023 dijelaskan pada tabel c.4 di bawah ini:

Tabel c. 4 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2023*(dalam rupiah)*

No	OPD	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%
1	Dinas Pendidikan	27.000.000,00	27.000.000,00	100,00
2	Dinas Kesehatan	48.474.905.000,00	48.014.980.743,44	99,05
3	RSUD Prof. Dr. Soekandar – BLUD	115.000.000.000,00	128.857.956.697,36	112,05
4	RSUD RA. Basuni - BLUD	65.000.000.000,00	59.743.507.151,00	91,91
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6.064.756.959,00	2.886.230.264,75	47,59
6	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan	7.500.053.200,00	6.145.293.206,79	81,94
7	Dinas Tenaga Kerja	2.501.042.400,00	3.281.058.100,00	131,19
8	Dinas Pangan dan Perikanan	100.000.000,00	100.500.600,00	100,50
9	Dinas Lingkungan Hidup	2.861.480.000,00	3.438.211.067,00	120,15
10	Dinas Komunikasi dan Informatika	942.085.000,00	942.085.000,00	100,00
11	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	844.229.547,00	0,00
12	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	13.166.034.000,00	8.699.167.147,00	66,07
13	Dinas Pertanian	1.000.000.000,00	1.540.387.100,82	154,04
14	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3.884.137.840,00	3.467.359.130,40	89,27
15	Sekretariat Daerah	7.463.924.823,00	7.463.924.823,09	100,00
16	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.942.172.687.517,00	1.962.110.666.551,89	101,03
17	Badan Pendapatan Daerah	391.715.867.220,00	370.987.401.773,00	94,71
Total Pendapatan		2.607.873.973.959,00	2.608.549.958.903,54	100,03

Dari tabel di atas diketahui kontribusi terbesar dari Pendapatan terdapat pada OPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sebesar Rp1.962.110.666.551,89 atau 75,22% dari total pendapatan Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Dari nilai tersebut sebesar Rp1.952.423.671.884,00 merupakan Pendapatan Transfer, hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Mojokerto masih sangat bergantung pada Pemerintah Pusat untuk membiayai kegiatannya. Kontribusi kedua terdapat pada OPD Badan Pendapatan Daerah yaitu sebesar Rp370.987.401.773,00 atau 14,22%, selanjutnya terdapat pada RSUD Prof. Dr. Soekandar sebesar Rp128.857.956.697,36 atau 4,94%.

Sedangkan anggaran dan realisasi belanja setiap OPD untuk Tahun Anggaran 2023 dijelaskan pada tabel c.5 di bawah ini:

Tabel c. 5 Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2023

(dalam rupiah)

No	OPD	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%
1	Dinas Pendidikan	744.753.865.905,00	681.885.763.087,00	91,56
2	Dinas Kesehatan	250.634.361.490,00	222.926.668.383,88	88,94
3	RSUD Prof. Dr. Soekandar - Rutin	43.240.756.000,00	42.438.097.632,00	98,14
4	RSUD Prof. Dr. Soekandar - BLUD	188.000.000.000,00	180.319.006.085,00	95,91
5	RSUD RA. Basuni - Rutin	11.265.897.000,00	10.835.293.795,00	96,18
6	RSUD RA. Basuni - BLUD	82.411.197.536,00	67.799.797.063,00	82,27
7	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	257.689.725.709,00	218.013.314.279,00	84,60
8	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan	17.849.298.000,00	16.474.913.161,00	92,30
9	Satuan Polisi Pamong Praja	14.651.377.311,00	12.612.330.449,00	86,08
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8.991.786.730,00	8.415.623.172,00	93,59
11	Dinas Sosial	19.922.809.277,00	19.100.291.893,00	95,87
12	Dinas Tenaga Kerja	8.646.140.400,00	7.681.698.784,00	88,85
13	Dinas Pangan dan Perikanan	7.804.498.063,00	6.890.219.096,00	88,29
14	Dinas Lingkungan Hidup	29.062.760.057,00	26.866.186.569,00	92,44
15	Dinas Kependudukan dan Capil	8.573.557.554,00	7.909.080.060,00	92,25
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	16.658.398.608,00	15.815.305.582,00	94,94
17	Dinas Pengendalian Penduduk KB dan Pemberdayaan Perempuan	20.795.893.333,00	19.925.934.064,00	95,82
18	Dinas Komunikasi dan Informatika	22.501.598.000,00	21.761.303.413,00	96,71
19	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	5.420.247.981,00	4.940.008.675,00	91,14
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	13.602.260.000,00	10.451.469.115,00	76,84
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.501.765.361,00	4.123.044.438,00	91,59
22	Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga	23.429.479.920,00	22.186.248.545,00	94,69
23	Dinas Pertanian	29.362.237.480,00	26.247.084.124,00	89,39
24	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	11.535.775.713,00	9.879.800.438,00	85,64
25	Sekretariat Daerah	86.059.826.943,00	80.952.605.553,00	94,07
26	Inspektorat Kabupaten	14.614.350.906,00	12.985.097.344,00	88,85
27	Badan Perencanaan & Pembangunan Daerah	12.540.261.092,00	11.319.589.290,00	90,27
28	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	770.579.698.590,00	723.880.232.568,00	93,94
29	Badan Pendapatan Daerah	34.702.246.387,00	29.336.749.446,00	84,54
30	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	10.318.448.756,00	9.589.450.181,00	92,93
31	Sekretariat DPRD	88.357.433.936,00	83.023.167.120,00	93,96
32	Kecamatan Puri	3.426.665.158,00	3.204.795.427,00	93,53
33	Kecamatan Sooko	2.902.352.710,00	2.664.510.688,00	91,81
34	Kecamatan Trowulan	2.848.177.896,00	2.663.650.051,00	93,52
35	Kecamatan Bangsal	3.155.283.467,00	2.992.699.194,00	94,85
36	Kecamatan Gedeg	2.720.088.927,00	2.566.829.648,00	94,37
37	Kecamatan Kemlagi	3.027.617.971,00	2.818.230.653,00	93,08
38	Kecamatan Jetis	2.925.418.587,00	2.850.658.456,00	97,44
39	Kecamatan Dawarblandong	3.020.050.960,00	2.602.352.599,00	86,17
40	Kecamatan Pacet	2.674.199.736,00	2.423.802.727,00	90,64
41	Kecamatan Pungging	2.736.730.956,00	2.548.233.392,00	93,11
42	Kecamatan Ngoro	3.257.064.000,00	2.949.752.728,00	90,56

No	OPD	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%
43	Kecamatan Kutorejo	2.929.868.777,00	2.867.019.991,00	97,85
44	Kecamatan Dlanggu	2.651.900.199,00	2.580.121.822,00	97,29
45	Kecamatan Trawas	2.732.000.000,00	2.462.026.274,00	90,12
46	Kecamatan Mojoanyar	2.832.629.331,00	2.759.450.448,00	97,42
47	Kecamatan Gondang	2.621.711.933,00	2.421.773.530,00	92,37
48	Kecamatan Jatirejo	2.939.867.009,00	2.709.350.236,00	92,16
49	Kecamatan Mojosari	11.381.820.672,00	9.915.837.048,00	87,12
50	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	43.848.026.617,00	42.507.327.210,19	96,94
Total Belanja		2.963.109.428.944,00	2.715.093.795.527,07	91,63

Dari tabel di atas terlihat bahwa belanja terbesar ada pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp723.880.232.568,00 atau 26,66% dari total belanja Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Selanjutnya di Dinas Pendidikan yang mencapai Rp681.885.763.087,00 atau 25,11% dan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp222.926.668.383,88 atau 8,21%, sisanya sebesar 40,02% tersebar di 47 (empat puluh tujuh) OPD dan BLUD. Hal ini menunjukkan bahwa urusan wajib pelayanan dasar di bidang Pendidikan dan Kesehatan menjadi prioritas utama Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

Terhadap besaran anggaran dan realisasi belanja per OPD sesuai tabel c.5 tersebut, rincian anggaran dan realisasi belanja berdasarkan kelompok belanja per OPD untuk Tahun Anggaran 2023 yang dibagi dalam kelompok Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer disajikan dalam tabel berikut.

Tabel c. 6 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2023

(dalam rupiah)

No	OPD	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%
1	Dinas Pendidikan	667.652.162.538,00	614.063.722.273,00	91,97
2	Dinas Kesehatan	224.660.808.315,00	198.863.269.108,00	88,52
3	RSUD Prof. Dr. Soekandar - Rutin	14.823.024.000,00	14.214.158.694,00	95,89
4	RSUD Prof. Dr. Soekandar - BLUD	120.800.000.000,00	118.297.425.098,00	97,93
5	RSUD RA. Basuni - Rutin	8.565.897.000,00	8.278.112.218,00	96,64
6	RSUD RA. Basuni - BLUD	72.917.443.740,00	65.519.669.412,00	89,85
7	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	71.397.107.387,00	65.809.420.462,00	92,17
8	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan	14.800.029.503,00	13.608.399.528,00	91,95
9	Satuan Polisi Pamong Praja	14.334.365.081,00	12.391.498.559,00	86,45
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8.745.090.870,00	8.185.706.172,00	93,60
11	Dinas Sosial	19.922.809.277,00	19.100.291.893,00	95,87
12	Dinas Tenaga Kerja	8.616.162.400,00	7.656.708.784,00	88,86
13	Dinas Pangan dan Perikanan	7.589.059.291,00	6.676.061.096,00	87,97
14	Dinas Lingkungan Hidup	24.255.616.176,00	22.845.565.179,00	94,19
15	Dinas Kependudukan dan Capil	7.906.708.354,00	7.264.874.060,00	91,88
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	16.582.034.608,00	15.740.950.582,00	94,93
17	Dinas Pengendalian Penduduk KB dan Pemberdayaan Perempuan	19.085.809.068,00	18.318.607.064,00	95,98
18	Dinas Komunikasi dan Informatika	21.542.761.410,00	20.810.135.690,00	96,60
19	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	5.032.226.281,00	4.597.663.139,00	91,36
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.771.700.810,00	4.649.668.115,00	80,56
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.427.731.011,00	4.061.857.668,00	91,74
22	Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga	21.359.352.077,00	20.302.435.392,00	95,05
23	Dinas Pertanian	29.272.598.230,00	26.157.842.124,00	89,36

No	OPD	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%
24	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	11.412.017.266,00	9.761.897.538,00	85,54
25	Sekretariat Daerah	83.610.846.958,00	78.734.564.493,00	94,17
26	Inspektorat Kabupaten	14.537.271.906,00	12.914.722.344,00	88,84
27	Badan Perencanaan & Pembangunan Daerah	12.183.465.891,00	10.969.688.102,00	90,04
28	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	134.165.020.869,00	126.332.688.896,00	94,16
29	Badan Pendapatan Daerah	33.256.501.887,00	27.911.651.246,00	83,93
30	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	9.813.077.039,00	9.085.974.541,00	92,59
31	Sekretariat DPRD	86.852.470.598,00	81.548.079.120,00	93,89
32	Kecamatan Puri	3.307.182.458,00	3.094.720.427,00	93,58
33	Kecamatan Sooko	2.882.479.710,00	2.644.747.688,00	91,75
34	Kecamatan Trowulan	2.672.417.915,00	2.499.440.051,00	93,53
35	Kecamatan Bangsal	3.123.831.467,00	2.961.367.194,00	94,80
36	Kecamatan Gedeg	2.660.473.927,00	2.513.319.648,00	94,47
37	Kecamatan Kemlagi	2.932.427.771,00	2.726.088.153,00	92,96
38	Kecamatan Jetis	2.745.242.187,00	2.674.539.531,00	97,42
39	Kecamatan Dawarblandong	3.000.698.960,00	2.583.622.599,00	86,10
40	Kecamatan Pacet	2.628.529.886,00	2.381.110.227,00	90,59
41	Kecamatan Pungging	2.668.864.956,00	2.481.163.392,00	92,97
42	Kecamatan Ngoro	3.129.448.000,00	2.835.802.728,00	90,62
43	Kecamatan Kutorejo	2.862.407.777,00	2.801.976.991,00	97,89
44	Kecamatan Dlanggu	2.564.917.759,00	2.500.366.822,00	97,48
45	Kecamatan Trawas	2.655.830.000,00	2.394.361.274,00	90,15
46	Kecamatan Mojoanyar	2.750.004.331,00	2.681.187.448,00	97,50
47	Kecamatan Gondang	2.594.236.933,00	2.394.298.530,00	92,29
48	Kecamatan Jatirejo	2.882.469.888,00	2.651.954.990,00	92,00
49	Kecamatan Mojosari	8.152.318.103,00	7.334.410.098,00	89,97
50	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	43.795.718.277,00	42.456.817.370,19	96,94
Total Belanja Operasi		1.895.900.670.146,00	1.749.284.603.751,19	92,27

Dari tabel c.6 di atas terlihat bahwa belanja operasi terbesar ada pada OPD Dinas Pendidikan yang mencapai Rp614.063.722.273,00 atau 35,10% dari total Belanja Operasi Pemerintah Kabupaten Mojokerto, selanjutnya di Dinas Kesehatan sebesar Rp198.863.269.108,00 atau 11,37% hal ini menunjukkan pendidikan dan kesehatan adalah prioritas utama Pemerintah Kabupaten Mojokerto, sisanya sebesar 53,53% tersebar pada 48 (empat puluh delapan) OPD dan BLUD.

Selanjutnya anggaran dan realisasi dalam kelompok Belanja Modal pada OPD, dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel c. 7 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2023

(dalam rupiah)

No	OPD	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%
1	Dinas Pendidikan	77.101.703.367,00	67.822.040.814,00	87,96
2	Dinas Kesehatan	25.973.553.175,00	24.063.399.275,88	92,65
3	RSUD Prof. Dr.Soekandar - Rutin	28.417.732.000,00	28.223.938.938,00	99,32
4	RSUD Prof. Dr.Soekandar - BLUD	67.200.000.000,00	62.021.580.987,00	92,29
5	RSUD RA. Basuni - Rutin	2.700.000.000,00	2.557.181.577,00	94,71
6	RSUD RA. Basuni - BLUD	9.493.753.796,00	2.280.127.651,00	24,02
7	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	186.292.618.322,00	152.203.893.817,00	81,70
8	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan	3.049.268.497,00	2.866.513.633,00	94,01
9	Satuan Polisi Pamong Praja	317.012.230,00	220.831.890,00	69,66
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	246.695.860,00	229.917.000,00	93,20

No	OPD	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%
12	Dinas Tenaga Kerja	29.978.000,00	24.990.000,00	83,36
13	Dinas Pangan dan Perikanan	215.438.772,00	214.158.000,00	99,41
14	Dinas Lingkungan Hidup	4.807.143.881,00	4.020.621.390,00	83,64
15	Dinas Kependudukan dan Capil	666.849.200,00	644.206.000,00	96,60
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	76.364.000,00	74.355.000,00	97,37
17	Dinas Pengendalian Penduduk KB dan Pemberdayaan Perempuan	1.710.084.265,00	1.607.327.000,00	93,99
18	Dinas Komunikasi dan Informatika	958.836.590,00	951.167.723,00	99,20
19	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	388.021.700,00	342.345.536,00	88,23
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7.830.559.190,00	5.801.801.000,00	74,09
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	74.034.350,00	61.186.770,00	82,65
22	Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga	2.070.127.843,00	1.883.813.153,00	91,00
23	Dinas Pertanian	89.639.250,00	89.242.000,00	99,56
24	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	123.758.447,00	117.902.900,00	95,27
25	Sekretariat Daerah	2.448.979.985,00	2.218.041.060,00	90,57
26	Inspektorat Kabupaten	77.079.000,00	70.375.000,00	91,30
27	Badan Perencanaan & Pembangunan Daerah	356.795.201,00	349.901.188,00	98,07
28	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	580.807.000,00	573.239.814,00	98,70
29	Badan Pendapatan Daerah	1.445.744.500,00	1.425.098.200,00	98,57
30	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	505.371.717,00	503.475.640,00	99,62
31	Sekretariat DPRD	1.504.963.338,00	1.475.088.000,00	98,01
32	Kecamatan Puri	119.482.700,00	110.075.000,00	92,13
33	Kecamatan Sooko	19.873.000,00	19.763.000,00	99,45
34	Kecamatan Trowulan	175.759.981,00	164.210.000,00	93,43
35	Kecamatan Bangsal	31.452.000,00	31.332.000,00	99,62
36	Kecamatan Gedeg	59.615.000,00	53.510.000,00	89,76
37	Kecamatan Kemlagi	95.190.200,00	92.142.500,00	96,80
38	Kecamatan Jetis	180.176.400,00	176.118.925,00	97,75
39	Kecamatan Dawarblandong	19.352.000,00	18.730.000,00	96,79
40	Kecamatan Pacet	45.669.850,00	42.692.500,00	93,48
41	Kecamatan Pungging	67.866.000,00	67.070.000,00	98,83
42	Kecamatan Ngoro	127.616.000,00	113.950.000,00	89,29
43	Kecamatan Kutorejo	67.461.000,00	65.043.000,00	96,42
44	Kecamatan Dlanggu	86.982.440,00	79.755.000,00	91,69
45	Kecamatan Trawas	76.170.000,00	67.665.000,00	88,83
46	Kecamatan Mojoanyar	82.625.000,00	78.263.000,00	94,72
47	Kecamatan Gondang	27.475.000,00	27.475.000,00	100,00
48	Kecamatan Jatirejo	57.397.121,00	57.395.246,00	100,00
49	Kecamatan Mojosari	3.229.502.569,00	2.581.426.950,00	79,93
50	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	52.308.340,00	50.509.840,00	96,56
Total Belanja Modal		431.374.888.077,00	368.834.887.917,88	85,50

Dari tabel c.7 di atas terlihat bahwa belanja modal terbesar ada pada OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp152.203.893.817,00 atau 41,27% dari total belanja modal, kemudian pada Dinas Pendidikan sebesar Rp67.822.040.814,00 atau 18,39%, dan selanjutnya pada RSUD Soekandar BLUD sebesar Rp62.021.580.987,00 atau 16,82%, sisanya sebesar 23,52% tersebar pada 47 (empat puluh tujuh) OPD dan BLUD.

Realisasi Belanja Tak Terduga pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.394.558.239,00 dari anggaran sebesar Rp38.559.268.266,00 atau 3,62%. Belanja

Tak Terduga tersebut digunakan untuk penanganan bencana alam dan pengembalian Dana Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021 dan 2022.

Realisasi Belanja Transfer sebesar Rp595.579.745.619,00 dari anggaran sebesar Rp597.274.602.455,00 atau 99,72%. Dari total Belanja Transfer sebesar Rp43.211.642.719,00 atau 7,26% digunakan untuk Belanja Bagi Hasil baik Bagi Hasil Pajak maupun Bagi Hasil Retribusi, sedangkan sebesar Rp552.368.102.900,00 atau 92,74% digunakan untuk Belanja Bantuan Keuangan.

2) Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Terhadap kinerja pembangunan dalam berbagai bidang, adanya kemajuan didalam penanganan permasalahan-permasalahan yang ada, diharapkan mampu mengurangi hambatan didalam pencapaian target sesuai kebijakan yang telah ditetapkan daerah.

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja pembangunan, masih ditemukan berbagai permasalahan yang menjadi hambatan dalam mewujudkan target-target yang telah direncanakan. Dari berbagai permasalahan tersebut dirumuskan menjadi isu strategis Kabupaten Mojokerto, yang meliputi:

(a) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berakhlak mulia

Pembangunan manusia pada hakekatnya merupakan suatu proses investasi. Upaya Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi agar dapat berjalan seiring dengan pembangunan manusia diupayakan melalui berbagai program pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan standar hidup serta kapabilitas penduduk. Dengan adanya peningkatan kualitas hidup manusia yang cukup signifikan baik dari sisi kesehatan, pendidikan maupun ekonomi maka akan terlahir generasi penerus yang berkualitas. Oleh sebab itu, Pemerintah Kabupaten Mojokerto fokus pada sektor pendidikan dan kesehatan. Pada sektor pendidikan berfokus pada pemerataan akses bagi seluruh lapisan masyarakat dan peningkatan kualitas pendidikan. Adapun peningkatan kualitas dilakukan dengan pemenuhan sarana/prasarana kelengkapan belajar mengajar pada tiap satuan pendidikan dan peningkatan kualitas tenaga pendidik. Hal ini serupa dengan isu strategis bidang pendidikan yaitu peningkatan akses pelayanan dan kualitas layanan pendidikan dasar, kompetensi guru dan sarana prasarana. Sedangkan pada sektor kesehatan berfokus pada peningkatan sarana pelayanan kesehatan baik RSUD, Puseksmas dan Puskesmas Pembantu (Pustu). Pemerintah Kabupaten Mojokerto juga berupaya meningkatkan derajat kesehatan melalui masyarakat atau yang dikenal sebagai Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) diantara lain melalui Posyandu, Poskesdes, Polindes dan Posbindu serta pengembangan Desa Siaga. Selain itu, guna memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas, Pemerintah Kabupaten Mojokerto juga fokus terhadap pemenuhan alat kesehatan serta peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan. Terdapat beberapa permasalahan di bidang kesehatan yaitu peningkatan akses pelayanan dan kualitas kesehatan dalam penurunan AKI, Stunting, pemberantasan penyakit, penyediaan air bersih dan sanitasi. Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat serta sumber daya manusia kesehatan. Selain itu yaitu masih kurangnya kualitas dan akses pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi seluruh masyarakat termasuk bagi masyarakat yang berkebutuhan

khusus (disabilitas). Disamping kedua hal di atas pemerintah kabupaten Mojokerto juga memperhatikan kemampuan/daya beli masyarakat yang semakin menurun di era Covid 19 ini. Perlu upaya-upaya terukur dan sistematis untuk membantu masyarakat menghadapi dampak sosial dan ekonomi akibat pandemi virus corona tersebut. Guna mewujudkan Kabupaten Mojokerto yang berkarakter, peningkatan kualitas keimanan dan ketaqwaan diselaraskan dengan salah satu agenda prioritas nasional (Nawa Cita) yaitu revolusi karakter bangsa atau lebih dikenal dengan penyebutan revolusi mental. Pada hakekatnya revolusi mental bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum, meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia serta membangkitkan kesadaran bahwa bangsa Indonesia memiliki kekuatan besar untuk berprestasi tinggi, produktif dan berpotensi menjadi bangsa maju dan modern, serta mengubah cara pandang, pikiran, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan, sehingga Indonesia menjadi bangsa besar dan mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain di dunia.

(b) Pengentasan masyarakat miskin dan yang termarginalkan

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan, kesehatan dan pekerjaan. Kemiskinan tidak hanya merupakan permasalahan/isu strategis di tingkat dunia saja. Namun merupakan permasalahan/isu strategis di tingkat nasional maupun provinsi. Seluruh Kab/Kota di Indonesia berupaya mengurangi angka kemiskinan di wilayahnya. Disamping masyarakat miskin, masyarakat yang termarginalkan juga harus dimasukkan dalam agenda pembangunan. Termasuk dalam hal ini masyarakat yang terkena dampak covid 19 sehingga menjadi tidak berdaya, kaum difabel yang kurang berdaya. Kebijakan sosial yang inklusif tidak membiarkan warga masyarakatnya yang termarginalkan menjadi korban akibat dampak pembangunan. Termasuk dalam hal ini warga yang menganggur karena adanya pemutusan hubungan kerja atau usahanya yang gagal dalam situasi saat ini. Hal ini dapat disebabkan dari berkurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia di wilayah Kabupaten Mojokerto dan minat lembaga/ instansi/ perusahaan mencari SDM yang berkualitas, berintelektual tinggi dan berdaya saing karena masyarakat Kabupaten Mojokerto cenderung belum memiliki SDM yang memenuhi kebutuhan lembaga/ instansi/ perusahaan. Untuk itu perlu adanya peningkatan kesempatan kerja untuk penyerapan tenaga kerja, meningkatkan kualitas dan produktifitas ketenagakerjaan dan kompetensi tenaga kerja.

(c) Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif.

Kabupaten Mojokerto merupakan salah satu wilayah yang ditetapkan sebagai Kawasan Pusat Pertumbuhan Industri nasional. Di Kabupaten Mojokerto sendiri, sektor industri secara konsisten merupakan sektor penyumbang terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi. Meskipun demikian, secara relatif besarnya kontribusi tersebut nyatanya kurang optimal dan cenderung stagnan. Selain itu, sektor industri secara faktual ternyata masih belum mampu menyerap banyak tenaga kerja di Kabupaten Mojokerto. Berdasarkan posisi geografis, Kabupaten Mojokerto

merupakan bagian dalam Kawasan Strategis Nasional (KSN), yang dikenal dengan “Gerbang Kertosusila”. Posisi ini menjadikan Kabupaten Mojokerto sebagai salah satu wilayah prioritas dalam percepatan pembangunan ekonomi guna menunjang perekonomian nasional. Disamping itu, dalam lingkup Jawa Timur, Kabupaten Mojokerto termasuk dalam Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) yang berpotensi dalam pengembangan industri besar. Oleh karena itu, dengan keuntungan geografis ini, memberikan peluang besar bagi Kabupaten Mojokerto menjadi salah satu pengungkit perekonomian Jawa Timur selain Kota Surabaya.

- (d) Tata kelola pemerintahan yang berkualitas, cerdas (*smart*) dan bermanfaat
- Tata kelola pemerintahan merupakan hal yang fundamental untuk sebuah pemerintahan. Pemerintahan perlu mengambil bentuk yang lebih berdaya guna dan berhasil guna untuk kemanfaatan bagi masyarakatnya. Reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang dilakukan harus didukung oleh teknologi informasi dan internet. Karena perubahan perilaku dan interaksi masyarakat yang saat ini banyak menggunakan sistem daring atau *online*. Disamping itu reformasi yang dilakukan harus berorientasi pada kinerja yaitu hasil dan dampak positif terhadap masyarakat Mojokerto. Untuk hal ini dibutuhkan pemerintah yang melayani secara prima. Pelayanan prima secara harfiah berarti pelayanan terbaik atau sangat baik. Hakekat pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. Sejalan dengan hal itu pelayanan prima juga diharapkan dapat memotivasi pemberi layanan lain melakukan tugasnya dengan kompeten dan rajin. Pelayanan Prima sebagaimana menuntut pelayanan yang memuaskan pelanggan/masyarakat memerlukan persyaratan bahwa setiap pemberi layanan yang memiliki kualitas kompetensi yang profesional, dengan demikian kualitas kompetensi profesionalisme menjadi sesuatu aspek penting dan wajar dalam setiap transaksi. Upaya peningkatan kualitas pelayanan prima di Kabupaten Mojokerto terus dilaksanakan. Namun, bukan berarti perwujudan pelayanan prima di Kabupaten Mojokerto terbebas dari kendala. Berbagai isu permasalahan seringkali menyertai upaya pelaksanaan pelayanan prima. Hal tersebut terlihat dari masih banyaknya keluhan dari masyarakat / pengguna pelayanan terkait dengan sistem dan prosedur pelayanan perizinan, kependudukan, dan sebagainya. Oleh karenanya, dalam periode 5 (lima) tahun ke depan Pemerintah Kabupaten Mojokerto akan lebih mengoptimalkan pencapaian pemberian pelayanan prima bagi masyarakat di seluruh unsur pelayanan meningkatkan kinerja sektor pemerintahan dan investasi. Kualitas tata kelola pemerintahan (*good governance*) adalah prasyarat tercapainya sasaran pembangunan suatu daerah, baik jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat. Dari sisi penguatan kapasitas pemerintahan (birokrasi), pemerintah daerah terus berupaya memantapkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi untuk mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi nasional (RBN) di segala area perubahan yang disasar, baik kebijakan, kelembagaan, SDM aparatur, maupun perubahan mindset dan cultureset.

- (e) Peningkatan sumber daya fisik/infrastruktur dan lingkungan yang berkualitas dengan dukungan IT.

Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana air bersih, air limbah, drainase, persampahan, penanganan kawasan kumuh, Sumber Daya Alam, dan RTLH.

- Prasarana Air Bersih

Jumlah sumur gali, sumur pompa, mata air, dan jumlah pengolahan air bersih/air minum.

- Sumber Daya Alam

Kurang optimalnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan hidup.

- Sanitasi

Jumlah MCK umum sejumlah 54 unit dan yang memiliki jamban keluarga sebanyak 357 kepala keluarga.

- Air Limbah

Perencanaan IPAL Komunal, debit air limbah, desain, lokasi, dan kebutuhan lahan

- Drainase

Saluran terbuka, primer, sekunder, tersier, saluran tertutup, waduk, pintu air, pompa, bangunan persilangan, bangunan pelimpah, cek dam.

- Persampahan

Skala individu (masyarakat), skala lingkungan (masyarakat, Pemda, swasta), skala kota (Pemda, swasta)

- Penanganan Kawasan Kumuh

Pembangunan perumahan dan permukiman yang kurang terpadu, terarah, terencana, dan kurang memperhatikan kelengkapan prasarana dan sarana dasar seperti air bersih, sanitasi (jamban), sistem pengelolaan sampah, dan saluran pembuangan air hujan, akan cenderung mengalami degradasi kualitas lingkungan atau yang kemudian diterminologikan sebagai "Kawasan Kumuh". Kawasan kumuh meskipun tidak dikendaki namun harus diakui bahwa keberadaannya dalam perkembangan wilayah dan kota tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, dalam rangka meminimalisir munculnya kawasan kumuh, maka perlu dilakukan upaya-upaya secara komprehensif yang menyangkut berbagai aspek yang mampu menghambat timbulnya kawasan kumuh tersebut. Upaya-upaya tersebut antara lain pengentasan kemiskinan, penyuluhan kesehatan lingkungan, pembinaan masyarakat sadar lingkungan, pembangunan infrastruktur publik, pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan masyarakat, pengelolaan kawasan bantaran / sepadan, peningkatan kesehatan masyarakat.

- (f) Penataan Ruang perlu mendapatkan perhatian.

Pada urusan penataan ruang, target penyusunan RDTR belum tercapai karena:

- Peta dasar yang harus ter *update* setiap 2 (dua) tahun
- Proses asistensi peta yang harus melalui PPIDS dan BIG
- Perkembangan yang sangat pesat pada wilayah perkotaan
- Tumpang tindihnya Rencana Rinci Tata Ruang (Rencana Strategis Kabupaten dan Rencana Detail tata Ruang)
- Banyaknya data teknis yang belum dimiliki (RTH, jaringan drainase, jaringan persampahan, dll)

7.d. KEBIJAKAN AKUNTANSI

1) Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua! Pada Pemerintah Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh entitas akuntansi dalam hal ini adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berada di lingkup Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuannya peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas pelaporan dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Adapun jumlah entitas akuntansi pada Pemerintah Kabupaten Mojokerto adalah 48 OPD, 2 Badan Layanan Umum Daerah dan 1 SKPKD.

Untuk BLUD didirikan berdasarkan Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 188.45/146/HK/416-012/2011 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. Soekandar sebagai Badan Layanan Umum Daerah Dengan Status Penuh dan Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 188.45/258/HK/416-012/2013 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah R.A. Basoeni sebagai Badan Layanan Umum Daerah Dengan Status Penuh. Pada Tahun 2023, BLUD masih berupa SKPD sendiri yang mengkonsolidasikan Laporan Keuangannya langsung ke SKPKD

Seluruh laporan keuangan BLUD harus dikonsolidasi ke SKPKD. Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas Badan Layanan Umum (BLU) digabungkan pada laporan keuangan entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahnya (SKPKD). Seluruh pendapatan, belanja, dan pembiayaan pada LRA BLUD dikonsolidasikan ke dalam LRA entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahnya. Laporan Arus Kas BLU dikonsolidasikan pada Laporan Arus Kas unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum. Laporan Perubahan SAL BLU digabungkan dengan Laporan Perubahan SAL BLU dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasiannya.

Dalam rangka konsolidasian laporan keuangan BLUD ke dalam laporan keuangan entitas yang membawahnya (SKPKD), perlu dilakukan eliminasi terhadap akun-akun timbal balik (*reciprocal accounts*) seperti pendapatan, beban, aset, dan kewajiban yang berasal dari entitas akuntansi/pelaporan dalam satu entitas pemerintahan kecuali akun-akun pendapatan dan belanja pada LRA yang berasal dari entitas akuntansi/pelaporan

Selain entitas akuntansi, Pemkab Mojokerto juga memiliki 2 BUMD yakni Perumdam Mojopahit yang bergerak di bidang Penyediaan Air Minum yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Mojopahit dan PT BPR Majatama yang bergerak di bidang Perbankan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perubahan Bentuk Badan Usaha dari PD. BPR Bank Pasar menjadi PT BPR Majatama.

2) Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan SKPD adalah basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca, pengakuan pendapatan - LO dan beban dalam laporan operasional. Sedangkan dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas maka LRA disusun berdasarkan basis kas.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Sedangkan Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

- a). Basis akrual untuk LO berarti pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi, walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula di LO.
- b). Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas maka LRA disusun berdasarkan basis kas berarti pendapatan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah atau entitas pelaporan, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah. Pemerintah daerah tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran (Naik/Turun) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi pendapatan dan pembiayaan penerimaan dengan belanja dan pembiayaan pengeluaran.
- c). Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

3) Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2015 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam penyusunan Laporan Keuangan telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini disusun dengan berpedoman pada Kebijakan Akuntansi yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2016 yaitu:

a) Pengakuan

(1) Pengakuan atas Laporan Realisasi Anggaran

Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pengakuan Pendapatan-LRA pada saat Kas atas pendapatan tersebut telah

diterima pada RKUD dan Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.

Sedangkan Pengakuan Pendapatan-LRA untuk BLUD, Kapitasi dan BOS adalah pada saat Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada Rekening BLUD, Rekening Bendahara JKN Kapitasi dan Rekening Bendahara BOS. Untuk Kas atas pendapatan yang telah diterima oleh Bendahara Penerimaan BLUD yang hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke Rekening BLUD, tetap diakui sebagai Pendapatan dan merupakan bagian dari Kas BLUD.

Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari RKUD. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil. Dalam hal BLUD, JKN Kapitasi dan Dana BOS, belanja diakui pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh PPKD dengan menerbitkan SP3B.

(2) Pengakuan atas Laporan Operasional

Pendapatan - LO

Pendapatan - LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pengakuan Pendapatan - LO pada saat timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*). Pengakuan Pendapatan - LO dibagi menjadi dua yaitu:

(a) Pendapatan - LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas selama tahun berjalan.

Pendapatan - LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah. Atau pada saat diterimanya kas/aset non kas yang menjadi hak pemerintah daerah tanpa lebih dulu adanya penetapan. Dengan demikian, Pendapatan - LO diakui pada saat kas diterima baik disertai maupun tidak disertai dokumen penetapan.

(b) Pendapatan - LO diakui pada saat penyusunan laporan keuangan, dibedakan menjadi:

- Pendapatan - LO diakui sebelum penerimaan kas

Pendapatan - LO diakui sebelum penerimaan kas dilakukan apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah (misalnya SKP-D/SKRD yang diterbitkan dengan metode *official assesment* atau Perpres/Permenkeu/Pergub) dimana hingga akhir tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh pemerintah

daerah. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi pemerintah daerah dan utang bagi wajib bayar atau pihak yang menerbitkan keputusan/peraturan.

- Pendapatan - LO diakui setelah penerimaan kas

Apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain, atau kas telah diterima terlebih dahulu. Atas Pendapatan - LO yang telah diakui saat kas diterima dilakukan penyesuaian dengan pasangan akun pendapatan diterima dimuka.

Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Pengakuan Beban terjadi pada saat timbulnya kewajiban, saat terjadinya konsumsi aset, dan saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:

- (a) Saat timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.
- (b) Saat terjadinya konsumsi aset artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.
- (c) Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu.

Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:

- (a) Beban diakui sebelum pengeluaran kas;
Beban diakui sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan. Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya beban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun belum dilakukan pengeluaran kas.
- (b) Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas;
Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas.
- (c) Beban diakui setelah pengeluaran kas.
Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat

barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar di Muka (akun neraca), Aset Tetap dan Aset Lainnya.

Pengakuan beban pada periode berjalan di Pemerintah Kabupaten Mojokerto dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D belanja, kecuali pengeluaran belanja modal. Sedangkan pengakuan beban pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian. Untuk beban dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan terbitnya dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) LS atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi. Disisi lain, Beban dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban telah disahkan oleh Pengguna Anggaran/pada saat Pertanggungjawaban (SPJ) atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.

Pada saat penyusunan laporan keuangan harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan beban, yaitu:

- (a) Beban Pegawai, diakui timbulnya kewajiban beban pegawai berdasarkan dokumen yang sah, misal daftar gaji, tetapi pada 31 Desember belum dibayar.
- (b) Beban Barang dan Jasa, diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak dari pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani tetapi pada 31 Desember belum dibayar. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban.
- (c) Beban Penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
- (d) Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
- (e) Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.
- (f) Beban transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dibagikan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas.

(3) Pengakuan atas Pos-pos Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan

andal, aset juga diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

Kas

Kas dan setara kas pada pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab selain Bendahara Umum Daerah, misalnya bendahara pengeluaran. Kas dan setara kas yang dikuasai dan dibawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah terdiri dari:

- saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran.
- setara kas, antara lain berupa surat utang negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah.

Piutang

Piutang diakui pada saat penyusunan laporan keuangan yaitu ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat:

- Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi;
- Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan dan belum dilunasi.

Peristiwa-peristiwa yang dapat menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan
- Jumlah piutang dapat diukur.

Dalam proses konsolidasi, piutang SKPD yang merupakan hutang SKPD lainnya, dilakukan eliminasi atas piutang dan hutang tersebut.

Beberapa jenis piutang yang di catat dalam laporan keuangan pemerintah Kabupaten Mojokerto meliputi:

- (a) Piutang Pajak Daerah diakui pada akhir periode pelaporan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan dan dapat dipertanggungjawabkan yang belum dilunasi atau kurang dibayar. Dalam hal pajak daerah bersifat *self assessment*, Piutang Pajak Daerah diakui berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dari wajib pajak yang belum dilunasi.
- (b) Piutang Retribusi Daerah diakui pada akhir periode pelaporan berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan dan dapat dipertanggungjawabkan yang belum dilunasi atau kurang dibayar dari yang telah ditetapkan.
- (c) Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam diakui berdasarkan alokasi definitif yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku sebesar hak daerah yang belum dibayarkan.

- (d) Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui berdasarkan jumlah yang ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku yang belum ditransfer dan merupakan hak daerah.
- (e) Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui berdasarkan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya sebesar jumlah yang belum ditransfer.
- (f) Piutang Dana Otonomi Khusus (Otsus) diakui berdasarkan jumlah yang ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku yang belum ditransfer dan merupakan hak daerah.
- (g) Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) terdiri dari bagi hasil pajak dan sumber daya alam, yang diberikan baik oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah maupun dari pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten. Piutang DBH dihitung berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak daerah yang belum ditransfer. Nilai definitif jumlah yang menjadi hak daerah pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya suatu tahun anggaran. Apabila alokasi definitif menurut Surat Keputusan telah ditetapkan, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah tersebut dicatat sebagai piutang DBH oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- (h) Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar. Apabila jumlah/nilai definitif menurut Surat Keputusan Kepala Daerah yang menjadi hak daerah penerima belum dibayar sampai dengan akhir periode laporan, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dapat diakui sebagai hak tagih bagi Pemerintah Daerah penerima yang bersangkutan.
- (i) Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya.
- (j) Piutang Tuntutan Ganti Rugi terjadi ketika terjadi peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (diluar pengadilan). SK Pembebanan/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.

Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan diakui pada saat:

- (a) potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
 - (b) diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.
- Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik.

Investasi

Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas. Investasi diklasifikasikan menjadi dua yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar sedangkan investasi jangka panjang merupakan kelompok aset non lancar.

Pengeluaran kas dan atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- (a) Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah;
- (b) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

Dalam menentukan apakah suatu pengeluaran kas dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi memenuhi kriteria pengakuan investasi yang pertama, entitas perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali. Eksistensi dari kepastian yang cukup bahwa manfaat ekonomi yang akan datang atau jasa potensial yang akan diperoleh memerlukan suatu jaminan bahwa suatu entitas akan memperoleh manfaat dari aset tersebut dan akan menanggung risiko yang mungkin timbul.

Pada tahun 2023 telah diterbitkan draft Peraturan Bupati tentang properti investasi yang menyebutkan bahwa properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

- 1) digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
- 2) dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Pada umumnya Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal.

Untuk dapat diakui sebagai Aset Tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

- (a) Berwujud;
- (b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- (c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- (d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- (e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
- (f) Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi Aset Tetap yang telah ditetapkan.

Pengakuan Aset Tetap akan andal bila Aset Tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan Aset Tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka Aset Tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas Aset Tetap tersebut telah berpindah.

Dana Cadangan

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama dana cadangan pemerintah daerah yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah (BUD). Dana Cadangan diakui pada saat terbit SP2D-LS Pembentukan Dana Cadangan. Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan dan Pencairan Dana Cadangan diakui pada saat terbit dokumen pindah-bukuan atau yang sejenisnya atas Dana Cadangan, yang dikeluarkan oleh BUD atau Kuasa BUD atas persetujuan PPKD. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan.

Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, Aset Tetap dan dana cadangan. Termasuk di dalam Aset Lainnya adalah:

- (a) Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;
- (b) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
- (c) Kemitraan dengan Pihak Ketiga;
- (d) Aset Tidak Berwujud;
- (e) Aset Lain-lain.

Secara umum aset lainnya dapat diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal atau pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah. Aset lainnya yang diperoleh melalui pengeluaran kas maupun tanpa pengeluaran kas dapat diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen perolehan yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Aset lainnya yang berkurang melalui penerimaan kas maupun tanpa penerimaan kas, diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban juga diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah daerah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul.

Pengakuan terhadap pos-pos kewajiban jangka panjang adalah saat ditandatanganinya kesepakatan perjanjian utang antara pemerintah daerah dengan Sektor Perbankan/Sektor Lembaga Keuangan Non Bank/Pemerintah Pusat atau saat diterimanya uang kas dari hasil penjualan obligasi pemerintah daerah.

Sedangkan pengakuan atas kewajiban jangka pendek, adalah sebagai berikut:

- (a) Utang perhitungan pihak ketiga, diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atas pengeluaran dari Kas Daerah untuk pembayaran seperti gaji dan tunjangan serta pengadaan barang dan jasa.
- (b) Utang bunga sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi dan belum dibayar. Pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, sehingga untuk kepraktisan utang bunga diakui pada akhir periode pelaporan.
- (c) Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang, diakui pada saat reklasifikasi kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar hutang jangka panjang yang akan didanai kembali. Termasuk dalam Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang adalah utang jangka panjang yang persyaratan tertentu telah dilanggar sehingga kewajiban itu menjadi kewajiban jangka pendek. Pendapatan Diterima Dimuka, diakui pada saat kas telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah daerah.
- (d) Utang Beban, diakui pada saat:
 - Beban secara peraturan perundang-undangan telah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
 - Terdapat tagihan dari pihak ketiga yang biasanya berupa surat penagihan atau invoice kepada pemerintah daerah terkait penyerahan barang dan jasa tetapi belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah daerah.
 - Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar.
- (e) Utang jangka pendek lainnya diakui pada saat terdapat/timbulnya klaim kepada pemerintah daerah namun belum ada pembayaran sampai dengan tanggal pelaporan.
- (f) Utang kepada pihak ketiga diakui pada saat penyusunan laporan keuangan

apabila barang yang dibeli sudah diterima, atau jasa/ bagian jasa sudah diserahkan sesuai perjanjian, atau sebagian/seluruh fasilitas peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

- (g) Utang Transfer DBH yang terjadi karena kesalahan tujuan dan/atau jumlah transfer merupakan kewajiban jangka pendek yang harus diakui pada saat penyusunan laporan keuangan sedangkan Utang Transfer DBH yang terjadi akibat realisasi penerimaan melebihi proyeksi penerimaan diakui pada saat jumlah definitif diketahui berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi.

Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan yang diklasifikasikan kedalam Ekuitas dan Ekuitas SAL.

b) Pengukuran

(1) Pengukuran atas Laporan Realisasi Anggaran

Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Sedangkan pengukuran belanja didasarkan pada realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran. Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

(2) Pengukuran atas Laporan Operasional

Pengukuran Pendapatan - LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Beban diukur sesuai dengan harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah, serta menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

(3) Pengukuran atas Pos-Pos Neraca

Kas

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Piutang

Pengukuran piutang pendapatan dilakukan berdasarkan asal piutang, yaitu:

- (a) Piutang yang berasal dari peraturan perundang undangan, adalah sebagai berikut:
 - Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah

(SKPD)/Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang telah diterbitkan atau SPTPD yang telah diterima; atau

- Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
 - Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
 - Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.
- (b) Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:
- Pemberian pinjaman, piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, commitment fee dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, commitment fee dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.
 - Penjualan, piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.
 - Kemitraan, piutang yang timbul dari kegiatan kemitraan diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.
 - Pemberian fasilitas/jasa, piutang yang timbul dari aktivitas pemberian fasilitas/jasa diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.
- (c) Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:
- Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku setelah diklarifikasi kepada Pemerintah Pusat;
 - Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke kabupaten;
 - Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.
- (d) Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:
- Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;

- Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.
- (e) Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

Persediaan

Persediaan diukur dengan menggunakan metode:

- (a) Metode Perpetual digunakan untuk mencatat jenis persediaan yang sifatnya *continues/turnover*/perputarannya tinggi, nilainya material dan membutuhkan kontrol yang kuat, berkaitan dengan operasional utama di SKPD, contohnya persediaan obat-obatan di RSUD, Dinas Kesehatan, dan Puskesmas. Pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan nilai per unit dengan menggunakan metode penilaian *First In First Out* (FIFO).
- (b) Metode Periodik digunakan untuk mencatat jenis persediaan yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan SKPD, pemakaiannya sulit diidentifikasi, contohnya adalah persediaan Alat Tulis Kantor (ATK) dan alat kebersihan. Pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan, ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan dengan nilai per unit dengan menggunakan metode penilaian FIFO. Pada akhir periode penyusunan laporan keuangan dibuat jurnal penyesuaian untuk meng-update nilai persediaan.

Penilaian persediaan menggunakan metode FIFO. Harga perolehan dari barang-barang yang pertama kali dibeli/diperoleh akan menjadi harga barang yang digunakan/dijual pertama kali. Sehingga nilai persediaan akhir dihitung dimulai dari harga perolehan terakhir.

Sedangkan persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar.

Investasi

Investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut. Secara umum untuk investasi yang memiliki pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasarnya, maka nilai pasar dapat dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Dan untuk investasi yang tidak memiliki pasar aktif, maka dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.

Dalam hal tertentu, suatu investasi mungkin diperoleh bukan berdasarkan biaya perolehannya, atau berdasarkan nilai wajar pada tanggal perolehan. Dalam kasus yang demikian, penggunaan nilai estimasi yang layak dapat digunakan.

Dan untuk harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayarkan dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

Aset Tetap

Aset Tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian Aset Tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Penggunaan nilai wajar pada saat perolehan bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.

Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian Aset Tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk memperoleh bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

Biaya perolehan Aset Tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan Aset Tetap tersebut. Biaya yang dapat dikapitalisasi secara langsung sebagai biaya perolehan Aset Tetap adalah:

- (a) Biaya Konstruksi Fisik, yaitu besarnya biaya yang dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan konstruksi fisik pembangunan, yang dilaksanakan oleh penyedia jasa pelaksanaan secara kontraktual.
- (b) Biaya Perencanaan Teknis Konstruksi, yaitu besarnya biaya maksimum yang dapat digunakan untuk membiayai perencanaan pembangunan, yang dilakukan oleh penyedia jasa perencanaan.
- (c) Biaya Pengawasan Konstruksi, yaitu besarnya biaya maksimum yang dapat digunakan untuk membiayai pengawasan pembangunan, yang dilakukan oleh penyedia jasa pengawasan.
- (d) Biaya Pengelolaan Kegiatan, yaitu besarnya biaya maksimum yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pengelolaan pembangunan. Biaya Pengelolaan Kegiatan terdiri dari:
 - Biaya operasional unsur Pengguna Anggaran yaitu biaya honorarium staf dan panitia lelang, perjalanan dinas, rapat-rapat, proses pelelangan, bahan dan alat yang berkaitan dengan pengelolaan kegiatan, serta persiapan dan pengiriman kelengkapan administrasi/dokumen pendaftaran aset, dan biaya lainnya.
 - Biaya operasional unsur Pengelola Teknis yaitu biaya honorarium pengelola teknis, honorarium tenaga ahli/narasumber (apabila diperlukan), perjalanan dinas, transport lokal, biaya rapat, biaya pembelian/penyewaan bahan dan alat yang berkaitan dengan kegiatan yang bersangkutan dan biaya lainnya.

Dana Cadangan

Dana Cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari Kas yang diklasifikasikan ke Dana Cadangan. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan diukur sebesar nilai nominal yang diterima.

Aset Lainnya

Aset Lainnya terdiri dari:

- (a) Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah atau berdasarkan daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- (b) Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas umum daerah. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah.
- (c) Bangun, Kelola, Serah (BKS) dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BKS tersebut. Aset yang berada dalam BKS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap. Aset Bangun Kelola Serah yang harus disusutkan tetap disusutkan sesuai dengan metode penyusutan yang digunakan. Penyerahan/pengembalian aset BKS oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah pada akhir masa perjanjian diperlakukan sebagai berikut:
 - Untuk aset yang berasal dari pemerintah daerah dinilai sebesar nilai tercatat yang diserahkan pada saat aset tersebut dikerjasamakan dan disajikan kembali sebagai Aset Tetap.
 - Untuk aset yang dibangun oleh pihak ketiga dinilai sebesar harga wajar pada saat perolehan/penyerahan.
- (d) Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan Aset Tak Berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam entitas tersebut. Aset Tidak Berwujud disajikan di neraca berdasarkan nilai bruto setelah dikurangi amortisasi. Perhitungan amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus dengan masa manfaat selama 4 tahun.

Kewajiban

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Pada akhir periode pelaporan, pengukuran pada masing-masing kewajiban adalah sebagai berikut:

- (a) Utang PFK merupakan saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain yang harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.
- (b) Utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.
- (c) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

(d) Pendapatan diterima dimuka merupakan nilai atas barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain sampai dengan tanggal neraca, namun kasnya telah diterima.

(e) Utang Beban merupakan beban yang belum dibayar oleh pemerintah daerah sesuai dengan perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal neraca.

(f) Utang transfer diakui sebesar nilai kekurangan

Pada saat pemerintah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus mencatat kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut. Pengukuran untuk masing-masing item kewajiban disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut.

Ekuitas

Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih revaluasi Aset Tetap, dan lain-lain. Ekuitas SAL digunakan untuk mencatat akun perantara dalam rangka penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL mencakup antara lain Estimasi Pendapatan, Estimasi Penerimaan Pembiayaan, Apropriasi Belanja, Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan, dan Estimasi Perubahan SAL, Surplus/Defisit - LRA. Kenaikan atau penurunan setiap akun dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL akan menaikkan atau menurunkan Ekuitas SAL.

c) Penyajian

(1) Penyajian atas Laporan Realisasi Anggaran

Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas sesuai klasifikasi dalam BAS.

Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(2) Penyajian atas Laporan Operasional

Pendapatan - LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.

Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:

(a) Beban Operasi, yang terdiri dari: Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain.

(b) Beban Transfer.

(c) Beban Non Operasional.

(d) Beban Luar Biasa.

(3) Penyajian atas Pos-pos Neraca

Kas

Saldo kas dan setara kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas. Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan

keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris pada Laporan Arus Kas.

Piutang

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

Persediaan

Persediaan disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan mengenai persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dan jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

Investasi

Investasi disajikan di Neraca dalam kelompok Aset Lancar apabila investasi jangka pendek dan dalam kelompok Investasi Jangka Panjang apabila Investasi tersebut lebih dari dua belas bulan.

Aset Tetap

Aset Tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan Aset Tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka Aset Tetap disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun Aset Tetap.

Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh Aset Tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat Aset Tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Masa manfaat Aset Tetap yang dapat disusutkan akan ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian.

Metode penyusutan yang dipergunakan adalah Metode garis lurus (*straight line method*) dengan masa manfaat dan tarif penyusutan sebagaimana di telah diatur dalam Kebijakan Akuntansi.

Dana Cadangan

Dana Cadangan disajikan dalam Neraca pada kelompok Aset Nonlancar dan disajikan dengan nilai Rupiah. Dalam hal Dana Cadangan dibentuk untuk lebih dari satu peruntukan maka Dana Cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.

Aset Lainnya

Aset lain-lain disajikan dalam neraca sebesar nilai bukunya dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Kewajiban

Kewajiban di sajikan di neraca dengan klasifikasi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

4) Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam SAP pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mojokerto menerapkan akuntansi berbasis akrual sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Berkenaan dengan penerapan kebijakan akuntansi pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Kebijakan akuntansi telah diterapkan sesuai dengan SAP, yaitu:

- a) Basis Kas untuk pos-pos Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas.
- b) Basis Akrual untuk pos-pos Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas;
- c) Pengakuan-pengakuan untuk pos-pos pendapatan, belanja, aset dan kewajiban, dan prinsip konsistensi serta *Full Disclosure*;
- d) Pengukuran untuk aset yang dicatat berdasarkan nilai nominal dan sebesar biaya perolehan;
- e) Pengukuran kewajiban yang dicatat berdasarkan nilai nominal.

7.e. PENJELASAN POS – POS LAPORAN KEUANGAN

7.e.1). Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembelanjaan dari suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Dalam Laporan Realisasi Anggaran ini terdiri dari anggaran dan realisasi pendapatan, belanja, penerimaan pembelanjaan dan pengeluaran pembelanjaan.

7.e.1).a) Pendapatan

Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
2.607.873.973.959,00	2.608.549.958.903,54	2.537.235.424.067,77

Pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pada Tahun 2023 Anggaran Pendapatan Kabupaten Mojokerto adalah sebesar Rp2.607.873.973.959,00, terealisasi sebesar Rp2.608.549.958.903,54 atau sebesar 100,03%. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2022 sebesar Rp2.537.235.424.067,77, realisasi pendapatan pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp71.314.534.835,77 atau sebesar 2,81%.

Sementara rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2023 dibandingkan Tahun Anggaran 2022 dijelaskan pada tabel e.1

Tabel e. 1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan TA 2023 dan TA 2022

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Naik/Turun	Realisasi 2022
1.	Pendapatan Asli Daerah	673.662.919.222,00	656.126.287.019,54	97,40	-20.581.864.131,23	676.708.151.150,77
2.	Pendapatan Transfer	1.934.211.054.737,00	1.952.423.671.884,00	100,94	172.681.348.589,00	1.779.742.323.295,00
3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	0,00	0,00	-80.784.949.622,00	80.784.949.622,00
Jumlah		2.607.873.973.959,00	2.608.549.958.903,54	100,03	71.314.534.835,77	2.537.235.424.067,77

7.e.1).a).(1) Pendapatan Asli Daerah

Realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp656.126.287.019,54 atau sebesar 97,40% dari anggaran sebesar Rp673.662.919.222,00 atau dibawah target anggaran sebesar Rp17.536.632.202,46. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mojokerto TA 2023 dan TA 2022 terdiri dari:

Tabel e. 2 Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) TA 2023 dan TA 2022

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Naik/Turun	Realisasi 2022
Pendapatan Pajak Daerah	391.174.190.020,00	369.537.744.691,00	94,47	-322.577.659,00	369.860.322.350,00
Pendapatan Retribusi Daerah	37.804.816.399,00	31.114.926.163,76	82,30	6.656.920.998,99	24.458.005.164,77
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.417.837.280,00	10.417.837.280,95	100,00	1.374.423.694,32	9.043.413.586,63
Lain-lain PAD Yang Sah-LRA	234.266.075.523,00	245.055.778.883,83	104,61	-28.290.631.165,54	273.346.410.049,37
Jumlah	673.662.919.222,00	656.126.287.019,54	97,40	-20.581.864.131,23	676.708.151.150,77

Realisasi tersebut lebih rendah sebesar Rp20.581.864.131,23 atau 3,04% apabila dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2022.

7.e.1).a).(1).a) Pendapatan Pajak Daerah

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp369.537.744.691,00 atau 94,47% dari anggaran sebesar Rp391.174.190.020,00 atau lebih rendah dari target sebesar Rp21.636.445.329,00. Realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LRA Kabupaten Mojokerto TA 2023 dan TA 2022 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel e. 3 Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2023 dan TA 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Naik/Turun	Realisasi 2022
1.	Pajak Hotel	5.500.000.000,00	5.577.841.244,00	101,42	1.884.133.649,00	3.693.707.595,00
2.	Pajak Restoran	11.500.000.000,00	11.711.864.861,00	101,84	1.566.523.124,00	10.145.341.737,00
3.	Pajak Hiburan	2.000.000.000,00	1.697.996.837,00	84,90	260.429.601,00	1.437.567.236,00
4.	Pajak Reklame	4.000.000.000,00	4.044.800.951,00	101,12	299.808.335,00	3.744.992.616,00
5.	Pajak Penerangan Jalan	118.800.000.000,00	121.987.479.093,00	102,68	4.180.537.348,00	117.806.941.745,00
6.	Pajak Parkir	325.000.000,00	327.873.113,00	100,88	-22.367.992,00	350.241.105,00
7.	Pajak Air Tanah	35.599.190.020,00	35.730.522.869,00	100,37	1.877.087.682,00	33.853.435.187,00
8.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	35.450.000.000,00	20.007.454.500,00	56,44	-3.015.619.900,00	23.023.074.400,00
9.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	105.000.000.000,00	106.225.406.356,00	101,17	3.075.878.919,00	103.149.527.437,00
10.	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	73.000.000.000,00	62.226.504.867,00	85,24	-10.428.988.425,00	72.655.493.292,00
	Jumlah	391.174.190.020,00	369.537.744.691,00	94,47	-322.577.659,00	369.860.322.350,00

Dari jumlah Pendapatan Pajak Daerah di atas, sebesar Rp121.987.479.093,00 atau 33,01% diperoleh dari obyek Pajak Penerangan Jalan sebagai pemberi kontribusi Pendapatan Pajak Daerah terbesar, diikuti dengan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar Rp106.225.406.356,00 atau 28,75% dan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp62.226.504.867,00 atau 16,84%. Dari sepuluh jenis Pajak Daerah tersebut, Pajak Hotel mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 51,01% disusul Pajak Hiburan sebesar 18,12% kemudian Pajak Restoran sebesar 15,44%. Kenaikan yang cukup signifikan tersebut dikarenakan adanya penambahan objek dan wajib pajak baru serta peningkatan dan intensifikasi hasil pemeriksaan pajak daerah.

Secara keseluruhan, realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp369.537.744.691,00 lebih rendah apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 yang berjumlah Rp369.860.322.350,00 atau menurun sebesar Rp322.577.659,00 atau 0,09%.

7.e.1).a).(1).(b) Pendapatan Retribusi Daerah

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp31.114.926.163,76 atau 82,30% dari anggaran sebesar Rp37.804.816.399,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, maka Realisasi Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp6.656.920.998,99 atau 27,22% dari realisasi Tahun Anggaran 2022. Realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel e. 4 Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2023 dan TA 2022

(dalam rupiah)

Uraian	OPD	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Naik/Turun	Realisasi 2022
Ret.Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	61.227.000,00	61.232.000,00	100,01	-51.393.000,00	112.625.000,00
Ret. Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Dinas Lingkungan Hidup	1.400.000.000,00	1.766.500.000,00	126,18	204.150.000,00	1.562.350.000,00
	Disperindag	295.974.000,00	11.040.000,00	3,73	-171.795.500,00	182.835.500,00
Ret.Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	DPRKP2	4.667.740.000,00	4.023.624.500,00	86,20	-7.798.000,00	4.031.422.500,00
Ret.Pelayanan Pasar	Dinas Pertanian	12.900.000,00	14.813.000,00	114,83	4.513.000,00	10.300.000,00
	Disperindag	2.700.736.840,00	2.437.087.830,40	90,24	109.056.782,61	2.328.031.047,79
Ret.Pengujian Kendaraan Bermotor	DPRKP2	2.372.263.700,00	1.712.388.606,79	72,18	-211.798.993,21	1.924.187.600,00
Ret. Pelayanan Tera/Tera Ulang	Disperindag	742.427.000,00	850.452.300,00	114,55	102.305.000,00	748.147.300,00
Ret.Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekom	Diskominfo	942.085.000,00	942.085.000,00	100,00	189.701.000,00	752.384.000,00
Ret.Pemakaian Kekayaan Daerah	DPUPR	1.364.227.500,00	1.644.299.825,75	120,53	179.553.484,75	1.464.746.341,00
	DLH	1.461.480.000,00	1.671.711.067,00	114,38	210.232.202,00	1.461.478.865,00
	Disparpora	36.000.000,00	71.080.000,00	197,44	37.400.000,00	33.680.000,00
	Dinas Pertanian	675.025.000,00	1.238.623.600,82	183,49	407.416.300,82	831.207.300,00
Ret.Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	Disperindag	60.000.000,00	74.600.000,00	124,33	2.100.000,00	72.500.000,00
Ret.Terminal	DPRKP2	13.484.500,00	6.065.000,00	44,98	-4.755.000,00	10.820.000,00
Ret.Tempat Khusus Parkir	DPRKP2	445.965.000,00	402.615.100,00	90,28	6.048.000,00	396.567.100,00
Ret.Rumah Potong Hewan	Dinas Pertanian	112.075.000,00	81.302.500,00	72,54	-29.037.500,00	110.340.000,00
Ret.Tempat Rekreasi dan Olah Raga	Dinas Pendidikan	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	-60.000,00	9.060.000,00
	Disparpora	13.130.034.000,00	8.628.087.147,00	65,71	2.447.598.044,02	6.180.489.102,98
Ret.Penjualan Produksi Usaha Daerah	Dinas Pangan dan Perikanan	100.000.000,00	100.500.600,00	100,50	-43.520,00	100.544.120,00
Ret.Izin Mendirikan Bangunan	DPMTSP	0,00	830.470.731,00	-	209.876.967,00	620.593.764,00
Ret. Persetujuan Bangunan Gedung	DPUPR	4.569.744.459,00	1.190.511.789,00	26,05	1.190.511.789,00	0,00
Ret.Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	DPRKP2	600.000,00	600.000,00	100,00	0,00	600.000,00
Ret.Pengendalian Lalu Lintas	DPUPR	130.785.000,00	51.418.650,00	39,32	51.418.650,00	0,00
	DPMTSP	0,00	13.758.816,00	-	-155.388.408,00	169.147.224,00
Ret.Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	Dinas Tenaga Kerja	2.501.042.400,00	3.281.058.100,00	131,19	1.937.109.700,00	1.343.948.400,00
Jumlah		37.804.816.399,00	31.114.926.163,76	82,30	6.656.920.998,99	24.458.005.164,77

Dari jumlah Pendapatan Retribusi Daerah tersebut, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga memberikan kontribusi yang paling besar yaitu sebesar Rp8.628.087.147,00 atau 27,73% dari total Pendapatan Retribusi, diikuti dengan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebesar Rp4.023.624.500,00 atau 12,93% dari total Pendapatan Retribusi, selanjutnya Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) sebesar Rp3.281.058.100,00 atau 10,54%. Secara umum realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023 meningkat apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022.

Adapun Pendapatan Retribusi Daerah yang tidak memenuhi target, antara lain:

- (1) Retribusi Pelayanan Persampahan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan terealisasi 3,73% atau Rp11.040.000,00 dari anggaran sebesar Rp295.974.000,00, hal ini disebabkan karena penyetoran retribusi daerah menggunakan QRis sehingga setoran menjadi satu dengan Retribusi Pelayanan Pasar dan tidak bisa membedakan setoran Retribusi Pelayanan Persampahan dan Retribusi Pelayanan Pasar.
- (2) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Perhubungan terealisasi 86,20% atau sebesar Rp4.023.624.500,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp4.667.740.000,00, hal ini disebabkan karena pendapatan tersebut dihitung dari Pendapatan Retribusi Parkir Berlangganan yang dibayarkan bersamaan dengan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor ke samsat, sehingga hasil yang didapatkan didasarkan pada jumlah kendaraan yang wajib bayar Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2023.
- (3) Retribusi Pelayanan Pasar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan terealisasi 90,24% atau sebesar Rp2.437.087.830,40 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp2.700.736.840,00 hal ini karena adanya pasar online yang menyebabkan konsumen yang datang ke pasar semakin menurun sehingga banyak kios/los di pasar yang buka tutup karena kurangnya pembeli terutama untuk jenis dagangan yang menyediakan kebutuhan tambahan seperti kios konveksi, sepatu sandal, gerabah, elektronik dan lain-lain.
- (4) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Perhubungan terealisasi 72,18% atau sebesar Rp1.712.388.606,79 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp2.372.263.700,00 hal ini disebabkan karena pemberlakuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 134/2015 tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan serta Penegakan Hukum Terhadap Over Dimensi Overload (ODOL) mengenai regulasi kendaraan berat yang memiliki dimensi dan muatan berlebih yang melampaui ukuran dan kapasitas kendaraan. Sehingga banyak kendaraan angkutan barang yang tidak lulus uji sehingga berimpas pada hasil pendapatan pencapaian target Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
- (5) Retribusi Terminal pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Perhubungan terealisasi 44,98% atau sebesar Rp6.065.000,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp13.484.500,00, hal ini disebabkan karena jumlah kendaraan angkutan umum Mobil Penumpang Umum (MPU) semakin berkurang dan makin banyaknya ojek online, motor dan mobil pribadi yang menyebabkan semakin banyak armada bus dan angkot yang tidak beroperasi.

- (6) Retribusi Tempat Khusus Parkir pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Perhubungan terealisasi 90,28% atau sebesar Rp402.615.100,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp445.965.000,00, hal ini disebabkan karena banyaknya bermunculan obyek wisata baru yang dikelola swasta sehingga obyek-obyek wisata yang dikelola oleh Pemerintah Daerah menjadi berkurang yang berdampak pada tidak tercapainya Retribusi Tempat Khusus Parkir pada obyek wisata.
- (7) Retribusi Rumah Potong Hewan pada Dinas Pertanian terealisasi 72,54% atau sebesar Rp81.302.500,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp112.075.000,00, hal ini disebabkan karena terdapat Rumah Potong Hewan yang dikerjasamakan belum terealisasi.
- (8) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga terealisasi 65,71% atau sebesar Rp8.628.087.147,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp13.130.034.000,00 hal ini disebabkan karena:
 - Meningkatnya harga kebutuhan pokok, sehingga berpengaruh terhadap minat wisatawan untuk mengunjungi tempat-tempat wisata.
 - Banyaknya wisata baru yang bermunculan seperti desa wisata dan wisata yang dikelola swasta sehingga mengurangi kunjungan ke wisata yang dikelola pemerintah.
 - Obyek wisata yang dikelola oleh Pemerintah Daerah belum ada inovasi yang signifikan yang mampu menarik kunjungan wisatawan.
- (9) Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung pada Dinas Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Ruang terealisasi 26,05% atau sebesar Rp1.190.511.789,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp4.569.744.459,00 hal ini disebabkan karena proses saat ini menggunakan SIMBG yang didalamnya harus sinkron dengan RTRW, sedangkan permohonan Persetujuan Bangunan Gedung banyak yang terkendala RTRW tidak bisa diproses lebih lanjut hal ini menyebabkan minimnya realisasi Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.
- (10) Retribusi Pengendalian Lalu Lintas pada Dinas Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Ruang terealisasi 39,32% atau sebesar Rp51.418.650,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp130.785.000,00,00 hal ini disebabkan karena Retribusi tersebut semula dianggarkan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, pada saat PAPBD dialihkan ke Dinas Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Ruang sehingga realisasi Retribusi pada bulan Januari sampai dengan September masih tercatat sebagai pendapatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

7.e.1).a).(1).(c) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp10.417.837.280,95 atau sebesar 100% dari anggaran sebesar Rp10.417.837.280,00. Adapun rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel e. 5 Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2023 dan TA 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Naik/Turun	Realisasi 2022
1.	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	10.417.837.280,00	10.417.837.280,95	100,00	1.374.423.694,32	9.043.413.586,63
	Bagian Laba PT BPR Majatama	3.303.059.728,00	3.303.059.728,00	100,00	1.453.754.725,00	1.849.305.003,00
	Bagian Laba Bank Jatim	4.160.865.095,00	4.160.865.095,09	100,00	76.806.324,98	4.084.058.770,11
	Perumdam Majapahit	2.953.912.457,00	2.953.912.457,86	100,00	-156.137.355,66	3.110.049.813,52
2.	Bagian Laba Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bagian Laba Asphalt Mixing Plant dan Pemecah Batu (Stone Crusher)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	10.417.837.280,00	10.417.837.280,95	100,00	1.374.423.694,32	9.043.413.586,63

Dari jumlah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan diketahui bahwa Deviden dari Bank Jatim memberikan kontribusi yang paling besar yaitu sebesar Rp4.160.865.095,09 atau 39,94% dari total Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, diikuti oleh Bgaian Laba dari PT BPR Majatama sebesar Rp3.303.059.728,00 atau 31,71% dan terakhir dari Perumdam Majapahit sebesar Rp2.953.912.457,86 atau 28,35%. Sedangkan Bagian Laba dari Asphalt Mixing Plant and Stone Cruisher PT RBU pada Tahun Anggaran 2023 adalah nihil. Secara total Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2023 lebih tinggi sebesar Rp1.374.423.694,32 atau 15,20% apabila dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2022.

7.e.1).a).(1).(d) Lain-lain PAD yang Sah

Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Tahun Anggaran 2023 mencapai Rp245.055.778.883,83 atau sebesar 104,61% dari anggaran sebesar Rp234.266.075.523,00 atau lebih besar dari target sebesar Rp10.789.703.360,83. Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel e. 6 Realisasi Lain-lain PAD yang Sah TA 2023 dan TA 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Naik/Turun	Realisasi 2022
1	Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan	0,00	181.668.200,00	-	174.143.200,00	7.525.000,00
2	Hasil Pemanfaatan BMD Yang Tidak Dipisahkan	303.000.000,00	422.838.959,00	139,55	71.492.209,00	351.346.750,00
3	Jasa Giro	4.000.000.000,00	3.910.297.908,48	97,76	-1.900.606.650,29	5.810.904.558,77
4	Pendapatan Bunga	0,00	274.128.440,00	0,00	274.128.440,00	0,00
5	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	0,00	930.401.099,08	-	-988.005.935,01	1.918.407.034,09
6	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	262.061.249,47	-	-326.874.351,66	588.935.601,13
7	Pendapatan Denda Pajak Daerah	541.677.200,00	1.449.657.082,00	267,62	247.000.721,00	1.202.656.361,00

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Naik/Turun	Realisasi 2022
8	Pendapatan dari Pengembalian	1.007.720.323,00	1.069.513.354,00	106,13	518.027.101,57	551.486.252,43
9	Pendapatan BLUD	228.413.678.000,00	236.555.212.591,80	103,56	-26.358.485.900,15	262.913.698.491,95
10	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Perda	0,00	0,00	0,00	-1.450.000,00	1.450.000,00
	Jumlah	234.266.075.523,00	245.055.778.883,83	104,61	-28.290.631.165,54	273.346.410.049,37

Dari tabel di atas diketahui Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan, Pendapatan Bunga, Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah, dan Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan tidak ada anggarannya hal ini karena atas jenis pendapatan tersebut tidak dapat diprediksi sehingga tidak dapat ditentukan targetnya.

Dari jumlah Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah tersebut, Pendapatan BLUD memberikan kontribusi yang paling besar yaitu sebesar Rp236.555.212.591,80 atau 96,53% dari total Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah yang terdiri dari Pendapatan BLUD RSUD Prof. Dr. Soekandar sebesar Rp128.857.956.697,36, pendapatan RSUD R.A. Basoeni sebesar Rp59.743.507.151,00 dan Pendapatan BLUD pada 27 (Dua Puluh Tujuh) Puskesmas sebesar Rp47.953.748.743,44. Atas pendapatan BLUD tersebut telah dilakukan audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan nilai yang sama dengan yang dilaporkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

Selanjutnya Pendapatan Jasa Giro sebesar Rp3.910.297.908,48 atau 0,02%, dan di urutan ketiga adalah Pendapatan Denda Pajak Daerah sebesar Rp1.449.657.082,00 atau 0,01%. Secara umum realisasi Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar Rp28.290.631.165,54 atau sebesar 10,35% dibandingkan realisasi Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah Tahun Anggaran 2022.

Adapun rincian Pendapatan BLUD pada 27 (Dua Puluh Tujuh) Puskesmas dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel e. 7 Realisasi Pendapatan BLUD dan Dana Kapitasi JKN TA 2023 dan TA 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Naik/Turun	Realisasi 2022
1	Puskesmas Sooko	2.905.654.600,00	2.786.396.442,19	95,90	216.328.019,19	2.570.068.423,00
2	Puskesmas Trowulan	1.881.463.800,00	1.715.516.931,72	91,18	234.004.117,15	1.481.512.814,57
3	Puskesmas Tawang Sari	1.441.152.700,00	1.667.871.983,63	115,73	531.700.175,92	1.136.171.807,71
4	Puskesmas Puri	3.069.804.800,00	2.970.041.317,76	96,75	452.404.780,66	2.517.636.537,10
5	Puskesmas Gayaman	1.296.036.600,00	1.487.070.359,04	114,74	234.457.718,60	1.252.612.640,44
6	Puskesmas Bangsal	2.457.981.700,00	2.328.621.001,38	94,74	228.261.288,78	2.100.359.712,60
7	Puskesmas Gedeg	1.283.676.400,00	1.247.174.050,54	97,16	335.568.257,04	911.605.793,50
8	Puskesmas Lespadangan	954.750.800,00	921.589.634,07	96,53	189.090.027,08	732.499.606,99
9	Puskesmas Kemlagi	1.768.540.000,00	1.657.712.743,81	93,73	341.737.439,45	1.315.975.304,36
10	Puskesmas Kedungsari	934.845.300,00	888.686.485,58	95,06	157.133.328,20	731.553.157,38
11	Puskesmas Dawarblandong	2.979.825.900,00	3.141.466.168,58	105,42	768.517.412,74	2.372.948.755,84
12	Puskesmas Kupang	1.349.563.000,00	1.346.326.588,14	99,76	316.454.667,84	1.029.871.920,30
13	Puskesmas Jetis	1.316.150.000,00	1.163.516.141,17	88,40	305.232.471,85	858.283.669,32
14	Puskesmas Mojosari	1.830.097.700,00	1.722.034.159,55	94,10	197.062.285,49	1.524.971.874,06
15	Puskesmas Modopuro	1.393.679.100,00	1.320.236.374,98	94,73	247.837.791,09	1.072.398.583,89
16	Puskesmas Pungging	2.163.776.800,00	2.097.891.824,82	96,96	406.401.332,81	1.691.490.492,01
17	Puskesmas Watukenongo	892.974.200,00	885.543.584,31	99,17	208.242.518,38	677.301.065,93
18	Puskesmas Ngoro	1.773.953.800,00	1.743.948.324,10	98,31	309.585.406,33	1.434.362.917,77
19	Puskesmas Manduro	1.302.328.200,00	1.361.932.191,53	104,58	232.179.782,82	1.129.752.408,71
20	Puskesmas Dlanggu	2.694.292.700,00	2.686.391.432,69	99,71	242.222.467,68	2.444.168.965,01
21	Puskesmas Kutorejo	1.837.710.700,00	1.773.576.983,05	96,51	259.052.429,16	1.514.524.553,89
22	Puskesmas Pesanggrahan	1.336.556.700,00	1.378.360.160,57	103,13	269.573.469,48	1.108.786.691,09
23	Puskesmas Pacet	1.669.215.500,00	1.766.628.934,66	105,84	208.221.251,53	1.558.407.683,13

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Naik/Turun	Realisasi 2022
24	Puskesmas Pandan	1.006.120.000,00	919.584.338,41	91,40	280.231.711,01	639.352.627,40
25	Puskesmas Trawas	1.703.588.400,00	1.873.239.842,24	109,96	441.017.709,93	1.432.222.132,31
26	Puskesmas Gondang	1.970.788.200,00	2.249.899.514,31	114,16	471.969.124,36	1.777.930.389,95
27	Puskesmas Jatirejo	3.199.150.400,00	2.852.491.230,61	89,16	113.961.937,89	2.738.529.292,72
	Jumlah	48.413.678.000,00	47.953.748.743,44	99,05	8.198.448.922,46	39.755.299.820,98

7.e.1).a).(2) Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer yang dicapai pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp1.952.423.671.884,00 atau sebesar 100,94% dari anggaran sebesar Rp1.934.211.054.737,00. Pendapatan Transfer ini mengalami kenaikan sebesar Rp172.681.348.589,00 atau 9,70% bila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022. Rincian Pendapatan Transfer Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel e. 8 Realisasi Pendapatan Transfer TA 2023 dan TA 2022

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Naik/Turun	Realisasi 2022
Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	1.454.242.856.027,00	1.399.947.097.386,00	96,27	109.685.754.773,00	1.290.261.342.613,00
Transfer Pemerintah Pusat-Lainya	294.800.336.000,00	294.196.059.900,00	99,80	17.826.217.100,00	276.369.842.800,00
Transfer Pemerintah Provinsi	185.167.862.710,00	258.280.514.598,00	139,48	45.169.376.716,00	213.111.137.882,00
Jumlah	1.934.211.054.737,00	1.952.423.671.884,00	100,94	172.681.348.589,00	1.779.742.323.295,00

7.e.1).a).(2)(a) Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

Realisasi Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.399.947.097.386,00 atau sebesar 96,27% dari anggaran sebesar Rp1.454.242.856.027,00. Adapun realisasi Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel e. 9 Realisasi Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan TA 2023 dan TA 2022

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Naik/Turun	Realisasi 2022
Dana Bagi Hasil Pajak	70.701.114.106,00	65.878.176.955,00	93,18	-2.500.130,00	65.880.677.085,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	89.381.641.921,00	41.605.266.339,00	46,55	-40.812.305.328,00	82.417.571.667,00
Dana Alokasi Umum	935.349.004.000,00	947.516.964.403,00	101,30	45.958.942.276,00	901.558.022.127,00
Dana Alokasi Khusus	358.811.096.000,00	344.946.689.689,00	96,14	104.541.617.955,00	240.405.071.734,00
Jumlah	1.454.242.856.027,00	1.399.947.097.386,00	96,27	109.685.754.773,00	1.290.261.342.613,00

Dari tabel di atas diketahui Pendapatan Dana Perimbangan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum memberikan kontribusi yang paling besar mencapai Rp947.516.964.403,00 atau 67,68% dari total Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, kemudian Dana Alokasi Khusus sebesar Rp344.946.689.689,00 atau 24,64%. Secara umum realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2023 lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp109.685.754.773,00 atau naik 8,50%.

Adapun rincian realisasi Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

(1) Dana Bagi Hasil Pajak

Realisasi Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Dana Bag Hasil Pajak Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp65.878.176.955,00 atau sebesar 93,18% dari anggaran sebesar Rp70.701.114.106,00. Adapun realisasi Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil Pajak Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel e. 10 Realisasi Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Dana Bagi Hasi Pajak TA 2023 dan TA 2022

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Naik/Turun	Realisasi 2022
DBH Pajak Bumi dan Bangunan	5.601.194.495,00	5.503.495.159,00	98,26	-5.215.011.264,00	10.718.506.423,00
DBH PPh Pasal 21	30.274.799.243,00	25.773.866.216,00	85,13	-1.574.753.092,00	27.348.619.308,00
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOP DN	2.147.525.772,00	1.923.220.984,00	89,56	-1.645.014.841,00	3.568.235.825,00
DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	32.677.594.596,00	32.677.594.596,00	100,00	8.432.279.067,00	24.245.315.529,00
Jumlah	70.701.114.106,00	65.878.176.955,00	93,18	-2.500.130,00	65.880.677.085,00

Dari tabel di atas diketahui realisasi Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil Pajak yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (CHT) memberikan kontribusi yang paling besar mencapai Rp32.677.594.596,00 atau 49,60% dari total Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil Pajak, disusul Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) yang mencapai Rp25.773.866.216,00 atau %. Secara keseluruhan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil Pajak menurun sebesar Rp2.500.130,00 atau 39,12% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

(2) Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Realisasi Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp41.605.266.339,00 atau sebesar 46,55% dari anggaran sebesar Rp89.381.641.921,00. Adapun realisasi Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel e. 11 Realisasi Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Dana Bagi Hasi Sumber Daya Alam TA 2023 dan TA 2022

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Naik/Turun	Realisasi 2022
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	81.016.008.499,00	35.916.143.005,00	44,33	-36.731.289.818,00	72.647.432.823,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	5.338.502.434,00	2.726.339.246,00	51,07	-1.449.351.720,00	4.175.690.966,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	97.340.692,00	85.873.479,00	88,22	-34.082.469,00	119.955.948,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	303.306.429,00	32.893.000,00	10,84	22.299.883,00	10.593.117,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	765.292.000,00	983.391.591,00	128,50	-2.065.751.394,00	3.049.142.985,00

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Naik/Turun	Realisasi 2022
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	335.882.656,00	335.316.807,00	99,83	-121.128.021,00	456.444.828,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.525.309.211,00	1.525.309.211,00	100,00	-433.001.789,00	1.958.311.000,00
Jumlah	89.381.641.921,00	41.605.266.339,00	46,55	-40.812.305.328,00	82.417.571.667,00

Dari tabel di atas diketahui realisasi Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi memberikan kontribusi yang paling besar mencapai Rp35.916.143.005,00 atau 86,33% dari total Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam. Secara keseluruhan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam menurun sebesar Rp40.812.305.328,00 atau 49,52% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

(3) Dana Alokasi Umum

Realisasi Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Dana Alokasi Umum Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp947.516.964.403,00 atau 101,30% dari anggaran sebesar Rp935.349.004.000,00. Dana Alokasi Umum ini memberikan kontribusi yang paling besar pada Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat.

(4) Dana Alokasi Khusus

Realisasi Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Dana Alokasi Khusus Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp344.946.689.689,00 atau 96,14% dari anggaran sebesar Rp358.811.096.000,00. Dana Alokasi Khusus dirinci menjadi Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik. Adapun realisasi Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel e. 12 Realisasi Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Dana Alokasi Khusus TA 2023 dan TA 2022

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Naik/Turun	Realisasi 2022
Dana Alokasi Khusus (DAK) - Fisik					
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	366.238.000,00	364.832.000,00	99,62	-3.150.361.000,00	3.515.193.000,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	4.377.835.000,00	4.017.241.500,00	91,76	-7.428.868.652,00	11.446.110.152,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	5.699.838.000,00	5.373.586.500,00	94,28	-14.072.874.243,00	19.446.460.743,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	0,00	0,00	0,00	-367.199.000,00	367.199.000,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	0,00	0,00	0,00	-220.279.500,00	220.279.500,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	0,00	0,00	0,00	-1.508.816.800,00	1.508.816.800,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	0,00	0,00	0,00	-3.176.139.690,00	3.176.139.690,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-	0,00	0,00	0,00	-3.375.445.495,00	3.375.445.495,00

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Naik/Turun	Realisasi 2022
Reguler-Pelayanan Kefarmasian					
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	1.436.129.000,00	1.337.343.000,00	93,12	216.348.600,00	1.120.994.400,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Percepatan Penurunan Stunting	17.067.082.000,00	6.076.669.038,00	35,60	6.076.669.038,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit	1.564.593.000,00	12.220.071.829,00	781,04	12.220.071.829,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya	0,00	0,00	0,00	-863.157.000,00	863.157.000,00
DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	0,00	0,00	0,00	-3.470.395.652,00	3.470.395.652,00
DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	0,00	0,00	0,00	-4.918.486.200,00	4.918.486.200,00
DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	9.116.115.000,00	7.126.327.814,00	78,17	3.438.967.845,00	3.687.359.969,00
DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	5.869.267.000,00	5.869.267.000,00	100,00	2.267.187.000,00	3.602.080.000,00
DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	0,00	0,00	0,00	-3.394.279.328,00	3.394.279.328,00
Jumlah Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	45.497.097.000,00	42.385.338.681,00	93,16	-21.727.058.248,00	64.112.396.929,00
DAK Non Fisik-BOS Reguler	95.730.760.000,00	95.273.413.958,00	99,52	95.273.413.958,00	0,00
DAK Non Fisik-BOS Kinerja	4.270.000.000,00	4.270.000.000,00	100,00	4.270.000.000,00	0,00
DAK Non Fisik-TPG PNSD	148.215.750.000,00	145.441.221.272,00	98,13	1.678.134.949,00	143.763.086.323,00
DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	2.958.000.000,00	2.567.688.731,00	86,80	1.167.438.731,00	1.400.250.000,00
DAK Non Fisik-BOP PAUD	21.837.880.000,00	21.782.112.000,00	99,74	21.782.112.000,00	0,00
DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	1.245.870.000,00	1.245.870.000,00	100,00	1.245.870.000,00	0,00
DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	26.864.636.000,00	22.007.570.585,00	81,92	-23.968.463,00	22.031.539.048,00
DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	10.959.458.000,00	8.797.642.946,00	80,27	614.759.062,00	8.182.883.884,00
DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal	333.900.000,00	302.368.725,00	90,56	36.802.325,00	265.566.400,00
DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	487.575.000,00	483.612.400,00	99,19	206.431.200,00	277.181.200,00
DAK Non Fisik-PK2UMK	410.170.000,00	389.850.391,00	95,05	17.682.441,00	372.167.950,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	313.313.999.000,00	302.561.351.008,00	96,57	126.268.676.203,00	176.292.674.805,00
Jumlah	358.811.096.000,00	344.946.689.689,00	96,14	104.541.617.955,00	240.405.071.734,00

Dari tabel di atas diketahui Pendapatan Dana Perimbangan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik memberikan kontribusi yang lebih besar mencapai Rp302.561.351.008,00 atau 87,71% dari total Dana Alokasi Khusus. Dan dari nilai tersebut, pendapatan terbesar adalah dari Tunjangan Profesi Guru PNS (TPG PNSD) yang mencapai Rp145.441.221.272,00. Secara umum realisasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2023 lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp104.541.617.955,00 atau naik 43,49%. Kenaikan yang signifikan tersebut dikarenakan pendapatan BOS Reguler dan BOS Kinerja pada Tahun Anggaran 2023 dicatat sebagai Pendapatan DAK Non Fisik sedangkan pada Tahun Anggaran 2022 dicatat sebagai Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

7.e.1.a).(2)(b) Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya

Realisasi Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp294.196.059.900,00 atau sebesar 99,80% dari anggaran sebesar Rp294.196.059.900,00. Adapun rincian Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel e. 13 Realisasi Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya
TA 2023 dan TA 2022**

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Naik/Turun	Realisasi 2022
Dana Insentif Daerah	0,00	0,00	0,00	-23.003.791.000,00	23.003.791.000,00
Dana Desa	294.800.336.000,00	294.196.059.900,00	99,80	40.830.008.100,00	253.366.051.800,00
Jumlah	294.800.336.000,00	294.196.059.900,00	99,80	17.826.217.100,00	276.369.842.800,00

Dari tabel di atas diketahui Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya Tahun Anggaran 2023 hanya berasal dari Dana Desa dan mengalami kenaikan sebesar Rp17.826.217.100,00 atau 6,45% dibandingkan Dana Desa Tahun Anggaran 2022.

7.e.1.a).(2)(c) Transfer Pemerintah Provinsi

Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi merupakan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Pendapatan Bantuan Keuangan. Realisasi Transfer Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp258.280.514.598,00 atau sebesar 139,48% dari anggaran sebesar Rp185.167.862.710,00 yang bersumber dari Transfer Pemerintah Provinsi berupa Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan. Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel e. 14 Realisasi Transfer Pemerintah Provinsi TA 2023 dan TA 2022

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Naik/Turun	Realisasi 2022
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	178.490.787.589,00	251.603.439.477,00	140,96	44.379.960.595,00	207.223.478.882,00
Bantuan Keuangan	6.677.075.121,00	6.677.075.121,00	100,00	789.416.121,00	5.887.659.000,00
Jumlah	185.167.862.710,00	258.280.514.598,00	139,48	45.169.376.716,00	213.111.137.882,00

Dari tabel di atas diketahui Pendapatan Bagi Hasil Pajak memberikan kontribusi yang paling besar mencapai Rp251.603.439.477,00,00 atau 97,41% dari total Pendapatan Transfer Antar Daerah. Adapun penjelasan atas realisasi Transfer Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 dapat dirinci sebagai berikut:

(1) Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Pendapatan Bagi Hasil Pajak merupakan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi, yang pada Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp251.603.439.477,00,00 atau 140,96% dari anggaran sebesar Rp178.490.787.589,00. Adapun rincian Pendapatan Bagi Hasil Tahun Anggaran 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel e. 15 Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak TA 2023 dan TA 2022

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Naik/Turun	Realisasi 2022
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	47.113.719.044,00	73.037.591.300,00	155,02	12.938.680.880,00	60.098.910.420,00
Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	26.335.151.534,00	34.486.695.300,00	130,95	-137.531.000,00	34.624.226.300,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	40.087.649.202,00	74.138.581.800,00	184,94	21.807.279.880,00	52.331.301.920,00

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Naik/Turun	Realisasi 2022
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	40.087.649.202,00	74.138.581.800,00	184,94	21.807.279.880,00	52.331.301.920,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	324.358.809,00	569.958.600,00	175,72	158.165.620,00	411.792.980,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	64.629.909.000,00	69.370.612.477,00	107,34	9.613.365.215,00	59.757.247.262,00
Jumlah	178.490.787.589,00	251.603.439.477,00	140,96	44.379.960.595,00	207.223.478.882,00

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi yang memberikan kontribusi paling besar adalah Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp74.138.581.800,00 atau 29,47% dari total Pendapatan Bagi Hasil Pajak, diikuti Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp73.037.591.300,00 atau 29,03%. Secara total Pendapatan Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2023 meningkat jika dibandingkan dengan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp44.379.960.595,00 atau 21,42%.

(2) Bantuan Keuangan

Realisasi Bantuan Keuangan pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp6.677.075.121,00 atau sebesar 100% dari anggaran sebesar Rp6.677.075.121,00 yang merupakan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi dalam hal ini Provinsi Jawa Timur. Pada Tahun Anggaran 2022 Realisasi Bantuan Keuangan adalah sebesar Rp5.887.659.000,00 sehingga Pendapatan dari Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2023 meningkat sebesar Rp789.416.121,00 atau 13,41%. Adapun rincian Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat dirinci sebagai berikut:

- Bantuan Keuangan khusus Bidang Kesehatan sebesar Rp274.425.121,00.
- Bantuan Keuangan khusus Bidang Pendidikan sebesar Rp4.403.200.000,00.
- Bantuan Keuangan bagi Aparatur Pemerintahan Desa sebesar Rp1.935.450.000,00.
- Bantuan Keuangan khusus dalam rangka Pemberdayaan BUMDES, Pemberdayaan Desa Mandiri dan Pemberdayaan Usaha Perempuan (Jatim Puspa) sebesar Rp64.000.000,00.

7.e.1).a).(3) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2023 adalah nihil. Adapun rincian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel e. 16 Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2023 dan TA 2022

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Naik/Turun	Realisasi 2022
Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	-80.784.949.622,00	80.784.949.622,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	-80.784.949.622,00	80.784.949.622,00

Dari tabel e. 16 diketahui bahwa realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2023 secara total menurun jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp80.784.949.622,00 atau 100% yang merupakan Pendapatan Hibah BOS. Hal ini dikarenakan pada Tahun Anggaran 2023 Pendapatan Dana BOS dianggarkan dan catat sebagai Pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.

7.e.1.a).(3).(a) Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2023 adalah nihil karena tidak menerima hibah tunai melalui kas daerah, demikian juga pada Tahun Anggaran 2022 juga nihil.

7.e.1.a).(3).(b) Pendapatan Lainnya

Pendapatan Lainnya Tahun Anggaran 2023 adalah nihil. Adapun rincian Pendapatan Lainnya Tahun Anggaran 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel e. 17 Realisasi Pendapatan Lainnya TA 2023 dan TA 2022

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Naik/Turun	Realisasi 2022
Pendapatan Hibah Dana BOS	0,00	0,00	0,00	-80.784.949.622,00	80.784.949.622,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	-80.784.949.622,00	80.784.949.622,00

Khusus Pendapatan Hibah Dana BOS pada Tahun Anggaran 2023 dianggarkan dan dicatat sebagai Dana Alokasi Khusus Non Fisik.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa untuk sisi Pendapatan, kontribusi pendapatan terbesar adalah dari Kelompok Pendapatan Transfer yang mencapai Rp1.952.423.671.884,00 atau mencapai 74,85% dari total Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto. Sisanya sebesar Rp656.126.287.019,54 atau 25,15% merupakan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pendapatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Kondisi ini menggambarkan jika Pemerintah Kabupaten Mojokerto masih sangat tergantung pada Pemerintah Pusat untuk membiayai kegiatannya.

7.e.1.b) Belanja

<u>Anggaran TA 2023</u> (Rp)	<u>Realisasi TA 2023</u> (Rp)	<u>Realisasi TA 2022</u> (Rp)
2.963.109.428.944,00	2.715.093.795.527,07	2.620.848.933.109,70

Belanja adalah meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer. Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. Belanja Modal terdiri dari Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer yang terdiri dari Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan. Total Belanja Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp2.715.093.795.527,07 atau sebesar 91,63% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp2.963.109.428.944,00.

Adapun rincian Belanja menurut fungsi atau urusannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel e. 18 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Urusan TA 2023

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	TA 2023		%
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
05.01	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	1.639.411.074.958,00	1.480.821.098.999,88	90,33
5.1.01.1-01.0-00.0-00.01	Dinas Pendidikan	744.753.865.905,00	681.885.763.087,00	91,56
5.1.02.1-02.0-00.0-00.01	RSUD RA Basoeni	93.677.094.536,00	78.635.090.858,00	83,94
5.1.02.1-02.0-00.0-00.02	Dinas Kesehatan	250.634.361.490,00	222.926.668.383,88	88,94
5.1.02.1-02.0-00.0-00.03	RSUD Prof. Dr. Soekandar	231.240.756.000,00	222.757.103.717,00	96,33
5.1.03.1-03.2-15.0-00.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	257.689.725.709,00	218.013.314.279,00	84,60
5.1.04.1-04.2-15.2-10.01	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan	17.849.298.000,00	16.474.913.161,00	92,30
5.1.05.1-05.0-00.0-00.01	Satuan Polisi Pamong Praja	14.651.377.311,00	12.612.330.449,00	86,08
5.1.05.1-05.0-00.0-00.03	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8.991.786.730,00	8.415.623.172,00	93,59
5.1.06.1-06.0-00.0-00.01	Dinas Sosial	19.922.809.277,00	19.100.291.893,00	95,87
05.02	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	137.567.119.357,00	126.364.249.796,00	91,86
5.2.07.2-07.3-32.0-00.01	Dinas Tenaga Kerja	8.646.140.400,00	7.681.698.784,00	88,85
5.2.09.2-09.3-25.0-00.01	Dinas Pangan dan Perikanan	7.804.498.063,00	6.890.219.096,00	88,29
5.2.11.2-11.1-03.0-00.01	Dinas Lingkungan Hidup	29.062.760.057,00	26.866.186.569,00	92,44
5.2.12.2-12.0-00.0-00.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8.573.557.554,00	7.909.080.060,00	92,25
5.2.13.2-13.0-00.0-00.01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	16.658.398.608,00	15.815.305.582,00	94,94
5.2.14.2-14.2-08.0-00.01	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan	20.795.893.333,00	19.925.934.064,00	95,82
5.2.16.2-16.2-20.2-21.01	Dinas Komunikasi dan Informatika	22.501.598.000,00	21.761.303.413,00	96,71
5.2.17.2-17.0-00.0-00.01	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	5.420.247.981,00	4.940.008.675,00	91,14
5.2.18.2-18.3-29.0-00.01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	13.602.260.000,00	10.451.469.115,00	76,84
5.2.23.2-23.2-24.0-00.01	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.501.765.361,00	4.123.044.438,00	91,59
05.03	Urusan Pemerintahan Pilihan	64.327.493.113,00	58.313.133.107,00	90,65
5.3.26.3-26.2-19.2-22.01	Dinas Kebudayaan, Pemuda Olahraga dan Pariwisata	23.429.479.920,00	22.186.248.545,00	94,69
5.3.27.3-27.0-00.0-00.01	Dinas Pertanian	29.362.237.480,00	26.247.084.124,00	89,39
5.3.31.3-31.3-30.0-00.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	11.535.775.713,00	9.879.800.438,00	85,64
05.04	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	174.417.260.879,00	163.975.772.673,00	94,01
5.4.01.4-01.5-02.0-00.02	Sekretariat Daerah	86.059.826.943,00	80.952.605.553,00	94,07
5.4.02.4-02.0-00.0-00.01	Sekretariat DPRD	88.357.433.936,00	83.023.167.120,00	93,96
05.05	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	828.140.654.825,00	774.126.021.485,00	93,48
5.5.01.5-01.5-05.0-00.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	12.540.261.092,00	11.319.589.290,00	90,27
5.5.02.5-02.0-00.0-00.01	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	770.579.698.590,00	723.880.232.568,00	93,94
5.5.02.5-02.0-00.0-00.02	Badan Pendapatan Daerah	34.702.246.387,00	29.336.749.446,00	84,54
5.5.03.5-03.5-04.0-00.01	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	10.318.448.756,00	9.589.450.181,00	92,93
05.06	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	14.614.350.906,00	12.985.097.344,00	88,85
5.6.01.6-01.0-00.0-00.01	Inspektorat	14.614.350.906,00	12.985.097.344,00	88,85
05.07	Unsur Kewilayahan	60.783.448.289,00	56.001.094.912,00	92,13
5.7.01.7-01.0-00.0-00.01	Kecamatan Puri	3.426.665.158,00	3.204.795.427,00	93,53
5.7.01.7-01.0-00.0-00.02	Kecamatan Sooko	2.902.352.710,00	2.664.510.688,00	91,81
5.7.01.7-01.0-00.0-00.03	Kecamatan Trowulan	2.848.177.896,00	2.663.650.051,00	93,52
5.7.01.7-01.0-00.0-00.04	Kecamatan Bangsal	3.155.283.467,00	2.992.699.194,00	94,85
5.7.01.7-01.0-00.0-00.05	Kecamatan Gedeg	2.720.088.927,00	2.566.829.648,00	94,37
5.7.01.7-01.0-00.0-00.06	Kecamatan Kemlagi	3.027.617.971,00	2.818.230.653,00	93,08
5.7.01.7-01.0-00.0-00.07	Kecamatan Jetis	2.925.418.587,00	2.850.658.456,00	97,44
5.7.01.7-01.0-00.0-00.08	Kecamatan Dawarblandong	3.020.050.960,00	2.602.352.599,00	86,17
5.7.01.7-01.0-00.0-00.09	Kecamatan Pacet	2.674.199.736,00	2.423.802.727,00	90,64
5.7.01.7-01.0-00.0-00.10	Kecamatan Pungging	2.736.730.956,00	2.548.233.392,00	93,11
5.7.01.7-01.0-00.0-00.11	Kecamatan Ngoro	3.257.064.000,00	2.949.752.728,00	90,56
5.7.01.7-01.0-00.0-00.12	Kecamatan Kutorejo	2.929.868.777,00	2.867.019.991,00	97,85
5.7.01.7-01.0-00.0-00.13	Kecamatan Dlanggu	2.651.900.199,00	2.580.121.822,00	97,29
5.7.01.7-01.0-00.0-00.14	Kecamatan Trawas	2.732.000.000,00	2.462.026.274,00	90,12
5.7.01.7-01.0-00.0-00.15	Kecamatan Mojoanyar	2.832.629.331,00	2.759.450.448,00	97,42
5.7.01.7-01.0-00.0-00.16	Kecamatan Gondang	2.621.711.933,00	2.421.773.530,00	92,37
5.7.01.7-01.0-00.0-00.17	Kecamatan Jatirejo	2.939.867.009,00	2.709.350.236,00	92,16
5.7.01.7-01.0-00.0-00.18	Kecamatan Mojosari	11.381.820.672,00	9.915.837.048,00	87,12
05.08	Unsur Pemerintahan Umum	43.848.026.617,00	42.507.327.210,19	96,94
5.8.01.8-01.0-00.0-00.01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	43.848.026.617,00	42.507.327.210,19	96,94
	Jumlah	2.963.109.428.944,00	2.715.093.795.527,07	91,63

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 dapat dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel e. 19 Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2023 dan TA 2022

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Naik/Turun	Realisasi 2022
Belanja Operasi	1.895.900.670.146,00	1.749.284.603.751,19	92,27	40.235.195.315,00	1.709.049.408.436,19
Belanja Modal	431.374.888.077,00	368.834.887.917,88	85,50	27.707.913.754,37	341.126.974.163,51
Belanja Tak Terduga	38.559.268.266,00	1.394.558.239,00	3,62	-3.172.478.681,00	4.567.036.920,00
Belanja Transfer	597.274.602.455,00	595.579.745.619,00	99,72	29.474.232.029,00	566.105.513.590,00
Jumlah	2.963.109.428.944,00	2.715.093.795.527,07	91,63	94.244.862.417,37	2.620.848.933.109,70

Secara umum Belanja Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2023 meningkat sebesar Rp94.244.862.417,37 atau sebesar 3,60% jika dibandingkan dengan Belanja pada Tahun Anggaran 2022.

7.e.1).b) (1) Belanja Operasi

Belanja Operasi Pemerintah Kabupaten Mojokerto yang meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial pada Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp1.749.284.603.751,19 atau sebesar 92,27% dari Anggaran sebesar Rp1.895.900.670.146,00. Realisasi Belanja Operasi Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel e. 20 Realisasi Belanja Operasi TA 2023 dan TA 2022

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Naik/Turun	Realisasi 2022
Belanja Pegawai	1.010.134.694.569,00	921.800.933.771,19	91,26	-33.069.539.060,58	954.870.472.831,77
Belanja Barang dan Jasa	727.466.680.674,00	673.553.783.286,00	92,59	-4.555.272.096,42	678.109.055.382,42
Belanja Hibah	151.273.879.683,00	147.470.288.694,00	97,49	90.592.708.680,00	56.877.580.014,00
Belanja Bantuan Sosial	7.025.415.220,00	6.459.598.000,00	91,95	-12.732.702.208,00	19.192.300.208,00
Jumlah	1.895.900.670.146,00	1.749.284.603.751,19	92,27	40.235.195.315,00	1.709.049.408.436,19

Dari tabel di atas diketahui bahwa Belanja Pegawai merupakan Belanja Operasi terbesar di Pemerintah Kabupaten Mojokerto yang mencapai Rp921.800.933.771,19 atau 52,70% dari total Belanja Operasi Pemerintah Kabupaten Mojokerto, kemudian Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp673.553.783.286,00 atau 38,50% dari total Belanja Operasi, sisanya merupakan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. Secara umum Belanja Operasi Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2023 meningkat sebesar Rp40.235.195.315,00 atau 2,35% jika dibandingkan dengan Belanja Operasi Tahun Anggaran 2022.

7.e.1).b) (1) (a) Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai pada Tahun Anggaran 2023 mencapai Rp921.800.933.771,19 atau sebesar 91,26% dari anggaran sebesar Rp1.010.134.694.569,00. Realisasi Belanja Pegawai yang tidak maksimal ini disebabkan karena banyaknya pegawai yang pensiun atau purna tugas dan banyaknya kekosongan jabatan struktural.

Rincian realisasi Belanja Pegawai Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel e. 21 Realisasi Belanja Pegawai TA 2023 dan TA 2022

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Naik/Turun	Realisasi 2022
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	554.732.894.276,00	501.272.691.241,00	90,36	-12.409.762.915,00	513.682.454.156,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	132.752.122.115,00	113.138.404.326,19	85,23	-2.482.079.278,81	115.620.483.605,00
Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	187.130.818.058,00	174.393.243.727,00	93,19	-11.060.674.727,00	185.453.918.454,00
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	31.919.829.890,00	31.312.416.482,00	98,10	193.727.538,00	31.118.688.944,00
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.716.191.451,00	1.701.801.138,00	99,16	-393.746.213,00	2.095.547.351,00
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.403.614.379,00	1.357.898.197,00	96,74	86.660.197,00	1.271.238.000,00
Belanja Pegawai BOS	0,00	0,00	0,00	-2.840.500.000,00	2.840.500.000,00
Belanja Pegawai BLUD	100.479.224.400,00	98.624.478.660,00	98,15	-4.163.163.661,77	102.787.642.321,77
Jumlah	1.010.134.694.569,00	921.800.933.771,19	91,26	-33.069.539.060,58	954.870.472.831,77

Dari tabel di atas diketahui bahwa realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2023 lebih rendah jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022, yaitu menurun sebesar Rp33.069.539.060,58 atau 3,46%.

Adapun penjelasan terinci atas realisasi belanja pegawai adalah sebagai berikut:

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN adalah pembayaran untuk Belanja Gaji Pokok ASN, Tunjangan Keluarga ASN, Tunjangan Jabatan ASN, Tunjangan Fungsional ASN, Tunjangan Fungsional Umum ASN, Tunjangan Beras ASN, Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN, Pembulatan Gaji ASN, Iuran Jaminan Kesehatan ASN, Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN dan Iuran Jaminan Kematian ASN.
- (2) Belanja Tambahan Penghasilan ASN adalah pembayaran untuk Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN, Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN, Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN dan Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN.
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN adalah pembayaran untuk belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah, Insentif Pemungutan Retribusi Daerah, Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD, Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD, Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD, Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN dan Honorarium.
- (4) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD adalah pembayaran untuk Belanja Uang Representasi DPRD, Tunjangan Keluarga DPRD, Tunjangan Beras DPRD, Uang Paket DPRD, Tunjangan Jabatan DPRD, Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD, Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD, Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD, Tunjangan Reses DPRD, Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD, Tunjangan Transportasi DPRD, dan Uang Jasa Pengabdian DPRD.
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH adalah pembayaran untuk Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH, Tunjangan Keluarga KDH/WKDH, Tunjangan Jabatan KDH/WKDH, Tunjangan Beras KDH/WKDH, Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH, Pembulatan Gaji KDH/WKDH, Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH, Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH dan

Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah.

- (6) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH adalah pembayaran untuk Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD dan Belanja Dana Operasional KDH/WKDH.
- (7) Belanja Pegawai BOS adalah pembayaran untuk belanja pegawai BOS pada 426 sekolah SMP Negeri dan SD Negeri se wilayah Kabupaten Mojokerto.
- (8) Belanja Pegawai BLUD adalah pembayaran untuk belanja pegawai BLUD RSUD Prof. Dr. Soekandar, pegawai BLUD RSUD R.A. Basoeni dan pegawai BLUD pada 27 (dua puluh tujuh) Puskesmas.

7.e.1).b) (1) (b) Belanja Barang dan Jasa

Total realisasi Belanja Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2023 mencapai Rp673.553.783.286,00 atau sebesar 92,59% dari anggaran sebesar Rp727.466.680.674,00. Adapun Rincian Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel e. 22 Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2023 dan TA 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Naik/Turun	Realisasi 2022
1	Belanja Barang	109.694.457.324,00	100.676.726.425,00	91,78	-13.524.583.464,00	114.201.309.889,00
	Belanja Barang Pakai Habis	109.467.535.767,00	100.499.453.525,00	91,81	-13.131.341.318,00	113.630.794.843,00
	Belanja Barang Tak Habis Pakai	226.921.557,00	177.272.900,00	78,12	-393.242.146,00	570.515.046,00
2	Belanja Jasa	287.062.004.753,00	265.028.274.166,00	92,32	10.248.947.620,00	254.779.326.546,00
	Belanja Jasa Kantor	201.092.558.329,00	184.714.345.692,00	91,86	-17.251.923.645,00	201.966.269.337,00
	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	52.439.346.917,00	52.289.500.899,00	99,71	23.337.277.408,00	28.952.223.491,00
	Belanja Sewa Tanah	143.416.000,00	135.000.000,00	94,13	-26.875.949,00	161.875.949,00
	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	4.923.230.945,00	3.613.430.320,00	73,40	1.104.074.484,00	2.509.355.836,00
	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	3.868.246.019,00	3.469.543.435,00	89,69	522.012.957,00	2.947.530.478,00
	Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	67.902.000,00	67.700.000,00	99,70	67.700.000,00	0,00
	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	768.000.000,00	728.049.000,00	94,80	169.424.660,00	558.624.340,00
	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	3.083.796.000,00	2.735.400.605,00	88,70	-230.944.037,00	2.966.344.642,00
	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	6.166.699.940,00	5.211.907.741,00	84,52	109.493.963,00	5.102.413.778,00
	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	370.000,00	0,00	0,00	-195.648.160,00	195.648.160,00
	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	8.124.834.000,00	7.152.064.430,00	88,03	1.509.112.990,00	5.642.951.440,00
	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	6.372.604.603,00	4.900.332.044,00	76,90	1.124.242.949,00	3.776.089.095,00
	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	11.000.000,00	11.000.000,00	100,00	11.000.000,00	0,00

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Naik/Turun	Realisasi 2022
3	Belanja Pemeliharaan	12.014.368.816,00	11.521.633.917,00	95,90	-9.863.618.232,00	21.385.252.149,00
	Belanja Pemeliharaan Tanah	42.120.000,00	41.835.000,00	99,32	33.835.000,00	8.000.000,00
	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.171.260.025,00	5.875.185.943,00	95,20	211.481.121,00	5.663.704.822,00
	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.926.596.695,00	3.776.909.074,00	96,19	-6.334.526.165,00	10.111.435.239,00
	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.874.392.096,00	1.827.703.900,00	97,51	-3.774.408.188,00	5.602.112.088,00
4	Belana Perjalanan Dinas	86.657.115.357,00	78.064.060.618,00	90,08	-214.065.622,00	78.278.126.240,00
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	86.657.115.357,00	78.064.060.618,00	90,08	-214.065.622,00	78.278.126.240,00
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	13.510.172.320,00	13.148.246.610,00	97,32	-6.808.452.890,00	19.956.699.500,00
	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	12.536.874.300,00	12.345.699.600,00	98,48	-6.804.187.000,00	19.149.886.600,00
	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	973.298.020,00	802.547.010,00	82,46	-4.265.890,00	806.812.900,00
6	Belanja Barang dan Jasa BOS	72.350.358.768,00	72.350.358.768,00	100,00	-1.653.266.079,42	74.003.624.847,42
	Belanja Barang dan Jasa BOS	72.350.358.768,00	72.350.358.768,00	100,00	-1.653.266.079,42	74.003.624.847,42
7	Belanja Barang dan Jasa BLUD	146.178.203.336,00	132.764.482.782,00	90,82	17.259.766.571,00	115.504.716.211,00
	Belanja Barang dan Jasa BLUD	146.178.203.336,00	132.764.482.782,00	90,82	17.259.766.571,00	115.504.716.211,00
	Jumlah	727.466.680.674,00	673.553.783.286,00	92,59	-4.555.272.096,42	678.109.055.382,42

Dari tabel di atas di ketahui bahwa realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 yang terbesar adalah di Belanja Jasa sebesar Rp265.028.274.166,00 atau 39,35% dari total Belanja Barang dan Jasa, dengan rincian sebagai berikut:

- Belanja Jasa Kantor sebesar Rp184.714.345.692,00.
- Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebesar Rp52.289.500.899,00.
- Belanja Sewa Tanah sebesar Rp135.000.000,00.
- Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebesar Rp3.613.430.320,00.
- Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebesar Rp3.469.543.435,00.
- Belanja Sewa Jalan Jaringan dan Irigasi sebesar Rp67.700.000,00.
- Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebesar Rp728.049.000,00.
- Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebesar Rp2.735.400.605,00.
- Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebesar Rp5.211.907.741,00.
- Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebesar Rp7.152.064.430,00.
- Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebesar Rp4.900.332.044,00.
- Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud sebesar Rp11.000.000,00.

Dari rincian Belanja Jasa tersebut, Belanja Jasa Kantor merupakan Belanja Jasa terbesar selanjutnya Belanja Iuran Jaminan/Asuransi, selanjutnya Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan, dan Pelatihan, berikutnya Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi dan urutan kelima Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah.

Setelah Belanja Jasa, terbesar selanjutnya ada pada Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp132.764.482.782,00 atau 19,71% dan Belanja Barang sebesar Rp100.676.726.425,00 atau 14,95%. Secara total Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar Rp4.555.272.096,42 atau 0,67% jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022.

Adapun penjelasan terinci atas realisasi belanja barang dan jasa adalah sebagai berikut:

- (1) Belanja Barang adalah pembayaran untuk Belanja Barang Pakai Habis dan Belanja Barang Tak Habis Pakai.
- (2) Belanja Jasa adalah pembayaran untuk Belanja Jasa Kantor, Iuran Jaminan/Asuransi, Sewa Peralatan dan Mesin, Sewa Gedung dan Bangunan, Sewa Aset Tetap Lainnya, Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi, Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi, Belanja Jasa Ketersediaan Layanan, Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan serta Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah.
- (3) Belanja Pemeliharaan adalah pembayaran untuk Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, Pemeliharaan Jalan jaringan dan Irigasi serta Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya.
- (4) Belanja Perjalanan Dinas adalah pembayaran untuk Belanja Perjalanan Dinas Luar Kota, Perjalanan Dinas Dalam Kota, Perjalanan Dinas dalam rangka Meeting baik Luar Kota maupun Dalam Kota.
- (5) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat adalah pembayaran untuk hadiah dalam rangka perlombaan dan belanja penghargaan atas suatu prestasi.
- (6) Belanja Barang Dana BOS merupakan belanja barang dan jasa yang didanai dari Dana BOS.
- (7) Belanja barang dan Jasa BLUD adalah belanja barang dan jasa BLUD pada RSUD Prof. Dr. Soekandar dan RSUD RA Basoeni dan 27 (dua puluh tujuh) puskesmas.

7.e.1.b) (1) (c) Belanja Hibah

Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp147.470.288.694,00 atau sebesar 97,49% dari target anggaran sebesar Rp151.273.879.683,00 yang merupakan Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia, Belanja Hibah Dana BOS dan Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik. Realisasi Belanja Hibah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel e. 23 Realisasi Belanja Hibah TA 2023 dan TA 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Naik/Turun	Realisasi 2022
1	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga,	130.847.599.433,00	127.509.934.486,00	97,45	73.805.029.472,00	53.704.905.014,00

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Naik/Turun	Realisasi 2022
	Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia					
3	Belanja Hibah Dana BOS	16.753.605.250,00	16.787.679.208,00	100,20	16.787.679.208,00	0,00
4	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	3.172.675.000,00	3.172.675.000,00	100,00	0,00	3.172.675.000,00
	Jumlah	151.273.879.683,00	147.470.288.694,00	97,49	90.592.708.680,00	56.877.580.014,00

Belanja Hibah terbesar adalah Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia yaitu sebesar Rp127.509.934.486,00 atau sebesar 86,46% dari total Belanja Hibah. Secara keseluruhan Belanja Hibah Tahun Anggaran 2023 meningkat sebesar Rp90.592.708.680,00 atau 159,28% jika dibandingkan dengan Belanja Hibah Tahun 2022.

Adapun daftar rincian penerima hibah disajikan dalam **lampiran 3**.

7.e.1).b) (1) (d) Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp6.459.598.000,00 atau sebesar 91,95% dari anggaran sebesar Rp7.025.415.220,00 yang merupakan Belanja Bantuan Sosial kepada Individu, kepada Kelompok Masyarakat dan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya). Adapun rincian realisasi Belanja Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel e. 24 Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2023 dan TA 2022

<i>(dalam rupiah)</i>						
No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Naik/Turun	Realisasi 2022
1	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	5.790.000.000,00	5.367.400.000,00	92,70	-12.664.671.700,00	18.032.071.700,00
2	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	0,00	0,00		-390.000.000,00	390.000.000,00
3	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	675.415.220,00	662.198.000,00	98,04	191.969.492,00	470.228.508,00
4	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	560.000.000,00	430.000.000,00	76,79	130.000.000,00	300.000.000,00
	Jumlah	7.025.415.220,00	6.459.598.000,00	91,95	-12.732.702.208,00	19.192.300.208,00

Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2023 menurun cukup signifikan sebesar Rp12.732.702.208,00 atau 66,34% dibandingkan Tahun Anggaran 2022. Hal ini dikarenakan pada Tahun Anggaran 2022 Pemerintah Kabupaten Mojokerto melalui Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Perhubungan mencanangkan program Peningkatan Kualitas Kawasan Pemukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha, kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni sesuai Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 188.45/445/HK/416-01/2022 tentang Daftar Penerima dan Besaran Bantuan Sosial Berupa Uang untuk Pembangunan Jamban Sehat Dalam Rangka Pencegahan dan Penanganan Permukiman Kumuh untuk jamban sebanyak 5.539 unit sedangkan pada Tahun Anggaran 2023 tidak terdapat program serupa.

Adapun daftar rincian penerima Belanja Bantuan Sosial disajikan di **lampiran 4**.

7.e.1.b) (2) Belanja Modal

Realisasi belanja modal Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp368.834.887.917,88 atau sebesar 85,50% dari anggaran sebesar Rp431.374.888.077,00. Adapun rincian realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel e. 25 Realisasi Belanja Modal TA 2023 dan TA 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Naik/Turun	Realisasi 2022
1.	Belanja Tanah	456.320.000,00	451.920.000,00	99,04	451.920.000,00	0,00
2.	Belanja Peralatan dan Mesin	80.047.757.323,00	71.157.661.706,88	88,89	-71.554.709.034,12	142.712.370.741,00
3.	Belanja Gedung dan Bangunan	164.228.273.046,00	146.020.359.519,00	88,91	91.388.893.725,49	54.631.465.793,51
4.	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi	185.883.151.355,00	150.499.982.193,00	80,96	9.097.662.244,00	141.402.319.949,00
5.	Belanja Aset Tetap Lainnya	759.386.353,00	704.964.499,00	92,83	-1.675.853.181,00	2.380.817.680,00
	Jumlah	431.374.888.077,00	368.834.887.917,88	85,50	27.707.913.754,37	341.126.974.163,51

Dari tabel di atas diketahui Belanja Modal terbesar adalah Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi yang mencapai Rp150.499.982.193,00 atau 40,80% dari total realisasi Belanja Modal. Realisasi kedua pada Belanja Gedung dan Bangunan sebesar Rp146.020.359.519,00 atau 39,59% dari total Belanja Modal. Secara umum realisasi belanja modal Tahun Anggaran 2023 meningkat sebesar Rp27.707.913.754,37 atau 8,12% jika dibandingkan dengan realisasi belanja modal Tahun Anggaran 2022 yang mencapai Rp341.126.974.163,51. Penjelasan dari realisasi Belanja Modal tersebut adalah sebagai berikut:

7.e.1.b) (2) (a) Belanja Tanah

Total realisasi untuk Belanja Modal Tanah Kabupaten Mojokerto pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp451.920.000,00 atau 99,04% dari anggaran sebesar Rp456.320.000,00. Belanja Modal Tanah ini berupa pembelian Tanah untuk Makam.

7.e.1.b) (2) (b) Belanja Peralatan dan Mesin

Total realisasi untuk Belanja Peralatan dan Mesin pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp71.157.661.706,88 atau 88,89% dari anggaran sebesar Rp80.047.757.323,00, jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 terdapat penurunan sebesar Rp71.554.709.034,12 atau 50,14% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel e. 26 Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin TA 2023 dan TA 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Naik/Turun	Realisasi 2022
1	Belanja Modal Alat Besar	152.936.825,00	142.420.625,00	93,12	-676.527.825,00	818.948.450,00
2	Belanja Modal Alat Angkutan	1.402.080.060,00	1.340.189.630,00	95,59	-16.048.471.370,00	17.388.661.000,00
3	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	187.122.010,00	185.412.500,00	99,09	-142.687.750,00	328.100.250,00
4	Belanja Modal Alat Pertanian	9.246.300,00	9.245.000,00	99,99	-57.210.000,00	66.455.000,00
5	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	23.432.866.776,00	22.654.651.373,00	96,68	-3.292.049.836,00	25.946.701.209,00
6	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	2.012.866.640,00	1.818.247.500,00	90,33	-5.551.067.081,00	7.369.314.581,00
7	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	42.569.388.056,00	35.842.246.649,88	84,20	-14.858.204.208,12	50.700.450.858,00
8	Belanja Modal Alat	986.792.879,00	908.683.000,00	92,08	-4.634.044.478,00	5.542.727.478,00

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Naik/Turun	Realisasi 2022
	Laboratorium					
9	Belanja Modal Komputer	7.478.305.037,00	6.502.355.290,00	86,95	-10.774.578.454,00	17.276.933.744,00
10	Belanja Modal Alat Explorasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	16.229.500,00	8.288.800,00	51,07	-101.413.700,00	109.702.500,00
12	Belanja Modal Alat Peraga	0,00	0,00	0,00	-832.000,00	832.000,00
13	Belanja Modal Rambu-Rambu	1.411.366.460,00	1.387.111.840,00	98,28	-2.260.348.592,00	3.647.460.432,00
14	Belanja Modal Peralatan Olahraga	388.556.780,00	358.809.499,00	92,34	-131.445.801,00	490.255.300,00
15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	0,00	0,00	-3.711.001.325,00	3.711.001.325,00
16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	0,00	0,00	0,00	-9.314.826.614,00	9.314.826.614,00
	Jumlah	80.047.757.323,00	71.157.661.706,88	88,89	-71.554.709.034,12	142.712.370.741,00

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa realisasi Belanja Peralatan dan Mesin yang terbesar adalah untuk Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan yang mencapai Rp35.842.246.649,88 atau 50,37% dari total Belanja Peralatan dan Mesin, berikutnya Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp22.654.651.373,00 atau 31,84%. Secara total Belanja Peralatan dan Mesin menurun sebesar Rp71.554.709.034,12 atau 50,14% jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya. Adapun rincian Belanja Peralatan dan Mesin per Rincian Obyek disajikan dalam lampiran 5.

7.e.1).b) (2) (c) Belanja Gedung dan Bangunan

Total realisasi Belanja Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Mojokerto pada Tahun Anggaran 2023 mencapai sebesar Rp146.020.359.519,00 atau 88,91% dari anggaran sebesar Rp164.228.273.046,00. Adapun rincian dari realisasi Belanja Gedung dan Bangunan adalah sebagai berikut:

Tabel e. 27 Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan TA 2023 dan TA 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Naik/Turun	Realisasi 2022
1	Belanja Modal Bangunan Gedung	101.418.085.808,00	88.248.508.530	87,01	38.546.326.777,49	49.702.181.752,51
2	Belanja Modal Monumen	107.433.442,00	107.433.442,00	100,00	107.433.442,00	0,00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	62.702.753.796,00	57.664.417.547,00	91,96	52.735.133.506,00	4.929.284.041,00
	Jumlah	164.228.273.046,00	146.020.359.519,00	88,91	91.388.893.725,49	54.631.465.793,51

Dari tabel di atas diketahui bahwa realisasi Belanja Gedung dan Bangunan yang paling besar adalah Belanja Modal Bangunan Gedung yang mencapai Rp145.912.926.077,00 atau 88,91% dari total Belanja Gedung dan Bangunan yang digunakan untuk pembangunan gedung kantor, pembangunan gedung pendidikan, dan bangunan gedung kesehatan. Secara total Belanja Gedung dan Bangunan lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 yaitu terjadi kenaikan sebesar Rp91.388.893.725,49 atau 167,28%. Kenaikan yang cukup signifikan ini karena pembangunan rehabilitasi dan revitalisasi gedung-gedung sekolah serta pembangunan fasilitas kesehatan pada RSUD Prof. Dr. Soekandar. Adapun rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan per Rincian Obyek disajikan dalam lampiran 6.

7.e.1).b) (2) (d) Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi

Realisasi Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi pada Tahun Anggaran 2023 mencapai Rp150.499.982.193,00 atau sebesar 80,96% dari anggaran sebesar Rp185.883.151.355,00 dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel e. 28 Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2023 dan TA 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Naik/Turun	Realisasi 2022
1	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	167.912.285.051,00	135.715.206.651,00	80,83	5.284.696.014,00	130.430.510.637,00
2	Belanja Modal Bangunan Air	16.428.866.304,00	13.407.720.542,00	81,61	2.916.568.719,00	10.491.151.823,00
3	Belanja Modal Instalasi	1.542.000.000,00	1.377.055.000,00	89,30	1.366.554.400,00	10.500.600,00
4	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD	0,00	0,00	0,00	-470.156.889,00	470.156.889,00
	Jumlah	185.883.151.355,00	150.499.982.193,00	80,96	9.097.662.244,00	141.402.319.949,00

Dari tabel di atas diketahui bahwa Belanja Jalan Jaringan dan Irigasi yang terbesar adalah untuk Belanja Modal Jalan dan Jembatan yang mencapai Rp135.715.206.651,00 atau 90,18% dari total Belanja Jalan Jaringan dan Irigasi, hal ini karena prioritas pembangunan Kabupaten Mojokerto adalah di bidang infrastruktur jalan. Berikutnya sebesar Rp13.407.720.542,00 atau 8,91% adalah untuk Belanja Modal Bangunan Air. Secara total jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022, realisasi Belanja Jalan Jaringan dan Irigasi Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp9.097.662.244,00 atau 6,43%. Adapun rincian Belanja Jalan Jaringan dan Irigasi per Rincian Obyek disajikan pada lampiran 7.

7.e.1).b).(2).(e) Belanja Aset Tetap Lainnya

Total Belanja Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp704.964.499,00 atau sebesar 92,83% dari anggaran sebesar Rp759.386.353,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel e. 29 Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya TA 2023 dan TA 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Naik/Turun	Realisasi 2022
1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	331.665.271,00	289.258.899,00	87,21	-391.735.101,00	680.994.000,00
2	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/Olahraga	0,00	0,00	0,00	-762.172.500,00	762.172.500,00
3	Belanja Modal Tanaman	0,00	0,00	0,00	-159.260.580,00	159.260.580,00
4	Belanja Modal Hewan	47.228.882,00	45.400.000,00	96,13	45.400.000,00	0,00
5	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	380.492.200,00	370.305.600,00	97,32	-408.085.000,00	778.390.600,00
	Jumlah	759.386.353,00	704.964.499,00	92,83	-1.675.853.181,00	2.380.817.680,00

Dari tabel tersebut diketahui realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya sebesar Rp370.305.600,00 atau 52,53% dari total realisasi digunakan untuk Belanja Modal Aset Tak Berwujud. Secara total realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2023 jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 terjadi penurunan sebesar Rp1.675.853.181,00 atau 70,39%. Adapun rincian Belanja Aset Tetap Lainnya per Rincian Obyek disajikan dalam lampiran 8.

7.e.1).b).(3) Belanja Tak Terduga

Realisasi Belanja Tak Terduga Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp1.394.558.239,00 atau sebesar 3,62% dari anggaran sebesar Rp38.559.268.266,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 terjadi penurunan Belanja Tak Terduga sebesar Rp3.172.478.681,00 atau 69,46%. Belanja Tak Terduga tersebut digunakan untuk penanganan bencana angin kencang, tanah longsor dan kekeringan serta pengembalian sisa Dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Provinsi

Jawa Timur Tahun Anggaran 2021 dan 2022. Anggaran Belanja Tak Terduga adalah di BPKAD. Adapun daftar Perangkat Daerah yang melaksanakan Belanja Tak Terduga Tahun Anggaran 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel e. 30 Realisasi Belanja Tak Terduga TA 2023 dan TA 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022
1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	545.608.139,00	69.483.400,00
2	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	848.950.100,00	3.096.791.370,00
3	Dinas Pertanian	0,00	1.400.762.150,00
Jumlah		1.394.558.239,00	4.567.036.920,00

7.e.1).c) Transfer

Transfer merupakan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan. Total Transfer Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp595.579.745.619,00 atau sebesar 99,72% dari anggaran sebesar Rp597.274.602.455,00. Jika di dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022, realisasi Transfer Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp29.474.232.029,00 atau 5,21%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel e. 31 Realisasi Transfer TA 2023 dan TA 2022

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2023	%	Naik/Turun	Realisasi 2022
Bagi Hasil	43.921.993.776,00	43.211.642.719,00	98,38	2.930.389.329,00	40.281.253.390,00
Bantuan Keuangan	553.352.608.679,00	552.368.102.900,00	99,82	26.543.842.700,00	525.824.260.200,00
Jumlah	597.274.602.455,00	595.579.745.619,00	99,72	29.474.232.029,00	566.105.513.590,00

7.e.1).c).(1) Transfer/Bagi Hasil Ke Desa

Transfer/Bagi Hasil ke Desa merupakan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi kepada Pemerintahan Desa serta Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa. Realisasi Transfer/Bagi Hasil ke Desa tersebut selama Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp595.579.745.619,00 atau sebesar 99,72% dari anggaran sebesar Rp597.274.602.455,00. Rincian Transfer/Bagi Hasil ke Desa Tahun Anggaran 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel e. 32 Realisasi Transfer/Bagi Hasil ke Desa TA 2023 dan TA 2022

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Naik/Turun	Realisasi 2022
Bagi Hasil Pajak	40.448.166.585,00	40.110.340.117,00	99,16	2.283.321.967,00	37.827.018.150,00
Bagi Hasil Retribusi	3.473.827.191,00	3.101.302.602,00	89,28	647.067.362,00	2.454.235.240,00
Bantuan Keuangan	553.352.608.679,00	552.368.102.900,00	99,82	26.543.842.700,00	525.824.260.200,00
Jumlah	597.274.602.455,00	595.579.745.619,00	99,72	29.474.232.029,00	566.105.513.590,00

Dari tabel di atas diketahui realisasi Transfer/Bagi Hasil ke Desa Tahun Anggaran 2023, apabila dibandingkan dengan realisasi Transfer/Bagi Hasil ke Desa Tahun Anggaran 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp29.474.232.029,00 atau 5,21%. Berikut disajikan rincian realisasi Transfer/Bagi Hasil ke Desa Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022.

7.e.1).c).(1).(a) Bagi Hasil Pajak

Realisasi Bagi Hasil Pajak selama Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp40.110.340.117,00 atau sebesar 99,16% dari anggaran yang ditetapkan. Rincian Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel e. 33 Rincian Realisasi Bagi Hasil Pajak TA 2023 dan TA 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Naik/Turun	Realisasi 2022
1	Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	2.061.314.000,00	1.723.487.548,00	83,61	571.914.598,00	1.151.572.950,00
2	Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa					
	Kecamatan Sooko	1.926.482.608,00	1.926.482.608,00	100,00	-41.340.892,00	1.967.823.500,00
	Kecamatan Trowulan	1.704.417.155,00	1.704.417.154,00	100,00	26.380.154,00	1.678.037.000,00
	Kecamatan Puri	1.965.010.732,00	1.965.010.731,00	100,00	-3.023.469,00	1.968.034.200,00
	Kecamatan Bangsal	1.936.058.251,00	1.936.058.250,00	100,00	416.404.250,00	1.519.654.000,00
	Kecamatan Gedeg	1.636.788.839,00	1.636.788.837,00	100,00	-104.042.463,00	1.740.831.300,00
	Kecamatan Kemlagi	2.051.034.171,00	2.051.034.171,00	100,00	101.727.371,00	1.949.306.800,00
	Kecamatan Jetis	2.483.394.451,00	2.483.394.450,00	100,00	43.476.650,00	2.439.917.800,00
	Kecamatan Dawarblandong	1.904.442.556,00	1.904.442.557,00	100,00	101.709.257,00	1.802.733.300,00
	Kecamatan Mojosari	1.748.282.731,00	1.748.282.731,00	100,00	50.764.831,00	1.697.517.900,00
	Kecamatan Pungging	2.610.684.052,00	2.610.684.052,00	100,00	27.281.052,00	2.583.403.000,00
	Kecamatan Ngoro	5.123.535.007,00	5.123.535.007,00	100,00	329.848.107,00	4.793.686.900,00
	Kecamatan Kutorejo	1.966.125.163,00	1.966.125.163,00	100,00	150.606.663,00	1.815.518.500,00
	Kecamatan Dlanggu	1.705.783.298,00	1.705.783.298,00	100,00	96.400.998,00	1.609.382.300,00
	Kecamatan Gondang	1.871.746.308,00	1.871.746.306,00	100,00	76.539.006,00	1.795.207.300,00
	Kecamatan Jatirejo	1.931.917.246,00	1.931.917.246,00	100,00	68.295.646,00	1.863.621.600,00
	Kecamatan Trawas	2.008.622.858,00	2.008.622.849,00	100,00	94.859.649,00	1.913.763.200,00
	Kecamatan Pacet	2.340.706.271,00	2.340.706.271,00	100,00	181.130.471,00	2.159.575.800,00
	Kecamatan Mojoanyar	1.471.820.888,00	1.471.820.888,00	100,00	94.390.088,00	1.377.430.800,00
	Jumlah	38.386.852.585,00	38.386.852.569,00	100,00	1.711.407.369,00	36.675.445.200,00
	Total	40.448.166.585,00	40.110.340.117,00	99,16	2.283.321.967,00	37.827.018.150,00

Dari tabel di atas diketahui realisasi Belanja Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2023 lebih tinggi sebesar Rp2.283.321.967,00 atau meningkat sebesar 6,04%. Adapun daftar rincian realisasi Bagi Hasil Pajak di sajikan dalam lampiran 9.

7.e.1).c)(1).(b) Bagi Hasil Retribusi

Realisasi Bagi Hasil Retribusi selama Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp3.101.302.602,00 atau sebesar 89,28% dari anggaran sebesar Rp3.473.827.191,00. Rincian Bagi Hasil Retribusi ke Desa Tahun Anggaran 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel e. 34 Rincian Realisasi Bagi Hasil Retribusi TA 2023 dan TA 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Naik/Turun	Realisasi 2022
1	Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa					
	Kecamatan Sooko	146.408.518,00	146.408.518,00	100,00	25.005.718,00	121.402.800,00
	Kecamatan Trowulan	136.517.814,00	136.517.814,00	100,00	35.250.014,00	101.267.800,00
	Kecamatan Puri	165.775.769,00	165.775.769,00	100,00	40.457.269,00	125.318.500,00
	Kecamatan Bangsal	120.993.388,00	120.993.388,00	100,00	32.550.188,00	88.443.200,00
	Kecamatan Gedeg	95.902.012,00	95.902.012,00	100,00	19.096.512,00	76.805.500,00
	Kecamatan Kemlagi	129.432.047,00	129.432.047,00	100,00	26.502.747,00	102.929.300,00
	Kecamatan Jetis	124.346.923,00	124.346.923,00	100,00	30.192.223,00	94.154.700,00
	Kecamatan Dawarblandong	118.833.114,00	118.833.114,00	100,00	27.440.714,00	91.392.400,00
	Kecamatan Mojosari	183.340.873,00	183.340.873,00	100,00	30.338.873,00	153.002.000,00
	Kecamatan Pungging	210.726.049,00	210.726.049,00	100,00	17.091.849,00	193.634.200,00
	Kecamatan Ngoro	231.741.514,00	231.741.514,00	100,00	3.616.014,00	228.125.500,00
	Kecamatan Kutorejo	136.787.607,00	136.787.607,00	100,00	28.339.407,00	108.448.200,00
	Kecamatan Dlanggu	119.833.549,00	119.833.549,00	100,00	32.758.449,00	87.075.100,00
	Kecamatan Gondang	117.338.254,00	117.338.254,00	100,00	14.824.354,00	102.513.900,00
	Kecamatan Jatirejo	132.231.295,00	132.231.295,00	100,00	27.839.995,00	104.391.300,00
	Kecamatan Trawas	153.121.088,00	153.121.088,00	100,00	71.425.088,00	81.696.000,00
	Kecamatan Pacet	304.814.928,00	304.814.928,00	100,00	85.530.028,00	219.284.900,00
	Kecamatan Mojoanyar	96.652.378,00	96.652.378,00	100,00	16.214.078,00	80.438.300,00
	Jumlah	2.724.797.120,00	2.724.797.120,00	100,00	564.473.520,00	2.160.323.600,00
2	Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pihak Lain	749.030.071,00	376.505.482,00	50,27	82.593.842,00	293.911.640,00
	Total	3.473.827.191,00	3.101.302.602,00	89,28	647.067.362,00	2.454.235.240,00

Dari tabel di atas diketahui realisasi Belanja Bagi Hasil Retribusi Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar Rp647.067.362,00 atau 26,37% dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2022. Adapun daftar rincian realisasi Bagi Hasil Pajak di sajikan dalam lampiran 10.

7.e.1).c)(1).c) Bantuan Keuangan

Bantuan Keuangan merupakan Bantuan Keuangan ke Desa yang berupa Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD) dan Bantuan Keuangan Infrastruktur kepada Desa serta Bantuan Keuangan untuk Pemilihan Kepala Desa. Realisasi Bantuan Keuangan tersebut selama Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp552.368.102.900,00 atau sebesar 99,82% dari anggaran sebesar Rp553.352.608.679,00. Adapun realisasi Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel e. 35 Realisasi Bantuan Keuangan TA 2023 dan TA 2022

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Naik/Turun	Realisasi 2022
Alokasi Dana Desa (ADD)	139.108.298.000,00	139.108.298.000,00	100,00	0,00	139.108.298.000,00
Dana Desa (DD)	294.800.336.000,00	294.196.059.900,00	99,80	40.830.008.100,00	253.366.051.800,00
Bantuan Keuangan Infrastruktur ke Desa	119.443.974.679,00	119.063.745.000,00	99,68	-11.686.497.800,00	130.750.242.800,00
Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa	0,00	0,00	0,00	-2.599.667.600,00	2.599.667.600,00
Jumlah	553.352.608.679,00	552.368.102.900,00	99,82	26.543.842.700,00	525.824.260.200,00

Dari tabel di atas diketahui bahwa realisasi Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2023 lebih tinggi sebesar Rp26.543.842.700,00 atau 5,05% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022. Dari tabel di atas juga diketahui bahwa realisasi Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2023 terbesar adalah Transfer Dana Desa sebesar Rp294.196.059.900,00 atau 53,26% dari total Bantuan Keuangan, kemudian Alokasi Dana Desa sebesar Rp139.108.298.000,00 atau 25,18%. Secara total Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan realisasi pada Tahun Anggaran 2022.

Bantuan Keuangan Infrastruktur ke Desa pada Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp119.063.745.000,00 atau 99,68% dari anggaran sebesar Rp119.443.974.679,00, sedangkan pada Tahun Anggaran 2022 terealisasi sebesar Rp130.750.242.800,00, terdapat penurunan sebesar Rp11.686.497.800,00 atau 8,94%. Bantuan Keuangan Infrastruktur ke Desa ini digunakan untuk pembangunan jalan usaha tani rabat beton, jalan desa dan lingkungan rabat beton, pembangunan dan renovasi Balai Desa dan Kantor Desa, saluran drainase, gedung serbaguna dan beberapa pekerjaan yang berhubungan dengan infrastruktur desa.

Disisi lain, Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa pada Tahun Anggaran 2023 adalah nihil, sedangkan pada Tahun Anggaran 2022 terdapat realisasi sebesar Rp2.599.667.600,00, hal ini karena pada Tahun 2023 tidak ada Pemilihan Kepala Desa. Pemilihan Kepala Desa secara serentak diselenggarakan pada Tahun 2022.

Berikut disajikan rincian realisasi Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022.

Tabel e. 36 Rincian Realisasi Bantuan Keuangan TA 2023 dan TA 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Naik/Turun	Realisasi 2022
1	Alokasi Dana Desa (ADD)					
	Kecamatan Sooko	7.090.513.000,00	7.090.513.000,00	100,00	0,00	7.090.513.000,00
	Kecamatan Trowulan	7.793.908.000,00	7.793.908.000,00	100,00	0,00	7.793.908.000,00
	Kecamatan Puri	7.511.764.000,00	7.511.764.000,00	100,00	0,00	7.511.764.000,00
	Kecamatan Bangsal	6.955.893.000,00	6.955.893.000,00	100,00	0,00	6.955.893.000,00
	Kecamatan Gedeg	6.313.868.000,00	6.313.868.000,00	100,00	0,00	6.313.868.000,00
	Kecamatan Kemlagi	9.382.864.000,00	9.382.864.000,00	100,00	0,00	9.382.864.000,00
	Kecamatan Jetis	7.675.971.000,00	7.675.971.000,00	100,00	0,00	7.675.971.000,00
	Kecamatan Dawarblandong	9.490.008.000,00	9.490.008.000,00	100,00	0,00	9.490.008.000,00
	Kecamatan Mojosari	6.486.882.000,00	6.486.882.000,00	100,00	0,00	6.486.882.000,00
	Kecamatan Pungging	9.055.421.000,00	9.055.421.000,00	100,00	0,00	9.055.421.000,00
	Kecamatan Ngoro	9.276.606.000,00	9.276.606.000,00	100,00	0,00	9.276.606.000,00
	Kecamatan Kutorejo	8.113.510.000,00	8.113.510.000,00	100,00	0,00	8.113.510.000,00
	Kecamatan Dlanggu	7.434.861.000,00	7.434.861.000,00	100,00	0,00	7.434.861.000,00
	Kecamatan Gondang	7.795.227.000,00	7.795.227.000,00	100,00	0,00	7.795.227.000,00
	Kecamatan Jatirejo	8.321.062.000,00	8.321.062.000,00	100,00	0,00	8.321.062.000,00
	Kecamatan Trawas	5.723.441.000,00	5.723.441.000,00	100,00	0,00	5.723.441.000,00
	Kecamatan Pacet	9.239.573.000,00	9.239.573.000,00	100,00	0,00	9.239.573.000,00
	Kecamatan Mojoanyar	5.446.926.000,00	5.446.926.000,00	100,00	0,00	5.446.926.000,00
	Jumlah	139.108.298.000,00	139.108.298.000,00	100,00	0,00	139.108.298.000,00
2	Dana Desa (DD)					
	Kecamatan Sooko	14.945.526.000,00	14.945.526.000,00	100,00	1.462.324.000,00	13.483.202.000,00
	Kecamatan Trowulan	18.923.403.000,00	18.923.403.000,00	100,00	4.495.162.000,00	14.428.241.000,00
	Kecamatan Puri	16.072.295.000,00	16.072.295.000,00	100,00	1.310.595.000,00	14.761.700.000,00
	Kecamatan Bangsal	15.137.793.000,00	15.137.793.000,00	100,00	1.922.116.000,00	13.215.677.000,00
	Kecamatan Gedeg	14.133.858.000,00	14.133.858.000,00	100,00	1.467.434.000,00	12.666.424.000,00
	Kecamatan Kemlagi	20.188.406.000,00	20.188.406.000,00	100,00	3.012.242.000,00	17.176.164.000,00
	Kecamatan Jetis	17.145.000.000,00	17.145.000.000,00	100,00	2.289.350.000,00	14.855.650.000,00
	Kecamatan Dawarblandong	18.392.341.000,00	18.392.341.000,00	100,00	2.776.743.000,00	15.615.598.000,00
	Kecamatan Mojosari	13.414.532.000,00	13.414.532.000,00	100,00	1.541.675.000,00	11.872.857.000,00
	Kecamatan Pungging	18.268.784.000,00	18.268.784.000,00	100,00	1.650.725.000,00	16.618.059.000,00
	Kecamatan Ngoro	18.530.145.000,00	17.925.868.900,00	96,74	2.132.479.100,00	15.793.389.800,00
	Kecamatan Kutorejo	18.219.689.000,00	18.219.689.000,00	100,00	4.143.721.000,00	14.075.968.000,00
	Kecamatan Dlanggu	15.606.890.000,00	15.606.890.000,00	100,00	2.751.298.000,00	12.855.592.000,00
	Kecamatan Gondang	17.388.610.000,00	17.388.610.000,00	100,00	3.930.078.000,00	13.458.532.000,00
	Kecamatan Jatirejo	17.321.204.000,00	17.321.204.000,00	100,00	3.064.293.000,00	14.256.911.000,00
	Kecamatan Trawas	11.514.246.000,00	11.514.246.000,00	100,00	1.463.781.000,00	10.050.465.000,00
	Kecamatan Pacet	17.325.804.000,00	17.325.804.000,00	100,00	732.368.000,00	16.593.436.000,00
	Kecamatan Mojoanyar	12.271.810.000,00	12.271.810.000,00	100,00	683.624.000,00	11.588.186.000,00
	Jumlah	294.800.336.000,00	294.196.059.900,00	99,80	40.830.008.100,00	253.366.051.800,00
3	Bantuan Keuangan Infrastruktur ke Desa					
	Kecamatan Sooko	5.300.000.000,00	5.300.000.000,00	100,00	-400.000.000,00	5.700.000.000,00
	Kecamatan Trowulan	8.905.229.679,00	8.900.000.000,00	99,94	2.350.000.000,00	6.550.000.000,00
	Kecamatan Puri	5.190.000.000,00	5.190.000.000,00	100,00	-5.310.000.000,00	10.500.000.000,00
	Kecamatan Bangsal	5.600.000.000,00	5.600.000.000,00	100,00	300.000.000,00	5.300.000.000,00
	Kecamatan Gedeg	8.904.234.000,00	8.904.234.000,00	100,00	2.454.991.200,00	6.449.242.800,00
	Kecamatan Kemlagi	9.925.000.000,00	9.750.000.000,00	98,24	3.085.000.000,00	6.665.000.000,00
	Kecamatan Jetis	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	100,00	-5.800.000.000,00	9.300.000.000,00
	Kecamatan Dawarblandong	8.500.000.000,00	8.500.000.000,00	100,00	1.775.000.000,00	6.725.000.000,00
	Kecamatan Mojosari	8.380.000.000,00	8.380.000.000,00	100,00	-2.070.000.000,00	10.450.000.000,00
	Kecamatan Pungging	7.575.000.000,00	7.575.000.000,00	100,00	-925.000.000,00	8.500.000.000,00
	Kecamatan Ngoro	4.600.000.000,00	4.600.000.000,00	100,00	-2.550.000.000,00	7.150.000.000,00
	Kecamatan Kutorejo	6.140.000.000,00	6.140.000.000,00	100,00	65.000.000,00	6.075.000.000,00
	Kecamatan Dlanggu	7.600.000.000,00	7.450.000.000,00	98,03	904.000.000,00	6.546.000.000,00
	Kecamatan Gondang	7.639.511.000,00	7.639.511.000,00	100,00	1.859.511.000,00	5.780.000.000,00
	Kecamatan Jatirejo	7.160.000.000,00	7.160.000.000,00	100,00	2.235.000.000,00	4.925.000.000,00
	Kecamatan Trawas	2.550.000.000,00	2.550.000.000,00	100,00	-200.000.000,00	2.750.000.000,00
	Kecamatan Pacet	5.075.000.000,00	5.025.000.000,00	99,01	-4.975.000.000,00	10.000.000.000,00
	Kecamatan Mojoanyar	6.900.000.000,00	6.900.000.000,00	100,00	-4.485.000.000,00	11.385.000.000,00
	Jumlah	119.443.974.679,00	119.063.745.000,00	99,68	-11.686.497.800,00	130.750.242.800,00
4	Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa					
	Kecamatan Sooko	0,00	0,00	0,00	-52.745.200,00	52.745.200,00

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Naik/Turun	Realisasi 2022
	Kecamatan Trowulan	0,00	0,00	0,00	-349.430.300,00	349.430.300,00
	Kecamatan Puri	0,00	0,00	0,00	-178.790.000,00	178.790.000,00
	Kecamatan Bangsal	0,00	0,00	0,00	-171.580.800,00	171.580.800,00
	Kecamatan Gedeg	0,00	0,00	0,00	-191.011.200,00	191.011.200,00
	Kecamatan Jetis	0,00	0,00	0,00	-359.296.000,00	359.296.000,00
	Kecamatan Dawarblandong	0,00	0,00	0,00	-51.910.300,00	51.910.300,00
	Kecamatan Mojosari	0,00	0,00	0,00	-138.219.800,00	138.219.800,00
	Kecamatan Pungging	0,00	0,00	0,00	-268.352.600,00	268.352.600,00
	Kecamatan Ngoro	0,00	0,00	0,00	-210.778.200,00	210.778.200,00
	Kecamatan Kutorejo	0,00	0,00	0,00	-171.696.300,00	171.696.300,00
	Kecamatan Dlanggu	0,00	0,00	0,00	-139.001.900,00	139.001.900,00
	Kecamatan Gondang	0,00	0,00	0,00	-117.609.000,00	117.609.000,00
	Kecamatan Jatirejo	0,00	0,00	0,00	-26.216.500,00	26.216.500,00
	Kecamatan Mojoanyar	0,00	0,00	0,00	-173.029.500,00	173.029.500,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	-2.599.667.600,00	2.599.667.600,00
	Total	553.352.608.679,00	552.368.102.900,00	99,82	26.543.842.700,00	525.824.260.200,00

Adapun rincian Bantuan Keuangan berupa Alokasi Dana Desa, Dana Desa dan Bantuan Keuangan Infrastruktur untuk masing-masing Desa disajikan pada lampiran 11, 12 dan 13.

7.e.1).d) Pembiayaan

Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
355.235.454.985,00	355.235.454.984,97	509.848.964.026,90

Pembiayaan (*financing*), yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan berasal antara lain dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, Penerimaan Pinjaman dan Hasil Divestasi, sedangkan Pengeluaran Pembiayaan antara lain digunakan untuk Penyertaan Modal kepada BUMD, Pembayaran Kembali Pokok Pinjaman, dan Pembentukan Dana Cadangan. Berikut adalah realisasi Pembiayaan Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022:

Tabel e. 37 Realisasi Pembiayaan TA 2023 dan TA 2022

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Naik/Turun	Realisasi 2022
Penerimaan Pembiayaan	426.235.454.985,00	426.235.454.984,97	100,00	-83.613.509.041,93	509.848.964.026,90
Pengeluaran Pembiayaan	71.000.000.000,00	71.000.000.000,00	100,00	71.000.000.000,00	0,00
Jumlah	355.235.454.985,00	355.235.454.984,97	100,00	-12.613.509.041,93	509.848.964.026,90

7.e.1).d).(1) Penerimaan Pembiayaan

Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp426.235.454.984,97 atau sebesar 100% dari anggaran sebesar Rp426.235.454.985,00 yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Tahun Anggaran 2022, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel e. 38 Realisasi Penerimaan Pembiayaan TA 2023 dan TA 2022

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Naik/Turun	Realisasi 2022
Penggunaan SILPA	426.235.454.985,00	426.235.454.984,97	100,00	-83.613.509.041,93	509.848.964.026,90
Jumlah	426.235.454.985,00	426.235.454.984,97	100,00	-83.613.509.041,93	509.848.964.026,90

Dari tabel di atas diketahui Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2023 lebih rendah sebesar Rp83.613.509.041,93 atau turun 16,40% jika dibandingkan

dengan realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2022. Hal ini karena pada Tahun Anggaran 2023 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun sebelumnya lebih kecil.

7.e.1).d).(2) Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp71.000.000.000,00 atau 100% dari anggaran yang ditetapkan yang digunakan untuk Pembentukan Dana Cadangan dan Penyertaan Modal, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel e. 39 Realisasi Pengeluaran Pembiayaan TA 2023 dan TA 2022

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Naik/Turun	Realisasi 2022
Pembentukan Dana Cadangan	55.000.000.000,00	55.000.000.000,00	100,00	55.000.000.000,00	0,00
Penyertaan Modal Daerah	16.000.000.000,00	16.000.000.000,00	100,00	16.000.000.000,00	0,00
Jumlah	71.000.000.000,00	71.000.000.000,00	100,00	71.000.000.000,00	0,00

Dari selisih antara Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan menghasilkan Pembiayaan Netto sebesar Rp355.235.454.984,97 atau terealisasi 100% dari yang dianggarkan sebesar Rp355.235.454.985,00.

7.e.1).e) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
0,00	248.691.618.361,44	426.235.454.984,97

Realisasi perhitungan Surplus Anggaran dan Pembiayaan Netto tersebut, menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA). Pada periode Tahun 2023 SILPA sebesar Rp248.691.618.361,44 lebih rendah sebesar Rp177.543.836.623,53 atau 41,65% dari SiLPA Tahun Anggaran 2022 yang mencapai Rp426.235.454.984,97 dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel e. 40 Perhitungan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Pendapatan	2.607.873.973.959,00	2.608.549.958.903,54	100,03	2.537.235.424.067,77
Belanja	2.963.109.428.944,00	2.715.093.795.527,07	91,63	2.620.848.933.109,70
Surplus (Defisit)	-355.235.454.985,00	-106.543.836.623,53	29,99	-83.613.509.041,93
Pembiayaan Netto	355.235.454.985,00	355.235.454.984,97	100,00	509.848.964.026,90
SILPA	0,00	248.691.618.361,44	-	426.235.454.984,97

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp248.691.618.361,44 tersebut terdiri dari:

Tabel e. 41 Rincian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

(dalam rupiah)

Uraian	Jumlah Kas 2023 (Rp)	Jumlah Kas 2022 (Rp)
Kas di BUD	207.586.133.851,84	325.574.098.043,29
Kas di Bendahara Penerimaan	222.000,00	669.000,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di BLUD	37.899.919.116,53	100.244.367.669,61
Kas di Bendahara BOS	14.971.714,07	416.320.272,07
Kas di Bendahara Puskesmas	3.190.371.679,00	0,00
SILPA	248.691.618.361,44	426.235.454.984,97

Atas SILPA berupa Kas di BUD Tahun 2023 sebesar Rp207.586.133.851,84 tersebut, terdiri dari:

- DAU Earmark sebesar Rp51.577.850.113,00.
- DBHCT sebesar Rp5.142.425.147,00.
- DAK Non Fisik Rp5.796.298.223,00.
- BKK Provinsi sebesar Rp374.617.021,00.
- Dana BOS sebesar Rp40.660.548,00.
- SILPA Bebas sebesar Rp62.931.851.052,00.

7.e.2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih merupakan laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih Tahun Pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terjadi keadaan yang menyebabkan adanya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dan Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA). Saldo Anggaran Lebih (SAL) merupakan akumulasi SiLPA atau SiKPA tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan, setelah ditutup ditambah / dikurangi dengan koreksi pembukuan.

Adapun rincian perhitungan perubahan SAL Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

7.e.2).a) Saldo Anggaran Lebih Awal

Uraian	Saldo 31 Des 2023 (Rp)	Saldo 31 Des 2022 (Rp)	Naik/Turun
Saldo Anggaran Lebih Awal	426.235.454.984,97	509.866.214.060,90	-83.630.759.075,93

Nilai Saldo Anggaran Lebih Awal sebesar Rp426.235.454.984,97 merupakan Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun 2022. Saldo tersebut adalah penerimaan pembiayaan tahun berjalan, yang digunakan untuk menutup anggaran defisit tahun 2023.

7.e.2).b) Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Uraian	Saldo 31 Des 2023 (Rp)	Saldo 31 Des 2022 (Rp)	Naik/Turun
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	426.235.454.984,97	509.848.964.026,90	-83.613.509.041,93

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun 2023 adalah seluruh Saldo Anggaran Lebih Akhir tahun 2022. Saldo Anggaran Lebih tahun sebelumnya yang digunakan sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan adalah sebesar Rp426.235.454.984,97.

7.e.2).c) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Uraian	Saldo 31 Des 2023 (Rp)	Saldo 31 Des 2022 (Rp)	Naik/Turun
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	248.691.618.361,44	426.235.454.984,97	-177.543.836.623,53

SiLPA adalah selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan atau selisih lebih antara realisasi pendapatan LRA dan penerimaan pembiayaan transfer dengan belanja dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan. Berdasarkan perhitungan dalam Laporan Realisasi Anggaran, nilai SiLPA pada akhir tahun 2023 adalah sebesar Rp248.691.618.361,44.

7.e.2).d) Lain-lain

Uraian	Saldo 31 Des 2022 (Rp)	Saldo 31 Des 2022 (Rp)	Naik/Turun
Lain-lain	0,00	-17.250.034,00	17.250.0354,00

Lain-lain pada Tahun Anggaran 2023 adalah nihil.

7.e.2).e) Saldo Anggaran Lebih Akhir

Uraian	Saldo 31 Des 2023 (Rp)	Saldo 31 Des 2022 (Rp)	Naik/Turun
Saldo Anggaran Lebih Akhir	248.691.618.361,44	426.235.454.984,97	-177.543.836.623,53

Saldo Anggaran Lebih Akhir merupakan akumulasi SiLPA tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan setelah ditutup ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan. Nilai Akumulatif Saldo Anggaran Lebih Akhir pada tahun 2023 adalah sebesar Rp248.691.618.361,44. Saldo Anggaran Lebih (SAL) fisik terdiri dari:

Kas di BUD	207.586.133.851,84
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00
Kas di Bendahara Penerimaan	222.000,00
Kas di BLUD	37.899.919.116,53
Kas di Bendahara BOS	14.971.714,07
Kas di Bendahara Puskesmas	3.190.371.679,00
SILPA	248.691.618.361,44

7.e.3) Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Penjelasan mengenai pos-pos dalam Neraca Pemerintah Kabupaten Mojokerto per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

7.e.3).a) Aset

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
5.975.171.836.786,88	6.089.920.320.337,08

Aset Pemerintah Kabupaten Mojokerto per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp5.975.171.836.786,88 yang terdiri dari Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan dan Aset Lainnya. Rincian Aset Pemerintah Kabupaten Mojokerto dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel e. 42 Rincian Aset Pemerintah Kabupaten Mojokerto

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik/Turun
Aset Lancar	353.435.864.041,36	549.018.125.659,23	-195.582.261.617,87
Investasi Jangka Panjang	109.646.129.252,80	90.117.317.571,27	19.528.811.681,53
Aset Tetap	5.425.516.507.741,47	5.425.896.293.253,87	-379.785.512,40
Dana Cadangan	55.000.000.000,00	0,00	55.000.000.000,00
Aset Lainnya	31.573.335.751,25	24.888.583.852,71	6.684.751.898,54
Jumlah	5.975.171.836.786,88	6.089.920.320.337,08	-114.748.483.550,20

Dari tabel di atas diketahui bahwa Nilai Aset Pemerintah Kabupaten Mojokerto per 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar Rp114.748.483.550,20 atau 1,88% jika dibandingkan dengan posisi Aset per 31 Desember 2022. Penurunan tersebut terjadi pada komponen Aset Lancar dan Aset Tetap, sedangkan Investasi Jangka Panjang dan Aset Lainnya mengalami kenaikan, namun kenaikannya tidak sebesar penurunan Aset Lancar dan Aset Tetap.

7.e.3).a).(1) Aset Lancar

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
353.435.864.041,36	549.018.125.659,23

Aset lancar Pemerintah Kabupaten Mojokerto per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp353.435.864.041,36 terdiri dari Kas, Piutang dan Persediaan. Rincian Aset Lancar Pemerintah Kabupaten Mojokerto per 31 Desember 2023 dan 2022 dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel e. 43 Aset Lancar Pemerintah Kabupaten Mojokerto
Per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik/Turun
Kas	248.710.998.448,44	426.247.969.951,97	-177.536.971.503,53
Piutang Netto	61.639.300.890,28	73.290.126.041,43	-11.650.825.151,15
Persediaan	43.085.564.702,64	49.480.029.665,83	-6.394.464.963,19
Jumlah	353.435.864.041,36	549.018.125.659,23	-195.582.261.617,87

Jumlah saldo Kas per 31 Desember 2023 terdiri dari:

- Kas di Kas Daerah		
Rekening Bank Jatim Nomor 0161008088	Rp	
Rekening Bank Jatim Nomor 0161008099	Rp	207.586.133.851,84
- Kas di Bendahara Pengeuaran	Rp	0,00
- Kas di Bendahara Penerimaan	Rp	222.000,00
- Kas di BLUD	Rp	37.899.919.116,53
- Kas Dana BOSP	Rp	14.971.714,07
- Kas Dana BOK Puskesmas	Rp	3.190.371.679,00
- Kas Lainnya	Rp	19.380.087,00
Jumlah	Rp	248.710.998.448,44

7.e.3).a).(1).(a) Kas di Kas Daerah

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Uraian	Saldo 31 Des 2023 (Rp)	Saldo 31 Des 2022 (Rp)	Naik/Turun
Kas di Kas Daerah	207.586.133.851,84	325.574.098.043,29	-117.987.964.191,45

Rincian Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel e. 44 Rincian Kas di Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Mojokerto
Per 31 Desember 2023 dan 2022**

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Rekening Bank Jatim Nomor 0161008088	0,00	0,00
Rekening Bank Jatim Nomor 0161008099	207.586.133.851,84	325.574.098.043,29
Jumlah	207.586.133.851,84	325.574.098.043,29

Dari tabel di atas diketahui bahwa Jumlah kas di Bendahara Umum Daerah per 31 Desember 2023 sesuai catatan pembukuan sebesar Rp207.586.133.851,84 yang terletak di rekening Giro Bank Jatim Nomor 0161008099, dan menurut rekening koran adalah sebesar Rp207.586.133.851,84. Tidak terdapat selisih antara catatan pembukuan dengan rekening koran.

7.e.3).a).(1).(b) Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Uraian	Saldo 31 Des 2023 (Rp)	Saldo 31 Des 2022 (Rp)	Naik/Turun
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	0,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 adalah nihil.

7.e.3).a).(1).(c) Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Uraian	Saldo 31 Des 2023 (Rp)	Saldo 31 Des 2022 (Rp)	Naik/Turun
Kas di Bendahara Penerimaan	222.000,00	669.000,00	-447.000,00

Rincian Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel e. 45 Kas di Bendahara Penerimaan

(dalam rupiah)

Uraian	Saldo 31 Des 2022	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo 31 Des 2023
Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Perhubungan	669.000,00	0,00	669.000,00	0,00
Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	0,00	222.000,00	0,00	222.000,00
Jumlah	669.000,00	222.000,00	669.000,00	222.000,00

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan Penerimaan Pendapatan OPD Tahun Anggaran 2023 yang sampai dengan akhir tahun pelaporan belum di setor ke Rekening Kas Umum Daerah. Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp222.000,00 yang berasal dari Pendapatan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga.

7.e.3).a).(1).(d) Kas di Badan Layanan Umum Daerah

Saldo Kas di Badan Layanan Umum Daerah per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Uraian	Saldo 31 Des 2023 (Rp)	Saldo 31 Des 2022 (Rp)	Naik/Turun
Kas Di Badan Layanan Umum Daerah	37.899.919.116,53	100.244.367.669,61	-62.344.448.553,08

Rincian Saldo Kas di Badan Layanan Umum Daerah per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel e. 46 Kas di Badan Layanan Umum Daerah

(dalam rupiah)

Uraian	Saldo 31 Des 2022	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo 31 Des 2023
RSUD Prof. Dr. Soekandar	74.733.236.908,06	128.857.956.697,36	180.319.006.085,00	23.272.187.520,42
RSUD RA. Basoeni	17.411.197.536,00	59.743.507.151,00	67.799.797.063,00	9.354.907.624,00
27 Puskesmas	8.099.933.225,55	47.953.748.743,44	50.780.857.996,88	5.272.823.972,11
Jumlah	100.244.367.669,61	236.555.212.591,80	298.899.661.144,88	37.899.919.116,53

Jumlah Kas di Badan Layanan Umum Daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp37.899.919.116,53 yang terdiri dari Kas di Badan Layanan Umum Daerah pada RSUD Prof. Dr. Soekandar sebesar Rp23.272.187.520,42, Kas di Badan Layanan Umum Daerah pada RSUD RA. Basoeni sebesar Rp9.354.907.624,00 dan Kas di Badan Layanan Umum Daerah pada 27 (dua puluh tujuh) Puskesmas sebesar Rp5.272.823.972,11 dengan penjelasan sebagai berikut:

(1) RSUD Prof. Dr. Soekandar

Saldo Kas di Badan Layanan Umum Daerah pada RSUD Prof. Dr. Soekandar adalah sebesar Rp23.272.187.520,42, terdiri dari:

- Bank Jatim nomor rekening 0481001889 sebesar Rp3.472.086.615,61.
- Bank BNI rekening 5915915913 sebesar Rp19.671.007.019,81.
- Kas di Bendahara Penerimaan BLUD yang merupakan Pendapatan BLUD yang belum di setor ke rekening BLUD sebesar Rp129.093.885,00.

(2) RSUD RA Basoeni

Saldo Kas di Badan Layanan Umum Daerah di RSUD RA Basoeni per 31 Desember 2023 sebesar Rp9.354.907.624,00, terdiri dari:

- Bank BNI nomor rekening 3613417778 sebesar Rp9.281.817.992,00.
- Kas di Bendahara Penerimaan BLUD yang merupakan Pendapatan BLUD yang belum di setor ke rekening BLUD sebesar Rp73.089.632,00.

(3) 27 (dua puluh tujuh) Puskesmas

Pada tahun 2021, kedua puluh tujuh Puskesmas di Pemerintah Kabupaten Mojokerto telah berubah menjadi Badan Layanan Umum Daerah sesuai Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 188.45/515/HK/416-012/2020 tentang Penerapan Badan Layanan Umum Daerah pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto tanggal 30 Desember 2020. Saldo Kas di Badan Layanan Umum Daerah pada 27 (dua puluh tujuh) Puskesmas per 31 Desember 2023 sebesar Rp5.272.823.972,11 yang semuanya terletak di Bank Jatim.

Rincian Saldo Kas di Badan Layanan Umum Daerah pada 27 (dua puluh tujuh) Puskesmas per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel e. 47 Kas di Badan Layanan Umum Daerah pada Puskesmas

(dalam rupiah)

No		Saldo 31 Des 2022	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo 31 Des 2023
1	Sooko	862.576.005,75	862.576.005,75	2.786.396.442,19	2.816.862.494,00
2	Trowulan	126.179.221,20	126.179.221,20	1.715.516.931,72	1.835.890.678,00
3	Tawang Sari	13.556.941,51	13.556.941,51	1.667.871.983,63	1.413.775.526,00
4	Puri	161.093.918,90	161.093.918,90	2.970.041.317,76	3.049.717.544,00
5	Gayaman	340.805.602,76	340.805.602,76	1.487.070.359,04	1.516.475.786,00
6	Bangsalsari	604.190.400,67	604.190.400,67	2.328.621.001,38	2.769.711.434,00

No		Saldo 31 Des 2022	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo 31 Des 2023
7	Gedeg	254.548.329,68	254.548.329,68	1.247.174.050,54	1.340.635.341,00
8	Lespadangan	49.809.945,12	49.809.945,12	921.589.634,07	962.116.734,00
9	Kemlagi	63.227.258,93	63.227.258,93	1.657.712.743,81	1.617.459.573,00
10	Kedungsari	191.078.847,65	191.078.847,65	888.686.485,58	1.021.214.385,00
11	Dawarblandong	506.258.388,98	506.258.388,98	3.141.466.168,58	3.321.036.120,00
12	Kupang	127.147.209,70	127.147.209,70	1.346.326.588,14	1.275.412.141,00
13	Jetis	26.493.173,70	26.493.173,70	1.163.516.141,17	1.157.720.474,00
14	Mojosari	258.853.948,93	258.853.948,93	1.722.034.159,55	1.677.070.976,00
15	Modopuro	157.630.394,30	157.630.394,30	1.320.236.374,98	1.314.540.983,00
16	Pungging	321.843.097,25	321.843.097,25	2.097.891.824,82	2.158.152.985,00
17	Watukenongo	48.497.629,48	48.497.629,48	885.543.584,31	872.929.578,00
18	Ngoro	219.398.129,61	219.398.129,61	1.743.948.324,10	1.750.007.443,00
19	Manduro	306.030.060,53	306.030.060,53	1.361.932.191,53	1.468.902.771,00
20	Dlanggu	799.925.331,35	799.925.331,35	2.686.391.432,69	3.372.988.162,00
21	Kutorejo	335.475.636,37	335.475.636,37	1.773.576.983,05	1.966.816.651,00
22	Pesanggrahan	350.667.397,29	350.667.397,29	1.378.360.160,57	1.577.720.641,00
23	Pacet	444.442.733,80	444.442.733,80	1.766.628.934,66	1.981.857.063,00
24	Pandan	64.003.098,79	64.003.098,79	919.584.338,41	936.966.714,00
25	Trawas	168.116.130,19	168.116.130,19	1.873.239.842,24	1.871.344.048,00
26	Gondang	636.343.376,73	636.343.376,73	2.249.899.514,31	2.458.706.370,88
27	Jatirejo	661.741.016,38	661.741.016,38	2.852.491.230,61	3.274.825.381,00
	Jumlah	8.099.933.225,55	8.099.933.225,55	47.953.748.743,44	50.780.857.996,88

7.e.3).a).(1).(e) Kas Dana BOSP

Saldo Kas Dana BOSP per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Uraian	Saldo 31 Des 2023 (Rp)	Saldo 31 Des 2022 (Rp)	Naik/Turun
Kas Dana BOS	14.971.714,07	416.320.272,07	-401.348.558,00

Rincian Saldo Kas Dana BOSP per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel e. 48 Kas Dana BOSP

(dalam rupiah)

Uraian	Saldo 31 Des 2022	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo 31 Des 2023
385 SD Negeri	255.272.666,74	53.878.179.961,00	54.127.213.928,74	6.238.699,00
41 SMP Negeri	161.047.605,33	28.836.894.241,00	28.989.208.831,33	8.733.015,00
Jumlah	416.320.272,07	82.715.074.202,00	83.116.422.760,07	14.971.714,00

Saldo Kas Dana BOSP per 31 Desember 2023 sebesar Rp14.971.714,07.

7.e.3).a).(1).(f) Kas Dana BOK Puskesmas

Saldo Kas Dana BOK Puskesmas per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Uraian	Saldo 31 Des 2023 (Rp)	Saldo 31 Des 2022 (Rp)	Naik/Turun
Kas Dana BOK Puskesmas	3.190.371.679,00	0,00	3.190.371.679,00

Rincian Saldo Kas Dana BOK Puskesmas per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel e. 49 Kas Dana BOK Puskesmas

(dalam rupiah)

No		Saldo 31 Des 2022	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo 31 Des 2023
1	Sooko	0,00	935.392.000,00	662.653.777,00	272.738.223,00
2	Trowulan	0,00	587.518.000,00	473.665.370,00	113.852.630,00
3	Tawang Sari	0,00	515.001.000,00	421.560.766,00	93.440.234,00
4	Puri	0,00	905.680.000,00	807.561.899,00	98.118.101,00
5	Gayaman	0,00	715.164.000,00	460.824.696,00	254.339.304,00
6	Bangsalsari	0,00	835.788.000,00	666.428.410,00	169.359.590,00
7	Gedeg	0,00	601.059.000,00	487.889.056,00	113.169.944,00
8	Lespadangan	0,00	388.632.000,00	351.242.042,00	37.389.958,00
9	Kemlagi	0,00	648.998.000,00	551.087.162,00	97.910.838,00
10	Kedungsari	0,00	470.096.000,00	379.899.514,00	90.196.486,00
11	Dawarblandong	0,00	953.968.000,00	902.817.934,00	51.150.066,00
12	Kupang	0,00	660.737.000,00	572.351.941,00	88.385.059,00
13	Jetis	0,00	515.948.000,00	466.173.626,00	49.774.374,00
14	Mojosari	0,00	686.411.000,00	545.775.654,00	140.635.346,00
15	Modopuro	0,00	555.828.000,00	465.689.462,00	90.138.538,00
16	Pungging	0,00	712.087.000,00	582.101.277,00	129.985.723,00
17	Watukenongo	0,00	446.482.000,00	334.880.106,00	111.601.894,00
18	Ngoro	0,00	741.506.000,00	624.873.113,00	116.632.887,00
19	Manduro	0,00	474.800.000,00	410.926.758,00	63.873.242,00
20	Dianggu	0,00	844.894.000,00	767.875.684,00	77.018.316,00
21	Kutorejo	0,00	565.851.000,00	456.768.297,00	109.082.703,00
22	Pesanggrahan	0,00	547.003.000,00	511.885.519,00	35.117.481,00
23	Pacet	0,00	649.779.000,00	504.483.602,00	145.295.398,00
24	Pandan	0,00	549.954.000,00	482.955.156,00	66.998.844,00
25	Trawas	0,00	647.675.000,00	636.952.800,00	10.722.200,00
26	Gondang	0,00	815.942.000,00	619.220.650,00	196.721.350,00
27	Jatirejo	0,00	895.240.000,00	528.517.050,00	366.722.950,00
	Jumlah	0,00	17.867.433.000,00	14.677.061.321,00	3.190.371.679,00

7.e.3).a).(1).(g) Kas Lainnya

Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Uraian	Saldo 31 Des 2023 (Rp)	Saldo 31 Des 2022 (Rp)	Naik/Turun
Kas Lainnya	19.380.087,00	12.514.967,00	6.865.120,00

Kas Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp19.380.087,00 merupakan Utang Perhitungan Pihak Ketiga atas Pajak yang telah dipungut oleh Bendahara Pengeluaran BOSP yang sampai 31 Desember 2023 belum disetorkan ke Kas Negara.

7.e.3).a).(1).(h) Piutang Pajak

Saldo Piutang Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Mojokerto per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Naik/Turun
Piutang Pajak	112.141.919.028,55	107.932.383.073,84	4.209.535.954,71

Saldo Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2023 naik sebesar Rp4.209.535.954,71 atau 3,90% dari saldo Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2022. Kenaikan ini karena timbulnya Piutang Pajak Daerah atas ketetapan Tahun 2023, dan yang terbesar adalah Piutang Pajak PBB P2. Adapun rincian saldo Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel e. 50 Piutang Pajak

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2022	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo 31 Desember 2023
1	Pajak Hotel	149.881.521,00	48.346.345,00	114.961.462,00	83.266.404,00
2	Pajak Restoran	515.440.827,31	72.012.606,00	190.573.027,00	396.880.406,31
3	Pajak Reklame	865.950.026,08	170.798.854,00	140.928.170,00	895.820.710,08
4	PPJ Non PLN	59.474.837,00	0,00	42.708.595,00	16.766.242,00
5	Pajak Air Tanah	961.070.723,65	321.500.159,00	933.350.835,29	349.220.047,36
6	PBB – P2	92.278.805.190,00	13.400.793.781,00	10.536.524.547,00	95.143.074.424,00
7	Pajak Minerba	13.025.061.060,80	3.826.890.500,00	1.668.894.000,00	15.183.057.560,80
8	Pajak Hiburan	73.687.637,00	48.360.020,00	58.543.564,00	63.504.093,00
9	Pajak Parkir	3.011.251,00	8.104.890,00	787.000,00	10.329.141,00
	Jumlah	107.932.383.073,84	17.896.807.155,00	13.687.271.200,29	112.141.919.028,55

Saldo Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2022 sebesar Rp107.932.383.073,84. Mutasi tambah atau penambahan sebesar Rp17.896.807.155,00 karena:

- (1) Surat Ketetapan atas Pajak Hotel Tahun 2023 yang belum dibayar sebesar Rp48.346.345,00.
- (2) Surat Ketetapan atas Pajak Restoran Tahun 2023 yang belum dibayar dengan nilai sebesar Rp72.012.606,00.
- (3) Surat Ketetapan atas Pajak Reklame Tahun 2023 yang belum dibayar dengan nilai sebesar Rp170.798.854,00.
- (4) Surat Ketetapan atas Pajak Air Tanah Tahun 2023 yang belum dibayar dengan nilai sebesar Rp321.500.159,00.
- (5) Pajak Bumi dan Bangunan PBB-P2 sebesar Rp13.400.793.781,00, dengan rincian:
 - Surat Ketetapan atas Pajak Bumi dan Bangunan PBB-P2 Tahun 2023 yang belum dibayar dengan nilai sebesar Rp13.382.063.714,00.
 - Pengakuan kembali Piutang Pajak PBB P2 yang telah di hapus sebesar Rp18.730.067,00.
- (6) Surat Ketetapan atas Pajak Mineral dan Batubara Tahun 2023 yang belum dibayar dengan nilai sebesar Rp3.826.890.500,00.
- (7) Surat Ketetapan atas Pajak Hiburan Tahun 2023 yang belum dibayar dengan nilai sebesar Rp48.360.020,00.
- (8) Surat Ketetapan atas Pajak Parkir Tahun 2023 yang belum dibayar dengan nilai sebesar Rp8.104.890,00.

Mutasi kurang atau pengurangan piutang pajak daerah sebesar Rp13.687.271.200,29 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- (1) Piutang Pajak Hotel sebesar Rp114.961.462,00, terdiri dari:
 - Realisasi Pembayaran Piutang Pajak Hotel sebesar Rp91.077.345,00.
 - Reklasifikasi ke Aset Lain-lain karena sedang dalam proses usulan penghapusan Piutang Pajak Hotel sebesar Rp23.884.117,00.
- (2) Piutang Pajak Restoran sebesar Rp190.573.027,00, dengan rincian:
 - Realisasi Pembayaran Piutang Pajak Restoran sebesar Rp169.719.477,00.
 - Reklasifikasi ke Aset Lain-lain karena sedang dalam proses usulan penghapusan Piutang Pajak Restoran sebesar Rp20.853.550,00.
- (3) Piutang Pajak Reklame sebesar Rp140.928.170,00, dengan rincian:
 - Realisasi Pembayaran Piutang Pajak Reklame sebesar Rp118.032.170,00.
 - Pembatalan Ketetapan atas Piutang Pajak Reklame sebesar Rp22.896.000,00 sesuai Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto

Nomor 188/1107/416-202/2023 tentang Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Reklame Tahun 2021.

- (4) Piutang Pajak Penerangan Jalan non PLN sebesar Rp42.708.595,00, dengan rincian:
 - Realisasi Pembayaran Piutang Pajak Penerangan Jalan non PLN sebesar Rp1.575.007,00.
 - Pembatalan atas Piutang Pajak Penerangan Jalan non PLN sesuai SPTPD Pajak Penerangan Jalan non PLN Tahun 2022 sebesar Rp41.133.588,00 dalam rangka melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 80/PUU-XV/2017 tanggal 13 desember 2018 atas Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (5) Piutang Pajak Air Tanah sebesar Rp933.350.835,29, dengan rincian:
 - Realisasi Pembayaran Piutang Pajak Air Tanah sebesar Rp427.421.732,00.
 - Reklasifikasi ke Aset Lain-lain karena sedang dalam proses usulan penghapusan Piutang Pajak Air Tanah sebesar Rp423.751.009,89.
 - Pembatalan Ketetapan atas Piutang Pajak Air Tanah sebesar Rp82.178.093,40 sesuai Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 188/820/416-202/2023 tentang Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Air Tanah Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2016.
- (6) Piutang Pajak PBB-P2 sebesar Rp10.536.524.547,00, yang terdiri dari:
 - Pengurangan karena realisasi pembayaran piutang pajak PBB-P2 untuk Tahun Ketetapan 2013 sampai dengan tahun 2022 sebesar Rp9.941.437.655,00.
 - Pengurangan karena realisasi pembayaran pajak yang telah dihapus sebesar Rp18.730.067,00.
 - Reklasifikasi ke Aset Lain-lain karena sedang dalam proses usulan penghapusan Piutang Pajak PBB P2 sebesar Rp182.865.297,00.
 - Pembatalan Ketetapan atas Piutang Pajak PBB P2 sebesar Rp118.307.960,00 sesuai Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 188/1140/416-202/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 188/900/416-202/2023 tentang Pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2022.
 - Pembatalan Ketetapan atas Piutang Pajak PBB P2 sebesar Rp275.183.568,00 sesuai Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 188/1141/416-202/2023 tentang Pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2022.
- (7) Realisasi pembayaran Piutang Pajak Minerba sebesar Rp1.668.894.000,00.
- (8) Realisasi pembayaran Piutang Pajak Hiburan sebesar Rp58.542.564,00.
- (9) Realisasi pembayaran Piutang Pajak Parkir sebesar Rp787.000,00.

Atas mutasi tambah dan mutasi kurang Piutang Pajak, diperoleh saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2023 sebesar Rp112.141.919.028,55.

7.e.3).a).(1).(i) Piutang Retribusi

Saldo Piutang Retribusi Pemerintah Kabupaten Mojokerto per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Naik/Turun
Piutang Retribusi	2.112.690.213,66	3.263.695.213,66	-1.151.005.000,00

Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp2.112.690.213,66, adapun rincian saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel e. 51 Piutang Retribusi

(dalam rupiah)

SKPD	Uraian	Saldo 31 Des 2022	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo 31 Des 2023
DPRKP2	Piutang Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir Wana Wisata Padusan	31.402.800,00	17.819.600,00	31.402.800,00	17.819.600,00
	Piutang Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir Dlundung	15.778.000,00	9.727.200,00	15.778.000,00	9.727.200,00
Diskominfo	Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	994.115.913,66	144.932.000,00	102.978.000,00	1.036.069.913,66
Disparpora	Piutang Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi Wana Wisata Padusan	1.330.216.000,00	321.043.000,00	1.330.216.000,00	321.043.000,00
	Piutang Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi Dlundung	513.458.000,00	144.768.000,00	513.458.000,00	144.768.000,00
Disperindag	Piutang Retribusi Pasar Raya Mojosari	140.991.500,00	138.315.000,00	63.979.500,00	215.327.000,00
	Piutang Retribusi Pugeran	130.702.000,00	56.838.000,00	4.895.000,00	182.645.000,00
	Piutang Retribusi Kedungmaling	107.031.000,00	47.700.000,00	4.878.000,00	149.853.000,00
	Pasar Pacet	0,00	35.437.500,00	0,00	35.437.500,00
	Jumlah	3.263.695.213,66	916.580.300,00	2.067.585.300,00	2.112.690.213,66

Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp3.263.695.213,66. Mutasi tambah atau penambahan sebesar Rp916.580.300,00 terdiri dari:

- (1) Piutang Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan sebesar Rp27.546.800,00 terdiri dari:
 - Piutang Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir Wana Wisata Padusan tahun 2023 sebesar Rp17.819.600,00.
 - Piutang Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir Dlundung tahun 2023 sebesar Rp9.727.200,00.
- (2) Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi tahun 2023 sebesar Rp144.932.000,00.
- (3) Piutang Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olah Raga pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga sebesar Rp465.811.000,00 terdiri dari:
 - Piutang Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi Wana Wisata Padusan Tahun 2023 sebesar Rp321.043.000,00.

- Piutang Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi Dlundung Tahun 2023 sebesar Rp144.768.000,00.
- (4) Piutang Retribusi Pelayanan Pasar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp278.290.500,00 terdiri dari:
- Piutang Retribusi Pelayanan Pasar Raya Mojosari atas SKRD Tahun 2023 sebesar Rp138.315.000,00.
 - Piutang Retribusi Pelayanan Pasar Pugeran atas SKRD Tahun 2023 sebesar Rp56.838.000,00.
 - Piutang Retribusi Pelayanan Pasar Kedungmaling atas SKRD Tahun 2023 sebesar Rp47.700.000,00.
 - Piutang Retribusi Pelayanan Pasar Pacet sebesar Rp35.437.500,00 yang terdiri dari Piutang Retribusi Pelayanan Pasar atas SKRD Tahun 2023 sebesar Rp19.162.500,00 dan koreksi kurang saji Piutang Retribusi Pelayanan Pasar sebesar Rp16.275.000,00.

Sedangkan mutasi kurang atau pengurangan sebesar Rp2.067.585.300,00 karena adanya realisasi pembayaran Piutang Retribusi di Tahun 2023 dan koreksi piutang dengan rincian:

- (1) Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan sebesar Rp47.180.800,00 terdiri dari:
- Realisasi pembayaran Piutang Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir Wana Wisata Padusan Tahun 2022 sebesar Rp31.402.800,00.
 - Realisasi pembayaran Piutang Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir Dlundung tahun 2022 sebesar Rp15.778.000,00.
- (2) Realisasi pembayaran Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp102.978.000,00.
- (3) Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga sebesar Rp1.843.674.000,00 terdiri dari:
- Realisasi pembayaran Piutang Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi Wana Wisata Padusan sebesar Rp1.236.393.200,00.
 - Realisasi pembayaran Piutang Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi Dlundung sebesar Rp488.568.800,00.
 - Koreksi lebih saji Piutang Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi Wana Wisata Padusan sebesar Rp60.822.800,00.
 - Koreksi lebih saji Piutang Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi Dlundung sebesar Rp24.889.200,00.
- (4) Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp73.752.500,00 terdiri dari:
- Realisasi pembayaran Piutang Retribusi Pelayanan Pasar Raya Mojosari sebesar Rp63.979.500,00.
 - Koreksi lebih saji Piutang Retribusi Pelayanan Pasar Pugeran sebesar Rp4.895.000,00
 - Realisasi pembayaran Piutang Retribusi Pelayanan Pasar Kedungmaling sebesar Rp4.878.000,00.

Dari penjelasan tersebut diperoleh saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.112.690.213,66.

7.e.3).a).(1).(j) Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Naik/Turun
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	16.004.254.059,00	10.874.267.771,64	5.129.986.287,36

Piutang Lain-lain PAD yang Sah merupakan Piutang pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Prof. Dr. Soekandar, RSUD RA Basoeni dan 27 (dua puluh tujuh) Puskesmas di Kabupaten Mojokerto. Dalam proses konsolidasi, terdapat saldo piutang Lain-Lain PAD yang Sah yang dieliminasi karena merupakan piutang terhadap Dinas Kesehatan yakni SPM Kabupaten Mojokerto, Jampersal dan Visum. SPM Kabupaten Mojokerto merupakan piutang atas pelayanan terhadap pasien dengan Surat Pernyataan Miskin (SPM) yang pembiayaannya dianggarkan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto. Jampersal merupakan biaya untuk persalinan dan Visum merupakan klaim pelayanan visum terkait kejadian kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan adanya surat permintaan visum dari Kepolisian.

Saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp16.004.254.059,00, dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel e. 52 Piutang Lain-lain PAD yang Sah

(dalam rupiah)

SKPD	Uraian	Saldo 31 Des 2022	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo 31 Des 2023
DINAS KESEHATAN	Piutang BPJS	288.604.500,00	266.476.500,00	288.604.500,00	266.476.500,00
		288.604.500,00	266.476.500,00	288.604.500,00	266.476.500,00
RSUD SOEKANDAR	Pasien Umum	159.950.562,00	14.839.607,00	16.350.952,00	158.439.217,00
	Pasien Penjamin	14.437.025,00	0,00	0,00	14.437.025,00
	PT. Inhealt	0,00	13.040.793,00	1.015.313,00	12.025.480,00
	Jampersal	16.478.200,00	16.675.700,00	33.153.900,00	0,00
	PT Bina Graha Sejahtera	19.388.391,00	7.869.445,00	19.388.391,00	7.869.445,00
	BPJS Ketenagakerjaan	24.659.865,00	12.301.690,00	24.659.865,00	12.301.690,00
	BPJS Kesehatan	6.648.202.500,00	22.612.129.011,00	18.335.085.608,00	10.925.245.903,00
	Kemenkes Covid	0,00	903.575.500,00	903.575.500,00	0,00
	PT Jasa Raharja	0,00	21.434.417,00	0,00	21.434.417,00
	Parkir RSUD	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
		6.884.116.543,00	23.601.866.163,00	19.334.229.529,00	11.151.753.177,00
RSUD RA BASOENI	BPJS Kesehatan	3.538.201.800,00	10.256.148.029,00	9.307.719.351,00	4.486.630.478,00
	Kemenkes Covid	142.726.000,00	596.296.000,00	739.022.000,00	0,00
	Jasa Raharja	0,00	160.020.167,00	111.237.776,00	48.782.391,00
	Lahan Parkir	17.600.000,00	39.000.000,00	8.000.000,00	48.600.000,00
	Pasien Umum	0,00	2.805.747,00	794.234,00	2.011.513,00
		3.698.527.800,00	11.054.269.943,00	10.166.773.361,00	4.586.024.382,00
BPKAD	Bunga TDF-TKD	3.018.928,64	0,00	3.018.928,64	0,00
		3.018.928,64	0,00	3.018.928,64	0,00
	Jumlah	10.874.267.771,64	34.922.612.606,00	29.792.626.318,64	16.004.254.059,00

Saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2022 sebesar Rp10.874.267.771,64. Mutasi tambah atau penambahan sebesar Rp34.922.612.606,00 terdiri dari:

- (1) Dinas Kesehatan sebesar Rp266.476.500,00 merupakan piutang BPJS Tahun 2023 pada 27 (dua puluh tujuh) Puskesmas yang sudah menjadi Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) RSUD Prof. Dr. Soekandar sebesar Rp23.601.866.163,00 yang terdiri dari:

- Piutang Tahun 2023 sebesar Rp10.993.716.542,00.
 - Koreksi kurang saji sebesar Rp12.608.149.621,00 terdiri dari Piutang BPJS Tahun 2022 yang baru selesai diverifikasi pada tahun 2023 sebesar Rp11.686.883.108,00, Piutang Kemenkes Klaim Covid 19 sebesar Rp903.575.500,00, Piutang PT Inhealth sebesar Rp1.015.313,00 dan Piutang Jampersal sebesar Rp16.675.700,00.
- (3) RSUD RA Basoeni sebesar Rp11.054.269.943,00 terdiri dari:
- Piutang Tahun 2023 sebesar Rp4.568.424.382,00
 - Koreksi kurang saji sebesar Rp6.485.845.561,00 terdiri dari Piutang BPJS Tahun 2022 yang baru selesai diverifikasi pada tahun 2023 sebesar Rp5.769.517.551,00, Piutang Kemenkes Klaim Covid 19 sebesar Rp596.296.000,00, Piutang Jasa Raharja sebesar Rp111.237.776,00, Piutang Lahan Parkir sebesar Rp8.000.000,00 dan Piutang Pasien Umum sebesar Rp794.234,00.

Mutasi kurang atau pengurangan sebesar Rp29.792.626.318,64 terdiri dari:

- (1) Dinas Kesehatan merupakan realisasi pembayaran piutang BPJS pada 27 (dua puluh tujuh) Puskesmas sebesar Rp288.604.500,00.
- (2) RSUD Prof. Dr. Soekandar sebesar Rp19.334.229.529,00, terdiri dari:
- Realisasi atau pembayan piutang tahun 2022 yang diterima pada tahun 2023 sebesar Rp18.859.657.444,00.
 - Koreksi lebih saji sebesar Rp474.572.085,00 terdiri dari Piutang BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp160.985,00 dan Piutang BPJS Kesehatan sebesar Rp474.411.100,00.
- (3) RSUD RA Basoeni sebesar Rp10.166.773.361,00 merupakan realisasi atau pembayaran piutang tahun 2022 yang diterima pada tahun 2023.
- (4) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp3.018.928,64 merupakan remunerasi atas Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam yang disalurkan melalui Fasilitas Treasury Deposit Facility Transfer (TDF).

Dari penjelasan tersebut diperoleh saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2023 setelah eliminasi sebesar Rp16.004.254.059,00.

7.e.3).a).(1).(k) Piutang Transfer Antar Daerah

Saldo Piutang Transfer Antar Daerah per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Naik/Turun
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	0,00	11.156.194.700,00	-11.156.194.700,00

Piutang Transfer Antar Daerah merupakan Piutang Bagi Hasil Pajak Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Saldo Piutang Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi per 31 Desember 2023 adalah nihil, dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel e. 53 Piutang Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Jawa Timur

(dalam rupiah)

Uraian	Saldo 31 Des 2022	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo 31 Des 2023
Piutang Dana Bagi Hasil Pajak PKB	0,00	12.715.965.100,00	12.715.965.100,00	0,00
Piutang Dana Bagi Hasil	0,00	5.081.559.400,00	5.081.559.400,00	0,00

Uraian	Saldo 31 Des 2022	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo 31 Des 2023
Pajak BBNKB				
Piutang Dana Bagi Hasil Pajak BBBKB	0,00	13.428.809.900,00	13.428.809.900,00	0,00
Piutang Dana Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	0,00	158.306.500,00	158.306.500,00	0,00
Piutang Dana Bagi Hasil Pajak Rokok	11.156.194.700,00	7.952.903.877,00	19.109.098.577,00	0,00
Jumlah	11.156.194.700,00	39.337.544.777,00	50.493.739.477,00	0,00

Mutasi tambah atau penambahan piutang pada tahun 2023 sebesar Rp39.337.544.777,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

- (1) Koreksi kurang saji Piutang Dana Bagi Hasil Pajak sebesar Rp31.384.640.900,00 merupakan Dana Bagi Hasil Pajak kurang bayar tahun 2022 sesuai Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/293/KPTS/013/2023 tanggal 12 Juli 2023 tentang Penetapan Definitif Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 dengan rincian:
 - Piutang Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp12.715.965.100,00.
 - Piutang Dana Bagi Hasil Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp5.081.559.400,00.
 - Piutang Dana Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp13.428.809.900,00.
 - Piutang Dana Bagi Hasil Pajak Air Permukaan sebesar Rp158.306.500,00.
- (2) Koreksi kurang saji Piutang Dana Bagi Hasil Pajak Rokok sebesar Rp7.952.903.877,00, merupakan Dana Hasil Pajak Rokok kurang bayar tahun 2022 sesuai Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/181/KPTS/013/2023 tanggal 17 April 2023 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok untuk Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Kas Bulan Desember Tahun Anggaran 2022.

Mutasi kurang atau pengurangan piutang sebesar Rp50.493.739.477,00 karena telah dilakukan pembayaran oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada Tahun Anggaran 2023, yang terdiri dari:

- (1) Realisasi pembayaran atas Piutang Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp12.715.965.100,00.
- (2) Realisasi pembayaran atas Piutang Dana Bagi Hasil Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp5.081.559.400,00.
- (3) Realisasi pembayaran atas Piutang Dana Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp13.428.809.900,00.
- (4) Realisasi pembayaran atas Piutang Dana Bagi Hasil Pajak Air Permukaan sebesar Rp158.306.500,00.
- (5) Realisasi pembayaran atas Piutang Dana Bagi Hasil Pajak Rokok sebesar Rp19.109.098.577,00.

Dari penjelasan tersebut saldo Piutang Transfer Antar Daerah per 31 Desember 2023 adalah nihil.

7.e.3).a).(1).(l) Piutang Lainnya

Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Naik/Turun
Piutang Lainnya	478.758.852,00	540.309.548,85	61.550.696,85

Rincian Piutang Lainnya per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel e. 54 Piutang Lainnya – Piutang Lain-lain

(dalam rupiah)

Uraian	Saldo 31 Des 2022	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo 31 Des 2023
Pinjaman kepada Kelompok Masyarakat				
Tahun 2008				
Pengendalian Harga Gabah	100.500.000,00	0,00	0,00	100.500.000,00
Sapi Kereman	22.000.000,00	0,00	0,00	22.000.000,00
Tahun 2009				
Sapi Kereman	77.453.852,00	0,00	0,00	77.453.852,00
Penguatan Modal Koperasi	122.000.000,00	0,00	0,00	122.000.000,00
Tahun 2010				
Beternak Sapi	156.805.000,00	0,00	0,00	156.805.000,00
Piutang Lain-lain				
Piutang Lain-lain	61.550.696,85	0,00	61.550.696,85	0,00
Jumlah	540.309.548,85	0,00	61.550.696,85	478.758.852,00

Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp540.309.548,85, atas Piutang Lainnya tersebut pada tahun 2023 terdapat mutasi kurang sebesar Rp61.550.696,85 yang merupakan piutang karena kerugian daerah yang berarti direklasifikasikan ke dalam kelompok aset lainnya tagihan tuntutan ganti rugi, sehingga saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp478.758.852,00.

7.e.3).a).(1).(m) Penyisihan Piutang

Saldo Penyisihan Piutang per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Naik/Turun
Penyisihan Piutang	-69.098.321.262,93	-60.476.724.266,56	-8.621.596.996,37

Penyisihan Piutang adalah Cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penyisihan Piutang ditentukan dengan menggunakan dasar penggolongan kualitas piutang, yang dikelompokkan menjadi 4 klasifikasi, yaitu:

- Kualitas Piutang Lancar
- Kualitas Piutang Kurang Lancar
- Kualitas Piutang Diragukan
- Kualitas Piutang Macet

Rincian Penyisihan Piutang per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel e. 55 Rincian Penyisihan Piutang
per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022**

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023	2022
1	Penyisihan Piutang Pajak	67.417.388.569,37	58.953.976.428,51
2	Penyisihan Piutang Retribusi	1.044.201.013,66	900.884.513,66
3	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	157.972.827,90	136.949.402,70
4	Penyisihan Piutang Lainnya	478.758.852,00	484.913.921,69
	Jumlah	69.098.321.262,93	60.476.724.266,56

(1) Penyisihan Piutang Pajak

Dari saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2023 sebesar Rp112.185.013.121,55, maka penyisihan piutang atas Piutang Pajak adalah sebesar Rp67.417.388.569,37 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel e. 56 Penyisihan Piutang Pajak

(dalam rupiah)

No	Uraian	Nominal Piutang	Tahun	Jangka Waktu	persentase Penyisihan	Nilai Penyisihan
1	Pajak Hotel	7.465.000,00	2019	> 3 s.d 5	70%	5.225.500,00
		4.935.339,00	2020	> 3 s.d 5	70%	3.454.737,30
		4.983.550,00	2021	> 2 s.d 3	40%	1.993.420,00
		17.536.170,00	2022	> 1 s.d 2	20%	3.507.234,00
		48.346.345,00	2023	0 s.d 1	0%	0,00
2	Pajak Restoran	65.625.892,20	2018	> 5	100%	65.625.892,20
		147.939.863,00	2019	> 3 s.d 5	70%	103.557.904,10
		43.756.192,11	2020	> 3 s.d 5	70%	30.629.334,48
		3.740.495,00	2021	> 2 s.d 3	40%	1.496.198,00
		63.805.358,00	2022	> 1 s.d 2	20%	12.761.071,60
		72.012.606,00	2023	0 s.d 1	0%	0,00
3	Pajak Reklame	134.163.913,50	2015	> 5	100%	134.163.913,50
		114.067.200,00	2016	> 5	100%	114.067.200,00
		71.500.677,08	2017	> 5	100%	71.500.677,08
		31.976.899,50	2018	> 5	100%	31.976.899,50
		184.495.708,00	2019	> 3 s.d 5	70%	129.146.995,60
		106.523.567,00	2020	> 3 s.d 5	70%	74.566.496,90
		47.382.954,00	2021	> 2 s.d 3	40%	18.953.181,60
		34.910.937,00	2022	> 1 s.d 2	20%	6.982.187,40
		170.798.854,00	2023	0 s.d 1	0%	0,00
4	PPJ Non PLN	1.154.080,00	2020	> 3 s.d 5	70%	807.856,00
		15.612.162,00	2021	> 2 s.d 3	40%	6.244.864,80
5	Pajak Air Tanah	1.138.408,36	2019	> 3 s.d 5	70%	796.885,85
		3.538.523,00	2020	> 3 s.d 5	70%	2.476.966,10
		4.869.867,00	2021	> 2 s.d 3	40%	1.947.946,80
		18.173.090,00	2022	> 1 s.d 2	20%	3.634.618,00
6	PBB P-2	321.500.159,00	2023	0 s.d 1	0%	0,00
		3.064.475.746,00	2013	> 5	100%	3.064.475.746,00
		5.602.017.654,00	2014	> 5	100%	5.602.017.654,00
		7.548.829.866,00	2015	> 5	100%	7.548.829.866,00
		5.075.227.287,00	2016	> 5	100%	5.075.227.287,00
		7.419.823.699,00	2017	> 5	100%	7.419.823.699,00
		7.911.966.959,00	2018	> 5	100%	7.911.966.959,00
		9.185.586.617,00	2019	> 3 s.d 5	70%	6.429.910.631,90
		11.663.101.486,00	2020	> 3 s.d 5	70%	8.164.171.040,20
		12.363.662.000,00	2021	> 2 s.d 3	40%	4.945.464.800,00
7	Pajak Minerba	11.926.319.396,00	2022	> 1 s.d 2	20%	2.385.263.879,20
		13.382.063.714,00	2023	0 s.d 1	0%	0,00
		4.056.814.000,00	2018	> 5	100%	4.056.814.000,00
		2.696.880.060,80	2019	> 3 s.d 5	70%	1.887.816.042,56
		1.976.834.500,00	2020	> 3 s.d 5	70%	1.383.784.150,00
		933.434.500,00	2021	> 2 s.d 3	40%	373.373.800,00
8	Pajak Hiburan	1.692.204.000,00	2022	> 1 s.d 2	20%	338.440.800,00
		3.826.890.500,00	2023	0 s.d 1	0%	0,00
		512.973,00	2019	> 3 s.d 5	70%	359.081,10
		143.500,00	2020	> 3 s.d 5	70%	100.450,00

No	Uraian	Nominal Piutang	Tahun	Jangka Waktu	persentase Penyisihan	Nilai Penyisihan
		3.049.912,00	2021	> 2 s.d 3	40%	1.219.964,80
		11.437.688,00	2022	> 1 s.d 2	20%	2.287.537,60
		48.360.020,00	2023	0 s.d 1	0%	0,00
9	Pajak Parkir	391.750,00	2021	> 2 s.d 3	40%	156.700,00
		1.832.501,00	2022	> 1 s.d 2	20%	366.500,20
		8.104.890,00	2023	0 s.d 1	0%	0,00
	Jumlah	112.141.919.028,55				67.417.388.569,37

(2) Penyisihan Piutang Retribusi

Dari saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.112.690.213,66, maka penyisihan piutang atas Piutang Retribusi adalah sebesar Rp1.044.201.013,66 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel e. 57 Penyisihan Piutang Retribusi

(dalam rupiah)

No	Uraian	Nominal Piutang	Tahun	Jangka Waktu	persentase Penyisihan	Nilai Penyisihan
1	DPRKP2	17.819.600,00	2023	0 s.d 1	0%	0,00
		9.727.200,00	2023	0 s.d 1	0%	0,00
2	Dinas Komunikasi dan Informatika	709.955.213,66	2016	> 5	100%	709.955.213,66
		28.622.700,00	2018	> 5	100%	28.622.700,00
		49.582.000,00	2020	> 3 s.d 5	100%	49.582.000,00
		80.094.000,00	2021	> 2 s.d 3	70%	56.065.800,00
		22.884.000,00	2022	> 1 s.d 2	40%	9.153.600,00
		144.932.000,00	2023	0 s.d 1	0%	0,00
3	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	321.043.000,00	2023	0 s.d 1	0%	0,00
		144.768.000,00	2023	0 s.d 1	0%	0,00
4	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	756.000,00	2018	> 5	100%	756.000,00
		23.728.000,00	2019	> 3 s.d 5	100%	23.728.000,00
		52.268.000,00	2020	> 3 s.d 5	100%	52.268.000,00
		54.239.000,00	2021	> 2 s.d 3	70%	37.967.300,00
		190.256.000,00	2022	> 1 s.d 2	40%	76.102.400,00
		262.015.500,00	2023	0 s.d 1	0%	0,00
	Jumlah	2.112.690.213,66				1.044.201.013,66

(3) Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Dari saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2023 sebesar Rp16.004.254.059,00, maka penyisihan piutang atas Piutang Lain-lain PAD yang Sah adalah sebesar Rp157.972.827,90 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel e. 58 Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah

(dalam rupiah)

No	Uraian	Nominal Piutang	Tahun	Jangka Waktu	persentase Penyisihan	Nilai Penyisihan
1	Dinas Kesehatan	266.476.500,00	2023	0 s.d 1	0%	0,00
2	RSUD Prof Dr. Soekandar	5.444.453,00	2013	>5	100%	5.444.453,00
		23.474.644,00	2014	>5	100%	23.474.644,00
		9.605.241,00	2015	>5	100%	9.605.241,00
		10.547.478,00	2016	>5	100%	10.547.478,00
		21.628.369,00	2017	>5	100%	21.628.369,00
		9.617.195,00	2018	>5	100%	9.617.195,00
		12.635.704,00	2019	> 3 s.d 5	100%	12.635.704,00
		28.187.793,00	2020	> 3 s.d 5	100%	28.187.793,00
		14.912.159,00	2021	> 2 s.d 3	70%	10.438.511,30
		21.983.599,00	2022	> 1 s.d 2	40%	8.793.439,60
		10.993.716.542,00	2023	0 s.d 1	0%	0,00
3	RSUD RA Basoeni	17.600.000,00	2018	>5	100%	17.600.000,00
		4.568.424.382,00	2023	0 s.d 1	0%	0,00
	Jumlah	16.004.254.059,00				157.972.827,90

(4) Penyisihan Piutang Lainnya

Dari saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp478.758.852,00, maka penyisihan piutang atas Piutang Lainnya adalah sebesar Rp478.758.852,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel e. 59 Penyisihan Piutang Lain-lain

(dalam rupiah)

Uraian	Nominal Piutang	Tahun	Jangka Waktu	persentase Penyisihan	Nilai Penyisihan
Pinjaman Kepada Kelompok Masyarakat					
▪ Pengendalian Harga Gabah	100.500.000,00	2008	> 5	100%	100.500.000,00
▪ Sapi Kereman	22.000.000,00	2008	> 5	100%	22.000.000,00
▪ Sapi Kereman	77.453.852,00	2009	> 5	100%	77.453.852,00
▪ Penguatan Modal Koperasi	122.000.000,00	2009	> 5	100%	122.000.000,00
▪ Beternak Sapi	156.805.000,00	2010	> 5	100%	156.805.000,00
Jumlah	478.758.852,00				478.758.852,00

7.e.3.a).(1).(n) Persediaan

Saldo Persediaan Pemerintah Kabupaten Mojokerto per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Naik/Turun
Persediaan	43.085.564.702,64	49.480.029.665,83	-6.394.464.963,19

Saldo persediaan sebesar Rp43.085.564.702,64 merupakan persediaan Barang Pakai Habis yang sampai dengan 31 Desember 2023 belum digunakan. Adapun rincian persediaan pada seluruh OPD adalah sebagai berikut:

Tabel e. 60 Daftar Persediaan per OPD

(dalam rupiah)

No	OPD	Saldo 31 Desember 2023	Saldo 31 Desember 2022
1	Dinas Pendidikan	26.576.338,00	161.188.536,00
2	Dinas Kesehatan	17.433.276.749,89	16.385.003.191,26
3	RSUD. Prof. Dr. Soekandar (APBD)	162.551.881,00	520.807.534,00
4	RSUD. Prof. Dr. Soekandar (BLUD)	8.298.773.751,91	6.761.292.680,33
5	RSUD. RA. Basoeni (APBD)	98.538.532,14	125.150.581,58
6	RSUD. RA. Basoeni (BLUD)	2.475.327.161,84	4.176.428.554,88
7	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	1.454.536.838,00	2.020.802.930,00
8	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Perhubungan	9.228.122.461,86	13.828.534.610,00
9	Satuan Polisi Pamong Praja	10.939.600,00	14.572.000,00
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	419.877.362,00	656.874.747,00
11	Dinas Sosial	67.012.940,00	86.370.397,00
12	Dinas Tenaga Kerja	10.964.600,00	3.164.000,00
13	Dinas Pangan Dan Perikanan	868.338.594,00	1.251.692.762,00
14	Dinas Lingkungan Hidup	91.726.020,00	77.804.250,00
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	512.054.365,00	1.470.835.656,00
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	6.465.900,00	2.226.184,00
17	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan	142.825.803,00	393.912.805,00
18	Dinas Komunikasi Dan Informatika	1.056.300,00	3.779.500,00
19	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro	3.972.500,00	3.260.000,00
20	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	15.409.000,00	47.873.340,00
21	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	402.500,00	312.500,00
22	Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga	212.041.000,00	316.183.000,00
23	Dinas Pertanian	82.232.474,00	77.551.095,00
24	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	84.509.000,00	98.764.000,00
25	Sekretariat Daerah	842.909.080,00	478.131.196,00
26	Inspektorat Kabupaten	236.696.150,00	250.218.800,00

No	OPD	Saldo 31 Desember 2023	Saldo 31 Desember 2022
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	20.473.150,00	7.854.150,00
28	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	79.844.000,00	76.217.600,00
29	Badan Pendapatan Daerah	15.460.600,00	37.462.000,00
30	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	6.213.550,00	4.713.000,00
31	Sekretariat DPRD	151.846.000,00	109.399.033,78
32	Kecamatan Puri	380.000,00	2.090.000,00
33	Kecamatan Sooko	343.000,00	459.000,00
34	Kecamatan Trowulan	615.375,00	1.202.000,00
35	Kecamatan Bangsal	1.250.500,00	7.617.830,00
36	Kecamatan Gedeg	1.457.250,00	1.911.000,00
37	Kecamatan Kemlagi	1.030.000,00	364.000,00
38	Kecamatan Jetis	1.809.900,00	1.765.000,00
39	Kecamatan Dawarblandong	731.000,00	760.000,00
40	Kecamatan Pacet	549.400,00	1.575.000,00
41	Kecamatan Pungging	741.000,00	607.000,00
42	Kecamatan Ngoro	953.750,00	1.585.202,00
43	Kecamatan Kutorejo	2.122.500,00	520.000,00
44	Kecamatan Dlanggu	724.000,00	857.500,00
45	Kecamatan Trawas	3.088.725,00	3.587.500,00
46	Kecamatan Mojoanyar	683.200,00	780.500,00
47	Kecamatan Gondang	363.900,00	644.000,00
48	Kecamatan Jatirejo	1.380.500,00	2.697.500,00
49	Kecamatan Mojosari	3.389.000,00	1.356.000,00
50	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.977.500,00	1.270.000,00
	Jumlah	43.085.564.702,64	49.480.029.665,83

Adapun persediaan sesuai jenisnya disajikan dalam tabel berikut:

Tabel e. 61 Daftar Persediaan Berdasarkan Jenis Persediaan

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2023	Saldo 31 Desember 2022
1	Bahan Bangunan Dan Konstruksi	898.859.187,00	1.283.255.238,00
2	Bahan Kimia	2.424.770.999,74	1.317.675.224,31
3	Bahan Bakar Dan Pelumas	0,00	869.095,00
4	Isi Tabung Gas	15.440.100,00	5.665.000,00
5	Bahan Lainnya	9.285.830.081,65	10.547.502.545,57
6	Suku Cadang Alat Angkutan	2.242.400,00	7.002.700,00
7	Suku Cadang Alat Besar	711.110.513,00	933.237.569,00
8	Suku Cadang Alat Kedokteran	1.428.570,00	0,00
9	Persediaan dari Belanja Bantuan Sosial	0,00	278.772.659,00
10	Alat Tulis Kantor	826.017.843,50	945.040.368,50
11	Kertas dan Cover	159.459.300,00	93.982.235,00
12	Bahan Cetak	3.715.167.851,82	2.589.543.555,58
13	Benda Pos	18.672.640,00	8.189.000,00
14	Bahan Komputer	150.306.950,00	705.216.650,00
15	Perabot Kantor	16.540.850,00	0,00
16	Alat Listrik	8.857.808.896,36	13.070.009.474,00
17	Perlengkapan Dinas	54.167.600,00	14.562.020,00
18	Suvenir/Cendera Mata	313.085.000,00	124.124.560,00
19	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	8.745.000,00	5.278.372,00
20	Obat	14.348.239.834,77	15.637.277.702,17
21	Obat-obatan Lainnya	162.558.190,80	418.017.211,70
22	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	99.526.120,00	69.090.000,00
23	Natura	1.000.471.394,00	1.319.618.026,00
24	Pakan	15.115.380,00	106.100.460,00
	Jumlah	43.085.564.702,64	49.480.029.665,83

Adapun persediaan sesuai jenisnya pada masing-masing SKPD disajikan dalam tabel berikut:

Tabel e. 62 Daftar Persediaan Berdasarkan Jenis Persediaan pada SKPD

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2023	Saldo 31 Desember 2022
1	Bahan Bangunan Dan Konstruksi		
	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	666.199.400,00	1.010.537.450,00
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	232.659.787,00	272.717.788,00
	Jumlah	898.859.187,00	1.283.255.238,00
2	Bahan Kimia		
	Dinas Kesehatan	2.333.196.579,74	1.239.899.824,31
	Dinas Pangan Dan Perikanan	0,00	105.150,00
	Dinas Lingkungan Hidup	91.574.420,00	77.670.250,00
	Jumlah	2.424.770.999,74	1.317.675.224,31
3	Bahan Bakar Dan Pelumas		
	Dinas Kesehatan	0,00	869.095,00
	RSUD. Prof. Dr. Soekandar (BLUD)	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	869.095,00
4	Isi Tabung Gas		
	RSUD RA BASOENI (BLUD)	15.440.100,00	5.665.000,00
	Jumlah	15.440.100,00	5.665.000,00
5	Bahan Lainnya		
	Dinas Pendidikan	0,00	2.034.000,00
	Dinas Kesehatan	7.757.128.000,24	8.121.750.168,32
	RSUD. Prof. Dr. Soekandar (BLUD)	1.484.081.081,41	2.343.399.326,25
	RSUD. RA. Basoeni (BLUD)	44.568.000,00	66.749.650,00
	Dinas Sosial	0,00	13.569.401,00
	Dinas Tenaga Kerja	53.000,00	0,00
	Jumlah	9.285.830.081,65	10.547.502.545,57
6	Suku Cadang Alat Angkutan		
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.242.400,00	7.002.700,00
	Jumlah	2.242.400,00	7.002.700,00
7	Suku Cadang Alat Besar		
	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	711.110.513,00	933.237.569,00
	Jumlah	711.110.513,00	933.237.569,00
8	Suku Cadang Alat Kedokteran		
	Dinas Sosial	1.428.570,00	0,00
	Jumlah	1.428.570,00	0,00
9	Persediaan dari Belanja Bantuan Sosial		
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	278.772.659,00
	Jumlah	0,00	278.772.659,00
10	Alat Tulis Kantor		
	Dinas Pendidikan	26.576.338,00	141.774.708,00
	Dinas Kesehatan	65.326.542,00	28.650.949,00
	RSUD. Prof. Dr. Soekandar (BLUD)	228.953.800,50	100.845.876,50
	RSUD. RA. Basoeni (BLUD)	64.962.863,00	83.563.240,00
	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	31.568.425,00	69.459.011,00
	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Perhubungan	375.400,00	2.877.820,00
	Satuan Polisi Pamong Praja	4.079.000,00	9.008.000,00
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.775.055,00	0,00
	Dinas Sosial	2.690.400,00	7.647.000,00
	Dinas Tenaga Kerja	5.294.600,00	897.000,00
	Dinas Pangan Dan Perikanan	0,00	685.300,00
	Dinas Lingkungan Hidup	61.600,00	36.000,00
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	51.004.750,00	161.905.750,00
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	556.900,00	251.450,00
	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan	5.772.800,00	1.393.000,00
	Dinas Komunikasi Dan Informatika	1.056.300,00	2.919.500,00
	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro	2.284.500,00	1.574.000,00
	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	8.899.000,00	35.136.600,00
	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	135.000,00	43.000,00
	Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	6.446.700,00	11.347.000,00
	Dinas Pertanian	6.798.650,00	5.213.600,00
	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.977.000,00	2.491.000,00
	Sekretariat Daerah	58.897.920,00	59.238.631,00

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2023	Saldo 31 Desember 2022
	Inspektorat Kabupaten	118.160.150,00	131.793.800,00
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	7.095.200,00	1.987.600,00
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	20.707.600,00	18.377.000,00
	Badan Pendapatan Daerah	1.411.600,00	5.220.800,00
	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	1.342.300,00	734.000,00
	Sekretariat DPRD	87.975.550,00	36.787.833,00
	Kecamatan Puri	120.000,00	1.690.000,00
	Kecamatan Sooko	343.000,00	459.000,00
	Kecamatan Trowulan	60.375,00	160.000,00
	Kecamatan Bangsal	912.000,00	6.893.400,00
	Kecamatan Gedeg	442.250,00	1.696.000,00
	Kecamatan Kemlagi	77.000,00	364.000,00
	Kecamatan Jetis	1.269.900,00	1.225.000,00
	Kecamatan Dawarblandong	731.000,00	760.000,00
	Kecamatan Pacet	120.900,00	521.000,00
	Kecamatan Pungging	741.000,00	607.000,00
	Kecamatan Ngoro	495.750,00	1.149.000,00
	Kecamatan Kutorejo	682.000,00	50.000,00
	Kecamatan Dlanggu	240.000,00	369.000,00
	Kecamatan Trawas	335.625,00	725.000,00
	Kecamatan Mojoanyar	683.200,00	717.000,00
	Kecamatan Gondang	38.900,00	544.000,00
	Kecamatan Jatrejo	190.500,00	2.697.500,00
	Kecamatan Mojosari	1.371.000,00	1.284.000,00
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.977.500,00	1.270.000,00
	Jumlah	826.017.843,50	945.040.368,50
11	Kertas dan Cover		
	Dinas Kesehatan	65.098.900,00	27.124.470,00
	Satuan Polisi Pamong Praja	2.042.600,00	3.084.000,00
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	999.000,00	0,00
	Dinas Sosial	895.000,00	0,00
	Dinas Tenaga Kerja	2.995.000,00	1.339.000,00
	Dinas Pangan Dan Perikanan	1.377.000,00	351.000,00
	Dinas Lingkungan Hidup	90.000,00	98.000,00
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	591.000,00	190.000,00
	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	223.500,00	269.500,00
	Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	4.078.000,00	0,00
	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	777.000,00	0,00
	Sekretariat Daerah	39.001.000,00	17.841.265,00
	Inspektorat	19.115.000,00	32.285.000,00
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	11.507.950,00	997.000,00
	Badan Pendapatan Daerah	3.447.000,00	8.945.000,00
	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	487.250,00	0,00
	Kecamatan Puri	260.000,00	0,00
	Kecamatan Trowulan	270.000,00	196.000,00
	Kecamatan Pacet	333.500,00	772.000,00
	Kecamatan Kutorejo	965.500,00	282.000,00
	Kecamatan Dlanggu	484.000,00	208.000,00
	Kecamatan Ngoro	229.500,00	0,00
	Kecamatan Trawas	270.600,00	0,00
	Kecamatan Gondang	135.000,00	0,00
	Kecamatan Kemlagi	513.000,00	0,00
	Kecamatan Gedeg	445.000,00	0,00
	Kecamatan Jatrejo	810.000,00	0,00
	Kecamatan Mojosari	2.018.000,00	0,00
	Jumlah	159.459.300,00	93.982.235,00
12	Bahan Cetak		
	Dinas Pendidikan	0,00	15.053.828,00
	Dinas Kesehatan	1.634.798.000,00	6.256.000,00
	RSUD. Prof. Dr. Soekandar (BLUD)	129.331.776,82	112.246.230,80
	RSUD. RA. Basoeni (BLUD)	76.753.500,00	70.998.698,00
	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	43.766.500,00	6.193.900,00
	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Perhubungan	516.063.600,00	845.511.686,00
	Satuan Polisi Pamong Praja	1.750.000,00	2.480.000,00
	Dinas Sosial	3.729.200,00	7.086.512,00

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2023	Saldo 31 Desember 2022
	Dinas Tenaga Kerja	0,00	810.000,00
	Dinas Pangan Dan Perikanan	26.710.050,00	39.309.000,00
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	377.640.415,00	623.843.006,00
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	4.713.000,00	1.784.734,00
	Dinas Komunikasi Dan Informatika	0,00	860.000,00
	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro	0,00	1.137.000,00
	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.510.000,00	12.136.740,00
	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	44.000,00	0,00
	Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	195.796.000,00	235.746.000,00
	Dinas Pertanian	7.138.000,00	4.662.000,00
	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	81.112.000,00	96.273.000,00
	Sekretariat Daerah	371.276.460,00	257.500.720,00
	Inspektorat Kabupaten	99.421.000,00	86.140.000,00
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.110.000,00	1.917.500,00
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	59.136.400,00	57.840.600,00
	Badan Pendapatan Daerah	7.035.000,00	23.296.200,00
	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	4.000.000,00	3.876.000,00
	Sekretariat DPRD	63.870.450,00	72.611.200,78
	Kecamatan Puri	0,00	400.000,00
	Kecamatan Bangsal	0,00	100.000,00
	Kecamatan Gedeg	0,00	215.000,00
	Kecamatan Jetis	540.000,00	540.000,00
	Kecamatan Kemplagi	440.000,00	0,00
	Kecamatan Trawas	2.482.500,00	2.482.500,00
	Kecamatan Mojoanyar	0,00	63.500,00
	Kecamatan Gondang	0,00	100.000,00
	Kecamatan Mojosari	0,00	72.000,00
	Jumlah	3.715.167.851,82	2.589.543.555,58
13	Benda Pos		
	Dinas Pendidikan	0,00	1.083.200,00
	Dinas Kesehatan	7.572.340,00	2.694.000,00
	RSUD. Prof. Dr. Soekandar (BLUD)	6.950.000,00	1.930.000,00
	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	1.892.000,00	1.375.000,00
	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Perhubungan	0,00	110.000,00
	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro	55.000,00	0,00
	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	600.000,00
	Sekretariat Daerah	0,00	260.000,00
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	136.800,00
	Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	1.143.300,00	0,00
	Sekretariat Daerah	1.060.000,00	0,00
	Jumlah	18.672.640,00	8.189.000,00
14	Bahan Komputer		
	Dinas Kesehatan	42.555.750,00	10.611.000,00
	Satuan Polisi Pamong Praja	3.068.000,00	0,00
	Dinas Tenaga Kerja	2.622.000,00	118.000,00
	Dinas Pangan Dan Perikanan	0,00	282.000,00
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	83.409.200,00	685.086.900,00
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	605.000,00	0,00
	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro	1.235.000,00	0,00
	Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	3.590.000,00	0,00
	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	643.000,00	0,00
	Sekretariat Daerah	5.683.000,00	4.604.000,00
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	760.000,00	2.815.250,00
	Badan Pendapatan Daerah	3.567.000,00	0,00
	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	384.000,00	103.000,00
	Kecamatan Trowulan	285.000,00	846.000,00
	Kecamatan Pacet	95.000,00	282.000,00
	Kecamatan Ngoro	190.000,00	0,00
	Kecamatan Gondang	190.000,00	0,00
	Kecamatan Gedeg	570.000,00	0,00

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2023	Saldo 31 Desember 2022
	Kecamatan Jatirejo	380.000,00	0,00
	Kecamatan Kutorejo	475.000,00	188.000,00
	Kecamatan Dlanggu	0,00	280.500,00
	Jumlah	150.306.950,00	705.216.650,00
15	Perabot Kantor		
	Dinas Kesehatan	12.713.500,00	0,00
	Dinas Sosial	1.698.500,00	0,00
	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro	114.000,00	0,00
	Dinas Pangan Dan Perikanan	1.637.850,00	0,00
	Kecamatan Ngoro	38.500,00	0,00
	Kecamatan Bangsal	338.500,00	0,00
	Jumlah	16.540.850,00	0,00
16	Alat Listrik		
	Dinas Kesehatan	3.226.850,00	4.903.821,00
	RSUD. Prof. Dr. Soekandar (BLUD)	136.419.284,50	55.711.474,00
	RSUD. RA. Basoeni (BLUD)	5.119.200,00	28.338.075,00
	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Perhubungan	8.711.683.461,86	12.980.035.104,00
	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro	284.000,00	549.000,00
	Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	987.000,00	0,00
	Sekretariat Daerah	89.100,00	0,00
	Kecamatan Ngoro	0,00	92.000,00
	Kecamatan Trawas	0,00	380.000,00
	Jumlah	8.857.808.896,36	13.070.009.474,00
17	Perlengkapan Dinas		
	Dinas Sosial	351.000,00	0,00
	Sekretariat Daerah	53.816.600,00	14.562.020,00
	Jumlah	54.167.600,00	14.562.020,00
18	Suvenir/Cendera Mata		
	Sekretariat Daerah	313.085.000,00	124.124.560,00
	Jumlah	313.085.000,00	124.124.560,00
19	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya		
	Dinas Sosial	8.745.000,00	4.309.740,00
	Kecamatan Bangsal	0,00	624.430,00
	Kecamatan Ngoro	0,00	344.202,00
	Jumlah	8.745.000,00	5.278.372,00
20	Obat		
	Dinas Pendidikan	0,00	1.242.800,00
	Dinas Kesehatan	5.511.660.287,91	6.941.264.363,63
	RSUD. Prof. Dr. Soekandar (Rutin)	162.551.881,00	520.807.534,00
	RSUD. Prof. Dr. Soekandar (BLUD)	6.304.860.308,68	4.129.633.968,78
	RSUD. RA. Basoeni (Rutin)	98.538.532,14	125.150.581,58
	RSUD. RA. Basoeni (BLUD)	2.198.340.231,04	3.849.330.245,18
	Dinas Sosial	3.992.770,00	2.172.714,00
	Dinas Pertanian	68.295.824,00	67.675.495,00
	Jumlah	14.348.239.834,77	15.637.277.702,17
21	Obat-Obatan Lainnya		
	RSUD. RA. Basoeni (BLUD)	25.505.187,80	25.497.406,70
	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan	137.053.003,00	392.519.805,00
	Jumlah	162.558.190,80	418.017.211,70
22	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat		
	Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	0,00	69.090.000,00
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	99.526.120,00	0,00
	Jumlah	99.526.120,00	69.090.000,00
23	Natura		
	Dinas Kesehatan	0,00	979.500,00
	RSUD. Prof. Dr. Soekandar (BLUD)	8.177.500,00	17.525.804,00
	RSUD. RA. Basoeni (BLUD)	44.638.080,00	46.286.240,00
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	80.675.000,00	98.381.600,00
	Dinas Sosial	43.482.500,00	51.585.030,00
	Dinas Pangan Dan Perikanan	823.498.314,00	1.104.859.852,00
	Jumlah	1.000.471.394,00	1.319.618.026,00
24	Pakan		

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2023	Saldo 31 Desember 2022
	Dinas Pangan Dan Perikanan	15.115.380,00	106.100.460,00
	Jumlah	15.115.380,00	106.100.460,00
	Total	43.085.564.702,64	49.480.029.665,83

7.e.3).a).(2) Investasi Jangka Panjang

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
109.646.129.252,80	90.117.317.571,27

Investasi Jangka Panjang dimaksudkan untuk menampung seluruh investasi yang dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Saldo Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Mojokerto per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp109.646.129.252,80, dalam bentuk Investasi Jangka Panjang Non Permanen dan Investasi Jangka Panjang Permanen. Berikut adalah saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022.

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Naik/Turun
Investasi Non Permanen	1.814.084.250,16	1.814.084.250,16	0,00
Investasi Permanen	107.832.045.002,64	88.303.233.321,11	19.528.811.681,53
Jumlah	109.646.129.252,80	90.117.317.571,27	19.528.811.681,53

7.e.3).a).(2).(a) Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Saldo Investasi Jangka Panjang Non Permanen per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022.

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Naik/Turun
Investasi Non Permanen	1.814.084.250,16	1.814.084.250,16	0,00

Investasi Non Permanen Pemerintah Kabupaten Mojokerto per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.814.084.250,16, merupakan Investasi pada PT Ridlatama Bangun Usaha yang dibentuk berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Mojokerto dengan PT. Ridlatama Bangun Persada. Sesuai Surat Perjanjian kerjasama Nomor 6 Tahun 2001 dan Nomor 026/PEMDA-RBP/AGREE/VIII/01 Tanggal 29 Juni 2001 tentang Pendirian Perusahaan Pengelolaan Asphalt Mixing Plant dengan jangka waktu perjanjian selama 20 Tahun. PT Ridlatama Bangun Usaha dimulai sejak tahun 2002 dengan bentuk Perseroan Terbatas. Perusahaan ini didirikan berdasarkan akta pendirian Nomor 14 tertanggal 27 Nopember 2001 di hadapan Notaris Nyonya Nurul Laili, SH dan memiliki Surat Izin Usaha (SIUP) Nomor 08/13-19/SIUP-B/XII/2001 tanggal 31 Desember 2001 dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP/PKP) Nomor 02.007.721.0-602.000 tanggal 29 Nopember 2001. PT Ridlatama Bangun Usaha adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha pertambangan, pemborong, jasa konstruksi, usaha kontraktor pertambangan, penyewaan alat-alat konstruksi dan perbaikan alat-alat berat.

Sesuai Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 188.45/1106/K/406-012/2001 tentang Penunjukan Personil Dewan Komisaris pada PT Ridlatama Bangun Usaha, Dewan Komisaris dari Pemerintah Kabupaten Mojokerto diwakili oleh tiga orang dan Dewan Komisaris dari PT RBU dua orang. Modal Dasar Perusahaan sebesar Rp7.350.000.000,00 terbagi dalam 14.700 lembar saham dengan Nilai Nominal per lembar saham sebesar Rp500.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tn. Drs Suhariyono	Rp2.000.000.000,00	Pemkab
Tn. Ir. Abdul Rachman	Rp1.045.500.000,00	Pemkab
Tn. Soewadji Prawadina	Rp 850.000.000,00	Pemkab
Tn. Novi Endaryono	Rp 735.000.000,00	RBP
Tn. Ir. Anang Mudjiantoro	Rp2.719.500.000,00	RBP

Dengan komposisi tersebut, persentase kepemilikan atas penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Mojokerto pada PT Ridlatama Bangun Usaha sebesar Rp3.895.500.000,00 atau sebesar 53%.

Pada Tahun 2014 Susunan Dewan Komisaris dari Pemerintah Kabupaten Mojokerto telah diganti sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 188.45/775/HK/416-012/2014 tanggal 22 Oktober 2014 tentang Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Penunjukan Anggota Dewan Komisaris Periode Tahun 2014-2022 pada PT Ridlatama Bangun Usaha, dengan susunan Anggota sebagai berikut:

- Ir. H. Zainal Abidin, MM., MT
- Noerhono, S.Sos., MM
- Drs. Nugraha Budhi S, M.Si

Pada Tahun 2018 susunan Dewan Komisaris telah diganti sesuai Surat Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 188.45/145/HK/416-012/2018 tanggal 27 Pebruari 2018 tentang Penunjukan Anggota Dewan Komisaris periode Tahun 2018-2023 pada PT Ridlatama Bangun Usaha, dengan susunan Anggota sebagai berikut:

- Ir. Didik Pancaning Argo, M.Si.
- Drs. Bambang Eko W., M.Si.
- Drs. Nugraha Budhi S., M.Si.

Selanjutnya susunan Dewan Komisaris diganti sesuai Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 188.45/105/HK/416-012/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 188.45/145/HK/416-012/2018 tentang Penunjukan Anggota Dewan Komisaris Periode Tahun 2018-2023 pada PT Ridlatama Bangun Usaha, dengan susunan anggota sebagai berikut:

- Drs. Musta'in, MM., M.Si.
- Drs. Nugraha Budhi S., M.Si.
- Drs. Bambang Eko W., M.Si.

Pada Tahun 2022 susunan Dewan Komisaris diganti lagi sesuai Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 188.45/411/HK/416-012/2023 tentang Pemberhentian dan Penunjukan Anggota Dewan Komisaris PT Ridlatama Bangun Usaha Periode 2018-2022 yang dalam hal ini memberhentikan Sdr. Drs. Musta'in, MM., M.Si dan mengangkat Sdr. Nurul Istiqomah, SE., MM sebagai Anggota Dewan Komisaris.

Nilai Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Mojokerto pada PT Ridlatama Bangun Usaha berdasarkan nilai perolehan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel e. 63 Daftar Penyertaan Modal kepada PT RBU

(dalam rupiah)

No	Tahun	Nilai Penyertaan Modal	Penambahan	Total Nilai Penyertaan Modal
1	Tahun 2001	Investasi Awal		3.895.500.000,00
2	Tahun 2002	3.895.500.000,00	0,00	3.895.500.000,00
3	Tahun 2003	3.895.500.000,00	0,00	3.895.500.000,00
4	Tahun 2004	3.895.500.000,00	0,00	3.895.500.000,00
5	Tahun 2005	3.895.500.000,00	0,00	3.895.500.000,00

No	Tahun	Nilai Penyertaan Modal	Penambahan	Total Nilai Penyertaan Modal
6	Tahun 2006	3.895.500.000,00	0,00	3.895.500.000,00
7	Tahun 2007	3.895.500.000,00	0,00	3.895.500.000,00
8	Tahun 2008	3.895.500.000,00	0,00	3.895.500.000,00
9	Tahun 2009	3.895.500.000,00	0,00	3.895.500.000,00
10	Tahun 2010	3.895.500.000,00	0,00	3.895.500.000,00
11	Tahun 2011	3.895.500.000,00	0,00	3.895.500.000,00
12	Tahun 2012	3.895.500.000,00	0,00	3.895.500.000,00
13	Tahun 2013	3.895.500.000,00	0,00	3.895.500.000,00
14	Tahun 2014	3.895.500.000,00	0,00	3.895.500.000,00
15	Tahun 2015	3.895.500.000,00	0,00	3.895.500.000,00
16	Tahun 2017	3.895.500.000,00	0,00	3.895.500.000,00
17	Tahun 2018	3.895.500.000,00	0,00	3.895.500.000,00
18	Tahun 2019	3.895.500.000,00	0,00	3.895.500.000,00
19	Tahun 2020	3.895.500.000,00	0,00	3.895.500.000,00
20	Tahun 2021	3.895.500.000,00	0,00	3.895.500.000,00
21	Tahun 2022	3.895.500.000,00	0,00	3.895.500.000,00
22	Tahun 2023	3.895.500.000,00	0,00	3.895.500.000,00

Nilai Investasi Jangka Panjang Non Permanen pada PT Ridlatama Bangun Usaha per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.814.084.250,16. Pada tahun 2023 tidak terdapat mutasi tambah maupun mutasi kurang, hal ini karena pada tahun 2023 PT Ridlatama Bangun Usaha sudah tidak beroperasi lagi dan sedang dalam proses pengakhiran kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Mojokerto dengan PT Ridlamata Bangun Persada.

Sehingga Nilai Investasi Non Permanen Pemerintah Kabupaten Mojokerto pada PT Ridlatama Bangun Usaha Per 31 Desember 2023 tetap sebesar Rp1.814.084.250,16.

Sedangkan langkah yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto atas penghentian kerjasama dengan PT Ridlatama Bangun Usaha tersebut adalah dengan menerbitkan Surat Keputusan Bupati Nomor 188.45/240/HK/416-012/2023 tentang Tim Percepatan Pengakhiran Kerjasama Investasi dengan PT Ridlatama Bangun Usaha. Tim ini telah melaksanakan pengamanan aset Pemerintah Kabupaten Mojokerto pada lokasi PT. Ridlatama Bangun Usaha, dengan alamat Jalan Raden Patah Nomor 9 Desa Lebaksono, Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto.

Dalam upaya Pengamanan dan Pengawasan Barang Milik Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 299 dan 481 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dilaksanakan pendataan, pencocokan serta pengecekan batas terhadap tanah tempat berdirinya PT. Ridlatama Bangun Usaha dan beberapa aset tetap pada PT. Ridlatama Bangun Usaha sebagaimana berita acara pengamanan yang ditandatangani pada hari kamis tanggal 14 Maret 2024 oleh tim percepatan pengakhiran kerjasama investasi dengan PT Ridlatama Bangun Usaha.

Sedangkan langkah yang dilakukan oleh Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto telah melaksanakan permintaan kerjasama dengan Kantor Jasa Penilaian Publik Andi Tiffani dan Rekan untuk permintaan *appraisal* Aset Tetap PT. Ridlatama Bangun Usaha.

7.e.3).a).(2).(b) Investasi Jangka Panjang Permanen

Saldo Investasi Jangka Panjang Permanen per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022.

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Naik/Turun
Investasi Permanen	107.832.045.002,64	88.303.233.321,11	19.528.811.681,53

Pemerintah Kabupaten Mojokerto memiliki Investasi Jangka Panjang Permanen yang seluruhnya berbentuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebesar Rp107.832.045.002,64 Saldo Investasi Jangka Panjang Permanen Pemerintah Kabupaten Mojokerto per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel e. 64 Rincian Investasi Permanen

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Perumdam Mojopahit	53.123.377.368,67	39.170.290.510,62
2	PT BPR Majatama	35.115.217.383,97	29.539.492.560,49
3	Bank Jatim	19.593.450.250,00	19.593.450.250,00
	Jumlah	107.832.045.002,64	88.303.233.321,11

Atas Investasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Mojokerto mencatat dengan Metode Biaya (*cost methode*) untuk Investasi pada PT Bank Jatim, sedangkan Investasi atau penyertaan modal pada Perumdam Majapahit dan PT BPR Majatama Kabupaten Mojokerto dibukukan dengan metode ekuitas (*equity methode*) dikarenakan kepemilikan Pemerintah Kabupaten Mojokerto di atas 50%, hal ini sesuai dengan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 96 Tahun 2016 Tentang Kebijakan Akuntansi yang menyatakan bahwa kepemilikan 20% sampai dengan 50% atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh signifikan menggunakan Metode Ekuitas. Berikut disajikan persentase Kepemilikan Pemerintah Kabupaten Mojokerto atas investasinya.

Tabel e. 65 persentase Kepemilikan Pemerintah Kabupaten Mojokerto

Nama BUMD	Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	Total Modal Disetor	% Kepemilikan	Metode Investasi SAP
Perumdam Mojopahit	41.812.612.938,70	50.392.423.198,70	100%	Ekuitas
PT BPR Majatama	22.800.000.000,00	22.820.000.000,00	99,91%	Ekuitas
Bank Jatim	19.593.450.250,00	9.000.000.000.000,00	0,22%	Biaya

*Total modal disetor pada Perumdam Mojopahit sebesar Rp.50.392.423.198,70 terdiri dari setoran modal milik Pemerintah Kabupaten Mojokerto sebesar Rp.41.812.612.938,70 dan sebesar Rp.8.579.810.260,- merupakan Penyertaan Modal Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Timur Yang Belum Ditetapkan Statusnya.

(1) Perumdam Mojopahit

PDAM Kabupaten Mojokerto dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Mojokerto Nomor 4 Tahun 1980 dengan modal awal ditetapkan sebesar Rp5.763.435.297,00 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 1989 dimana Jumlah Modal Perusahaan Daerah ditetapkan menjadi sebesar Rp568.366.514,30 dan selanjutnya diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 1992 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1980 tentang Perusahaan Daerah Air Minum. Dan dirubah lagi sesuai Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Mojopahit dengan Modal Dasar sebesar

Rp20.906.556.797,00, serta yang terakhir sesuai Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Mojopahit dan ditetapkan Modal Dasar sebesar Rp150.000.000.000,00.

Nilai Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Mojokerto sesuai setoran modal pada Perumdam Mojopahit berdasarkan nilai perolehan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel e. 66 Daftar Penyertaan Modal kepada Perumdam Mojopahit

1	Modal awal/dasar penyerahan dari Pemerintah Provinsi Jatim, merupakan saldo modal dasar perusahaan per 31 Desember 1997 yang ditetapkan berdasarkan Perda Kabupaten Dati II Mojokerto No. 4 Tahun 1980 tentang PDAM Kabupaten Dati II Mojokerto yang kemudian diperbaharui dengan Perda No. 16 Tahun 1989 tentang perubahan Perda No. 4 Tahun 1980.	568.366.514,00
2	<p>Penyertaan Modal Pemerintah Pusat pada PDAM Kabupaten Dati II Mojokerto ditetapkan statusnya berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor: S-6500/A/92/1994 tanggal 20 Oktober 1994 perihal Penetapan status kelayakan proyek-proyek air bersih Departemen Pekerjaan Umum. Surat Pernyataan tentang Penetapan Status Modal Pemerintah Pusat ditandatangani pada tanggal 13 Oktober 1994. Serta surat Menteri Keuangan Nomor: S-1897/A/52/0597 tanggal 5 Mei 1997 perihal Penetapan Status Aset Eks Proyek Penyediaan & Pengolahan Air Bersih serta Berita Acara Serah Terima Nomor: 5/BA/W.13/97 tanggal 5 Juni 1997 dengan rincian sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bantuan Direktorat Air Bersih 58.201.173,00 - Sarana & Prasarana Air Bersih th 1992 1.259.479.785,00 - Bantuan kendaraan tangki th 1992 35.450.000,00 - Bantuan kendaraan tangki th 1993 41.635.000,00 - Bantuan bahan instalasi th 1993 53.717.898,35 - Bantuan Pemasangan pipa transmisi di Pandan & Dawar Blandong 445.722.070,00 - Bantuan pompa IKK Banyulegi Dawar Blandong 5.429.800,00 - Bantuan SR dan bahan instalasi th 1994 30.892.700,00 - Bantuan bahan instalasi th 1994 11.820.000,00 - Bantuan pemasangan pipa transmisi di IKK Kutorejo th 1995 323.559.300,00 - Bantuan pemasangan pipa transmisi di IKK Kutorejo & Dawar Blandong 941.137.790,00 - Bantuan bahan instalasi th 1994 31.333.800,00 - Bantuan bahan instalasi th 1995 3.068.000,00 - Bantuan bahan instalasi th 1996 1.309.500,00 <p style="text-align: right;">Jumlah 3.242.756.816,35</p>	3.242.756.816,00
3	<p>Saldo Cadangan Umum, merupakan saldo cadangan umum eks pembagian laba per 31 Desember 1999 yang terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Eks tahun 1987 140.905,00 - Eks tahun 1988 1.217.081,00 - Eks tahun 1989 2.259.746,00 - Eks tahun 1990 2.222.600,00 - Eks tahun 1991 1.231.839,00 - Eks tahun 1992 1.270.561,00 - Eks tahun 1993 6.747.403,00 - Eks tahun 1998 4.738.901,00 <p style="text-align: right;">Sub Jumlah 19.829.036,00</p> <p>Dana dipergunakan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> - SKP KPP Mojokerto Tahun 1989 (2.947.138,00) - PPh Ps 25 Th. 1992 (1.601.050,00) - Kekurangan PPh Ps 25 Th. 1992 (3.475.145,00) - Kekurangan PPh Ps 25 Th. 1993 (1.377.678,00) <p style="text-align: right;">Sub Jumlah (9.401.011,00)</p>	10.428.025,00
	Saldo Laba (Rugi) ditahan per 31 Desember 1999, terdiri atas:	(62.136.797,00)
4	<ul style="list-style-type: none"> - Saldo awal tahun 31.592.671,00 - Laba (Rugi) tahun berjalan (62.136.797,00) <p style="text-align: right;">Jumlah (30.544.126,00)</p> <p>Dikurangi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Setoran ke Pemda (17.375.969,00) - Cadangan Umum (4.738.901,00) - Dana Sosial dan Pendidikan (3.159.267,00) 	

	- Jasa Produksi	(3.159.267,00)	
	- Dana Pensiun dan Sumbangan Daerah	(3.159.267,00)	
	Jumlah	(31.592.671,00)	
	Saldo Perubahan Ekuitas 31 Desember 1999		3.759.414.558,00
5	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanen selama tahun 2000		(102.879.778,00)
	- Laba (Rugi) Tahun 2000	(102.879.778,00)	
	Penambahan Penyertaan Modal:		
	Saldo Perubahan Ekuitas 31 Desember 2000		3.656.534.780,00
6	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanen selama tahun 2001		(183.158.941,00)
	- Laba (Rugi) Tahun 2001	(183.158.941,00)	
	Penambahan Penyertaan Modal:		
	- Penambahan Penyertaan Modal dari APBD tahun 2001 yang digunakan untuk menambah jaringan pipa transmisi di Gondang, Japan Raya dan Pondok Teratai (tertuang pada Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada BUMD)		500.000.000,00
	Saldo Perubahan Ekuitas 31 Desember 2001		3.973.375.839,00
7	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanen selama tahun 2002		(258.800.613,00)
	- Laba (Rugi) Tahun 2002	(258.800.613,00)	
	Penambahan Penyertaan Modal:		
	- Penambahan Penyertaan Modal dari APBD tahun 2002 digunakan untuk pengeboran di wilayah Banyulegi, Dawar Blandong, sesuai SPP Nomor 01/PT/Keu/IX/2002 tanggal 30 Agustus 2002		100.000.000,00
	Saldo Perubahan Ekuitas 31 Desember 2002		3.814.575.226,00
8	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanen selama tahun 2003		(230.411.920,00)
	- Laba (Rugi) Tahun 2003	(230.411.920,00)	
	Penambahan Penyertaan Modal:		
	Saldo Perubahan Ekuitas 31 Desember 2003		3.584.163.306,00
9	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanen selama tahun 2004		(910.435.745,00)
	- Koreksi Laba (Rugi) Tahun Lalu	(986.851,00)	
	- Laba (Rugi) Tahun 2004	(909.448.894,00)	
	Penambahan Penyertaan Modal:		
	Saldo Perubahan Ekuitas 31 Desember 2004		2.673.727.561,00
10	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanen selama tahun 2005		(377.568.444,00)
	- Laba (Rugi) Tahun 2005	(377.568.444,00)	
	Penambahan Penyertaan Modal:		
	- Dana Pendamping dari Pemda Kabupaten Mojokerto sebagai syarat menerima bantuan proyek dari APBN untuk Sumber Wonolopo Desa Pacet sebagai pengganti Sumber Ngepre yang terkena musibah banjir bandang tahun 2002 (tertuang pada Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah)		100.000.000,00
	Saldo Perubahan Ekuitas 31 Desember 2005		2.396.159.117,00
11	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanen selama tahun 2006		7.719.270,23
	- Laba (Rugi) Tahun 2006	7.719.270,23	
	Saldo Perubahan Ekuitas 31 Desember 2006		2.403.878.387,23
12	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanen selama tahun 2007		230.298.841,77
	- Laba (Rugi) Tahun 2007	203.095.821,00	
	- Laba Rugi Ditahan	26.045.130,00	
	- Cadangan Umum	1.157.891,00	
	Penambahan Penyertaan Modal:		
	- Tambahan Modal Dari Pemda Tahun 2007 (tertuang pada Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah)		901.000.000,00
	Saldo Perubahan Ekuitas 31 Desember 2007		3.535.177.229,00
13	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanen selama tahun 2008		261.155.313,00
	- Laba (Rugi) Tahun 2008	433.786.761,00	
	- Cadangan Umum	30.464.373,00	
	- Laba ditahan	(203.095.821,00)	
	Saldo Perubahan Ekuitas 31 Desember 2008		3.796.332.541,52
14	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanen selama tahun 2009		714.243.282,25
	- Laba (Rugi) Tahun 2009	714.243.282,25	
	Penambahan Penyertaan Modal:		
	Saldo Perubahan Ekuitas 31 Desember 2009		4.510.575.823,77

15	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanen selama tahun 2010		218.808.007,00
	- Laba (Rugi) Tahun 2010	202.499.124,00	
	- Pengurangan Tahun 2010	(441.650.414,00)	
	- Koreksi Saldo Laba 2010	457.959.297,00	
Saldo Perubahan Ekuitas 31 Desember 2010			4.729.383.830,77
16	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanen selama tahun 2011		1.121.842.725,00
	- Laba tahun 2010	1.139.417.874,00	
	- Koreksi tahun 2010	(508.092.928,00)	
	- Koreksi tahun 2011	490.517.779,00	
Penambahan Penyertaan Modal:			
Saldo Perubahan Ekuitas 31 Desember 2011			5.851.226.555,77
17	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanen selama tahun 2012		976.627.724,00
	- Koreksi Saldo tahun 2011	(999.004.931,00)	
	- Jasa Produksi 2011	(113.941.787,00)	
	- Laba Tahun 2012	1.435.065.451,00	
	- Koreksi Tahun 2012	798.015.536,00	
	- Jasa Produksi 2012	(143.506.545,00)	
Saldo Perubahan Ekuitas 31 Desember 2012			6.827.854.278,21
18	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanen selama tahun 2013		2.105.633.424,01
	- Laba Tahun 2013	2.105.633.424,01	
	Penambahan Penyertaan Modal:		
Saldo Perubahan Ekuitas 31 Desember 2013			8.933.487.702,22
19	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanen selama tahun 2014		(1.973.161.499,43)
	- Laba (Rugi) Tahun 2014	(688.785.591,11)	
	- Jasa Produksi	(210.563.342,40)	
	- Dana Sosial Pendidikan	(354.069.887,46)	
	- Dana Pensiun dan Sokongan	(354.069.887,46)	
	- Koreksi Audit 2014	(365.672.791,00)	
	Penambahan Penyertaan Modal:		
- Penyertaan Modal PEMKAB sesuai Perda No 11 Tahun 2013 dan SK Bupati Mojokerto No 188.45/217/HK/416.012/2014		3.000.000.000,00	
Saldo Perubahan Ekuitas 31 Desember 2014			9.960.326.202,79
20	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanen selama tahun 2015		2.151.287.652,61
	- Laba (Rugi) Tahun 2015	2.151.287.652,61	
	Saldo Perubahan Ekuitas 31 Desember 2015		
21	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanen selama tahun 2016		1.814.191.097,15
	- Laba (Rugi) Tahun 2016	2.487.305.513,61	
	- Pembagian Laba 2015	(27.728.120,88)	
	- Jasa Produksi	(215.128.765,26)	
	- Dana Sosial Pendidikan	(215.128.765,16)	
	- Dana Pensiun dan Sokongan	(215.128.765,16)	
	Penambahan Penyertaan Modal:		
	- Penyertaan Pemkab (tertuang pada Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah)		1.000.000.000,00
Saldo Perubahan Ekuitas 31 Desember 2016			14.925.804.952,55
22	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanen selama tahun 2017		1.512.036.007,00
	- Laba (Rugi) Tahun 2017	2.258.227.660,00	
	- Jasa Produksi	(248.730.551,00)	
	- Dana Sosial Pendidikan	(248.730.551,00)	
	- Dana Pensiun dan Sokongan	(248.730.551,00)	
Saldo Perubahan Ekuitas 31 Desember 2017			16.437.840.959,55
23	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanen selama tahun 2018		3.946.320.118,00
	- Laba (Rugi) Tahun 2018	4.623.788.416,00	
	- Jasa Produksi	(225.822.766,00)	
	- Dana Sosial Pendidikan	(225.822.766,00)	
	- Dana Pensiun dan Sokongan	(225.822.766,00)	
	Penambahan Penyertaan Modal:		
- Penyertaan Pemkab (tertuang pada Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah)		2.000.000.000,00	
Saldo Perubahan Ekuitas 31 Desember 2018			22.384.161.077,55
24	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanen selama tahun 2019		3.883.019.073,00
	- Laba Tahun 2019	5.652.279.678,00	

	- Jasa Produksi	(462.378.841,00)	
	- Dana Sosial & Pendidikan 2019	(462.378.841,00)	
	- Dana Pensiun & Sokongan 2019	(462.378.841,00)	
	- Cadangan Umum 2019	(382.124.082,00)	
	Penambahan Penyertaan Modal:		
	Penambahan Penyertaan Modal 2019 (tertuang pada Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah)		2.000.000.000,00
	Penambahan Penyertaan Modal 2019 APBD (tertuang pada Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah)		2.000.000.000,00
	Saldo Perubahan Ekuitas 31 Desember 2019		30.267.180.150,55
25	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanen selama tahun 2020		865.094.799,00
	- Laba Tahun 2020	5.086.004.216,00	
	- Hutang Bagian Deviden PEMDA	(3.108.753.823,00)	
	- Dana Sosial & Pendidikan 2020	(565.227.968,00)	
	- Dana Pensiun & Sokongan 2020	(565.227.968,00)	
	- Pengembalian Laba tahun 2018	18.300.342,00	
	Saldo Perubahan Ekuitas 31 Desember 2020		31.132.274.949,55
26	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanen selama tahun 2021		973.466.821,01
	- Laba Tahun 2021	5.654.636.024,58	
	- Hutang Bagian Deviden PEMDA	(3.108.753.822,90)	
	- Dana Sosial & Pendidikan 2021	(508.600.421,60)	
	- Dana Pensiun & Sokongan 2021	(1.045.514.617,07)	
	- Pengembalian Laba tahun 2018	(18.300.342,00)	
	Tambahan Penyertaan Modal:		
	- Penyertaan Modal Pemkab dr Bagian Laba tahun 2019		6.217.507.645,80
	Saldo Perubahan Ekuitas 31 Desember 2021		38.323.249.416,57
27	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanen selama tahun 2022		847.041.103,71
	- Laba Tahun 2022	5.370.749.923,38	
	- Setoran PAD Tahun 2022	(3.110.049.813,52)	
	- Dana Sosial & Pendidikan 2022	(565.463.602,46)	
	- Dana Pensiun & Sokongan 2022	(848.195.403,69)	
	Saldo Perubahan Ekuitas 31 Desember 2022		39.170.290.520,28
28	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanen selama tahun 2023		953.086.858,05
	- Laba Tahun 2023	5.249.686.796,76	
	- Setoran PAD Tahun 2023	(2.953.912.457,86)	
	- Dana Sosial & Pendidikan 2023	(537.074.992,34)	
	- Dana Pensiun & Sokongan 2023	(805.612.488,51)	
	Tambahan Penyertaan Modal:		
	- Penambahan Penyertaan Modal 2023 sesuai Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Mojopahit Mojokerto Tahun Anggaran 2023		13.000.000.000,00
	Saldo Perubahan Ekuitas 31 Desember 2023		53.123.377.378,33

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Mojokerto pada Perumdam Mojopahit dibukukan dengan metode ekuitas (*equity methode*) dikarenakan kepemilikan Pemerintah Kabupaten Mojokerto di atas 50%, dan memiliki pengaruh signifikan. Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Mojopahit, telah ditetapkan Modal Dasar sebesar Rp150.000.000.000,00, sedangkan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sesuai setoran modal sebesar Rp41.812.612.938,70.

Dari mutasi tambah dan mutasi kurang tersebut dalam tabel, diperoleh Nilai Investasi Permanen Pemerintah Kabupaten Mojokerto pada PDAM Mojopahit Mojokerto per 31 Desember 2023 menjadi sebesar Rp53.123.377.368,67.

Adapun Laporan Keuangan PDAM Kabupaten Mojokerto disajikan dalam lampiran 14.

(2)) PT BPR Majatama

PD. BPR Bank Pasar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 10 Tahun 1994 tentang PD. BPR Bank Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1995 Seri C Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 26 Tahun 2001 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2001 Seri C Nomor 2) dan yang terakhir diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Mojokerto. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perubahan Bentuk Badan Usaha dari PD. BPR Bank Pasar menjadi PT BPR Majatama, maka modal PT BPR Majatama merupakan pengalihan seluruh kekayaan Pemerintah Kabupaten Mojokerto pada PD. BPR Bank Pasar Kabupaten Mojokerto kepada PT BPR Majatama.

Nilai Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Kabupaten Mojokerto pada PT BPR Majatama berdasarkan Nilai Perolehan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel e. 67 Daftar Penyertaan Modal kepada PT BPR Majatama

NO	URAIAN		NILAI	% KEPEMILIKAN
1	Setoran modal dasar Pemerintah Kabupaten Mojokerto		89.092.392,00	89092392/89092392
2	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanen tahun 1994			
	a	Laba Tahun 1994	64.125.586	
	Penambahan penyertaan modal tahun 1994		0,00	100
	Saldo Perubahan Ekuitas 31 Desember 1994		153.217.978,00	153217978/153217978
3	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanen tahun 1995			
	a	Dana Pembangunan Tahun 1994	(19.237.675)	
	b	Anggaran Belanja Daerah Tahun 1994	(16.031.396)	
	c	Jasa Produksi 1994	(6.412.560)	
	d	Dana Pendidikan Pegawai Tahun 1994	(6.412.560)	
	e	Dana Hari Tua 1994	(6.412.558)	
	f	Dana Sosial Tahun 1994	(3.206.279)	
	g	Laba Tahun 1995	79.411.226	
	Penambahan penyertaan modal tahun 1995		20.000.000,00	100
	Saldo Perubahan Ekuitas 31 Desember 1995		194.916.176,00	194916176/194916176
4	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanen tahun 1996			
	a	Deviden Tahun 1995	(31.764.490)	
	b	Dana Kesra Tahun 1995	(7.941.123)	
	c	Jasa Produkdi Tahun 1995	(7.941.123)	
	d	Tantiem Tahun 1995	0	
	e	CSR Tahun 1995	0	
	f	Laba Tahun 1996	82.325.945	
	Penambahan penyertaan modal tahun 1996 sebanyak dua kali yaitu pada bulan Mei sebanyak 20.000.000 dan bulan Desember sebanyak 15.000.000		35.000.000,00	264595385/64595385
Saldo Perubahan Ekuitas 31 Desember 1996		264.595.385,00	100	
5	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanen tahun 1997			
	a	Deviden Tahun 1996	(32.930.377)	
	b	Dana Kesra Tahun 1996	(8.232.595)	
	c	Jasa Produkdi Tahun 1996	(8.232.595)	
	d	Tantiem Tahun 1996	0	
	e	CSR Tahun 1996	0	
	f	Laba Tahun 1997	83.294.170	448493988/448493988

	Penambahan penyertaan modal tahun 1997	150.000.000,00	100
	Saldo Perubahan Ekuitas 31 Desember 1997	448.493.988,00	
6	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanen tahun 1998		
	a Deviden Tahun 1997	(33.317.668)	
	b Dana Kesra Tahun 1997	(8.329.417)	
	c Jasa Produkdi Tahun 1997	(8.329.417)	
	d Tantiem Tahun 1997	0	
	e CSR Tahun 1997	0	
	f Laba Tahun 1998	83.294.170	581811656/581811656
	Penambahan penyertaan modal tahun 1998	100.000.000,00	100
	Saldo Perubahan Ekuitas 31 Desember 1998	581.811.656,00	
7	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanen tahun 1999		
	a Deviden Tahun 1998	(23.606.765)	
	b Dana Kesra Tahun 1998	(5.901.692)	
	c Jasa Produkdi Tahun 1998	(5.901.692)	
	d Tantiem Tahun 1998	0	
	e CSR Tahun 1998	0	
	f Laba Tahun 1999	74.307.932	720709439/720709439
	Penambahan penyertaan modal tahun 1999	100.000.000,00	100
	Saldo Perubahan Ekuitas 31 Desember 1999	720.709.439,00	
8	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanen tahun 2000		
	a Deviden Tahun 1999	(29.723.172)	
	b Dana Kesra Tahun 1999	(7.430.793)	
	c Jasa Produkdi Tahun 1999	(7.430.793)	
	d Tantiem Tahun 1999	0	
	e CSR Tahun 1999	0	
	f Laba Tahun 2000	117.288.147	868412828/868412828
	Penambahan penyertaan modal tahun 2000	75.000.000,00	100
	Saldo Perubahan Ekuitas 31 Desember 2000	868.412.828,00	
9	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanen tahun 2001		
	a Deviden Tahun 2000	(46.915.259)	
	b Dana Kesra Tahun 2000	(11.728.815)	
	c Jasa Produkdi Tahun 2000	(11.728.815)	
	d Tantiem Tahun 2000	0	
	e CSR Tahun 2000	0	
	f Laba Tahun 2001	177.597.605	1550637544/1550637544
	Penambahan penyertaan modal tahun 2001 sebanyak dua kali yaitu pada bulan Maret sebanyak 75.000.000 dan bulan September sebanyak 500.000.000 berdasarkan pengesahan OJK tanggal 1 November 2001	575.000.000,00	100
	Saldo Perubahan Ekuitas 31 Desember 2001	1.550.637.544,00	
10	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanen tahun 2002		
	a Deviden Tahun 2001	(71.039.043)	
	b Dana Kesra Tahun 2001	(17.759.760)	
	c Jasa Produkdi Tahun 2001	(17.759.760)	
	d Tantiem Tahun 2001	0	
	e CSR Tahun 2001	0	
	f Laba Tahun 2002	328.639.491	2522718472/2522718472
	Penambahan penyertaan modal tahun 2002 sebanyak dua kali yaitu pada bulan Februari 2022 sebanyak 250.000.000 berdasarkan pengesahan OJK tanggal 6 September 2002 dan bulan Juli sebanyak 500.000.000	750.000.000,00	100
	Saldo Perubahan Ekuitas 31 Desember 2002	2.522.718.472,00	
11	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanen tahun 2003		
	a Deviden Tahun 2002	(131.455.796)	
	b Dana Kesra Tahun 2002	(32.863.949)	

	c	Jasa Produkdi Tahun 2002	(32.863.949)		
	d	Tantiem Tahun 2002	0		
	e	CSR Tahun 2002	0		
	f	Laba Tahun 2003	384.497.133		2960031911/2960031911
	Penambahan penyertaan modal tahun 2003			250.000.000,00	100
	Saldo Perubahan Ekuitas 31 Desember 2003			2.960.031.911,00	
12	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanen tahun 2004				
	a	Deviden Tahun 2003	(153.798.853)		
	b	Dana Kesra Tahun 2003	(38.449.713)		
	c	Jasa Produkdi Tahun 2003	(38.449.713)		
	d	Tantiem Tahun 2003	0		
	e	CSR Tahun 2003	0		
	f	Laba Tahun 2004	444.377.434		100
	Penambahan penyertaan modal tahun 2004			200.000.000,00	3373711066/3373711066
	Saldo Perubahan Ekuitas 31 Desember 2004			3.373.711.066,00	
13	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanen tahun 2005				
	a	Deviden Tahun 2004	(177.750.974)		
	b	Dana Kesra Tahun 2004	(44.437.743)		
	c	Jasa Produkdi Tahun 2004	(44.437.743)		
	d	Tantiem Tahun 2004	0		
	e	CSR Tahun 2004	0		
	f	Laba Tahun 2005	542.931.794		3650016400/3650016400
	Tidak terdapat tambahan penyertaan modal di tahun 2005			0,00	100
	Saldo Perubahan Ekuitas 31 Desember 2005			3.650.016.400,00	
14	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanen tahun 2006				
	a	Deviden Tahun 2005	(217.172.718)		
	b	Dana Kesra Tahun 2005	(54.293.179)		
	c	Jasa Produkdi Tahun 2005	(54.293.179)		
	d	Tantiem Tahun 2005	0		
	e	CSR Tahun 2005	0		
	f	Laba Tahun 2006	331.491.806		3955749130/3955749130
	Penambahan penyertaan modal tahun 2006			300.000.000,00	100
	Saldo Perubahan Ekuitas 31 Desember 2006			3.955.749.130,00	
15	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanen tahun 2007				
	a	Deviden Tahun 2006	(132.596.722)		
	b	Dana Kesra Tahun 2006	(33.149.181)		
	c	Jasa Produkdi Tahun 2006	(33.149.181)		
	d	Tantiem Tahun 2006	0		
	e	CSR Tahun 2006	0		
	f	Laba Tahun 2007	845.268.150		6102122196/6102122196
	Penambahan penyertaan modal tahun 2007			1.500.000.000,00	100
	Saldo Perubahan Ekuitas 31 Desember 2007			6.102.122.196,00	
16	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanen tahun 2008				
	a	Laba Tahun 2007			
	b	Deviden Tahun 2007	(338.107.260)		
	c	Dana Kesra Tahun 2007	(84.526.815)		
	d	Jasa Produkdi Tahun 2007	(84.526.815)		
	e	Tantiem Tahun 2007	0		
	f	CSR Tahun 2007	0		
	g	Laba Tahun 2008	826.857.534		6421818840/6421818840
	Tidak terdapat tambahan penyertaan modal di tahun 2008			0,00	100
	Saldo Perubahan Ekuitas 31 Desember 2008			6.421.818.840,00	
17	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanen tahun 2009				
	a	Deviden Tahun 2008	(330.743.014)		
	b	Dana Kesra Tahun 2008	(82.685.753)		

	c	Jasa Produkdi Tahun 2008	(82.685.753)		
	d	Tantiem Tahun 2008	0		
	e	CSR Tahun 2008	0		
	f	Laba Tahun 2009	684.425.148		8460129468/8460129468
	Penggunaan Cadangan Tujuan untuk setor PAD sebesar Rp150.000.000			-150.000.000,00	100
	Penambahan penyertaan modal tahun 2009 sebesar Rp1.000.000.000 dan perubahan setoran modal dari kewajiban lain-lain Rp1.000.000.000			2.000.000.000,00	
	Saldo Perubahan Ekuitas 31 Desember 2009			8.460.129.468,00	
18	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanen tahun 2010				
	a	Deviden Tahun 2009	(342.212.574)		
	b	Dana Kesra Tahun 2009	(68.442.515)		
	c	Jasa Produkdi Tahun 2009	(68.442.515)		
	d	Tantiem Tahun 2009	0		
	e	CSR Tahun 2009	0		
	f	Laba Tahun 2010	(1.020.366.088)		6960665776/6960665776
	Tidak terdapat tambahan penyertaan modal di tahun 2010			0,00	100
	Saldo Perubahan Ekuitas 31 Desember 2010			6.960.665.776,00	
19	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanen selama 2011				
	a	Deviden Tahun 2010	0		
	b	Dana Kesra Tahun 2010	0		
	c	Jasa Produkdi Tahun 2010	0		
	d	Tantiem Tahun 2010	0		
	e	CSR Tahun 2010	0		
	f	Laba Tahun 2011	813.529.646		7774195422/7774195422
	Tidak terdapat tambahan penyertaan modal di tahun 2011			0,00	100
	Saldo Perubahan Ekuitas 31 Desember 2011			7.774.195.422,00	
20	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanen tahun 2012				
	a	Deviden Tahun 2011	(406.764.822)		
	b	Dana Kesra Tahun 2011	(81.352.965)		
	c	Jasa Produkdi Tahun 2011	(81.352.965)		
	d	Tantiem Tahun 2011	0		
	e	CSR Tahun 2011	0		
	f	Laba Tahun 2012	671.659.894		8039857541/8039857541
	Penggunaan Cadangan Umum untuk menutup kerugian dan renovasi gedung baru sebesar Rp826,717,229 sehingga jumlah saldo Cadangan Umum berkurang sebesar Rp336,527,023			-336.527.023,00	100
	Penambahan penyertaan modal tahun 2012			500.000.000,00	
	Saldo Perubahan Ekuitas 31 Desember 2012			8.039.857.541,00	
21	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanen tahun 2013				
	a	Deviden Tahun 2012	(335.829.947)		
	b	Dana Kesra Tahun 2012	(67.165.990)		
	c	Jasa Produkdi Tahun 2012	(67.165.989)		
	d	Tantiem Tahun 2012	0		
	e	CSR Tahun 2012	0		
	f	Laba Tahun 2013	548.762.703		8018458318/8018458318
	Penggunaan Cadangan Umum untuk pembelian Software Aplikasi Bank			-100.000.000,00	100
	Tidak terdapat tambahan penyertaan modal di tahun 2013			0,00	
	Saldo Perubahan Ekuitas 31 Desember 2013			8.018.458.318,00	
22	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanen tahun 2014				
	a	Deviden Tahun 2013	(274.381.352)		
	b	Dana Kesra Tahun 2013	(54.876.270)		
	c	Jasa Produkdi Tahun 2013	(54.876.271)		
	d	Tantiem Tahun 2013	0		
	e	CSR Tahun 2013	0		
	f	Laba Tahun 2014	723.749.836		9644092392/9664092392

	Pengurangan modal sebesar 92.392 sekaligus penambahan penyertaan modal sebesar Rp3.000.000.000		2.999.907.608,00	(99,7930483361629)
	Saldo Perubahan Ekuitas 31 Desember 2014		11.357.981.869,50	
23	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanen selama 2015			
	a	Deviden Tahun 2014	(466.382.224)	
	b	Dana Kesra Tahun 2014	(50.767.553)	
	c	Jasa Produksi 2014	(72.525.669)	
	d	Tantiem Tahun 2014	0	
	e	CSR Tahun 2014	(14.505.015)	
	f	Dana Pembinaan 2014	(3.626.254)	
	g	Laba Tahun 2015	1.158.098.792	
	Tidak terdapat tambahan penyertaan modal di tahun 2015		0,00	9644092392/9664092392 (99,7930483361629)
	Saldo Perubahan Ekuitas 31 Desember 2015		11.908.273.946,47	
24	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanen tahun 2016			
	a	Deviden Tahun 2015	(681.011.060)	
	c	Dana Kesra Tahun 2015	(83.056.965)	
	d	Jasa Produksi 2015	(116.500.050)	
	e	Tantiem Tahun 2015	0	
	f	CSR Tahun 2015	0	
	g	Laba Tahun 2016	714071652,1	
	Penambahan penyertaan modal tahun 2016		1.000.000.000,00	10644092392/10664092392 (99,8124547381547)
	Saldo Perubahan Ekuitas 31 Desember 2016		12.741.777.523,58	
25	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanen tahun 2017			
	a	Deviden Tahun 2016	(700.000.000)	
	b	Dana Kesra Tahun 2016	(4.653.898)	
	c	Jasa Produksi 2016	0	
	d	Tantiem Tahun 2016	0	
	e	CSR Tahun 2016	0	
	f	Laba Tahun 2017	1634220127	
	Tidak terdapat tambahan penyertaan modal di tahun 2017		0,00	10644092392/10664092392 (99,8124547381547)
	Saldo Perubahan Ekuitas 31 Desember 2017		13.671.343.752,29	
26	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanen tahun 2018			
	a	Deviden Tahun 2017	(898.821.056)	
	b	Dana Kesra Tahun 2017	(163.729.078)	
	c	Jasa Produksi 2017	(130.983.263)	
	d	Tantiem Tahun 2017	(65.491.631)	
	e	CSR Tahun 2017	(49.118.724)	
	f	Dana Pembinaan 2017	0	
	k	Laba Tahun 2018	1.773.640.704	
	Penambahan penyertaan modal tahun 2018		0,00	13644092392/13664092392 (99,8536309662857)
	Saldo Perubahan Ekuitas 31 Desember 2018		14.136.840.704,13	
27	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanen tahun 2019			
	a	Deviden Tahun 2018	(975.100.107)	
	b	Dana Kesra Tahun 2018	(177.624.057)	
	c	Jasa Produksi 2018	(142.099.246)	
	d	Tantiem Tahun 2018	(71.049.623)	
	e	CSR Tahun 2018	(53.287.217)	
	f	Dana Pembinaan 2018		
	g	Laba Tahun 2019	2.070.985.432	
	Penambahan penyertaan modal tahun 2019		3.000.000.000,00	16644092392/16664092392 (99,8799814623591)
	Saldo Perubahan Ekuitas 31 Desember 2019		17.788.665.885,97	
28	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanen tahun 2020			
	a	Deviden Tahun 2019	(1.138.741.472)	
	b	Dana Kesra Tahun 2019	(207.347.399)	
	c	Jasa Produksi 2019	(165.877.919)	

	d	Tantiem Tahun 2019	(82.938.959)		
	e	CSR Tahun 2019	(62.204.219)		
	f	Dana Pembinaan 2019			
	g	Laba Tahun 2020	2.896.379.398		19800092392/19820092392
	Penambahan penyertaan modal tahun 2020			3.000.000.000,00	(99,8990922968246)
	Saldo Perubahan Ekuitas 31 Desember 2020			22.027.935.315,87	
29	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanen tahun 2021				
	a	Deviden Tahun 2020	(1.592.703.913)		
	b	Dana Kesra Tahun 2020	(289.930.502)		
	c	Jasa Produksi 2020	(231.944.402)		
	d	Tantiem Tahun 2020	(115.972.201)		
	e	CSR Tahun 2020	(86.979.151)		
	f	Dana Pembinaan 2020			
	g	Laba Tahun 2021	3.362.342.182		19800092392/19820092392
	Tidak terdapat tambahan penyertaan modal di tahun 2021			3.156.000.000,00	(99,8990922968246)
	Saldo Perubahan Ekuitas 31 Desember 2021			26.228.747.328,48	
30	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanen tahun 2022				
	a	Deviden Tahun 2021	(1.849.305.003)		
	b	Dana Kesra Tahun 2021	(336.573.848)		
	c	Jasa Produksi 2021	(269.259.077)		
	d	Tantiem Tahun 2021	(134.629.539)		
	e	CSR Tahun 2021	(100.972.154)		
	f	Dana Pembinaan 2021			
	g	Laba Tahun 2022	6.005.508.573		19800092392/19820092392
	Penambahan penyertaan modal tahun 2022			0,00	(99,8990922968246)
	Saldo Perubahan Ekuitas 31 Desember 2022			29.543.516.280,51	
31	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanen tahun 2023				
	a	Deviden Tahun 2022	(3.303.059.727)		
	b	Dana Kesra Tahun 2022	(601.157.473)		
	c	Jasa Produksi 2022	(480.925.977)		
	d	Tantiem Tahun 2022	(240.462.989)		
	e	CSR Tahun 2022	(180.347.241)		
	f	Dana Pembinaan 2022			
	g	Laba Tahun 2023	7.377.654.510		22800000000/22820000000
	Penambahan penyertaan modal tahun 2023			3.000.000.000,00	(99,9123579359082)
	Saldo Perubahan Ekuitas 31 Desember 2023			35.115.217.383,97	

Nilai Investasi Permanen pada PT BPR Majatama Kabupaten Mojokerto per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.29.543.516.280,51. Sesuai Laporan Keuangan Audited PT BPR Majatama Tahun 2023, diketahui mutasi tambah atau penambahan penyertaan modal pada PT BPR Majatama sebesar Rp.10.377.654.510,00 dengan rincian sebagai berikut:

- Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Mojokerto kepada PT BPR Majatama Tahun 2023 sebesar Rp.3.000.000.000,00.
- Bagian Laba Pemerintah Kabupaten Mojokerto atas Laba Tahun 2023 PT BPR Majatama sebesar Rp.7.377.654.510,00.

Mutasi kurang tahun 2023 sebesar Rp.2.690.739.620,00, terdiri dari:

- Pembagian Deviden atas Laba Tahun 2022 sebesar Rp.3.303.059.728,00.
- Penggunaan Laba untuk Dana Kesejahteraan, Dana Sosial, Tantiem dan Jasa Produksi yang mengurangi ekuitas sebesar Rp.1.502.893.678,00.

Atas mutasi tambah dan mutasi kurang tersebut, diperoleh saldo Investasi PT BPR Majatama per 31 Desember 2023 sebesar Rp.35.115.217.383,97.

Adapun Laporan Keuangan PT BPR Majatama disajikan dalam **lampiran 15**.

(3) Bank Jatim

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Mojokerto pada Bank Jatim per 31 Desember 2023 sebesar Rp19.593.450.250,00 tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel e. 68 Daftar Penyertaan Modal Kepada Bank Jatim

(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai
1.	Sampai dengan Tahun 2000	807.000.000,00
2.	Tahun 2001	50.000.000,00
3.	Tahun 2002	510.000.000,00
4.	Tahun 2003	413.000.000,00
5.	Tahun 2004	541.000.000,00
6.	Tahun 2005	263.000.000,00
7.	Tahun 2006	542.000.000,00
8.	Tahun 2007	675.000.000,00
9.	Tahun 2008	1.000.000.000,00
10.	Tahun 2009	1.000.000.000,00
11.	Tahun 2010	-
12.	Tahun 2011	-
13.	Tahun 2012	5.000.000.000,00
14.	Cadangan yang dikonversi	8.792.450.250,00
15.	Tahun 2013	-
16.	Tahun 2014	-
17.	Tahun 2015	-
18.	Tahun 2017	-
19.	Tahun 2018	-
20.	Tahun 2019	-
21.	Tahun 2022	-
22.	Tahun 2021	-
23.	Tahun 2023	-
	Jumlah	19.593.450.250,00

persentase Kepemilikan Pemerintah Kabupaten Mojokerto atas Saham Bank Jatim adalah sebagai berikut:

Tabel e. 69 persentase Kepemilikan Pada Bank Jatim

(dalam rupiah)

Jenis Saham	Jumlah Lembar Saham Bank Jatim	Nilai Nominal	Total Nilai Nominal	Jumlah Lembar Saham Pemkab	Total Nilai Nominal
Seri A	24.000.000.000	250,00	6.000.000.000.000,00	78.373.801	19.593.450.250,00
Seri B	12.000.000.000	250,00	3.000.000.000.000,00	0	0,00
Jumlah	36.000.000.000		9.000.000.000.000,00	78.373.801	19.593.450.250,00
persentase Kepemilikan Pemerintah Kabupaten Mojokerto atas Saham Bank Jatim					0,22%

Nilai Investasi Saham Pemerintah Kabupaten Mojokerto per 31 Desember 2023 pada PT Bank Pembangunan daerah Jawa Timur sebesar Rp19.593.450.250,00 yang terbagi dalam 78.373.801 lembar saham. persentase kepemilikan pada PT Bank Jatim sebesar 0,22% sehingga dihitung dengan Metode Biaya (*cost methode*). Deviden yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto pada Tahun 2022 sebesar Rp4.160.865.095,09 dan masuk ke Rekening Kas Umum Daerah pada tanggal 12 Mei 2023. Nilai Investasi tersebut sesuai dengan sertifikat saham dari Bank Jatim yang disajikan dalam **lampiran 16**.

7.e.3).a).(3) Aset Tetap

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
5.425.516.507.741,47	5.425.896.293.253,87

Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Mojokerto per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel e. 70 Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan Per 31 Desember 2022
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Naik/Turun
Tanah	2.890.273.032.420,86	2.889.784.877.420,86	488.155.000,00
Peralatan dan Mesin	1.267.733.057.741,55	1.215.274.494.483,60	52.458.563.257,95
Gedung dan Bangunan	1.652.016.796.625,72	1.508.369.493.244,72	143.647.303.381,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.321.441.857.601,92	3.174.513.108.296,92	146.928.749.305,00
Aset Tetap Lainnya	15.629.496.523,49	11.139.670.174,49	4.489.826.349,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	9.443.840.013,60	6.797.610.038,00	2.646.229.975,60
Akumulasi Penyusutan	-3.731.021.573.185,67	-3.379.982.960.404,72	-351.038.612.780,95
Jumlah	5.425.516.507.741,47	5.425.896.293.253,87	-379.785.512,40

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2023 sebesar Rp5.425.516.507.741,47 nilai tersebut berasal dari mutasi sebagai berikut:

Tabel e. 71 Mutasi Aset Tetap Tahun 2023

Uraian	Nominal
Saldo Per 31 Desember 2022	8.805.879.253.658,59
Penambahan	431.807.601.012,48
Pengurangan	81.148.773.743,93
Saldo per 31 Desember 2023	9.156.538.080.927,14
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023	-3.731.021.573.185,67
Saldo setelah Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023	5.425.516.507.741,47

Penambahan Aset Tetap tahun 2023 sebesar Rp431.807.601.012,48, terdiri dari:

Tabel e. 72 Penambahan Aset Tetap Tahun 2023

Penambahan	Nominal
a. Belanja Modal/Pengadaan	368.834.887.917,88
b. Mutasi Masuk	45.903.396.589,00
c. Reklasifikasi Masuk	10.782.461.275,00
d. Inventarisasi	23.800.000,00
e. Hibah	1.496.168.030,00
f. Mutasi Masuk Karena Perubahan SOTK	0,00
g. Koreksi Nilai	0,00
h. Koreksi Kurang Catat	0,00
i. Pelunasan KDP	3.053.933.500,00
j. Hutang	351.540.833,60
k. Koreksi Atribusi/Kapitalisasi	1.361.412.867,00
Jumlah Penambahan	431.807.601.012,48

Pengurangan Aset Tetap tahun 2023 sebesar Rp81.148.773.743,93 terdiri dari:

Tabel e. 73 Pengurangan Aset Tetap Tahun 2023

Pengurangan	Nominal
a. Mutasi Keluar	45.903.396.589,00
b. Reklasifikasi	11.215.866.875,00
c. Hibah	167.153.000,00
d. Rusak Berat	16.522.251.592,15
e. Penghapusan	875.120.000,00
f. Mutasi Keluar Karena Perubahan SOTK	0,00
g. Koreksi Nilai	0,00

Pengurangan	Nominal
h. Koreksi Lebih Catat	0,00
i. Koreksi Atribusi/Kapitalisasi	1.050.588.433,00
j. Pelunasan KDP	3.053.933.500,00
k. Ekstrakompatel	2.360.463.754,78
Jumlah Pengurangan	81.148.773.743,93

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2023 sebesar Rp5.425.516.507.741,47 terdiri dari:

Tabel e. 74 Daftar Aset Tetap Tahun 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Saldo per 31 Desember 2022	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo per 31 Desember 2023
Tanah	2.889.784.877.420,86	5.901.155.000,00	5.413.000.000,00	2.890.273.032.420,86
Peralatan dan Mesin	1.215.274.494.483,60	73.915.734.136,88	21.457.170.878,93	1.267.733.057.741,55
Gedung dan Bangunan	1.508.369.493.244,72	187.179.164.208,00	43.531.860.827,00	1.652.016.796.625,72
Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.174.513.108.296,92	151.511.829.943,00	4.583.080.638,00	3.321.441.857.601,92
Aset Tetap Lainnya	11.139.670.174,49	4.931.129.499,00	441.303.150,00	15.629.496.523,49
Konstruksi Dalam Pengerjaan	6.797.610.038,00	8.368.588.225,60	5.722.358.250,00	9.443.840.013,60
Jumlah Aset Tetap	8.805.879.253.658,59	431.807.601.012,48	81.148.773.743,93	9.156.538.080.927,14
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023	-3.379.982.960.404,72			-3.731.021.573.185,67
Saldo setelah Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023	5.425.896.293.253,87			5.425.516.507.741,47

Nilai Aset Tetap di atas tidak termasuk Barang Ekstrakomptabel, sebagai berikut:

Tabel e. 75 Daftar Barang Ekstrakomptabel

(dalam rupiah)

Uraian	Nominal
Peralatan dan Mesin	228.432.351.402,79
Gedung dan Bangunan	1.672.449.958,87
Jalan, Irigasi dan Jaringan	24.213.150,00
Aset Tetap Lainnya	37.853.657.060,45
Jumlah	267.982.671.572,11

Penjelasan lebih lanjut atas Aset Tetap tersebut per jenis aset adalah sebagai berikut:

7.e.3).a).(3).(a) Tanah

Tanah milik Pemerintah Kabupaten Mojokerto per 31 Desember 2023 dibandingkan dengan Aset Tanah per 31 Desember 2022.

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Naik/Turun
Tanah	2.890.273.032.420,86	2.889.784.877.420,86	488.155.000,00

Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.890.273.032.420,86 berasal dari mutasi sebagai berikut:

Tabel e. 76 Mutasi Aset Tetap Tanah Tahun 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Nominal
1	Saldo Per 31 Desember 2022	2.889.784.877.420,86
2	Penambahan :	
	a. Belanja Modal/Pengadaan	451.920.000,00
	b. Mutasi Masuk	5.413.000.000,00
	c. Reklasifikasi	0,00
	d. Inventarisasi	0,00
	e. Hibah	0,00
	f. Mutasi Masuk Karena Perubahan SOTK	0,00

No	Uraian	Nominal
	g. Koreksi Nilai	0,00
	h. Koreksi Kurang Catat	0,00
	i. Koreksi Atribusi/Kapitalisasi	36.235.000,00
	Jumlah	5.901.155.000,00
3	Pengurangan :	
	a. Mutasi Keluar	5.413.000.000,00
	b. Reklasifikasi	0,00
	c. Hibah	0,00
	d. Rusak Berat	0,00
	e. Penghapusan	0,00
	f. Mutasi Keluar Karena Perubahan SOTK	0,00
	g. Koreksi Nilai	0,00
	h. Koreksi Lebih Catat	0,00
	i. Koreksi Atribusi/Kapitalisasi	0,00
	Jumlah	5.413.000.000,00
4	Saldo Per 31 Desember 2023	2.890.273.032.420,86

Penambahan nilai Aset Tetap Tanah sebesar Rp5.901.155.000,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- (1) Realisasi belanja modal tanah sebesar Rp451.920.000,00 pada Dinas PerumahanRakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan berupa tanah untuk makam.
- (2) Mutasi masuk antar Organisasi Perangkat Daerah sebesar Rp5.413.000.000,00 dengan rincian :
 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp165.000.000,00 berupa tanah bangunan pusat industri perdagangan akan di pergunakan sebagai mall pelayanan publik Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor 028/535/416-119/2023 tanggal 2 Mei 2023 dan Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor 028/443/416-203.4/2023 tanggal 31 Agustus 2023.
 - Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dari Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah SKPKD (BPKAD SKPKD) sebesar Rp4.163.000.000,00 atas tanah bangunan kantor DPRDBerdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor 028/4433/416-203.4/2023 tanggal 21 September 2023.
 - Kecamatan Trowulan dari Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah SKPKD (BPKAD SKPKD) sebesar Rp1.085.000.000,00 berupa tanah bangunan kantor Kecamatan Trowulan berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor 028/4434/416-203.4/2023 tanggal 1 September 2023.
- (3) Koreksi Atribusi dari Belanja Barang dan Jasa menunjang belanja modal tanah pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan sebesar Rp36.235.000,00 berupa Jasa Apraisal pengadaan tanah yang merupakan komponen pembentuk harga perolehan tanah.

Pengurangan nilai Aset Tetap Tanah sebesar Rp5.413.000.000,00 karena mutasi keluar antar Organisasi Perangkat Daerah sebesar Rp5.248.000.000,00 dengan rincian:

- (1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp165.000.000,00 berupa tanah bangunan pusat industri perdagangan akan di pergunakan sebagai mall pelayanan publik Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor 028/535/416-119/2023 tanggal 2 Mei 2023 dan Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor 028/443/416-203.4/2023 tanggal 31 Agustus 2023.

- (2) Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah SKPKD (BPKAD SKPKD) terdapat mutasi keluar ke Organisasi Perangkat Daerah sebagai berikut:
- Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebesar Rp4.163.000.000,00 berupa tanah bangunan kantor DPRD Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor 028/4433/416-203.4/2023 tanggal 21 September 2023.
 - Kecamatan Trowulan sebesar Rp1.085.000.000,00 berupa tanah bangunan kantor Kecamatan Trowulan berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor 028/4434/416-203.4/2023 tanggal 1 September 2023.

Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.890.273.032.420,86 dan mutasi tahun 2023 per Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah sebagai berikut:

Tabel e. 77 Aset Tetap Tanah per OPD

(dalam rupiah)

No	OPD	Saldo 31 Des 2022	Mutasi		Saldo 31 Des 2023
			Tambah	Kurang	
1	Dinas Pendidikan	475.263.648.800,00	0,00	0,00	475.263.648.800,00
2	Dinas Kesehatan	30.891.102.890,00	0,00	0,00	30.891.102.890,00
3	UOBK RSUD. Prof. DR. Soekandar	6.563.400.000,00	0,00	0,00	6.563.400.000,00
4	UOBK RSUD.Prof.DR.Soekandar BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00
5	RSUD. RA Basuni	2.318.975.000,00	0,00	0,00	2.318.975.000,00
6	RSUD. RA Basuni BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.801.235.351.317,46	0,00	0,00	1.801.235.351.317,46
8	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan	125.654.599.326,40	488.155.000,00	0,00	126.142.754.326,40
9	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9.206.500.000,00	0,00	0,00	9.206.500.000,00
12	Dinas Sosial	3.661.381.000,00	0,00	0,00	3.661.381.000,00
13	Dinas Tenaga Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dinas Pangan dan Perikanan	5.743.500.000,00	0,00	0,00	5.743.500.000,00
15	Dinas Lingkungan Hidup	26.429.212.679,00	0,00	0,00	26.429.212.679,00
16	Dinas Kependudukan dan catatan Sipil	425.500.000,00	0,00	0,00	425.500.000,00
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan	745.300.000,00	0,00	0,00	745.300.000,00
19	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.080.000.000,00	0,00	0,00	2.080.000.000,00
20	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	347.500.000,00	0,00	0,00	347.500.000,00
21	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	887.500.000,00	165.000.000,00	0,00	1.052.500.000,00
22	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga	23.154.900.000,00	0,00	0,00	23.154.900.000,00
24	Dinas Pertanian	59.365.754.000,00	0,00	0,00	59.365.754.000,00
25	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	44.259.431.404,00	0,00	165.000.000,00	44.094.431.404,00
26	Sekretariat Daerah	42.215.600.000,00	0,00	0,00	42.215.600.000,00
27	Sekretariat DPRD	0,00	4.163.000.000,00	0,00	4.163.000.000,00
28	Kecamatan Sooko	612.500.000,00	0,00	0,00	612.500.000,00

No	OPD	Saldo 31 Des 2022	Mutasi		Saldo 31 Des 2023
			Tambah	Kurang	
29	Kecamatan Trowulan	0,00	1.085.000.000,00	0,00	1.085.000.000,00
30	Kecamatan Puri	470.210.000,00	0,00	0,00	470.210.000,00
31	Kecamatan Bangsal	673.500.000,00	0,00	0,00	673.500.000,00
32	Kecamatan Gedeg	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Kecamatan Kemlagi	517.500.000,00	0,00	0,00	517.500.000,00
34	Kecamatan Jetis	3.450.000.000,00	0,00	0,00	3.450.000.000,00
35	Kecamatan Dawarblandong	480.000.000,00	0,00	0,00	480.000.000,00
36	Kecamatan Mojosari	52.745.336.629,00	0,00	0,00	52.745.336.629,00
37	Kecamatan Pungging	777.170.000,00	0,00	0,00	777.170.000,00
38	Kecamatan Ngoro	518.750.000,00	0,00	0,00	518.750.000,00
39	Kecamatan Kutorejo	783.750.000,00	0,00	0,00	783.750.000,00
40	Kecamatan Dlanggu	975.000.000,00	0,00	0,00	975.000.000,00
41	Kecamatan Gondang	663.250.000,00	0,00	0,00	663.250.000,00
42	Kecamatan Jatirejo	422.500.000,00	0,00	0,00	422.500.000,00
43	Kecamatan Trawas	1.460.000.000,00	0,00	0,00	1.460.000.000,00
44	Kecamatan Pacet	1.250.000.000,00	0,00	0,00	1.250.000.000,00
45	Kecamatan Mojoanyar	6.416.579.000,00	0,00	0,00	6.416.579.000,00
46	Inspektorat	668.646.000,00	0,00	0,00	668.646.000,00
47	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	528.000.000,00	0,00	0,00	528.000.000,00
49	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPKD)	155.923.029.375,00	0,00	5.248.000.000,00	150.675.029.375,00
50	Badan Pendapatan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	2.889.784.877.420,86	5.901.155.000,00	5.413.000.000,00	2.890.273.032.420,86

Dari total saldo Aset Tetap Tanah tersebut di atas termasuk didalamnya:

- Delapan puluh (80) bidang tanah senilai Rp49.881.523.939,00 teridentifikasi sebagai Properti Investasi sampai dengan terbitnya Perubahan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi yang didalamnya mengatur Properti Investasi pada tahun 2024,
- Enam (6) sertifikat SHM yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto namun belum tercatat pada KIB A sesuai hasil pemeriksaan catatan penyertifikatan yang diselenggarakan oleh BPKAD sebagaimana rincian dalam tabel berikut:

Tabel 78. Sertifikat Hak Milik yang Dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto Belum Dicatat di KIB A

No.	Nomor Sertipikat	Jenis Hak	Tanggal Sertipikat	Luasan (m ²)	Lokasi	Nama pemilik SHM
1	207	Milik	13/01/2003	635	Jotangan, Mojosari	TA
2	628	Milik	20/12/2005	586	Jotangan, Mojosari	Spi
3	789	Milik	15/02/2007	301	Jotangan, Mojosari	TA
4	460	Milik	19/12/2005	610	Jotangan, Mojosari	AB
5	461	Milik	19/12/2005	590	Jotangan, Mojosari	AB
6	462	Milik	19/12/2005	628	Jotangan, Mojosari	AB

7.e.3).a).(3).(b) Peralatan dan Mesin

Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022.

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Naik/Turun
Peralatan dan Mesin	1.267.733.057.741,55	1.215.274.494.483,60	52.458.563.257,95

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.267.733.057.741,55 berasal dari mutasi sebagai berikut:

Tabel e. 79 Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Nominal
1	Saldo Per 31 Desember 2022	1.215.274.494.483,60
2	Penambahan :	
	a. Belanja Modal Pengadaan	71.157.661.706,88
	b. Mutasi Masuk	1.093.713.900,00
	c. Reklasifikasi Masuk	165.990.500,00
	d. Inventarisasi	0,00
	e. Hibah	1.496.168.030,00
	f. Mutasi Masuk Karena Perubahan SOTK	0,00
	g. Koreksi Nilai	0,00
	h. Koreksi Kurang Catat	0,00
	i. Hutang	0,00
	j. Koreksi Atribusi / Kapitalisasi BTT	2.200.000,00
	Jumlah Penambahan	73.915.734.136,88
3	Pengurangan :	
	a. Mutasi Keluar	1.093.713.900,00
	b. Reklasifikasi	4.326.265.000,00
	c. Hibah	167.153.000,00
	d. Rusak Berat	12.807.344.124,15
	e. Penghapusan	110.000.000,00
	f. Reklasifikasi ke ekstrakom	2.179.165.854,78
	g. Koreksi Nilai	0,00
	h. Koreksi Lebih Catat	0,00
	i. Koreksi Atribusi / Kapitalisasi	773.529.000,00
	Jumlah Pengurangan	21.457.170.878,93
4	Saldo Per 31 Desember 2023	1.267.733.057.741,55

Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp73.915.734.136,88 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- (1) Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2023 sebesar Rp71.157.661.706,88.
- (2) Mutasi masuk antar OPD sebesar Rp1.093.713.900,00 dengan rincian:
 - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp520.773.000,00 berupa tiang lampu PJU Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor 028/378/416-203.4/2023 tanggal 2 Agustus 2023.
 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah dari Sekretariat Daerah sebesar Rp303.088.500,00 berupa toyota kijang innova 2018 Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor 028/215/416-203.4/2023 tanggal 19 Mei 2023.
 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah sebesar Rp4.010.000,00 berupa Meja Rapat Pejabat berdasarkan 1. Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor 028/1864/416-201/2022 tanggal 21 Desember 2022 dan BAST Nomor 028/6333/416-112/2023 tanggal 7 Desember 2023.
 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dari Badan Perencanaan dan Pembangunan

Daerah sebesar Rp265.842.400,00 berupa kendaraan dinas roda empat toyota kijang innova 2014 Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor 028/983/416-201/2023 tanggal 17 April 2023.

- (3)) Reklasifikasi masuk sebesar Rp165.990.500,00 dengan penjelasan sebagai berikut:
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dari Aset Tetap Lainnya sebesar Rp16.685.000,00 berupa Audio Visual Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) senilai Rp16.685.000 berupa 1 unit Mic Wireless Rp4.760.000, 1 unit Speaker Active Rp6.500.000 dan 1 unit Subwoofer Aktif Rp5.425.000.
 - Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp96.282.000,00 berupa alat penyimpanan perlengkapan kantor.
 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah dari Aset Tetap Lainnya sebesar Rp5.900.000,00 berupa Speaker.
 - Kecamatan Trowulan dari Aset Tetap Lainnya sebesar Rp2.370.000,00 berupa Peralatan Studio Audio Mic Wireless.
 - Kecamatan Kutorejo dari Aset Tetap Lainnya sebesar Rp2.790.000,00 berupa Speaker.
 - Kecamatan Mojoanyar dari Aset Tetap Lainnya sebesar Rp14.775.000,00 terdiri dari Rp8.175.000,00 berupa Speaker Gantung & Speaker Karaoke dan sebesar Rp6.600.000,00 berupa Audio Mixer & Mic Wireless.
 - Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dari Aset Tetap Lainnya sebesar Rp16.150.000,00 berupa HDMI Wireless, Mic Clip On Wireless, Wireless Mic Podcast.
- (4)) Hibah masuk sebesar Rp1.496.168.030,00 dengan rincian:
- UOBK RSUD Prof. DR. Soekandar sebesar Rp877.526.515,00 berupa Solar Cell/Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor 210/BAST/BN.07/KPB/2022 tanggal 29 September 2023 dari Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian ESDM RI Kepada Kabupaten Mojokerto.
 - Sekretariat Daerah sebesar Rp618.641.515,00 berupa Solar Cell/Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor 210/BAST/BN.07/KPB/2022 tanggal 29 September 2023 dari Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian ESDM RI Kepada Kabupaten Mojokerto.
- (5)) Koreksi Atribusi belanja barang dan jasa sebesar Rp2.200.000,00 pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dari belanja barang dan jasa sebesar Rp2.200.000,00 berupa Gymbal Stabilizer.

Pengurangan atas Aset Tetap Peralatan dan mesin sebesar Rp21.457.170.878,93 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- (1)) Mutasi keluar antar Perangkat Daerah sebesar Rp14.078.605.768,00 dengan rincian sebagai berikut:
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ke Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan sebesar Rp520.773.000,00 berupa tiang lampu PJU Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor 028/378/416-203.4/2023 tanggal 2 Agustus 2023.
 - Sekretariat Daerah ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp303.088.500,00 berupa toyota kijang innova 2018 Berdasarkan Berita Acara

Serah Terima (BAST) Nomor 028/215/416-203.4/2023 tanggal 19 Mei 2023

- Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah sebesar Rp520.773.000,00 dengan rincian:
 - a. ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar Rp4.010.000,00 berupa Meja Rapat Pejabat berdasarkan 1. Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor 028/1864/416-201/2022 tanggal 21 Desember 2022 dan BAST Nomor 028/6333/416-112/2023 tanggal 7 Desember 2023.
 - b. ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp265.842.400,00 berupa kendaraan dinas roda empat toyota kijang innova 2014 Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor 028/983/416-201/2023 tanggal 17 April 2023.
- (2) Reklasifikasi keluar sebesar Rp4.326.265.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - Dinas Pendidikan ke Aset Tetap Lainnya Sebesar Rp4.202.565,00 berupa Buku BOS (bantuan operasional satuan kerja).
 - Dinas Kesehatan reklasifikasi keluar ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp37.000.000,00 berupa alat kesehatan umum lainnya.
 - UOBK RSUD.Prof.DR.Soekandar BLUD reklasifikasi keluar ke Aset Tetap Lainnya sebesar Rp23.600.000,00 berupa alat musik.
 - UOBK RSUD. RA. Basuni BLUD reklasifikasi keluar ke Aset Tak Berwujud sebesar Rp15.100.000,00 berupa software.
 - tedapat reklasifikasi keluar dari peralatan dan mesin ke belanja barang dan jasa sebesar Rp48.000.000,00 berupa biaya jasa setting konfigurasi dan biaya jasa instalasi perangkat CCTV.
- (3) Hibah sebesar Rp167.153.000,00 pada Dinas Pendidikan ke Lembaga Swasta berupa Alat Peraga Edukasi (APE), dengan rincian sebesar Rp41.460.000,00 ke TK Pertiwi Kabupaten Mojokerto berdasarkan berita acara serah terima Nomor 027/6785/416-101/2023 tanggal 27 Januari 2023 , sebesar Rp39.909.000,00 ke TK Baitussalam berdasarkan NPHD 027/5006/416-101,Prassar/VII/2023 tanggal 20 juni 2023; sebesar Rp39.909.000,00 ke TL Al Mutazam bberdasarkan NPHD 027/5006/416-101,Prassar/VII/2023 tanggal 20 juni 2023.
- (4) Reklasifikasi ke Aset Lain-lain Rusak Berat atas usulan penghapusan Barang Milik Daerah pada masing-masing perangkat daerah, sebanyak 42 (empat puluh dua) perangkat daerah sebesar Rp12.807.344.124,15 sebagai berikut:

Tabel e. 80 Daftar Perangkat daerah Reklasifikasi keluar ke Aset lainnya-Rusak Berat atas usulan penghapusan BMD

(dalam rupiah)

No	Organisasi Perangkat Daerah	Nomor Surat Usulan	Tanggal	Nilai Perolehan
1	Rsud. Ra Basuni	028/ 2943 /416-208/2023	1 Agustus 2023	180.000.000,00
2	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Perhubungan	028/2648/416-104/2023	09 November 2023	198.000.000,00
3	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	028/1284/416-206/2023	28 Juli 2023	375.811.250,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	028/2083/416-105/2023	09 Agustus 2023	240.745.000,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	028/1971/416-205/2023	07 Agustus 2023	278.114.900,00
6	Dinas Sosial	028/528/416-106/2023	23 Agustus 2023	218.284.100,00
7	Dinas Tenaga Kerja	028/2118/416-107/2023	03 Agustus 2023	64.970.000,00
8	Dinas Pangan Dan Perikanan	028/296/416-109/2023	28 Juli 2023	231.616.037,50
9	Dinas Lingkungan Hidup	028/3919/416-110/2023	24 Juli 2023	1.596.134.000,00
10	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipl	028/2216/416-111/2023	25 Juli 2023	1.023.680.535,98
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	028 / 2697 / 416-112 / 2023	28 Juli 2023	262.485.500,00
12	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan	028/3907/416-108/2023	31 Juli 2023	925.030.278,08
13	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro	028/ 1173 /416-114/2023	28 Juli 2023	19.400.000,00
14	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	503/1954/416-115.3/2023	14 Agustus 2023	603.316.500,00

No	Organisasi Perangkat Daerah	Nomor Surat Usulan	Tanggal	Nilai Perolehan
15	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	028/811/416-177/2023	03 Agustus 2023	62.790.000,00
16	Dinas Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga	028/2548/416-116/2023	21 September 2023	124.058.000,00
17	Dinas Pertanian	028/ /416-118/2023	14 Agustus 2023	32.610.400,00
18	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	028 / 3065 / 416-119 / 2023	02 Agustus 2023	52.269.451,00
19	Sekretariat Daerah	028 / 622 / 416-013 / 2023	27 Juli 2023	1.261.167.517,62
20	Sekretariat Dprd	900/1591/416-050/2023	31 Juli 2023	714.699.002,00
21	Kecamatan Sooko	028/ 429 /416-313/2023	28 Juli 2023	35.200.000,00
22	Kecamatan Bangsal	028/1814/416-310/2023	21 September 2023	34.750.000,00
23	Kecamatan Gedeg	028/ /416 - 314/2023	Juli 202	41.790.000,00
24	Kecamatan Kemlagi	028/657/416-315/2023	04 Agustus 2023	48.292.500,00
25	Kecamatan Jetis	028/6 1 1 /416-316/2023	24 Juli 2023	29.996.000,00
26	Kecamatan Dawarblandong	028/539/416-317/2023	27 Juli 2023	73.362.750,00
27	Kecamatan Mojosari	028/ 937 /416-308/2023	28 Juli 2023	92.900.000,00
28	Kecamatan Pungging	028/ 496 /416-306/2023	25 Juli 2023	55.915.000,00
29	Kecamatan Ngoro	028/692/416-305/2023	28 Juli 2022	25.132.500,00
30	Kecamatan Kutorejo	028/ 461 /416-307/2023	12 Agustus 2023	62.837.000,00
31	Kecamatan Dlanggu	028/774 /416-308/2023	09 Agustus 2023	14.600.000,00
32	Kecamatan Gondang	028/724/416-302/2023	07 Juli 2023	23.553.000,00
33	Kecamatan Jatrejo	028/675/416-301/2023	26 Juli 2023	14.625.000,00
34	Kecamatan Trawas	28/478/416-304/2023	2 Agustus 2023	37.096.428,89
35	Kecamatan Pacet	028/ 485 /416-303/2023	01 Agustus 2023	58.150.000,00
36	Kecamatan Mojoanyar	028/643/416-318/2023	27 Juli 2023	42.376.000,00
37	Inspektorat	028/2036/416-060/2023	15 Agustus 2023	218.691.693,19
38	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	028/1750/416-201/2023	26 Juli 2023	532.701.000,00
39	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	028/1233/416-203/2023	31 Juli 2023	994.570.375,00
40	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (Skpkd)	028/1233/416-203/2023	31 Juli 2023	212.300.000,00
41	Badan Pendapatan Daerah	028/4638/416-202.0/2023	15 Agustus 2023	1.462.383.654,89
42	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	028/ 9350 / 416-204/2023	24 Juli 2023	230.938.750,00
	Jumlah			12.807.344.124,15

(5) Penghapusan Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp110.000.000,00 pada perangkat daerah sebagai berikut :

- Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan sebesar Rp40.000.000,00 berupa kendaraan bermotor penumpang yang telah laku lelang berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 188,45/39/HK/416-012/2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Penghapusan Barang Milik daerah dari daftar Barang milik Daerah.
- Sekretariat Daerah sebesar Rp40.000.000,00 berupa kendaraan bermotor penumpang yang telah laku lelang berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 188,45/39/HK/416-012/2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Penghapusan Barang Milik daerah dari daftar Barang milik Daerah.
- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp30.000.000,00 berupa kendaraan bermotor penumpang yang telah laku lelang berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 188,45/39/HK/416-012/2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Penghapusan Barang Milik daerah dari daftar Barang milik Daerah.

(6) Reklasifikasi ke ekstrakomptabel sebesar Rp2.179.165.854,78 sebagai berikut :

Pada 33 (tiga puluh tiga) Perangkat daerah terdapat reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Ekstrakomptabel sebesar Rp2.094.474.444,78 berdasarkan surat Bupati Mojokerto Nomor 700/2533/416-060/2023 tanggal 23 Juni 2023 Tindak lanjut LHP BPK RI Tahun 2022 bahwa Bidang Pengelolaan BMD melakukan verifikasi dan koreksi atas aset tetap di bawah batas kapitalisasi sebagai berikut :

Tabel e. 81 Daftar Reklasifikasi ke Ekstrakomptabel atas temuan LHP BPK TA.2022

(dalam rupiah)

No	Organisasi Perangkat Daerah	Nilai Perolehan	Sub Jenis Barang Milik Daerah
1	Dinas Pendidikan	1.229.381.305,00	Alat kantor lainnya, meubelair, alat rumah tangga lainnya (home use), meja kerja pejabat, peralatan studio audio, alat peraga praktek sekolah lainnya, komputer jaringan, personal komputer, dan peralatan komputer lainnya
2	Dinas Kesehatan	603.946.079,26	Alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan dan unit alat laboratorium lainnya
3	UOBK RSUD. Prof. DR. Soekandar	5.000.000,00	Alat kedokteran umum
4	UOBK RSUD.Prof.DR.Soekandar BLUD	8.359.308,96	Alat komunikasi telephone, alat kedokteran umum, dan alat kedokteran bedah
5	RSUD. RA Basuni	11.768.980,00	Alat kedokteran umum
6	RSUD. RA Basuni BLUD	13.577.811,56	Mesin proses, kursi kerja pejabat, peralatan studio audio, dan alat kesehatan umum lainnya
7	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.320.000,00	Alat komunikasi telephone
8	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan	1.012.000,00	Peralatan studio pemetaan/peralatan ukur tanah
9	Satuan Polisi Pamong Praja	3.982.960,00	Peralatan studio audio
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.590.000,00	Alat kantor lainnya dan peralatan studio audio
11	Dinas Tenaga Kerja	1.950.000,00	Peralatan studio audio
12	Dinas Pangan dan Perikanan	6.909.900,00	Alat produksi perikanan dan peralatan studio audio
13	Dinas Lingkungan Hidup	16.278.500,00	Alat laboratorium pertanian dan peralatan studio audio
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.430.000,00	Peralatan studio audio
15	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan	9.987.500,00	Kendaraan bermotor khusus dan alat kantor lainnya
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	16.317.000,00	Peralatan studio audio, peralatan personal komputer, dan peralatan jaringan
17	Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga	500.000,00	Alat komunikasi telephone
18	Dinas Pertanian	950.000,00	Peralatan studio audio
19	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	8.602.600,00	Alat rumah tangga lainnya (home use) dan alat laboratorium lain
20	Sekretariat Daerah	5.594.000,00	Meubelair, alat rumah tangga lainnya (home use), peralatan studio audio, dan alat komunikasi telephone
21	Sekretariat DPRD	9.100.000,00	Alat kantor lainnya
22	Kecamatan Trowulan	13.300.000,00	Meubelair dan peralatan studio audio
23	Kecamatan Bangsal	6.750.000,00	Alat pemeliharaan tanaman/ikan/ternak dan meubelair
24	Kecamatan Gedeg	35.152.000,00	Alat kantor lainnya dan alat rumah tangga lainnya (home use)
25	Kecamatan Kemlagi	21.284.500,00	Alat rumah tangga lainnya (home use)
26	Kecamatan Mojosari	782.000,00	
27	Kecamatan Pungging	11.610.000,00	Alat kantor lainnya dan alat rumah tangga lainnya (home use)
	Kecamatan Kutorejo	7.000.000,00	Kursi rapat pejabat dan peralatan studio audio
28	Kecamatan Gondang	2.500.000,00	Meubelair
29	Kecamatan Jatirejo	20.000.000,00	Meubelair dan kursi rapat pejabat
30	Kecamatan Trawas	10.300.000,00	Alat kantor lainnya dan alat rumah tangga lainnya (home use)
31	Inspektorat	600.000,00	Alat kantor lainnya
32	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	493.000,00	Peralatan personal komputer
33	Badan Pendapatan Daerah	7.145.000,00	Meubelair dan peralatan jaringan
	Jumlah	2.094.474.444,78	

Pada 14 (empat belas) perangkat daerah terdapat reklasifikasi keluar ke ekstrakomptabel sebesar Rp84.691.410,00 atas koreksi BPK RI perwakilan Provinsi Jawa Timur karena nilai dibawah batasan kapitalisasi sebagai berikut :

- 1) Dinas Pendidikan sebesar Rp77.575.710,00 berupa Home Use, Peralatan studio audio, Personal Komputer;
 - 2) Dinas Kesehatan sebesar Rp875.000,00 berupa mesin hitung dan peralatan personal komputer;
 - 3) UOBK RSUD. RA Basuni BLUD sebesar Rp475.200,00 berupa alat komunikasi telephone;
 - 4) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp445.500,00 berupa Alat komunikasi telephone;
 - 5) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp495.000,00 berupa Peralatan Jaringan;
 - 6) Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp450.000,00 berupa Alat komunikasi telephone;
 - 7) Kecamatan Trowulan sebesar Rp450.000,00 berupa alat komunikasi radio ssb;
 - 8) Kecamatan Puri sebesar Rp450.000,00 berupa peralatan personal komputer;
 - 9) Kecamatan Jatirejo Rp400.000,00 alat komunikasi radio ssb;
 - 10) Kecamatan Trawas Rp450.000,00 Alat komunikasi telephone;
 - 11) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Rp375.000,00 Alat komunikasi telephone.
- (2) Koreksi atribusi keluar ke pakai habis pada aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp773.529.000,00 sebagai berikut :
- 1) Dinas Pendidikan sebesar Rp685.660.000,00 berupa Koreksi pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur atas salah penganggaran Hibah Keluar yang direalisasikan kepada SMP Swasta Darul ulum;
 - 2) Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan sebesar Rp82.980.200,00 berupa helm PJU (penerangan Jalan Umum) dan Sparepart.
 - 3) Pada Dinas Lingkungan Hidup terdapat reklasifikasi dari aset tetap peralatan dan mesin ke pakai habis sebesar Rp3.000.000 berupa Alat Pelindung Lainnya berupa Helm Safety 20 Unit.
 - 4) Dinas Komunikasi dan Informatika ke Pakai Habis sebesar Rp1.200.000 berupa Jack Audio 8 Unit.
 - 5) Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp688.800,00 berupa Rompi Safety 5 unit.

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.268.503.409.151,55 dan mutasi tahun 2023 Perangkat Daerah sebagai berikut:

Tabel e. 82 Aset Tetap Peralatan dan Mesin per OPD

(dalam rupiah)

No	OPD	Saldo 31 Des 2022	Mutasi		Saldo 31 Des 2023
			Tambah	Kurang	
1	Dinas Pendidikan	219.329.853.289,58	19.711.887.148,00	6.362.335.015,00	232.679.405.422,58
2	Dinas Kesehatan	188.994.268.488,88	19.669.513.576,88	641.821.079,26	208.021.960.986,50
3	RSUD. Prof. DR. Soekandar	239.070.460.393,10	9.140.065.453,00	5.000.000,00	248.205.525.846,10
4	RSUD.Prof.DR.Soekandar BLUD	32.298.783.528,00	5.117.425.053,00	31.959.308,96	37.384.249.272,04
5	RSUD. RA Basuni	148.986.466.384,39	2.557.181.577,00	191.768.980,00	151.351.878.981,39
6	RSUD. RA Basuni BLUD	18.170.474.275,00	1.271.276.505,00	29.153.011,56	19.412.597.768,44

No	OPD	Saldo 31 Des 2022	Mutasi		Saldo 31 Des 2023
			Tambah	Kurang	
7	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	69.178.623.678,94	192.426.000,00	522.538.500,00	68.848.511.178,94
8	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan	30.204.097.592,50	2.079.142.325,00	369.992.200,00	31.913.247.717,50
9	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.638.469.477,00	50.509.840,00	375.811.250,00	1.313.168.067,00
10	Satuan Polisi Pamong Praja	3.811.622.888,00	220.831.890,00	244.727.960,00	3.787.726.818,00
11	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	20.045.738.422,00	433438500	279.704.900,00	20.199.472.022,00
12	Dinas Sosial	3.511.934.442,00	0,00	218.284.100,00	3.293.650.342,00
13	Dinas Tenaga Kerja	1.494.746.748,00	24.990.000,00	66.920.000,00	1.452.816.748,00
14	Dinas Pangan dan Perikanan	2.465.757.076,00	21.774.000,00	238.975.937,50	2.248.555.138,50
15	Dinas Lingkungan Hidup	39.355.684.736,56	62.955.990,00	1.615.412.500,00	37.803.228.226,56
16	Dinas Kependudukan dan catatan Sipil	6.177.636.894,20	644.206.000,00	1.023.680.535,98	5.798.162.358,22
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.464.803.155,00	78.365.000,00	263.915.500,00	2.279.252.655,00
18	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan	9.829.701.060,46	280.493.000,00	935.017.778,08	9.175.176.282,38
19	Dinas Komunikasi dan Informatika	13.400.936.832,33	788.411.500,00	17.517.000,00	14.171.831.332,33
20	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	1.468.140.979,00	10.435.039,00	19.400.000,00	1.459.176.018,00
21	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.075.689.301,00	3.757.436.000,00	603.811.500,00	6.229.313.801,00
22	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.686.932.996,00	305.059.850,00	62.790.000,00	3.929.202.846,00
23	Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga	7.451.914.326,24	95.019.800,00	125.696.800,00	7.421.237.326,24
24	Dinas Pertanian	6.637.122.343,00	12.715.000,00	33.560.400,00	6.616.276.943,00
25	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	9.259.169.052,00	62.700.000,00	60.872.051,00	9.260.997.001,00
26	Sekretariat Daerah	44.049.399.795,95	2.748.081.375,00	1.609.850.017,62	45.187.631.153,33
27	Sekretariat DPRD	14.437.708.425,00	866.710.000,00	723.799.002,00	14.580.619.423,00
28	Kecamatan Sooko	2.226.497.405,89	19.763.000,00	35.200.000,00	2.211.060.405,89
29	Kecamatan Trowulan	2.230.727.648,89	164.210.000,00	15100000	2.379.837.648,89
30	Kecamatan Puri	2.470.507.576,89	110.075.000,00	450.000,00	2.580.132.576,89
31	Kecamatan Bangsal	2.345.705.808,89	31.332.000,00	41.500.000,00	2.335.537.808,89
32	Kecamatan Gedeg	2.121.250.413,89	53.510.000,00	76.942.000,00	2.097.818.413,89
33	Kecamatan Kemlagi	2.497.984.176,89	92.142.500,00	69.577.000,00	2.520.549.676,89
34	Kecamatan Jetis	2.155.651.338,00	174.288.925,00	29.996.000,00	2.299.944.263,00
35	Kecamatan Dawarblandong	2.562.745.642,89	18.730.000,00	73.812.750,00	2.507.662.892,89
36	Kecamatan Mojosari	3.337.630.976,01	469.602.500,00	93.682.000,00	3.713.551.476,01
37	Kecamatan Pungging	2.477.810.256,89	67.070.000,00	67.525.000,00	2.477.355.256,89
38	Kecamatan Ngoro	2.368.284.579,89	113.950.000,00	25.132.500,00	2.457.102.079,89
39	Kecamatan Kutorejo	2.249.156.198,89	65.043.000,00	69.837.000,00	2.244.362.198,89
40	Kecamatan Dlanggu	2.161.498.418,00	79.755.000,00	14.600.000,00	2.226.653.418,00
41	Kecamatan Gondang	2.415.461.383,89	27.475.000,00	26.053.000,00	2.416.883.383,89
42	Kecamatan Jatirejo	2.399.779.523,89	26.371.000,00	35.025.000,00	2.391.125.523,89
43	Kecamatan Trawas	2.009.480.867,89	67.665.000,00	47.846.428,89	2.029.299.439,00
44	Kecamatan Pacet	2.487.928.499,89	42.692.500,00	58.150.000,00	2.472.470.999,89
45	Kecamatan Mojoanyar	1.948.468.550,00	78.263.000,00	42.376.000,00	1.984.355.550,00
46	Inspektorat	4.631.782.964,00	70.375.000,00	219.291.693,19	4.482.866.270,81
47	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	4.778.077.179,00	209.091.000,00	803.046.400,00	4.184.121.779,00
48	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	7.610.208.285,00	287400000	1.024.945.375,00	6.872.662.910,00
49	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPKD)	756.003.000,00	0,00	212.300.000,00	543.703.000,00
50	Badan Pendapatan Daerah	11.567.813.539,00	1.179.683.800,00	1.469.528.654,89	11.277.968.684,11
51	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.967.903.669,00	264.195.490,00	230.938.750,00	3.001.160.409,00
	Jumlah	1.215.274.494.483,60	73.915.734.136,88	21.457.170.878,93	1.267.733.057.741,55

7.e.3).a) (3) (c) Gedung dan Bangunan

Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Mojokerto per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Naik/Turun
Gedung dan Bangunan	1.652.016.796.625,72	1.508.369.493.244,72	143.647.303.381,00

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.652.016.796.625,72 berasal dari mutasi sebagai berikut:

Tabel e. 83 Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan

(dalam rupiah)

No	Uraian	Nominal
1	2	3
1	Saldo Per 31 Desember 2022	1.508.369.493.244,72
2	Penambahan :	
	a. Belanja Modal Pengadaan	146.020.359.519,00
	b. Mutasi Masuk	37.493.377.939,00
	c. Reklasifikasi Masuk	279.870.133,00
	d. Inventarisasi	23.800.000,00
	e. Hibah	0,00
	f. Hutang	41.972.000,00
	g. Pelunasan KDP	2.042.085.750,00
	h. Koreksi Nilai	0,00
	i. Koreksi Kurang Catat	0,00
	j. Koreksi Atribusi / Kapitalisasi Barjas	1.277.698.867,00
	Jumlah Penambahan	187.179.164.208,00
3	Pengurangan :	
	a. Mutasi Keluar	37.493.377.939,00
	b. Reklasifikasi	2.011.240.987,00
	c. Hibah	0,00
	d. Rusak Berat	3.714.907.468,00
	e. Penghapusan	0,00
	f. Extracomtable	0,00
	g. Koreksi Nilai	0,00
	h. Reklasifikasi ke Ekstrakom	35.275.000,00
	i. Koreksi Atribusi / Kapitalisasi pakai habis	277.059.433,00
	Jumlah Pengurangan	43.531.860.827,00
4	Saldo Per 31 Desember 2023	1.652.016.796.625,72

Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp187.179.164.208,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- (1) Realisasi Belanja Modal tahun 2023 sebesar Rp146.020.359.519,00.
- (2) Mutasi Masuk sebesar Rp37.493.377.939,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - UOBK RSUD. Prof. DR. Soekandar sebesar Rp16.850.993.640,00 berupa bangunan kesehatan dari RSUD Soekandar (BLUD) atas rehabilitasi dikarenakan gedung induknya berada pada RSUD Soekandar (Rutin-APBD).
 - UOBK RSUD Basuni terdapat sebesar Rp1.001.989.527,00 berupa Bangunan Kesehatan dikarenakan gedung induk berada pada RSUD Basuni (Rutin-APBD).
 - Dinas Sosial dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp3.196.664.845,00 berupa kompleks Rumah Aman berdasarkan berita acara serah terima Nomor 028/321/416-203,4/2023 tanggal 8 Desember 2023.
 - Dinas Lingkungan Hidup dari Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp1.000.826.800,00 berupa bangunan gedung kantor berdasarkan Berita acara serah terima Nomor 028/4432/416-203,4/2023 tanggal 28 Agustus 2023.
 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu dari Dinas industri

Perdagangan atas bangunan Pusat Perindustrian Perdagangan sebesar Rp12.275.828.127,00 yang akan dipergunakan sebagai mall pelayanan publik sesuai Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor 028/535/416-119/2023 tanggal 2 Mei 2023 dan Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor 028/443/416-203.4/2023 tanggal 31 Agustus 2023.

- Badan Pendapatan Daerah dari Sekretariat DPRD atas bangunan gedung kantor eks DPRD sebesar Rp3.167.075.000,00 Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor 028/1696/416-203.4/2023 tanggal 23 Agustus 2023 dan Nomor 028/4430/416-203.4/2023 tanggal 27 Juli 2023.
- (3)) Reklasifikasi masuk sebesar Rp279.870.133,00,00 dengan rincian sebagai berikut:
- Dinas Kesehatan dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp37.000.000,00 berupa alat kesehatan lainnya.
 - UOBK RSUD.Prof.DR. Soekandar BLUD dari aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp242.870.133,00 berupa rehab gedung kantor.
- (4)) Inventarisasi masuk sebesar Rp23.800.000,00 pada Dinas Pendidikan atas kurang catat Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp23.800.000,00 berupa rumah negara Golongan II Berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Nomor 028/977/416-101/2023 tanggal 23 November 2023 hal Permohonan Pencatatan Barang Milik Daerah Berupa rumah negara Golongan II.
- (5)) Hutang pada Dinas Kesehatan menambah aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp41.972.000 berupa Kanopi UGD, Kanopi Parkir Karyawan dan kanopi Genset
- (6)) Reklasifikasi masuk dari Aset tetap Konstruksi dalam Pengerjaan sebesar Rp2.042.085.750,00 dengan rincian sebagai berikut:
- Dinas Pendidikan sebesar Rp962.064.750,00 berupa Bangunan Kesehatan dikarenakan telah selesai pembangunannya (Pelunasan KDP).
 - UOBK RSUD.Prof.DR. Soekandar BLUD sebesar Rp976.094.000,00 berupa bangunan kesehatan karena telah selesai pengerjaannya.
 - Dinas Koperasi dan Usaha Mikro terdapat sebesar Rp17.427.000,00 berupa Pelunasan KDP, DED Bangunan Gedung Kantor.
 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp86.500.000,00 berupa Gedung Pertokoan karena Pelunasan KDP.
- (7)) Koreksi atribusi atas belanja barang dan jasa (reklasifikasi masuk dari belanja barang dan jasa) Aset sebesar Rp1.277.698.867,00 sebagai berikut:
- RSUD. RA Basuni BLUD dari Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp36.607.781,00 berupa Bangunan Kesehatan;
 - Dinas Sosial dari Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp335.314.236,00 berupa Pemeliharaan Gedung Kantor senilai Rp305.416.000, Perencanaan Konstruksi Rp16.650.000, Pengawasan Konstruksi Rp13.248.236 ke Gedung Kantor
 - Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga dari Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp219.814.101,00 berupa pemeliharaan gedung kantor dan pagar.
 - Dinas Pertanian dari Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp7.642.350,00 dengan rincian, sebesar Rp2.980.350,00 dari Belanja Jasa Pengawasan dan sebesar Rp4.662.000 Belanja Jasa Perencanaan.
 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan dari Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp32.655.700,00 berupa Pemeliharaan Gedung Kantor dengan rincian:
 - a. Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi sebesar Rp17.343.100,00

- b. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural sebesar Rp 5.472.000,00.
- c. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur senilai sebesar Rp4.384.500,00.
- d. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor sebesar Rp5.456.100,00.
- Sekretariat Daerah dari Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp641.530.699,00 berupa pagar, rumah negara golongan II, dan gedung kantor.
- Kecamatan Mojosari dari Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp4.134.000 berupa Bangunan Gedung kantor.

Pengurangan atas Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp43.531.860.827,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- (1)) Mutasi Keluar sebesar Rp37.493.377.939,00 dengan rincian sebagai berikut:
- UOBK RSUD. Prof. DR. Soekandar BLUD ke UOBK RSUD Soekandar Rutin sebesar Rp16.850.993.640,00 berupa Bangunan kesehatan atas rehabilitasi dikarenakan gedung induknya berada pada RSUD Soekandar (Rutin-APBD).
 - UOBK RSUD RA Basuni BLUD ke UOBK RSUD RA Basuni rutin sebesar Rp1.001.989.527,00 berupa bangunan kesehatan dikarenakan gedung induknya berada pada RSUD Basuni (Rutin-APBD).
 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ke Dinas Sosial sebesar Rp3.196.664.845,00 berupa kompleks Rumah Aman berdasarkan berita acara serah terima Nomor 028/321/416-203,4/2023 tanggal 8 Desember 2023.
 - Satuan Polisi Pamong Praja Ke Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp1.000.826.800,00 dari berupa bangunan gedung kantor berdasarkan Berita acara serah terima Nomor 028/4432/416-203.4/2023 tanggal 28 Agustus 2023.
 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp12.275.828.127,00 ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu atas Bangunan Pusat Perindustrian Perdagangan yang akan dipergunakan sebagai mall pelayanan publik, dengan nilai perolehan Rp12.275.828.127,00 Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor 028/535/416-119/2023 tanggal 2 Mei 2023 dan Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor 028/443/416-203.4/2023 tanggal 31 Agustus 2023.
 - Badan Pendapatan Daerah atas bangunan gedung kantor eks DPRD, dengan nilai perolehan Rp3.167.075.000,00 Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor 028/1696/416-203.4/2023 tanggal 23 Agustus 2023 dan Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor 028/ 4430/416-203.4/2023 tanggal 27 Juli 2023
- (2)) Reklasifikasi keluar sebesar Rp2.011.240.987,00 pada perangkat daerah sebagai berikut:
- Dinas Pendidikan terdapat reklasifikasi keluar dari aset tetap gedung dan bangunan ke Konstruksi Dalam Pengerjaan atas bangunan yang belum selesai pengerjaannya sebesar Rp1.438.653.270,00.
 - UOBK RSUD.Prof.DR.Soekandar BLUD terdapat reklasifikasi keluar sebesar Rp199.000.000,00 dari aset tetap gedung dan bangunan ke aset Konstruksi dalam pengerjaan dikarenakan bangunan yang belum selesai pengerjaannya berupa bangunan kesehatan.
 - RSUD RA Basuni BLUD terdapat reklasifikasi keluar ke Konstruksi dalam pengerjaan sebesar Rp37.750.000,00 berupa bangunan kesehatan yang masih

berupa konstruksi.

- Dinas pekerjaan umum dan Penataan Ruang terdapat reklasifikasi masuk dari Konstruksi dalam Pengerjaan ke gedung dan bangunan sebesar Rp239.555.717,00 berupa DED dan Biaya Umum Gudang Material Pekerjaan umum Kelurahan.

(3)) Reklasifikasi ke aset lain-lain rusak berat sebagai berikut :

- Dinas Pendidikan ke Aset Lain-lain rusak berat sebesar Rp482.271.000,00 terdiri dari :
 - 1) Sebesar Rp451.971.000,00 berupa bangunan sekolah Berdasarkan Persetujuan Pembongkaran Barang Milik Daerah Dinas Pendidikan Nomor 028/3234/416-203.4/2023 tanggal 31 Juli 2023 hal persetujuan pembongkaran Barang Milik Daerah.
 - 2) Sebesar Rp30.300.000,00 berupa perumahan dinas Sooko berdasarkan Surat Bupati Mojokerto nomor 028/2457/416-203.4/2023 tanggal 29 Desember 2023 hal Persetujuan Pemusnahan Barang Milik Daerah pada Dinas pendidikan.
- Dinas kesehatan terdapat reklasifikasi keluar dari aset tetap gedung dan bangunan ke aset lain-lain rusak berat sebesar Rp3.101.381.268,00 terdiri dari :
 - 1) Sebesar Rp1.303.162.000,00 berupa bangunan pada puskesmas Ngoro, Puskesmas bangsal, Puskesmas Dawarblandong berdasarkan 3. Berdasarkan Surat Bupati Mojokerto Nomor 028/3375/416-203.4/2023 tanggal 11 Agustus 2023 hal Persetujuan Pemusnahan BMD Pada Dinas Kesehatan
 - 2) Sebesar Rp1.798.219.268,00 berupa puskesmas tawang Sari, puskesmas Jatirejo, puskesmas kemlagi dan Puskesmas Trowulan Berdasarkan Surat Bupati Mojokerto Nomor 028/2830/416-203.4/2023 tanggal 13 Juli 2023 hal Persetujuan Pemusnahan BMD Pada Dinas Kesehatan
- Badan Pendapatan daerah terdapat reklasifikasi keluar dari aset tetap ke aset lain-lain rusak berat sebesar Rp131.255.200,00 berdasarkan surat Kepala Badan Pendapatan Daerah Nomor 028/4638/416-202.0/2023 tanggal 15 Agustus 2023

(4)) Reklasifikasi ke ekstrakomptabel sebesar Rp35.275.000,00 sebagai berikut :

- Dinas Kesehatan terdapat reklasifikasi ekstrakom sebesar Rp10.000.000,00 berupa bangunan tempat kerja lainnya pada puskesmas jatirejo.
- RSUD RA Basuni BLUD terdapat reklasifikasi dari aset tetap gedung dan bangunan ke ekstrakom sebesar Rp6.325.000,00 berupa bangunan gedung kantor TL BPK LHP TA.2022.
- Kecamatan Gondang reklasifikasi ke ekstrakomptabel sebesar Rp6.500.000,00 sebagai tindak lanjut LHP BPK atas temuan Tahun 2022.
- Badan Pendapatan Daerah terdapat reklasifikasi ke ekstrakomptabel sebesar Rp12.450.000,00 sebagai tindak lanjut LHP BPK atas temuan Tahun 2022.

(5)) Koreksi atribusi belanja barang dan jasa sebesar Rp277.059.433,00;

- Dinas Pendidikan sebesar Rp241.579.000,00 berupa Koreksi Keluar dikarenakan diberikan ke Pihak lembaga swasta Pembangunan TK Darul Ulum pada pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur;
- Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan terdapat reklasifikasi keluar dari aset tetap gedung dan bangunan ke pakai habis sebesar Rp35.480.433,00 berupa Pengecatan Gedung.

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.652.016.796.625,72 dan mutasi tahun 2023, per Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sebagai berikut:

Tabel e. 84 Aset Tetap Gedung dan Bangunan per OPD

(dalam rupiah)

No	OPD	Saldo 31 Des 2022	MUTASI		Saldo 31 Des 2023
			Tambah	Kurang	
1	Dinas Pendidikan	613.469.734.777,43	48.133.654.896,00	2.162.503.270,00	659.440.886.403,43
2	Dinas Kesehatan	175.830.881.562,29	4.472.857.699,00	3.111.381.268,00	177.192.357.993,29
3	RSUD. Prof. DR. Soekandar	59.820.365.369,94	37.774.458.390,00	0,00	97.594.823.759,94
4	RSUD.Prof.DR.Soekandar BLUD	36.290.725.444,00	57.880.249.934,00	17.049.993.640,00	77.120.981.738,00
5	RSUD. RA Basuni	69.527.647.836,54	1.001.989.527,00	0,00	70.529.637.363,54
6	RSUD. RA Basuni BLUD	1.177.172.680,00	1.039.739.527,00	1.046.064.527,00	1.170.847.680,00
7	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	19.516.420.717,00	5.437.503.297,00	3.436.220.562,00	21.517.703.452,00
8	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan	14.446.320.295,50	362.834.859,00	131.762.433,00	14.677.392.721,50
9	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.030.159.178,00	0,00	0,00	1.030.159.178,00
10	Satuan Polisi Pamong Praja	1.000.826.800,00	0,00	1.000.826.800,00	0,00
11	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.502.884.200,00	0,00	0,00	4.502.884.200,00
12	Dinas Sosial	5.553.511.153,00	3.531.979.081,00	0,00	9.085.490.234,00
13	Dinas Tenaga Kerja	1.185.644.310,00	0,00	0,00	1.185.644.310,00
14	Dinas Pangan dan Perikanan	10.963.176.344,58	192.384.000,00	0,00	11.155.560.344,58
15	Dinas Lingkungan Hidup	17.825.711.119,71	3.581.437.200,00	0,00	21.407.148.319,71
16	Dinas Kependudukan dan catatan Sipil	2.811.040.642,00	0,00	0,00	2.811.040.642,00
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	541.059.800,00	0,00	0,00	541.059.800,00
18	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan	6.711.830.250,00	1.326.834.000,00	0,00	8.038.664.250,00
19	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.400.130.000,00	134.756.223,00	0,00	1.534.886.223,00
20	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	1.750.061.600,00	349.337.497,00	0,00	2.099.399.097,00
21	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.613.640.300,00	14.406.693.127,00	0,00	16.020.333.427,00
22	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5.621.852.200,00	0,00	0,00	5.621.852.200,00
23	Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga	88.682.432.695,69	2.008.607.454,00	0,00	90.691.040.149,69
24	Dinas Pertanian	17.512.536.109,00	84.169.350,00	0,00	17.596.705.459,00
25	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	115.283.418.122,00	87.858.600,00	12.275.828.127,00	103.095.448.595,00
26	Sekretariat Daerah	36.369.165.794,21	641.530.699,00	0,00	37.010.696.493,21
27	Sekretariat DPRD	54.374.243.850,00	608.378.000,00	3.167.075.000,00	51.815.546.850,00
28	Kecamatan Sooko	6.878.507.395,00	0,00	0,00	6.878.507.395,00
29	Kecamatan Trowulan	7.118.694.450,00	0,00	0,00	7.118.694.450,00
30	Kecamatan Puri	6.628.603.250,00	0,00	0,00	6.628.603.250,00
31	Kecamatan Bangsal	6.766.185.266,00	0,00	0,00	6.766.185.266,00
32	Kecamatan Gedeg	7.540.427.550,00	0,00	0,00	7.540.427.550,00
33	Kecamatan Kemlagi	6.811.631.816,00	0,00	0,00	6.811.631.816,00
34	Kecamatan Jetis	7.034.246.766,00	0,00	0,00	7.034.246.766,00
35	Kecamatan Dawarblandong	6.471.941.466,00	0,00	0,00	6.471.941.466,00
36	Kecamatan Mojosoari	10.188.373.322,62	309.371.450,00	0,00	10.497.744.772,62
37	Kecamatan Pungging	6.889.898.128,90	0,00	0,00	6.889.898.128,90
38	Kecamatan Ngoro	6.139.412.066,00	0,00	0,00	6.139.412.066,00
39	Kecamatan Kutorejo	7.268.317.846,00	0,00	0,00	7.268.317.846,00
40	Kecamatan Dlanggu	7.258.329.116,00	0,00	0,00	7.258.329.116,00
41	Kecamatan Gondang	7.149.501.523,00	0,00	6.500.000,00	7.143.001.523,00
42	Kecamatan Jatirejo	6.627.152.066,00	31.024.246,00	0,00	6.658.176.312,00
43	Kecamatan Trawas	7.628.765.992,00	0,00	0,00	7.628.765.992,00
44	Kecamatan Pacet	7.032.393.866,00	0,00	0,00	7.032.393.866,00
45	Kecamatan Mojoanyar	7.178.530.796,00	0,00	0,00	7.178.530.796,00
46	Inspektorat	931.577.929,80	0,00	0,00	931.577.929,80
47	Badan Perencanaan dan	1.436.595.419,15	143.010.188,00	0,00	1.579.605.607,15

No	OPD	Saldo 31 Des 2022	MUTASI		Saldo 31 Des 2023
			Tambah	Kurang	
	Pembangunan Daerah				
48	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	4.436.327.467,94	285.839.814,00	0,00	4.722.167.281,94
49	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPKD)	3.318.316.625,42	0,00	0,00	3.318.316.625,42
50	Badan Pendapatan Daerah	801.743.750,00	3.167.075.000,00	143.705.200,00	3.825.113.550,00
51	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.021.426.220,00	185.590.150,00	0,00	4.207.016.370,00
Total		1.508.369.493.244,72	187.179.164.208,00	43.531.860.827,00	1.652.016.796.625,72

7.e.3).a) (3) (d) Jalan, Irigasi dan Jaringan

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Selisih Naik/Turun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.321.441.857.601,92	3.174.513.108.296,92	146.928.749.305,00

Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.321.441.857.601,92 berasal dari mutasi sebagai berikut:

Tabel e. 85 Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

(dalam rupiah)

No	Uraian	Nominal
1	Saldo Per 31 Desember 2022	3.174.513.108.296,92
2	Penambahan :	
	a. Belanja Modal/Pengadaan	150.499.982.193,00
	b. Mutasi Masuk	0,00
	c. Reklasifikasi	1.011.847.750,00
	d. Inventarisasi	0,00
	e. Hibah	0,00
	f. Mutasi Masuk Karena Perubahan SOTK	0,00
	g. Koreksi Nilai	0,00
	h. Koreksi Kurang Catat	0,00
	i. Hutang	0,00
	j. Pelunasan KDP	0,00
	Jumlah	151.511.829.943,00
3	Pengurangan :	
	a. Mutasi Keluar	0,00
	b. Reklasifikasi	4.438.346.788,00
	c. Hibah	0,00
	d. Rusak Berat	0,00
	e. Penghapusan	0,00
	f. Extracom	144.733.850,00
	g. Koreksi Nilai	0,00
	h. Koreksi Lebih Catat	0,00
	i. Koreksi Atribusi/Kapitalisasi	0,00
	Jumlah	4.583.080.638,00
4	Saldo Per 31 Desember 2023	3.321.441.857.601,92

Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp151.511.829.943,00 sebagai berikut :

- (1) Realisasi Belanja Modal Tahun 2022 menambah nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp150.499.982.193,00.
- (2) Reklasifikasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp1.011.847.750,00 berupa Perencanaan Konstruksi Dalam Pengerjaan atas koreksi BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur

Pengurangan Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp4.583.080.638,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

- (1) Reklasifikasi keluar sebesar Rp4.438.346.788,00 sebagai berikut:

- UOBK RSUD.Prof.DR.Soekandar BLUD ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp242.870.133,00 berupa bangunan terbuka.
 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ke Konstruksi dalam Pengerjaan sebesar Rp4.095.909.655,00 berupa DED dan biaya umum Bangunan Pembawa Irigasi.
 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah ke Konstruksi dalam Pengerjaan sebesar Rp99.567.000 berupa DED Jembatan Talunbrak
- (2) Reklasifikasi ke Ekstrakomptabel sebesar Rp144.733.850,00 pada perangkat daerah sebagai berikut :
- UOBK RSUD.Prof.DR.Soekandar BLUD ke Ekstrakomptabel sebesar Rp12.493.750,00 berupa instalasi pusat pengatur lisrik berdasarkan surat Bupati Mojokerto Nomor 700/2533/416-060/2023 tanggal 23 Juni 2023 Tindak lanjut LHP BPK RI Tahun 2022 bahwa Bidang Pengelolaan BMD melakukan verifikasi dan koreksi atas aset tetap di bawah batas kapitalisasi.
 - UOBK RSUD RA Basuni BLUD ke Ekstrakomptabel sebesar Rp5.719.400,00 karena nilai dibawah batasan kapitalisasi berupa Saluran Resapan air.
 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sebesar Rp118.743.500,00 berupa Bangunan Waduk Irigasi dan Jalan Kabupaten atas Koreksi Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Jawa Timur
 - Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan ke Ekstrakomptabel sebesar Rp1.000.000,00 berupa jaringan distribusi berdasarkan surat Bupati Mojokerto Nomor 700/2533/416-060/2023 tanggal 23 Juni 2023 Tindak lanjut LHP BPK RI Tahun 2022 bahwa Bidang Pengelolaan BMD melakukan verifikasi dan koreksi atas aset tetap di bawah batas kapitalisasi.
 - Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp6.777.200,00 Bangunan Waduk Irigasi atas Koreksi Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Jawa Timur

Saldo Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.321.441.857.601,92 per OPD adalah sebagai berikut:

Tabel e. 86 Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per OPD

(dalam rupiah)

No	OPD	Saldo 31 Des 2022	Mutasi		Saldo 31 Des 2023
			Tambah	Kurang	
1	Dinas Pendidikan	494.205.000,00	0,00	0,00	494.205.000,00
2	Dinas Kesehatan	11.373.664.042,51	0,00	0,00	11.373.664.042,51
3	RSUD. Prof. DR. Soekandar (APBD)	10.775.970.393,04	0,00	0,00	10.775.970.393,04
4	RSUD. Prof. DR. Soekandar (BLUD)	4.666.731.685,00	242.870.133,00	255.363.883,00	4.654.237.935,00
5	RSUD. RA Basuni (APBD)	10.802.886.663,07	0,00	0,00	10.802.886.663,07
6	RSUD. RA Basuni (BLUD)	239.251.500,00	5.719.400,00	5.719.400,00	239.251.500,00
7	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.060.279.711.596,22	147.390.359.961,00	4.214.653.155,00	3.203.455.418.402,22
8	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan	28.254.625.985,00	589.671.449,00	1.000.000,00	28.843.297.434,00
9	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	110.343.700,00	99.567.000,00	99.567.000,00	110.343.700,00
12	Dinas Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Dinas Tenaga Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dinas Pangan dan Perikanan	3.180.000,00	0,00	0,00	3.180.000,00
15	Dinas Lingkungan Hidup	15.397.851.537,23	1.377.055.000,00	6.777.200,00	16.768.129.337,23
16	Dinas Kependudukan dan catatan Sipil	0,00	0,00	0,00	0,00

No	OPD	Saldo 31 Des 2022	Mutasi		Saldo 31 Des 2023
			Tambah	Kurang	
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.415.000.000,00	0,00	0,00	2.415.000.000,00
20	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga	12.500.000,00	0,00	0,00	12.500.000,00
24	Dinas Pertanian	119.978.400,00	0,00	0,00	119.978.400,00
25	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3.162.853.900,00	0,00	0,00	3.162.853.900,00
26	Sekretariat Daerah	2.566.693.000,00	0,00	0,00	2.566.693.000,00
27	Sekretariat DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Kecamatan Sooko	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Kecamatan Trowulan	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kecamatan Puri	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Kecamatan Bangsal	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kecamatan Gedeg	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Kecamatan Kemlagi	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Kecamatan Jetis	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Kecamatan Dawarblandong	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Kecamatan Mojokerto	22.718.344.665,31	1.806.587.000,00	0,00	24.524.931.665,31
37	Kecamatan Pungging	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Kecamatan Ngoro	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Kecamatan Kutorejo	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Kecamatan Dlanggu	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Kecamatan Gondang	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Kecamatan Jatirejo	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Kecamatan Trawas	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Kecamatan Pacet	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Kecamatan Mojoanyar	949.334.229,54	0,00	0,00	949.334.229,54
46	Inspektorat	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPKD)	169.982.000,00	0,00	0,00	169.982.000,00
50	Badan Pendapatan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		3.174.513.108.296,92	151.511.829.943,00	4.583.080.638,00	3.321.441.857.601,92

7.e.3).a) (3) (e) Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kabupaten Mojokerto per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Selisih Naik/Turun
Aset Tetap Lainnya	15.629.496.523,49	11.139.670.174,49	4.489.826.349,00

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp15.629.496.523,49 berasal dari mutasi sebagai berikut:

Tabel e. 87 Mutasi Aset Tetap Lainnya Tahun 2023

(dalam rupiah)		
No	Uraian	Nominal
1	Saldo Per 31 Desember 2022	11.139.670.174,49
2	Penambahan :	
	a. Belanja Modal/Pengadaan	704.964.499,00

No	Uraian	Nominal
	b. Mutasi Masuk	0,00
	c. Reklasifikasi	4.226.165.000,00
	d. Inventarisasi	0,00
	e. Hibah	0,00
	f. Mutasi Masuk Karena Perubahan SOTK	0,00
	g. Koreksi Nilai	0,00
	h. Koreksi Kurang Catat	0,00
	i. Koreksi Atribusi/Kapitalisasi	0,00
	Jumlah	4.931.129.499,00
3	Pengurangan :	
	a. Mutasi Keluar	0,00
	b. Reklasifikasi	440.014.100,00
	c. Hibah	0,00
	d. Rusak Berat	0,00
	e. Penghapusan	0,00
	f. Mutasi Keluar Karena Perubahan SOTK	0,00
	g. Koreksi Nilai	0,00
	h. Koreksi Lebih Catat	0,00
	i. Extracomtable	1.289.050,00
	j. Koreksi Atribusi/Kapitalisasi	0,00
	Jumlah	441.303.150,00
4	Saldo Per 31 Desember 2023	15.629.496.523,49

Penambahan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp4.931.129.499,00 terdiri dari:

- (1) Realisasi Belanja Modal tahun 2023 sebesar Rp704.964.499,00.
- (2) Reklasifikasi masuk sebesar Rp4.226.165.000,00, dengan rincian:
 - Dinas Pendidikan terdapat reklasifikasi masuk Aset Tetap lainnya dari Aset Tetap peralatan dan mesin Sebesar Rp4.202.565,00 berupa Buku BOS (bantuan operasional satuan kerja).
 - UOBK RSUD.Prof.DR.Soekandar BLUD terdapat reklasifikasi masuk Aset Tetap lainnya dari Aset Tetap peralatan sebesar Rp23.600.000,00 berupa alat musik.

Pengurangan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp441.303.150,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

- (1) Reklasifikasi keluar sebesar Rp440.014.100,00 dengan rincian:
 - Dinas Pendidikan ke Aset Tetap Peralatan dan mesin sebesar Rp11.038.500,00 berupa speaker;
 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ke Aset Tetap peralatan dan mesin sebesar Rp16.685.000,00 berupa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) terdiri dari 1 unit Mic Wireless Rp4.760.000,00 1 unit Speaker Active Rp6.500.000,00 dan 1 unit Subwoofer Aktif Rp5.425.000,00.
 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ke Aset Tetap peralatan dan mesin sebesar Rp16.685.000,00 berupa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) terdiri dari 1 unit Mic Wireless Rp4.760.000,00 1 unit Speaker Active Rp6.500.000 dan 1 unit Subwoofer Aktif Rp5.425.000,00
 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah ke Aset Tetap peralatan dan Mesin sebesar Rp5.900.000,00 berupa Speaker
 - Dinas Komunikasi dan Informatika ke Aset tak berwujud sebesar Rp28.000.000,00 berupa lisensi dan franchise.
 - Sekretariat daerah ke aset tak berwujud sebesar Rp43.201.200,00 berupa Software
 - Kecamatan Trowulan ke Aset Tetap peralatan dan mesin sebesar Rp2.370.000,00 berupa Peralatan Studio Audio Mic Wireless
 - Kecamatan kutorejo ke Aset Tetap peralatan dan mesin sebesar Rp2.790.000,00 berupa Speaker

- Kecamatan Mojoanyar ke Aset Tetap peralatan dan mesin sebesar Rp14.775.000,00 sebesar Rp8.175.000,00 berupa Speaker Gantung & Speaker Karaoke sebesar Rp6.600.000 berupa Audio Mixer & Mic Wireless.
 - Badan Perencanaan dan Pembangunan Aset Tetap peralatan dan mesin sebesar Rp16.150.000,00 berupa HDMI Wireless, Mic Clip On Wireless, Wireless Mic Podcast.
 - Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp245.414.400 ke aset tak berwujud berupa Software dan Hak Cipta.
 - Badan kepegawaian, pendidikan dan Sumber Daya Manusia sebesar Rp53.690.000,00 ke aset tak berwujud berupa Software.
- (2)) Reklasifikasi keluar ke Ekstrakomptabel sebesar Rp1.289.050,00, dengan rincian:
- Sekretariat daerah terdapat Reklasifikasi keluar dari Aset Tetap lainnya (Hewan Piaraan lainnya) ke Ekstrakomptabel sebesar Rp1.000.000,00 berupa Kelinci 10 (sepuluh) Ekor.
 - Kecamatan Jetis reklasifikasi ke ekstrakom sebesar Rp289.050,00 berupa buku umum yang nilai dibawah batasan kapitalisasi.

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp15.629.496.523,49. Adapun rincian Aset Tetap Lainnya per Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), adalah sebagai berikut:

Tabel e. 88 Aset Tetap Lainnya per SKPD

(dalam rupiah)

No	OPD	Saldo 31 Des 2022	Mutasi		Saldo 31 Des 2023
			Tambah	Kurang	
1	Dinas Pendidikan	8.795.099.073,49	4.213.902.270,00	11.038.500,00	12.997.962.843,49
2	Dinas Kesehatan	5.704.000,00	0,00	0,00	5.704.000,00
3	RSUD. Prof. DR. Soekandar	0,00	0,00	0,00	0,00
4	RSUD. Prof. DR. Soekandar BLUD	0,00	23.600.000,00	0,00	23.600.000,00
5	RSUD. RA Basuni	0,00	0,00	0,00	0,00
6	RSUD. RA Basuni BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	218.217.465,00	212.137.309,00	16.685.000,00	413.669.774,00
8	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	16.300.000,00	5.900.000,00	5.900.000,00	16.300.000,00
12	Dinas Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Dinas Tenaga Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dinas Pangan dan Perikanan	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dinas Lingkungan Hidup	408.219.000,00	0,00	0,00	408.219.000,00
16	Dinas Kependudukan dan catatan Sipil	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
18	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan	38.853.600,00	0,00	0,00	38.853.600,00
19	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00
20	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00
21	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	12.305.000,00	0,00	0,00	12.305.000,00
22	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	509.018.000,00	21.969.320,00	0,00	530.987.320,00
23	Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga	94.395.400,00	0,00	0,00	94.395.400,00
24	Dinas Pertanian	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	20.784.000,00	0,00	0,00	20.784.000,00
26	Sekretariat Daerah	344.285.500,00	88.601.200,00	44.201.200,00	388.685.500,00
27	Sekretariat DPRD	79.638.136,00	0,00	0,00	79.638.136,00
28	Kecamatan Sooko	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Kecamatan Trowulan	0,00	2.370.000,00	2.370.000,00	0,00

No	OPD	Saldo 31 Des 2022	Mutasi		Saldo 31 Des 2023
			Tambah	Kurang	
30	Kecamatan Puri	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Kecamatan Bangsal	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kecamatan Gedeg	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Kecamatan Kemlagi	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Kecamatan Jetis	0,00	1.830.000,00	289.050,00	1.540.950,00
35	Kecamatan Dawarblandong	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Kecamatan Mojosari	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Kecamatan Pungging	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Kecamatan Ngoro	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Kecamatan Kutorejo	0,00	2.790.000,00	2.790.000,00	0,00
40	Kecamatan Dlanggu	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Kecamatan Gondang	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Kecamatan Jatirejo	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Kecamatan Trawas	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Kecamatan Pacet	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00
45	Kecamatan Mojoanyar	0,00	14.775.000,00	14.775.000,00	0,00
46	Inspektorat	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	537.527.000,00	16.150.000,00	16.150.000,00	537.527.000,00
48	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	34.324.000,00	0,00	0,00	34.324.000,00
49	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPKD)	9.900.000,00	0,00	0,00	9.900.000,00
50	Badan Pendapatan Daerah	0,00	245.414.400,00	245.414.400,00	0,00
51	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	53.690.000,00	53.690.000,00	0,00
	Jumlah	11.139.670.174,49	4.931.129.499,00	441.303.150,00	15.629.496.523,49

7.e.3).a) (3) (f) Konstruksi Dalam Pekerjaan

Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan Pemerintah Kabupaten Mojokerto per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Selisih Naik/Turun
Konstruksi Dalam Pengerjaan	9.443.840.013,60	6.797.610.038,00	2.646.229.975,60

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2023 sebesar Rp9.443.840.013,60 berasal dari mutasi sebagai berikut:

Tabel e. 89 Mutasi Aset Tetap Konstruksi Dalam Pekerjaan Tahun 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Nominal
1	Saldo Per 31 Desember 2022	6.797.610.038,00
2	Penambahan :	
	a. Belanja Modal/Pengadaan	0,00
	b. Mutasi Masuk	1.903.304.750,00
	c. Reklasifikasi	6.110.435.642,00
	d. Inventarisasi	0,00
	e. Hibah	0,00
	f. Mutasi Masuk Karena Perubahan SOTK	309.568.833,60
	g. Koreksi Nilai	0,00
	h. Koreksi Kurang Catat	0,00
	i. Reklasifikasi belanja barang dan jasa	45.279.000,00
	Jumlah	8.368.588.225,60
3	Pengurangan :	
	a. Mutasi Keluar	1.903.304.750,00
	b. Reklasifikasi	0,00
	c. Reklasifikasi atas Penyelesaian KDP	3.053.933.500,00
	d. Rusak Berat	0,00
	e. Penghapusan	765.120.000,00
	f. Hutang atas Aset Periode Lalu	0,00
	g. Koreksi Nilai	0,00

No	Uraian	Nominal
	h. Koreksi Lebih Catat	0,00
	i. Koreksi Atribusi/Kapitalisasi	0,00
	Jumlah	5.722.358.250,00
4	Saldo Per 31 Desember 2023	9.443.840.013,60

Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp8.368.588.225,60 dengan rincian:

(1) Mutasi masuk Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp1.903.304.750,00 dengan rincian sebagai berikut :

- UOBK RSUD. Prof. DR. Soekandar dari RSUD Soekandar (BLUD) sebesar Rp962.064.750,00 berupa rehab gedung karena gedung induknya berada pada RSUD Soekandar (Rutin-APBD).
- UOBK RSUD Soekandar (BLUD) dari UOBK RSUD Soekandar sebesar Rp941.240.000,00 berupa rehabilitasi gedung.

(2) Reklasifikasi masuk Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp6.110.435.642,00 dengan rincian:

- Dinas Pendidikan dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.438.653.270,00 atas bangunan yang masih belum selesai pengerjaannya.
- UOBK RSUD Prof. DR Soekandar dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp199.000.000,00 berupa Bangunan Kesehatan masih dalam pengerjaan.
- UOBK RSUD. RA Basuni BLUD dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp37.750.000,00 berupa bangunan kesehatan.
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp4.335.465.372,00 dengan rincian sebagai berikut :

1) Dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp239.555.717,00 berupa DED dan Biaya Umum Gudang Material PU, Kel. Kauman, Kel. Sarirejo, Kel. Sawahan.

2) Dari Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp4.095.909.655,00 berupa DED dan Biaya Umum Jalan Kabupaten, Bangunan Pengambil Irigasi dan Bangunan Pembawa Irigasi.

- Badan Penanggulangan Bencana Daerah dari Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jembatan sebesar Rp99.567.000,00 berupa DED (Detailed Engineering Design) Jembatan Talunbrak.

(3) Penambahan berupa Hutang Pada Dinas Pendidikan sebesar Rp309.568.833,60 berupa Konstruksi Dalam pengerjaan atas Laboratorium SMP 1 Jetis

(4) Reklasifikasi dari belanja Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah sebesar Rp45.279.000,00 berupa jasa konsultasi konstruksi

Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp5.722.358.250,00, dengan rincian:

(1) Mutasi keluar Aset Tetap Konstruksi dalam Pengerjaan sebesar Rp1.903.304.750,00 sebagai berikut:

- UOBK RSUD Soekandar ke UOBK RSUD Soekandar (BLUD) sebesar Rp941.240.000,00 berupa rehabilitasi gedung dikarenakan gedung induk pada UOBK RSUD Soekandar.
- RSUD Soekandar (BLUD) ke UOBK RSUD. Prof. DR. Soekandar sebesar Rp962.064.750,00 berupa rehab gedung karena gedung induknya berada pada RSUD Soekandar (APBD).

(2)) Pelunasan Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp3.053.933.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

- UOBK RSUD Prof. DR. Soekandar sebesar Rp962.064.750,00 ke Bangunan Kesehatan karena bangunan yang telah selesai.
- UOBK RSUD.Prof.DR.Soekandar BLUD sebesar Rp976.094.000,00 ke Bangunan Kesehatan karena bangunan yang telah selesai.
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp1.011.847.750,00 berupa perencanaan jalan, jembatan dan bangunan irigasi atas Koreksi BPK RI Perwakilan Provinsi Jatim;
- Dinas Koperasi dan Usaha Mikro ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp17.427.000,00 berupa DED bangunan kantor karena pembangunan telah selesai.
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp86.500.000 berupa Gedung Pertokoan karena penyelesaian KDP;

(3)) Penghapusan Aset Tetap Konstruksi dalam Pengerjaan sebesar Rp765.120.000,00 sebagai berikut:

- Dinas Pendidikan sebesar Rp321.717.000,00 berupa Perencanaan Pembangunan SDN Wonoploso dan SDN 2 Sooko karena tidak dilanjutkan fisiknya atas Koreksi BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur;
- Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan sebesar Rp44.550.000,00 berupa Jasa Konsultasi Perencanaan Pengadaan Bangunan Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat Dan Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar karena tidak dilanjutkan pengerjaan fisiknya atas Koreksi BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur;
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp 88.275.000,00 berupa DED Ruang pertemuan, Pos damkar dan gedung kantor yang tidak di lanjutkan pembangunan fisiknya dikarenakan refocusing anggaran atas Koreksi BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur;
- Dinas Sosial berupa DED yang tidak dilanjutkan kembali berdasarkan surat Kepala Dinas Sosial Nomor 028/26/416-106/2024 tanggal 12 Januari 2024 hal usulan penghapusan DED Rehabilitasi Gedung.
- Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp106.117.000,00 berupa perencanaantidak di lanjutkan pembangunan fisiknya dikarenakan refocusing anggaran atas Koreksi BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur;
- Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp105.247.000,00 berupa perencanaan tidak di lanjutkan pembangunan fisiknya dikarenakan refocusing anggaran atas Koreksi BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur;
- Sekretariat Daerah sebesar Rp59.180.000,00 berupa perencanaan tidak di lanjutkan pembangunan fisiknya dikarenakan refocusing anggaran atas Koreksi BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur;
- Kecamatan Mojosari sebesar Rp16.450.000,00 berupa perencanaan tidak di lanjutkan pembangunan fisiknya dikarenakan refocusing anggaran atas Koreksi BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur;

Saldo Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp9.443.840.013,60 dan mutasi tahun 2023, per Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel e. 90 Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan per SKPD

(dalam rupiah)

No	OPD	Saldo 31 Des 2022	Mutasi		Saldo 31 Des 2023
			Tambah	Kurang	
1	Dinas Pendidikan	74.525.000,00	1.748.222.103,60	321.717.000,00	1.501.030.103,60
2	Dinas Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RSUD. Prof. DR. Soekandar (APBD)	941.240.000,00	962.064.750,00	1.903.304.750,00	0,00
4	RSUD. Prof. DR. Soekandar (BLUD)	996.918.750,00	1.140.240.000,00	1.938.158.750,00	199.000.000,00
5	RSUD. RA Basuni (APBD)	742.582.500,00	0,00	0,00	742.582.500,00
6	RSUD. RA Basuni (BLUD)	0,00	37.750.000,00	0,00	37.750.000,00
7	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.475.882.938,00	4.335.465.372,00	1.011.847.750,00	6.799.500.560,00
8	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan	44.550.000,00	0,00	44.550.000,00	0,00
9	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	88.275.000,00	99.567.000,00	88.275.000,00	99.567.000,00
12	Dinas Sosial	23.584.000,00	0,00	23.584.000,00	0,00
13	Dinas Tenaga Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dinas Pangan dan Perikanan	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dinas Lingkungan Hidup	106.117.000,00	0,00	106.117.000,00	0,00
16	Dinas Kependudukan dan catatan Sipil	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	17.427.000,00	0,00	17.427.000,00	0,00
21	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	86.500.000,00	0,00	86.500.000,00	0,00
22	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga	105.247.000,00	0,00	105.247.000,00	0,00
24	Dinas Pertanian	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Sekretariat Daerah	78.310.850,00	45.279.000,00	59.180.000,00	64.409.850,00
27	Sekretariat DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Kecamatan Sooko	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Kecamatan Trowulan	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kecamatan Puri	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Kecamatan Bangsal	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kecamatan Gedeg	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Kecamatan Kemlagi	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Kecamatan Jetis	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Kecamatan Dawarblandong	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Kecamatan Mojosari	16.450.000,00	0,00	16.450.000,00	0,00
37	Kecamatan Pungging	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Kecamatan Ngoro	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Kecamatan Kutorejo	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Kecamatan Dlanggu	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Kecamatan Gondang	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Kecamatan Jatrejo	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Kecamatan Trawas	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Kecamatan Pacet	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Kecamatan Mojoanyar	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Inspektorat	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPKD)	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Badan Pendapatan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	6.797.610.038,00	8.368.588.225,60	5.722.358.250,00	9.443.840.013,60

7.e.3).a) (3) (g) Akumulasi Penyusutan

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Selisih Naik/Turun
Akumulasi Penyusutan	-3.731.021.573.185,67	-3.379.982.960.404,72	-351.038.612.780,95

Penyusutan atas Aset Tetap milik Pemerintah Kabupaten Mojokerto didasarkan pada Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. Akumulasi Penyusutan merupakan kumpulan dari beban penyusutan periodik, dimana pada akhir tahun pertama aktiva dimanfaatkan. Besarnya akumulasi penyusutan adalah sama dengan besarnya beban penyusutan selama tahun pertama pemakaian, sedangkan pada akhir tahun kedua besarnya akumulasi penyusutan merupakan penjumlahan antara besarnya beban penyusutan untuk tahun pertama pemakaian dengan beban penyusutan untuk tahun kedua dan seterusnya. Akun Penyusutan merupakan akun pengurang (*contra account*) dari akun aktiva bersangkutan.

Pada Tahun 2023, telah dilakukan Penyusutan atas Aset Tetap dengan metode perhitungan Linear/ Garis Lurus sebesar Rp3.731.021.573.185,67 dengan rincian:

Tabel e. 91 Daftar Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

(dalam rupiah)

No	Uraian	Akumulasi Penyusutan
1	Peralatan & Mesin	1.020.732.708.799,04
2	Gedung & Bangunan	354.554.515.120,07
3	Jalan, Irigasi, & Jaringan	2.355.419.432.156,56
4	Aset Tetap lainnya	314.917.110,00
	Total	3.731.021.573.185,67

Adapun rincian akumulasi penyusutan untuk masing-masing Aset Tetap per OPD di sajikan dalam tabel berikut:

Tabel e. 92 Daftar Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin per SKPD

(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Dinas Pendidikan	232.679.405.422,58	183.844.606.269,25	48.834.799.153,33
2	Dinas Kesehatan	208.021.960.986,50	169.688.893.970,88	38.333.067.015,62
3	RSUD. Prof. DR. Soekandar (APBD)	248.205.525.846,10	201.750.758.970,08	46.454.766.876,02
4	RSUD. Prof. DR. Soekandar (BLUD)	37.384.249.272,04	28.943.812.514,21	8.440.436.757,83
5	RSUD. RA Basuni (APBD)	151.351.878.981,39	133.763.763.513,36	17.588.115.468,03
6	RSUD. RA Basuni (BLUD)	19.412.597.768,44	12.375.560.857,29	7.037.036.911,15
7	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	68.848.511.178,94	61.204.601.181,96	7.643.909.996,98
8	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan	31.913.247.717,50	26.312.152.565,10	5.601.095.152,40
9	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.313.168.067,00	1.003.614.761,00	309.553.306,00
10	Satuan Polisi Pamong Praja	3.787.726.818,00	3.149.744.409,00	637.982.409,00
11	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	20.199.472.022,00	12.121.708.968,00	8.077.763.054,00
12	Dinas Sosial	3.293.650.342,00	2.780.051.070,80	513.599.271,20
13	Dinas Tenaga Kerja	1.452.816.748,00	1.354.971.848,00	97.844.900,00
14	Dinas Pangan dan Perikanan	2.248.555.138,50	2.092.420.538,50	156.134.600,00
15	Dinas Lingkungan Hidup	37.803.228.226,56	31.028.784.222,36	6.774.444.004,20
16	Dinas Kependudukan dan catatan Sipil	5.798.162.358,22	3.824.463.069,02	1.973.699.289,20
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.279.252.655,00	1.826.893.220,00	452.359.435,00
18	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan	9.175.176.282,38	7.188.501.483,38	1.986.674.799,00
19	Dinas Komunikasi dan Informatika	14.171.831.332,33	10.575.974.995,13	3.595.856.337,20
20	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	1.459.176.018,00	1.369.429.686,80	89.746.331,20
21	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.229.313.801,00	2.909.453.560,00	3.319.860.241,00

No	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
22	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.929.202.846,00	3.609.957.488,40	319.245.357,60
23	Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga	7.421.237.326,24	6.458.182.774,24	963.054.552,00
24	Dinas Pertanian	6.616.276.943,00	5.658.805.635,00	957.471.308,00
25	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	9.260.997.001,00	6.927.412.581,00	2.333.584.420,00
26	Sekretariat Daerah	45.187.631.153,33	35.134.142.593,16	10.053.488.560,17
27	Sekretariat DPRD	14.580.619.423,00	9.473.551.923,00	5.107.067.500,00
28	Kecamatan Sooko	2.211.060.405,89	1.591.491.399,09	619.569.006,80
29	Kecamatan Trowulan	2.379.837.648,89	1.636.706.750,89	743.130.898,00
30	Kecamatan Puri	2.580.132.576,89	1.854.518.976,89	725.613.600,00
31	Kecamatan Bangsal	2.335.537.808,89	1.684.483.058,89	651.054.750,00
32	Kecamatan Gedeg	2.097.818.413,89	1.538.718.203,89	559.100.210,00
33	Kecamatan Kemlagi	2.520.549.676,89	1.748.915.552,89	771.634.124,00
34	Kecamatan Jetis	2.299.944.263,00	1.549.805.123,00	750.139.140,00
35	Kecamatan Dawarblandong	2.507.662.892,89	1.872.171.372,89	635.491.520,00
36	Kecamatan Mojosari	3.713.551.476,01	2.529.307.880,01	1.184.243.596,00
37	Kecamatan Pungging	2.477.355.256,89	1.763.389.068,89	713.966.188,00
38	Kecamatan Ngoro	2.457.102.079,89	1.667.826.244,49	789.275.835,40
39	Kecamatan Kutorejo	2.244.362.198,89	1.614.642.824,89	629.719.374,00
40	Kecamatan Dlanggu	2.226.653.418,00	1.566.968.872,40	659.684.545,60
41	Kecamatan Gondang	2.416.883.383,89	1.778.000.565,89	638.882.818,00
42	Kecamatan Jatirejo	2.391.125.523,89	1.755.321.469,89	635.804.054,00
43	Kecamatan Trawas	2.029.299.439,00	1.448.466.027,80	580.833.411,20
44	Kecamatan Pacet	2.472.470.999,89	1.757.384.445,69	715.086.554,20
45	Kecamatan Mojoanyar	1.984.355.550,00	1.428.648.648,00	555.706.902,00
46	Inspektorat	4.482.866.270,81	3.579.013.388,03	903.852.882,78
47	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	4.184.121.779,00	3.269.476.127,00	914.645.652,00
48	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	6.872.662.910,00	5.428.135.960,00	1.444.526.950,00
49	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPKD)	543.703.000,00	543.703.000,00	0,00
50	Badan Pendapatan Daerah	11.277.968.684,11	8.413.693.924,11	2.864.274.760,00
51	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.001.160.409,00	2.339.705.244,60	661.455.164,40
	Jumlah	1.267.733.057.741,55	1.020.732.708.799,04	247.000.348.942,51

Tabel e. 93 Aset Tetap Gedung dan Bangunan per SKPD

(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Dinas Pendidikan	659.440.886.403,43	198.265.487.186,74	461.175.399.216,69
2	Dinas Kesehatan	177.192.357.993,29	33.484.817.770,25	143.707.540.223,04
3	RSUD. Prof. DR. Soekandar (APBD)	97.594.823.759,94	9.940.789.120,51	87.654.034.639,43
4	RSUD. Prof. DR. Soekandar (BLUD)	77.120.981.738,00	6.002.021.409,50	71.118.960.328,50
5	RSUD. RA Basuni (APBD)	70.529.637.363,54	9.504.730.192,89	61.024.907.170,65
6	RSUD. RA Basuni (BLUD)	1.170.847.680,00	79.180.211,26	1.091.667.468,74
7	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	21.517.703.452,00	3.777.046.463,52	17.740.656.988,48
8	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan	14.677.392.721,50	4.141.228.556,29	10.536.164.165,21
9	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.030.159.178,00	273.217.165,58	756.942.012,42
10	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	0,00
11	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.502.884.200,00	834.959.793,63	3.667.924.406,37
12	Dinas Sosial	9.085.490.234,00	1.646.613.414,00	7.438.876.820,00
13	Dinas Tenaga Kerja	1.185.644.310,00	411.455.671,56	774.188.638,44
14	Dinas Pangan dan Perikanan	11.155.560.344,58	2.505.841.990,81	8.649.718.353,77
15	Dinas Lingkungan Hidup	21.407.148.319,71	3.692.989.023,81	17.714.159.295,90
16	Dinas Kependudukan dan catatan Sipil	2.811.040.642,00	553.087.504,10	2.257.953.137,90
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	541.059.800,00	152.125.855,66	388.933.944,34
18	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan	8.038.664.250,00	1.410.730.341,04	6.627.933.908,96
19	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.534.886.223,00	447.422.548,09	1.087.463.674,91
20	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	2.099.399.097,00	324.093.155,94	1.775.305.941,06
21	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	16.020.333.427,00	1.439.501.253,22	14.580.832.173,78
22	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5.621.852.200,00	934.997.930,52	4.686.854.269,48

No	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
23	Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga	90.691.040.149,69	22.058.701.393,57	68.632.338.756,12
24	Dinas Pertanian	17.596.705.459,00	3.444.997.198,24	14.151.708.260,76
25	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	103.095.448.595,00	15.167.653.215,95	87.927.795.379,05
26	Sekretariat Daerah	37.010.696.493,21	5.516.387.520,23	31.494.308.972,98
27	Sekretariat DPRD	51.815.546.850,00	5.024.955.311,66	46.790.591.538,34
28	Kecamatan Sooko	6.878.507.395,00	859.115.386,17	6.019.392.008,83
29	Kecamatan Trowulan	7.118.694.450,00	869.917.414,46	6.248.777.035,54
30	Kecamatan Puri	6.628.603.250,00	717.589.737,20	5.911.013.512,80
31	Kecamatan Bangsal	6.766.185.266,00	931.375.638,07	5.834.809.627,93
32	Kecamatan Gedeg	7.540.427.550,00	906.639.201,24	6.633.788.348,76
33	Kecamatan Kemlagi	6.811.631.816,00	924.357.341,11	5.887.274.474,89
34	Kecamatan Jetis	7.034.246.766,00	1.242.364.487,72	5.791.882.278,28
35	Kecamatan Dawarblandong	6.471.941.466,00	827.371.606,23	5.644.569.859,77
36	Kecamatan Mojosari	10.497.744.772,62	1.982.064.614,18	8.515.680.158,44
37	Kecamatan Pungging	6.889.898.128,90	907.401.465,44	5.982.496.663,46
38	Kecamatan Ngoro	6.139.412.066,00	787.805.915,12	5.351.606.150,88
39	Kecamatan Kutorejo	7.268.317.846,00	1.305.463.221,00	5.962.854.625,00
40	Kecamatan Dlanggu	7.258.329.116,00	1.031.656.732,20	6.226.672.383,80
41	Kecamatan Gondang	7.143.001.523,00	1.079.410.676,00	6.063.590.847,00
42	Kecamatan Jatirejo	6.658.176.312,00	845.618.925,85	5.812.557.386,15
43	Kecamatan Trawas	7.628.765.992,00	1.354.006.087,56	6.274.759.904,44
44	Kecamatan Pacet	7.032.393.866,00	1.195.750.811,70	5.836.643.054,30
45	Kecamatan Mojoanyar	7.178.530.796,00	1.101.834.610,44	6.076.696.185,56
46	Inspektorat	931.577.929,80	242.363.908,21	689.214.021,59
47	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	1.579.605.607,15	158.153.073,94	1.421.452.533,21
48	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	4.722.167.281,94	1.029.378.164,35	3.692.789.117,59
49	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPKD)	3.318.316.625,42	1.353.151.803,64	1.965.164.821,78
50	Badan Pendapatan Daerah	3.825.113.550,00	848.297.532,30	2.976.816.017,70
51	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.207.016.370,00	1.018.395.567,37	3.188.620.802,63
	Jumlah	1.652.016.796.625,72	354.554.515.120,07	1.297.462.281.505,65

Tabel e. 94 Daftar Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per SKPD

(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Dinas Pendidikan	494.205.000,00	113.148.900,00	381.056.100,00
2	Dinas Kesehatan	11.373.664.042,51	2.882.573.497,70	8.491.090.544,81
3	RSUD. Prof. DR. Soekandar (APBD)	10.775.970.393,04	2.501.432.007,77	8.274.538.385,27
4	RSUD. Prof. DR. Soekandar (BLUD)	4.654.237.935,00	1.077.586.240,40	3.576.651.694,60
5	RSUD. RA Basuni (APBD)	10.802.886.663,07	2.440.937.582,44	8.361.949.080,63
6	RSUD. RA Basuni (BLUD)	239.251.500,00	43.164.480,00	196.087.020,00
7	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.203.455.418.402,22	2.314.198.387.455,62	889.257.030.946,60
8	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan	28.843.297.434,00	12.159.269.122,36	16.684.028.311,64
9	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	0,00
10	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	0,00
11	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	110.343.700,00	40.147.120,00	70.196.580,00
12	Dinas Sosial	0,00	0,00	0,00
13	Dinas Tenaga Kerja	0,00	0,00	0,00
14	Dinas Pangan dan Perikanan	3.180.000,00	636.000,00	2.544.000,00
15	Dinas Lingkungan Hidup	16.768.129.337,23	5.791.668.732,92	10.976.460.604,31
16	Dinas Kependudukan dan catatan Sipil	0,00	0,00	0,00
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	0,00	0,00
18	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan	0,00	0,00	0,00
19	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.415.000.000,00	483.000.000,00	1.932.000.000,00
20	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	0,00	0,00	0,00
21	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00	0,00

No	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
22	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,00	0,00
23	Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga	12.500.000,00	2.500.000,00	10.000.000,00
24	Dinas Pertanian	119.978.400,00	14.397.408,00	105.580.992,00
25	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3.162.853.900,00	917.024.744,00	2.245.829.156,00
26	Sekretariat Daerah	2.566.693.000,00	1.173.131.278,06	1.393.561.721,94
27	Sekretariat DPRD	0,00	0,00	0,00
28	Kecamatan Sooko	0,00	0,00	0,00
29	Kecamatan Trowulan	0,00	0,00	0,00
30	Kecamatan Puri	0,00	0,00	0,00
31	Kecamatan Bangsal	0,00	0,00	0,00
32	Kecamatan Gedeg	0,00	0,00	0,00
33	Kecamatan Kemlagi	0,00	0,00	0,00
34	Kecamatan Jetis	0,00	0,00	0,00
35	Kecamatan Dawarblandong	0,00	0,00	0,00
36	Kecamatan Mojosari	24.524.931.665,31	11.146.299.655,48	13.378.632.009,83
37	Kecamatan Pungging	0,00	0,00	0,00
38	Kecamatan Ngoro	0,00	0,00	0,00
39	Kecamatan Kutorejo	0,00	0,00	0,00
40	Kecamatan Dlanggu	0,00	0,00	0,00
41	Kecamatan Gondang	0,00	0,00	0,00
42	Kecamatan Jatirejo	0,00	0,00	0,00
43	Kecamatan Trawas	0,00	0,00	0,00
44	Kecamatan Pacet	0,00	0,00	0,00
45	Kecamatan Mojoanyar	949.334.229,54	379.733.691,81	569.600.537,73
46	Inspektorat	0,00	0,00	0,00
47	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	0,00	0,00	0,00
48	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	0,00	0,00
49	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPKD)	169.982.000,00	54.394.240,00	115.587.760,00
50	Badan Pendapatan Daerah	0,00	0,00	0,00
51	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	3.321.441.857.601,92	2.355.419.432.156,56	966.022.425.445,36

Tabel e. 95 Daftar Penyusutan Aset Tetap Lainnya per SKPD

(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Dinas Pendidikan	12.997.962.843,49	284.627.110,00	12.713.335.733,49
2	Dinas Kesehatan	5.704.000,00	3.200.000,00	2.504.000,00
3	RSUD. Prof. DR. Soekandar (APBD)	0,00	0,00	0,00
4	RSUD. Prof. DR. Soekandar (BLUD)	23.600.000,00	0,00	23.600.000,00
5	RSUD. RA Basuni (APBD)	0,00	0,00	0,00
6	RSUD. RA Basuni (BLUD)	0,00	0,00	0,00
7	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	413.669.774,00	7.290.000,00	406.379.774,00
8	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan	0,00	0,00	0,00
9	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	0,00
10	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	0,00
11	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	16.300.000,00	0,00	16.300.000,00
12	Dinas Sosial	0,00	0,00	0,00
13	Dinas Tenaga Kerja	0,00	0,00	0,00
14	Dinas Pangan dan Perikanan	0,00	0,00	0,00
15	Dinas Lingkungan Hidup	408.219.000,00	0,00	408.219.000,00
16	Dinas Kependudukan dan catatan Sipil	0,00	0,00	0,00
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	500.000,00	0,00	500.000,00
18	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan	38.853.600,00	0,00	38.853.600,00
19	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	0,00
20	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00
21	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	12.305.000,00	0,00	12.305.000,00

No	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
22	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	530.987.320,00	9.900.000,00	521.087.320,00
23	Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga	94.395.400,00	0,00	94.395.400,00
24	Dinas Pertanian	0,00	0,00	0,00
25	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	20.784.000,00	0,00	20.784.000,00
26	Sekretariat Daerah	388.685.500,00	0,00	388.685.500,00
27	Sekretariat DPRD	79.638.136,00	0,00	79.638.136,00
28	Kecamatan Sooko	0,00	0,00	0,00
29	Kecamatan Trowulan	0,00	0,00	0,00
30	Kecamatan Puri	0,00	0,00	0,00
31	Kecamatan Bangsal	0,00	0,00	0,00
32	Kecamatan Gedeg	0,00	0,00	0,00
33	Kecamatan Kemlagi	0,00	0,00	0,00
34	Kecamatan Jetis	1.540.950,00	0,00	1.540.950,00
35	Kecamatan Dawarblandong	0,00	0,00	0,00
36	Kecamatan Mojosari	0,00	0,00	0,00
37	Kecamatan Pungging	0,00	0,00	0,00
38	Kecamatan Ngoro	0,00	0,00	0,00
39	Kecamatan Kutorejo	0,00	0,00	0,00
40	Kecamatan Dlanggu	0,00	0,00	0,00
41	Kecamatan Gondang	0,00	0,00	0,00
42	Kecamatan Jatirejo	0,00	0,00	0,00
43	Kecamatan Trawas	0,00	0,00	0,00
44	Kecamatan Pacet	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00
45	Kecamatan Mojoanyar	0,00	0,00	0,00
46	Inspektorat	0,00	0,00	0,00
47	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	537.527.000,00	0,00	537.527.000,00
48	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	34.324.000,00	0,00	34.324.000,00
49	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPKD)	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00
50	Badan Pendapatan Daerah	0,00	0,00	0,00
51	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	15.629.496.523,49	314.917.110,00	15.314.579.413,49

7.e.3).a).(4) Dana Cadangan

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
<u>55.000.000.000,00</u>	<u>0,00</u>

Saldo Dana Cadangan Pemerintah Kabupaten Mojokerto per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah:

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Selisih Naik/Turun
Dana Cadangan	55.000.000.000,00	0,00	55.000.000.000,00

Dana Cadangan Pemerintah Kabupaten Mojokerto per 31 Desember 2023 sebesar Rp55.000.000.000,00. Dana Cadangan tersebut dibentuk sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2024. Pada saat ini Dana Cadangan tersebut di tempatkan pada Rekening Giro Dana Cadangan di Bank Jatim dengan Nomor Rekening 0161045594

7.e.3).a).(5) Aset Lainnya

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
<u>31.573.335.751,25</u>	<u>24.888.583.852,71</u>

Aset Lainnya (Netto) Pemerintah Kabupaten Mojokerto per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Selisih Naik/Turun
Aset Lainnya	31.573.335.751,25	24.888.583.852,71	6.684.751.898,54

Aset lainnya adalah aset Pemerintah Daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, dan Dana Cadangan. Nilai aset lainnya terdiri dari Tagihan Tuntutan Ganti Rugi, Aset Tidak Berwujud dan Aset Lain-lain. Nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2023 (Netto) sebesar Rp31.573.335.751,25 sedangkan secara keseluruhan sebelum penyisihan, penyusutan dan amortisasi menunjukkan jumlah sebesar Rp107.862.689.976,05 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel e. 96 Rincian Aset Lainnya Sebelum penyisihan, penyusutan dan amortisasi (Bruto)

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Selisih Naik/Turun
Tagihan Piutang Penjualan Angsuran	0,00	0,00	0,00
Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	43.187.620.737,67	43.304.771.604,39	-117.150.866,72
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	9.149.192.897,00	8.763.787.297,00	385.405.600,00
Aset Lain-Lain	55.525.876.341,38	51.577.673.109,58	3.948.203.231,80
Jumlah	107.862.689.976,05	103.646.232.010,97	4.216.457.965,08

7.e.3.a) (5).(a) Tagihan Tuntutan Ganti Rugi

Saldo Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 (Bruto) adalah sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Selisih Naik/Turun
Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	43.187.620.737,67	43.304.771.604,39	-117.150.866,72

Piutang Ganti Rugi atas kekayaan daerah merupakan piutang yang timbul karena pengenaan ganti kerugian negara/daerah kepada pegawai negeri bukan bendahara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas yang menjadi kewajibannya dan kerugian daerah yang ditimbulkan oleh pihak ketiga.

Aset Lainnya - Tuntutan Ganti Rugi merupakan akun yang menyajikan Kasus Kerugian Daerah yang telah diproses melalui mekanisme Tuntutan Ganti Rugi (TGR). Saldo Aset Lainnya – Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp43.187.620.737,67 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel e. 97 Mutasi Aset Lainnya- Tagihan Tuntutan Ganti Rugi

(dalam rupiah)

Uraian	Saldo Per 31 Des 2022	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo per 31 Des 2023
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	43.304.771.604,39	104.527.575,69	283.229.139,26	43.126.070.040,82
Total	43.304.771.604,39	166.078.272,54	283.229.139,26	43.187.620.737,67

Saldo Aset Lainnya-Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp43.304.771.604,39. Mutasi tambah atau penambahan selama tahun 2023 sebesar

Rp166.078.272,54 merupakan temuan atas pemeriksaan Laporan Keuangan tahun 2022 yang terdiri dari:

1. Kelebihan pembayaran honorarium Dewan Pengawas RSUD Prof. Dr Soekandar sebesar Rp20.089.426,32.
2. Kekurangan volume atas delapan paket pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada lima OPD sebesar Rp84.438.149,37, dengan rincian:
 - Bagian Umum Sekretaria Daerah sebesar Rp23.680.348,21 yang terdiri dari Pekerjaan Konstruksi TK Pertiwi sebesar Rp16.571.410,21 dan Pekerjaan Konstruksi Kantin sebesar Rp7.108.938,00
 - Dinas Pertanian sebesar Rp14.333.598,56 atas Pembangunan Pusat Kesehatan Hewan Gondang dan Renovasi Pusat Kesehatan Hewan Puri.
 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp13.970.962,00 atas Pekerjaan Pembangunan Rumah Aman.
 - Dinas Pendidikan sebesar Rp15.312.353,71 yaitu atas Pembangunan USB TKNP 1 Dawarblandong sebesar Rp11.087.175,24 dan Rehabilitasi Ruang SDN Mojowatesrejo.
 - Dinas Kesehatan sebesar Rp17.140.886,89, yaitu atas Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas Ngoro sebesar Rp.12.567.336,89 dan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas Bangsal sebesar Rp4.573.550,00.
 - Penambahan karena reklasifikasi dari piutang lainnya atas kekurangan volume atas pembangunan unit sekolah baru SMPN 2 Puri TA 2021 atas nama CV. AMP sebesar Rp61.550.696,85

Sedangkan mutasi kurang atau pengurangan sebesar Rp283.229.139,26, terdiri dari:

1. Pembayaran angsuran dari kerugian daerah atas temuan Belanja Daerah DPRD Tahun Anggaran 2004 dan 2005 sebesar Rp97.152.287,22, dengan rincian sebesar Rp31.172.544,00 diterimakan dalam bentuk uang tunai dan sebesar Rp65.979.743,22 merupakan potongan *Crash Program* sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 13/PMK.06/2023 tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/Dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun Anggaran 2023.
2. Koreksi lebih saji atas temuan kerugian daerah Belanja Daerah DPRD Tahun Anggaran 2004 dan 2005 sebesar Rp19.438.747,62 karena telah lunas.
3. Pembayaran angsuran dari kerugian daerah kekurangan volume kegiatan Bantuan Keuangan Desa atas temuan pemeriksaan LKPD Tahun 2013 sebesar Rp10.000.000,00
4. Pembayaran angsuran dari kerugian daerah kekurangan volume kegiatan Peningkatan Jalan Lingkungan (P JL) Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang atas temuan pemeriksaan LKPD Tahun 2013 sebesar Rp17.850.664,02.
5. Koreksi lebih saji atas temuan kerugian daerah kekurangan volume kegiatan Peningkatan Jalan Lingkungan (P JL) Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang atas temuan pemeriksaan LKPD Tahun 2013 sebesar Rp34.259.864,21.
6. Pembayaran angsuran dari kerugian daerah atas temuan pemeriksaan LKPD Tahun 2022 sebesar Rp104.527.575,69, dengan rincian:
 - a) Pembayaran kerugian daerah atas kelebihan pembayaran honorarium Dewan Pengawas RSUD Prof. Dr Soekandar sebesar Rp20.089.426,32.

b) Pembayaran kekurangan volume atas delapan paket pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada lima OPD sebesar Rp84.438.149,37, dengan rincian:

- Bagian Umum Sekretaria Daerah sebesar Rp23.680.348,21 yang terdiri dari Pekerjaan Konstruksi TK Pertiwi sebesar Rp16.571.410,21 dan Pekerjaan Konstruksi Kantin sebesar Rp7.108.938,00
- Dinas Pertanian sebesar Rp14.333.598,56 atas Pembangunan Pusat Kesehatan Hewan Gondang dan Renovasi Pusat Kesehatan Hewan Puri.
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp13.970.962,00 atas Pekerjaan Pembangunan Rumah Aman.
- Dinas Pendidikan sebesar Rp15.312.353,71 yaitu atas Pembangunan USB TKNP 1 Dawarblandong sebesar Rp11.087.175,24 dan Rehabilitasi Ruang SDN Mojowatesrejo.
- Dinas Kesehatan sebesar Rp17.140.886,89, yaitu atas Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas Ngoro sebesar Rp12.567.336,89 dan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas Bangsal sebesar Rp4.573.550,00.

Atas mutasi tambah dan mutasi kurang tersebut, saldo Aset Lainnya-Tagihan Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2023 menjadi sebesar Rp43.187.620.737,67 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel e. 98 Daftar Aset Lainnya Tagihan Tuntutan Ganti Rugi

(dalam rupiah)

No	Tahun Kejadian	Uraian	Nominal	Keterangan
1	1999	Sholahudin	10.000.000,00	
2	2004	Belana Daerah TA 2004 (DPRD)		
		Belanja Daerah TA 2004 dan 2005	47.690.476,20	
		Belanja Daerah TA 2004 dan 2005	67.055.666,66	
		Belanja Daerah TA 2004 dan 2005	264.090.067,22	
3	2005	Kusno Adi	3.500.000,00	
4	2006	LKPD 2006	75.011.250,00	
5	2007	STP	11.000.000,00	
6	2006	Supraptiningsih	1.730.000,00	
7	2011	LKPD 2011		
		a. Ach	30.972.990.000,00	
		b. Soe	205.000.000,00	
		c. Soe	4.375.000.000,00	
		d. HRS	260.000.000,00	
		e. YH	20.000.000,00	
		f. AM	50.000.000,00	
		g. Dri	445.000.000,00	
		h. Hry	67.000.000,00	
		i. Sty	50.000.000,00	
		j. SH	40.000.000,00	
		k. AS	50.000.000,00	
		l. Fq	75.000.000,00	
		m. Dju	45.000.000,00	
8	2013	LKPD 2013		
		a. Bantuan Keuangan Desa	1.076.680.227,91	
		b. PJJ Cipta Karya dan TR	4.136.467.873,83	
		c. DED Dinas Pendidikan	731.657.879,00	
9	2018	LKPD 2018		
		PAH BPBD	46.196.600,00	
10	2021	LKPD 2022		
		CV AMP	61.550.696,85	
		Jumlah	43.187.620.737,67	

Penjelasan atas tabel di atas adalah sebagai berikut:

- (1) Sholahudin Sekretaris Dewan Pendidikan Kabupaten Mojokerto merupakan kasus kehilangan kendaraan dinas tahun kejadian 1999 dengan nilai kerugian sebesar Rp15.000.000,00. Atas kerugian tersebut telah ada pembayaran sebesar Rp5.000.000,00, sehingga saldo kerugian per 31 Desember 2023 sebesar Rp10.000.000,00
- (2) Belanja Daerah, merupakan temuan pemeriksaan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 dan 2005, yang terdiri dari:
 - Pemberian uang tunjangan penghargaan dan uang tali asih untuk pimpinan dan anggota DPRD sebesar Rp.680.725.000,00 tidak sesuai ketentuan. Atas kerugian tersebut telah ada pembayaran sebesar Rp633.034.523,80, sehingga saldo kerugian per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp47.690.476,20.
 - Pemberian tunjangan perbaikan penghasilan kepada pimpinan dan anggota DPRD tidak sesuai ketentuan sebesar Rp245.922.900,00. Atas kerugian tersebut telah ada pembayaran sebesar Rp178.867.233,34, sehingga saldo kerugian per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp67.055.666,66.
 - Pembayaran tunjangan sebesar Rp.1.906.765.000,00 kepada pimpinan dan anggota DPRD meyimang dari ketentuan yang berlaku. Atas kerugian tersebut telah ada pembayaran sebesar Rp1.642.674.932,78, sehingga saldo kerugian tersebut per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp264.090.067,22.
- (3) Kusno Adi Kepala Desa Dlanggu Kecamatan Dlanggu merupakan kasus kehilangan kendaraan dinas tahun kejadian 2005 dengan nilai kerugian sebesar Rp7.500.000,00. Atas Atas kerugian tersebut telah ada pembayaran sebesar Rp4.000.000,00, sehingga saldo kerugian per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.500.000,00.
- (4) LKPD 2006, merupakan temuan atas pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2006, yaitu kelebihan pembayaran dana operasional dan tunjangan komunikasi intensif anggota DPRD dengan nilai kerugian sebesar Rp75.011.250,00 dan belum ada pembayaran sama sekali.
- (5) STP, adalah Kasubag Keuangan pada Bapedalda dan telah pensiun, dengan kasus kehilangan kendaraan dinas pada tahun 2007 dengan nilai kerugian sebesar Rp11.000.000,00 dan belum ada pembayaran sama sekali.
- (6) Supraptiningsih Bidan Desa Gondang dengan kasus kehilangan kendaraan dinas pada tahun 2009 dengan nilai kerugian sebesar Rp8.000.000,00. Atas kerugian tersebut telah ada pembayaran sebesar Rp6.270.000,00, sehingga saldo kerugian per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.730.000,00.
- (7) LKPD 2011, merupakan temuan atas pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2011, yaitu mekanisme pengeluaran menggunakan cek membuka peluang penyalahgunaan Dana APBD dan mengakibatkan ketekoran Kas pada BUD sebesar Rp.39.199.020.000,00. Saldo kerugian tersebut per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp36.654.990.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - Ach dengan nilai kerugian sebesar Rp30.972.990.000,00 telah ada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1449/K/PID.SUS/2013.
 - Soe dengan nilai kerugian sebesar Rp925.000.000,00 telah ada Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 69/Pid.Sus/2012/PN.Sby. Berdasarkan keputusan tersebut nilai kerugian ditetapkan sebesar Rp680.000.000,00 dan

telah dibayarkan ke Kejaksaan Negeri Mojokerto pada tanggal 24 April 2014, sehingga sisa nilai kerugian menjadi sebesar Rp245.000.000,00. Terhadap sisa kerugian tersebut telah ada pembayaran ke Kas Daerah pada tanggal 29 Januari 2014 sebesar Rp40.000.000,00 yang berasal dari uang barang bukti yang disetorkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya, sehingga saldo kerugian per 31 Desember 2023 sebesar Rp205.000.000,00.

- Soe dengan nilai kerugian sebesar Rp4.375.000.000,00 berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 69/Pid.Sus/2012/PN.Sby menyatakan bahwa kerugian tersebut digunakan untuk kompetisi PSMP.
 - HRS dan kawan-kawan dengan nilai kerugian sebesar Rp2.926.030.891,00, merupakan bagian dari kejadian ketekoran kas. Atas kerugian tersebut telah ada pembayaran sebesar Rp1.824.030.891,00, sehingga saldo kerugian tersebut per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.102.000.000,00.
- (8) LKPD 2013, merupakan temuan atas pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2013, yaitu:
- Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Desa Infrastruktur Tidak Sesuai Ketentuan sebesar Rp3.997.981.572,43. Atas kerugian tersebut telah ada pembayaran sebesar Rp2.921.301.344,52, sehingga saldo kerugian per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.076.680.227,91.
 - Pelaksanaan Belanja Barang pada Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang berupa Peningkatan Jalan Lingkungan Tidak Sesuai Ketentuan sebesar Rp16.111.441.645,71. Atas kerugian tersebut telah ada pembayaran sebesar Rp11.974.973.771,88, sehingga saldo kerugian per 31 Desember 2023 sebesar Rp4.188.578.402,06.
 - Pelaksanaan kegiatan DED SD dan SMP pada Dinas Pendidikan tidak jelas pemanfaatan hasilnya dan terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp.897.876.679,00. Atas kerugian tersebut telah ada pembayaran sebesar Rp166.218.800,00 sehingga saldo kerugian per 31 Desember 2023 sebesar Rp731.657.879,00.
- (9) LKPD 2018, merupakan temuan atas pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2018, yaitu kelebihan pembayaran Belanja Pegawai sebesar Rp408.151.940,00. Atas kerugian tersebut telah ada pembayaran sebesar Rp361.955.340,00 sehingga saldo kerugian per 31 Desember 2023 sebesar Rp46.196.600,00, atas nama Sdr. PAH dari Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (10) LKPD 2022, menemukan adanya kekurangan volume atas pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMPN 2 Puri atas nama CV AMP sebesar Rp61.550.696,85 yang dikelompokkan kedalam piutang lainnya, dan pada tahun 2023 piutang lainnya tersebut direklasifikasi kedalam aset lainnya tagihan tuntutan ganti rugi.

Dari nilai Tagihan Tuntutan Ganti Rugi sebesar Rp43.187.620.737,67 tersebut, nilai Penyisihan Tagihan Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp43.144.535.249,88, sehingga diperoleh Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Netto sebesar Rp43.085.487,79. Adapun rincian Penyisihan Tagihan Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel e. 99 Penyisihan Aset Lainnya Tuntutan Ganti Rugi

(dalam rupiah)

No	Uraian	Nominal TGR	Tahun	Jangka Waktu	persentase Penyisihan	Nilai Penyisihan
1	SH	10.000.000,00	1999	> 5	100%	10.000.000,00
2	Belanja Daerah	378.836.210,08	2004	> 5	100%	378.836.210,08
3	KA	3.500.000,00	2005	> 5	100%	3.500.000,00
4	LKPD 2006	75.011.250,00	2006	> 5	100%	75.011.250,00
5	STP	11.000.000,00	2007	> 5	100%	11.000.000,00
6	SP	1.730.000,00	2009	> 5	100%	1.730.000,00
7	LKPD 2011	36.654.990.000,00	2011	> 5	100%	36.654.990.000,00
8	LKPD 2013	5.944.805.980,74	2013	> 5	100%	5.944.805.980,74
9	LKPD 2018	46.196.600,00	2018	> 5	100%	46.196.600,00
10	LKPD 2022	61.550.696,85	2021	>2 s.d 3	30%	18.465.209,06
	Jumlah	43.187.620.737,67				43.144.535.249,88

7.e.3).a) (5).(b) Aset Tidak Berwujud

Saldo Aset Tidak Berwujud Pemerintah Kabupaten Mojokerto per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 (*Bruto*) adalah sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Selisih Naik/Turun
Aset Tidak Berwujud	9.149.192.897,00	8.763.787.297,00	385.405.600,00

Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2023 sebesar Rp9.149.192.897,00 berupa aplikasi/software dan Naskah Akademis yang merupakan reklasifikasi dari realisasi belanja modal dan belanja barang jasa dengan rincian sebagai berikut:

Tabel e. 100 Mutasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud

(dalam rupiah)

No	Uraian	Nominal
1	Saldo Per 31 Desember 2022	8.763.787.297,00
2	Penambahan :	
	a. Belanja Modal Pengadaan	0,00
	b. Mutasi Masuk	73.377.500,00
	c. Reklasifikasi Masuk	385.405.600,00
	d. Inventarisasi	0,00
	e. Hibah	0,00
	f. Mutasi Masuk Karena Perubahan SOTK	0,00
	g. Koreksi Nilai	0,00
	h. Koreksi Kurang Catat	0,00
	i. Pelunasan KDP	0,00
	Jumlah Penambahan	458.783.100,00
3	Pengurangan :	
	a. Mutasi Keluar	73.377.500,00
	b. Reklasifikasi	0,00
	c. Hibah	0,00
	d. Rusak Berat	0,00
	e. Penghapusan	0,00
	f. Mutasi Keluar Karena Perubahan SOTK	0,00
	g. Koreksi Nilai	0,00
	h. Koreksi Lebih Catat	0,00
	i. Koreksi Atribusi / Kapitalisasi	0,00
	Jumlah pengurangan	73.377.500,00
4	Saldo Per 31 Desember 2023	9.149.192.897,00
5	Amortisasi Per 31 Desember 2023	7.996.483.998,25
6	Saldo setelah Amortisasi Per 31 Desember 2023	1.152.708.898,75

Penambahan Aset Tidak Berwujud tahun 2023 sebesar Rp458.783.100,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

- (1) Mutasi masuk pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dari Sekretariat Daerah sebesar Rp73.377.500,00 berupa Aplikasi Standarisasi Harga (SIDIRGA) berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor 028/2261/416-021/2023 tanggal 13 September 2023 (lampiran 6) dilaksanakan mutasi BMD dari KIB G (aset tak berwujud).
- (2) Reklasifikasi masuk sebesar Rp385.405.600,00, dengan rincian:
- Pada UOBK RSUD. RA. Basuni BLUD dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp15.100.000,00 berupa software.
 - Pada Dinas Komunikasi dan Informatika dari Aset Tetap Lainnya sebesar Rp28.000.000,00 berupa lisensi dan franchise.
 - Pada Sekretariat Daerah dari Aset Tetap Lainnya sebesar Rp43.201.200,00 berupa Software.
 - Pada Badan Pendapatan Daerah dari Aset Tetap Lainnya berupa Software sebesar Rp245.014.400,00 dan Hak Cipta sebesar Rp400.000,00;
 - Pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Sumber Daya Manusia dari Aset Tetap Lainnya sebesar Rp53.690.000,00 berupa Software.

Pengurangan Aset Tak Berwujud sebesar Rp73.377.500,00 Pada Sekretariat Daerah merupakan mutasi keluar Aset Lainnya Tak Berwujud ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp73.377.500,00 berupa Aplikasi Standarisasi Harga (SIDIRGA) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor 028/2261/416-021/2023 tanggal 13 September 2023 (lampiran 6) dilaksanakan mutasi BMD dari KIB G (aset tak berwujud)

Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2023 sebesar Rp9.149.192.897,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel e. 101 Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud per SKPD

(dalam rupiah)

No	OPD	Saldo 31 Des 2022	Mutasi		Saldo 31 Des 2023
			Tambah	Kurang	
1	Dinas Pendidikan	153.566.552,00	0,00	0,00	153.566.552,00
2	Dinas Kesehatan	97.400.000,00	0,00	0,00	97.400.000,00
3	UOBK RSUD. Prof. DR. Soekandar (APBD)	0	0,00	0,00	0,00
4	UOBK RSUD. Prof. DR. Soekandar (BLUD)	3.103.200.000,00	0,00	0,00	3.103.200.000,00
5	UOBK RSUD. RA Basuni (APBD)	0	0,00	0,00	0,00
6	UOBK RSUD. RA Basuni (BLUD)	339.667.000,00	15.100.000,00	0,00	354.767.000,00
7	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0	0,00	0,00	0,00
8	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan	198.690.000,00	0,00	0,00	198.690.000,00
9	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0	0,00	0,00	0,00
10	Satuan Polisi Pamong Praja	0	0,00	0,00	0,00
11	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0	0,00	0,00	0,00
12	Dinas Sosial	73.452.000,00	0,00	0,00	73.452.000,00
13	Dinas Tenaga Kerja	44.100.000,00	0,00	0,00	44.100.000,00
14	Dinas Pangan dan Perikanan	34.705.000,00	0,00	0,00	34.705.000,00
15	Dinas Lingkungan Hidup	499.145.000,00	0,00	0,00	499.145.000,00
16	Dinas Kependudukan dan catatan Sipil	0	0,00	0,00	0,00
17	Dinas Pemberdayaan	74.748.300,00	0,00	0,00	74.748.300,00

No	OPD	Saldo 31 Des 2022	Mutasi		Saldo 31 Des 2023
			Tambah	Kurang	
	Masyarakat dan Desa				
18	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan	98.960.000,00	0,00	0,00	98.960.000,00
19	Dinas Komunikasi dan Informatika	597.752.845,00	28.000.000,00	0,00	625.752.845,00
20	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	0	0,00	0,00	0,00
21	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	214.775.000,00	0,00	0,00	214.775.000,00
22	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0	0,00	0,00	0,00
23	Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga	106.400.000,00	0,00	0,00	106.400.000,00
24	Dinas Pertanian	0	0,00	0,00	0,00
25	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	342.029.000,00	0,00	0,00	342.029.000,00
26	Sekretariat Daerah	750.687.400,00	43.201.200,00	73.377.500,00	720.511.100,00
27	Sekretariat DPRD	0	0,00	0,00	0,00
28	Kecamatan Sooko	0	0,00	0,00	0,00
29	Kecamatan Trowulan	0	0,00	0,00	0,00
30	Kecamatan Puri	0	0,00	0,00	0,00
31	Kecamatan Bangsal	0	0,00	0,00	0,00
32	Kecamatan Gedeg	0	0,00	0,00	0,00
33	Kecamatan Kemlagi	0	0,00	0,00	0,00
34	Kecamatan Jetis	0	0,00	0,00	0,00
35	Kecamatan Dawarblandong	0	0,00	0,00	0,00
36	Kecamatan Mojosari	0	0,00	0,00	0,00
37	Kecamatan Pungging	0	0,00	0,00	0,00
38	Kecamatan Ngoro	0	0,00	0,00	0,00
39	Kecamatan Kutorejo	0	0,00	0,00	0,00
40	Kecamatan Dlanggu	0	0,00	0,00	0,00
41	Kecamatan Gondang	0	0,00	0,00	0,00
42	Kecamatan Jatirejo	0	0,00	0,00	0,00
43	Kecamatan Trawas	0	0,00	0,00	0,00
44	Kecamatan Pacet	0	0,00	0,00	0,00
45	Kecamatan Mojoanyar	0	0,00	0,00	0,00
46	Inspektorat	0	0,00	0,00	0,00
47	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	191.461.000,00	0,00	0,00	191.461.000,00
48	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	124.960.000,00	73.377.500,00	0,00	198.337.500,00
49	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah SKPKD	0	0,00	0,00	0,00
50	Badan Pendapatan Daerah	866.339.250,00	245.414.400,00	0,00	1.111.753.650,00
51	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Sumber Daya Manusia	851.748.950,00	53.690.000,00	0,00	905.438.950,00
	Jumlah	8.763.787.297,00	458.783.100,00	73.377.500,00	9.149.192.897,00

Seperti halnya penyusutan pada aktiva tetap yang mengalokasikan harga perolehannya menjadi Beban (beban usaha). Pada Aset Tak Berwujud juga dilakukan Amortisasi. Pencatatan maupun penghitungan amortisasi sama seperti penghitungan dan pencatatan penyusutan Aset Tetap. Perhitungan Amortisasi berdasarkan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 96 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. Perhitungan Amortisasi dengan menggunakan Metode Perhitungan Linier/Garis Lurus. Saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tak berwujud per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Selisih Naik/Turun
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	-7.996.483.998,25	-7.051.838.087,00	-944.645.911,25

Saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel e. 102 Amortisasi Aset Tak Berwujud per SKPD

(dalam rupiah)

No.	URAIAN	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI AMORTISASI	NILAI BUKU
1	Dinas Pendidikan	153.566.552,00	-153.566.552,00	0,00
2	Dinas Kesehatan	97.400.000,00	-48.700.000,00	48.700.000,00
3	UOBK RSUD. Prof. DR. Soekandar (APBD)	0,00	0,00	0,00
4	UOBK RSUD. Prof. DR. Soekandar (BLUD)	3.103.200.000,00	-2.979.700.000,00	123.500.000,00
5	UOBK RSUD. RA Basuni (APBD)	0,00	0,00	0,00
6	UOBK RSUD. RA Basuni (BLUD)	354.767.000,00	-333.896.000,00	20.871.000,00
7	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	0,00	0,00
8	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan	198.690.000,00	-99.345.000,00	99.345.000,00
9	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	0,00
10	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	0,00
11	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00
12	Dinas Sosial	73.452.000,00	-73.452.000,00	0,00
13	Dinas Tenaga Kerja	44.100.000,00	-44.100.000,00	0,00
14	Dinas Pangan dan Perikanan	34.705.000,00	-34.705.000,00	0,00
15	Dinas Lingkungan Hidup	499.145.000,00	-487.645.000,00	11.500.000,00
16	Dinas Kependudukan dan catatan Sipil	0,00	0,00	0,00
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	74.748.300,00	-74.748.300,00	0,00
18	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan	98.960.000,00	-98.960.000,00	0,00
19	Dinas Komunikasi dan Informatika	625.752.845,00	-491.479.496,25	134.273.348,75
20	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	0,00	0,00	0,00
21	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	214.775.000,00	-214.775.000,00	0,00
22	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,00	0,00
23	Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga	106.400.000,00	-79.800.000,00	26.600.000,00
24	Dinas Pertanian	0,00	0,00	0,00
25	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	342.029.000,00	-323.925.500,00	18.103.500,00
26	Sekretariat Daerah	720.511.100,00	-660.230.750,00	60.280.350,00
27	Sekretariat DPRD	0,00	0,00	0,00
28	Kecamatan Sooko	0,00	0,00	0,00
29	Kecamatan Trowulan	0,00	0,00	0,00
30	Kecamatan Puri	0,00	0,00	0,00
31	Kecamatan Bangsal	0,00	0,00	0,00
32	Kecamatan Gedeg	0,00	0,00	0,00
33	Kecamatan Kemlagi	0,00	0,00	0,00
34	Kecamatan Jetis	0,00	0,00	0,00
35	Kecamatan Dawarblandong	0,00	0,00	0,00
36	Kecamatan Mojosari	0,00	0,00	0,00
37	Kecamatan Pungging	0,00	0,00	0,00
38	Kecamatan Ngoro	0,00	0,00	0,00
39	Kecamatan Kutorejo	0,00	0,00	0,00
40	Kecamatan Dlanggu	0,00	0,00	0,00
41	Kecamatan Gondang	0,00	0,00	0,00
42	Kecamatan Jatrejo	0,00	0,00	0,00
43	Kecamatan Trawas	0,00	0,00	0,00
44	Kecamatan Pacet	0,00	0,00	0,00
45	Kecamatan Mojoanyar	0,00	0,00	0,00
46	Inspektorat	0,00	0,00	0,00
47	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	191.461.000,00	-146.095.750,00	45.365.250,00
48	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	198.337.500,00	-198.337.500,00	0,00
49	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah SKPKD	0,00	0,00	0,00
50	Badan Pendapatan Daerah	1.111.753.650,00	-709.790.687,50	401.962.962,50
51	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Sumber Daya Manusia	905.438.950,00	-743.231.462,50	162.207.487,50
	Jumlah	9.149.192.897,00	-7.996.483.998,25	1.152.708.898,75

7.e.3).a) (5).(c) Aset Lain-lain

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Selisih Naik/Turun
Aset Lain-Lain	55.525.876.341,38	51.577.673.109,58	3.948.203.231,80

Saldo Aset lain-lain per 31 Desember 2023 (*Bruto*) sebesar Rp terdiri dari:

Tabel e. 103 Aset Lainnya – Aset Lain-Lain

(dalam rupiah)

Uraian	Saldo 31 Desember 2023	Saldo 31 Desember 2022	Naik/Turun
Aset Lain-lain – TDF TKD	23.942.900.000,00	12.447.629.294,00	11.495.270.706,00
Aset Lain-lain – Piutang Pajak Daerah	1.336.131.487,89	684.777.514,00	651.353.973,89
Aset Lain-lain – Rusak Berat	30.246.844.853,49	38.445.266.301,58	-8.198.421.448,09
Total	55.525.876.341,38	51.577.673.109,58	3.948.203.231,80

(1) Aset Lainnya – Aset Lain-lain TDF TKD

Saldo Aset Lainnya – Aset Lain-lain yang berasal dari penyaluran Dana Bagi Hasil/Dana Alokasi Umum melalui fasilitas *Treasury Deposit Facility* (TDF) per 31 Desember 2023 sebesar Rp23.942.900.000,00, merupakan Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam yang penyalurannya secara non tunai melalui *Treasury Deposit Facility* Transfer ke Daerah (TDF-TKD).

Adapun rincian dari *Treasury Deposit Facility* Transfer ke Daerah (TDF-TKD) Tahun 2023, adalah sebagai berikut:

Tabel e. 104 Aset Lainnya – Treasury Deposit Facility Transfer ke Daerah (TDF-TKD)

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1	DBH PBB Sektor Lainnya-Bagian Daerah	879.004.000,00	12.356.755,00
2	DBH PBB Perkebunan	0,00	12.417.987,00
3	DBH PBB Non Migas Lainnya	0,00	418.847,00
4	DBH PBB Minyak dan Gas Bumi	0,00	9.022.424,00
5	DBH PBB Non Migas Lainnya	0,00	12.064.700,00
6	DBH PBB Minyak dan Gas Bumi Bagian Daerah	0,00	259.832.915,00
7	DBH PBB Perhutanan-Biaya Pemungutan	0,00	6.449.466,00
8	DBH PBB Bagi Rata	0,00	472.605.805,00
9	DBH PBB Perhutanan Bagian Daerah	0,00	154.794.614,00
10	DBH PBB Sektor Lainnya Biaya Pemungutan	0,00	428.991,00
11	DBH PBB Perkebunan- Biaya Pemungutan	0,00	603.655,00
12	DBH Pajak Penghasilan PPh 21	5.468.302.000,00	2.755.246.216,00
13	DBH Pajak Penghasilan PPh 22/29	271.385.000,00	249.264.984,00
14	DBH CHT	0,00	2.785.062.596,00
15	DBH SDA Minyak Bumi 15%	14.357.913.000,00	4.732.722.560,00
16	DBH SDA Minyak Bumi 0,5%	0,00	157.758.445,00
17	DBH SDA Gas Bumi 0,5%	0,00	5.062.239,00
18	DBH SDA Gas Bumi 30%	2.612.162.000,00	305.649.007,00
19	DBH SDA Panas Bumi	41.811.000,00	8.697.479,00
20	DBH SDA Kehutanan	0,00	44.423.807,00
21	DBH SDA Minerba	312.323.000,00	250.992.591,00
22	DBH SDA Perikanan	0,00	211.753.211,00
	Jumlah	23.942.900.000,00	12.447.629.294,00

Adapun Dana Bagi Hasil/Dana Alokasi Umum melalui fasilitas *Treasury Deposit Facility* (TDF) per 31 Desember 2022 sebesar Rp12.447.629.294,00 seluruhnya telah disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah pada Tahun 2023.

(2)) Aset Lainnya–Aset Lain-lain Piutang Pajak yang sedang diusulkan proses penghapusan.

Saldo Aset Lainnya-Aset Lain-lain yang berasal dari reklasifikasi Piutang Pajak Daerah yang sedang diusulkan penghapusan per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.336.131.487,89, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel e.105 Aset Lainnya – Aset Lain-Lain Piutang yang Diusulkan Penghapusan

(dalam rupiah)

Uraian	Saldo 31 Des 2022	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo 31 Des 2023
Piutang Pajak PBB	684.777.514,00	182.865.297,00	0,00	867.642.811,00
Piutang Pajak Hotel	0,00	23.884.117,00	0,00	23.884.117,00
Piutang Pajak Restoran	0,00	20.853.550,00	0,00	20.853.550,00
Piutang pajak Air Tanah	0,00	423.751.009,89	0,00	423.751.009,89
Jumlah	684.777.514,00	651.353.973,89	0,00	1.336.131.487,89

Saldo Aset Lainnya-Aset Lain-lain yang berasal dari reklasifikasi Piutang Pajak Daerah yang sedang diusulkan penghapusan per 31 Desember 2022 sebesar Rp684.777.514,00. Mutasi tambah atau penambahan pada tahun 2023 sebesar Rp651.353.973,89, merupakan Piutang Pajak yang sedang diusulkan proses penghapusan sesuai Surat Kepala Badan Pendapatan Daerah kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 973/8711/416-202.3/2023 tanggal 28 Desember 2023 perihal Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah yang terdiri dari:

- Piutang Pajak PBB-P2 Tahun 2013-2017 sebesar Rp182.865.297,00 yang telah kadaluwarsa sesuai hasil konfirmasi, verifikasi dan validasi Piutang Pajak PBB-P2 Tahun 2013-2017 di wilayah Kecamatan Sooko.
- Piutang Pajak Hotel Tahun 2019-2022 sebesar Rp23.884.117,00 sesuai hasil konfirmasi dan penelitian lapangan atas 21 obyek pajak yang telah tutup.
- Piutang Pajak Restoran Tahun 2018-2022 sebesar Rp20.853.550,00 atas 25 obyek pajak, sesuai hasil konfirmasi dan penelitian lapangan bahwa obyek pajak tersebut telah tutup.
- Piutang Pajak Air Tanah Tahun 2013-2020 sebesar Rp423.751.009,89, sesuai hasil konfirmasi dan penelitian lapangan disamping Piutang Pajak Air Tanah telah kadaluwarsa obyek pajak tersebut juga telah tutup.

Mutasi kurang atau pengurangan adalah nihil. Atas mutasi tambah dan mutasi kurang tersebut saldo Aset Lainnya-Aset Lain-lain yang berasal dari reklasifikasi Piutang Pajak Daerah yang sedang diusulkan penghapusan per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.336.131.487,89.

Adapun penyisihan atas Piutang Pajak yang sedang diusulkan proses penghapusan per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.308.790.254,41,00, dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel e. 106 Penyisihan Piutang Pajak Yang Diusulkan Penghapusan

(dalam rupiah)

Uraian	Nominal Piutang	Tahun	Jangka Waktu	persentase Penyisihan	Nilai Penyisihan
PBB P-2	867.642.811,00	2013-2017	> 5	100%	867.642.811,00
Pajak Hotel	3.835.000,00	2019	> 3 s.d 5	70%	2.684.500,00
	17.564.117,00	2020	> 3 s.d 5	70%	12.294.881,90
	1.635.000,00	2021	> 2 s.d 3	40%	654.000,00
	850.000,00	2022	> 1 s.d 2	20%	170.000,00
Pajak Restoran	3.000.000,00	2018	> 5	100%	3.000.000,00
	6.892.434,00	2019	> 3 s.d 5	70%	4.824.703,80

Uraian	Nominal Piutang	Tahun	Jangka Waktu	persentase Penyisihan	Nilai Penyisihan
	6.423.567,00	2020	> 3 s.d 5	70%	4.496.496,90
	320.000,00	2021	> 2 s.d 3	40%	128.000,00
	4.217.549,00	2022	> 1 s.d 2	20%	843.509,80
Pajak Air Tanah	36.395.580,76	2013	> 5	100%	36.395.580,76
	56.975.001,25	2014	> 5	100%	56.975.001,25
	106.486.873,47	2015	> 5	100%	106.486.873,47
	74.951.149,56	2016	> 5	100%	74.951.149,56
	84.170.181,50	2017	> 5	100%	84.170.181,50
	25.773.360,41	2018	> 5	100%	25.773.360,41
	22.764.205,94	2019	> 3 s.d 5	70%	15.934.944,16
	16.234.657,00	2020	> 3 s.d 5	70%	11.364.259,90
Jumlah	1.336.131.487,89				1.308.790.254,41

(3)) Aset Lainnya – Aset Lain-lain Rusak Berat

Saldo Aset lainnya-Aset Lain-lain rusak berat per 31 Desember 2023 sebesar Rp30.246.844.853,49 berasal dari mutasi sebagai berikut:

Tabel e. 107 Mutasi Aset Lainnya – Aset Lain-lain Rusak Berat

(dalam rupiah)

No	Uraian	Nominal
1	Saldo Per 31 Desember 2022	38.445.266.301,58
2	Penambahan :	
	a. Mutasi Masuk dikarenakan proses hibah	23.548.763.334,57
	b. Reklasifikasi dari Peralatan Mesin	12.807.344.124,15
	c. Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan	3.714.907.468,00
	d. Reklasifikasi dari Jalan Irigasi dan Jaringan	0,00
	e. Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya	0,00
	f. Reklasifikasi dari Aset Tak Berwujud	0,00
	g. Koreksi Kurang Catat	0,00
	Jumlah Penambahan	40.071.014.926,72
3	Pengurangan :	
	a. Penghapusan	23.548.763.334,57
	b. Reklasifikasi ke Aset Tetap	24.720.673.040,24
	c. Hibah	0,00
	Jumlah Pengurangan	48.269.436.374,81
4	Saldo Per 31 Desember 2023	30.246.844.853,49

Penambahan Aset Lainnya – Aset Lain-lain Rusak Berat sebesar Rp40.071.014.926,72 00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

(1)) Mutasi Masuk aset lainnya Rusak Berat Sebesar Rp23.548.763.334,57 dengan rincian sebagai berikut:

- Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah mutasi masuk aset lain-lain rusak berat dari 41 (empat puluh satu) Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto atas proses penghapusan aset rusak berat sebesar Rp23.453.763.334,57 berupa peralatan dan mesin rusak berat, bangunan rusak berat dan aset tetap lainnya rusak berat , berdasarkan Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 188.45/399/HK/416-012/2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Milik Daerah tanggal 29 Desember 2023 tentang Penghapusan BMD dari daftar Barang Milik Daerah dengan rincian:

Tabel e. 108 Mutasi Masuk Aset Rusak Berat Pada BPKAD

(dalam rupiah)

No	Organisasi Perangkat Daerah	Nominal
1	Dinas Pendidikan	3.570.713.768,00
2	Dinas Kesehatan	3.078.643.393,53
3	RSUD. Prof. DR. Soekandar (APBD)	2.938.484.114,00
4	RSUD. RA Basuni (APBD)	3.578.453.650,00
5	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan	47.058.500,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	101.273.500,00

No	Organisasi Perangkat Daerah	Nominal
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	187.697.840,00
8	Dinas Sosial	162.914.000,00
9	Dinas Tenaga Kerja	10.109.999,00
10	Dinas Pangan Dan Perikanan	170.788.150,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	340.924.900,00
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.514.445.196,80
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	107.098.000,00
14	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan	166.084.816,18
15	Dinas Komunikasi Dan Informatika	449.200.000,00
16	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro	105.913.914,00
17	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	69.319.500,00
18	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	67.650.000,00
19	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata	259.000.000,00
20	Dinas Pertanian	496.371.200,00
21	Sekretariat Daerah	699.121.487,28
22	Sekretariat DPRD	1.475.618.916,00
23	Kecamatan Sooko	84.176.500,00
24	Kecamatan Puri	188.000.000,00
25	Kecamatan Bangsal	49.430.000,00
26	Kecamatan Kemlagi	80.000.000,00
27	Kecamatan Jetis	25.613.888,89
28	Kecamatan Dawarblandong	46.586.680,00
29	Kecamatan Mojosari	6.290.434,78
30	Kecamatan Pungging	285.418.686,89
31	Kecamatan Ngoro	49.294.000,00
32	Kecamatan Kutorejo	21.350.000,00
33	Kecamatan Dlanggu	39.438.500,00
34	Kecamatan Gondang	177.874.860,00
35	Kecamatan Jatirejo	134.596.742,06
36	Kecamatan Trawas	8.801.500,00
37	Kecamatan Mojoanyar	107.714.000,00
38	Inspektorat	77.370.000,00
39	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	462.664.700,00
40	Badan Pendapatan Daerah	932.765.497,16
41	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	79.492.500,00
Jumlah		23.453.763.334,57

- Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan terdapat mutasi masuk dari Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah sebesar Rp95.000.000,00 berupa kendaraan dinas roda empat Toyota LF82 Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor 028/706.1/416-201/2021 tanggal 2 Agustus 2021.

- (2) Reklasifikasi masuk dari Aset tetap Peralatan dan Mesin karena rusak berat sebesar Rp12.807.344.124,15 pada Perangkat Daerah sebagai berikut:

Tabel e. 109 Reklasifikasi Masuk Aset lainnya-Rusak Berat dari Aset tetap Peralatan dan Mesin

No	Organisasi Perangkat Daerah	Nomor Surat Usulan	Tanggal	Nilai Perolehan
1	RSUD RA Basoeni			180.000.000,00
2	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman Dan Perhubungan			198.000.000,00
3	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik			375.811.250,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	028/2083/416-105/2023	09 Agustus 2023	240.745.000,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	028/1971/416-205/2023	07 Agustus 2023	278.114.900,00
6	Dinas Sosial	028/528/416-106/2023	23 Agustus 2023	218.284.100,00
7	Dinas Tenaga Kerja	028/2118/416-107/2023	03 Agustus 2023	64.970.000,00
8	Dinas Pangan Dan Perikanan	028/296/416-109/2023	28 Juli 2023	231.616.037,50
9	Dinas Lingkungan Hidup	028/3919/416-110/2023	24 Juli 2023	1.596.134.000,00
10	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	028/2216/416-111/2023	25 Juli 2023	1.023.680.535,98
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	028 / 2697 / 416-112 / 2023	28 Juli 2023	262.485.500,00
12	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan	028/3907/416-108/2023	31 Juli 2023	925.030.278,08

No	Organisasi Perangkat Daerah	Nomor Surat Usulan	Tanggal	Nilai Perolehan
13	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro	028/ 1173 /416-114/2023	28 Juli 2023	19.400.000,00
14	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	503/1954/416-115.3/2023	14 Agustus 2023	603.316.500,00
15	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	028/811/416-177/2023	03 Agustus 2023	62.790.000,00
16	Dinas Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga			124.058.000,00
17	Dinas Pertanian	028/ /416-118/2023	14 Agustus 2023	32.610.400,00
18	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	028 / 3065 / 416-119 / 2023	02 Agustus 2023	52.269.451,00
19	Sekretariat Daerah	028 / 622 / 416-013 / 2023	27 Juli 2023	1.261.167.517,62
20	Sekretariat Dprd	900/1591/416-050/2023	31 Juli 2023	714.699.002,00
21	Kecamatan Sooko	028/ 429 /416-313/2023	28 Juli 2023	35.200.000,00
22	Kecamatan Bangsal			34.750.000,00
23	Kecamatan Gedeg	028/ /416 - 314/2023	Juli 202	41.790.000,00
24	Kecamatan Kemlagi	028/657/416-315/2023	04 Agustus 2023	48.292.500,00
25	Kecamatan Jetis	028/6 1 1 /416-316/2023	24 Juli 2023	29.996.000,00
26	Kecamatan Dawarblandong	028/539/416-317/2023	27 Juli 2023	73.362.750,00
27	Kecamatan Mojosari	028/ 937 /416-308/2023	28 Juli 2023	92.900.000,00
28	Kecamatan Pungging	028/ 496 /416-306/2023	25 Juli 2023	55.915.000,00
29	Kecamatan Ngoro	028/692/416-305/2023	28 Juli 2022	25.132.500,00
30	Kecamatan Kutorejo	028/ 461 /416-307/2023	12 Agustus 2023	62.837.000,00
31	Kecamatan Dlanggu	028/774 /416-308/2023	09 Agustus 2023	14.600.000,00
32	Kecamatan Gondang	028/724/416-302/2023	07 Juli 2023	23.553.000,00
33	Kecamatan Jatirejo	028/675/416-301/2023	26 Juli 2023	14.625.000,00
34	Kecamatan Trawas			37.096.428,89
35	Kecamatan Pacet	028/ 485 /416-303/2023	01 Agustus 2023	58.150.000,00
36	Kecamatan Mojoanyar	028/643/416-318/2023	27 Juli 2023	42.376.000,00
37	Inspektorat	028/2036/416-060/2023	15 Agustus 2023	218.691.693,19
38	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	028/1750/416-201/2023	26 Juli 2023	532.701.000,00
39	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	028/1233/416-203/2023	31 Juli 2023	994.570.375,00
40	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (Skpkd)			212.300.000,00
41	Badan Pendapatan Daerah	028/4638/416-202.0/2023	15 Agustus 2023	1.462.383.654,89
42	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	028/ 9350 / 416-204/2023	24 Juli 2023	230.938.750,00
	Jumlah			12.807.344.124,15

(3)) Reklasifikasi masuk dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp3.714.907.468,00 pada Organisasi Perangkat Daerah sebagai berikut:

- Dinas Pendidikan dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp482.271.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Sebesar Rp451.971.000,00 berupa bangunan sekolah berdasarkan Persetujuan Pembongkaran Barang Milik Daerah Dinas Pendidikan Nomor 028/3234/416-203.4/2023 tanggal 31 Juli 2023 hal persetujuan pembongkaran Barang Milik Daerah.
 - 2) Sebesar Rp30.300.000,00 berupa perumahan dinas Sooko berdasarkan Surat Bupati Mojokerto nomor 028/2457/416-203.4/2023 tanggal 29 Desember 2023 hal Persetujuan Pemusnahan Barang Milik Daerah pada Dinas pendidikan.
- Dinas kesehatan dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp3.101.381.268,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Sebesar Rp1.303.162.000,00 berupa bangunan pada puskesmas Ngoro, Puskesmas bangsal, Puskesmas Dawarblandong Berdasarkan Surat Bupati Mojokerto Nomor 028/3375/416-203.4/2023 tanggal 11 Agustus 2023 hal Persetujuan Pemusnahan BMD Pada Dinas Kesehatan;
 - 2) Sebesar Rp1.798.219.268,00 berupa puskesmas tawang Sari, puskesmas Jatirejo, puskesmas kemlagi dan Puskesmas Trowulan Berdasarkan Surat Bupati Mojokerto Nomor 028/2830/416-203.4/2023 tanggal 13 Juli 2023 hal Persetujuan Pemusnahan BMD Pada Dinas Kesehatan

- Badan Pendapatan Daerah dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp131.255.200,00 berupa baliho space iklan.

Pengurangan Aset Lainnya – Aset Lain-lain Rusak Berat sebesar Rp48.269.436.374,81 dapat dijelaskan sebagai berikut:

(1) Mutasi Keluar dari aset lainnya Rusak Berat Sebesar Rp23.548.763.334,57 dengan rincian sebagai berikut:

- 41 (empat puluh satu) Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto mutasi keluar aset lainnya rusak berat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atas Proses penghapusan aset rusak berat sebesar Rp23.453.763.334,57 berupa peralatan dan mesin rusak berat, bangunan rusak berat dan aset tetap lainnya rusak berat , berdasarkan Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 188.45/399/HK/416-012/2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Milik Daerah tanggal 29 Desember 2023 tentang Penghapusan BMD dari daftar Barang Milik Daerah dengan rincian :

Tabel e. 110 Daftar Mutasi keluar aset lainnya Rusak Berat ke BPKAD

(dalam rupiah)

No	Organisasi Perangkat Daerah	Nominal
1	Dinas Pendidikan	3.570.713.768,00
2	Dinas Kesehatan	3.078.643.393,53
3	RSUD. Prof. DR. Soekandar (APBD)	2.938.484.114,00
4	RSUD. RA Basuni (APBD)	3.578.453.650,00
5	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan	47.058.500,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	101.273.500,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	187.697.840,00
8	Dinas Sosial	162.914.000,00
9	Dinas Tenaga Kerja	10.109.999,00
10	Dinas Pangan Dan Perikanan	170.788.150,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	340.924.900,00
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.514.445.196,80
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	107.098.000,00
14	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan	166.084.816,18
15	Dinas Komunikasi Dan Informatika	449.200.000,00
16	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro	105.913.914,00
17	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	69.319.500,00
18	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	67.650.000,00
19	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata	259.000.000,00
20	Dinas Pertanian	496.371.200,00
21	Sekretariat Daerah	699.121.487,28
22	Sekretariat DPRD	1.475.618.916,00
23	Kecamatan Soko	84.176.500,00
24	Kecamatan Puri	188.000.000,00
25	Kecamatan Bangsal	49.430.000,00
26	Kecamatan Kemlagi	80.000.000,00
27	Kecamatan Jetis	25.613.888,89
28	Kecamatan Dawarblandong	46.586.680,00
29	Kecamatan Mojosari	6.290.434,78
30	Kecamatan Pungging	285.418.686,89
31	Kecamatan Ngoro	49.294.000,00
32	Kecamatan Kutorejo	21.350.000,00
33	Kecamatan Dlanggu	39.438.500,00
34	Kecamatan Gondang	177.874.860,00
35	Kecamatan Jatirejo	134.596.742,06
36	Kecamatan Trawas	8.801.500,00
37	Kecamatan Mojoanyar	107.714.000,00
38	Inspektorat	77.370.000,00
39	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	462.664.700,00

No	Organisasi Perangkat Daerah	Nominal
40	Badan Pendapatan Daerah	932.765.497,16
41	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	79.492.500,00
	Jumlah	23.453.763.334,57

- Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah ke Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan sebesar Rp95.000.000,00 berupa kendaraan dinas roda empat Toyota LF82 Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor 028/706.1/416-201/2021 tanggal 2 Agustus 2021.

(2) Penghapusan Aset lainnya - aset lain-lain rusak berat sebesar Rp24.720.673.040,24 sebagai berikut:

- Dinas Lingkungan Hidup penghapusan sebesar Rp94.000.000,00 berupa perahu dikarenakan force majeure berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 188,45/50/HK/416-012/2023 tentang Penghapusan BMD Dari Daftar Barang Milik Daerah tanggal 16 Februari 2023;
- Inspektorat penghapusan sebesar Rp17.893.750,00 berupa kendaraan roda dua yang hilang dan penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah;
- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp24.431.538.442,24 berupa peralatan dan mesin rusak berat, bangunan rusak berat dan aset tetap lainnya rusak berat berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 188,45/39/HK/416-012/2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Penghapusan Barang Milik daerah dari daftar Barang milik Daerah.

Dari penjelasan tersebut Aset Lain-lain Barang Milik Daerah Kondisi Rusak Berat namun masih tercatat di aset tetap (pada kartu Inventaris Barang) akan dilakukan pengusulan kegiatan inventarisasi aset kondisi rusak berat yang dijadwalkan pada TA. 2024-TA.2025, untuk saldo akhir pada per 31 Desember 2023 sebesar Rp30.246.844.853,49 dengan rincian per OPD sebagai berikut:

Tabel e. 111 Daftar Aset Lainnya-Aset Lain-lain per SKPD

(dalam rupiah)

No	OPD	Saldo 31 Des 2022	Mutasi		Saldo 31 Des 2023
			Tambah	Kurang	
1	Dinas Pendidikan	4.692.970.768,00	482.271.000,00	3.570.713.768,00	1.604.528.000,00
2	Dinas Kesehatan	4.596.561.936,87	3.101.381.268,00	3.078.643.393,53	4.619.299.811,34
3	RSUD. Prof. DR. Soekandar	8.811.758.654,00	0,00	2.938.484.114,00	5.873.274.540,00
4	RSUD.Prof.DR.Soekandar BLUD	968.584.000,00	0,00	0,00	968.584.000,00
5	RSUD. RA Basuni	5.504.581.816,00	180.000.000,00	3.578.453.650,00	2.106.128.166,00
6	RSUD. RA Basuni BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	285.250.000,00	0,00	0,00	285.250.000,00
8	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan	142.334.500,00	293.000.000,00	47.058.500,00	388.276.000,00
9	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	375.811.250,00	0,00	375.811.250,00
10	Satuan Polisi Pamong Praja	261.253.504,00	240.745.000,00	101.273.500,00	400.725.004,00
11	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	207.697.840,00	278.114.900,00	187.697.840,00	298.114.900,00
12	Dinas Sosial	216.512.000,00	218.284.100,00	162.914.000,00	271.882.100,00
13	Dinas Tenaga Kerja	10.109.999,00	64.970.000,00	10.109.999,00	64.970.000,00
14	Dinas Pangan dan Perikanan	201.788.150,00	231.616.037,50	170.788.150,00	262.616.037,50
15	Dinas Lingkungan Hidup	734.924.900,00	1.596.134.000,00	434.924.900,00	1.896.134.000,00
16	Dinas Kependudukan dan catatan Sipil	2.543.195.196,80	1.023.680.535,98	2.514.445.196,80	1.052.430.535,98
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	137.098.000,00	262.485.500,00	107.098.000,00	292.485.500,00
18	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan	565.259.816,18	925.030.278,08	166.084.816,18	1.324.205.278,08

No	OPD	Saldo 31 Des 2022	Mutasi		Saldo 31 Des 2023
			Tambah	Kurang	
19	Dinas Komunikasi dan Informatika	449.200.000,00	0,00	449.200.000,00	0,00
20	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	232.613.914,00	19.400.000,00	105.913.914,00	146.100.000,00
21	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	69.319.500,00	603.316.500,00	69.319.500,00	603.316.500,00
22	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	67.650.000,00	62.790.000,00	67.650.000,00	62.790.000,00
23	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	259.000.000,00	124.058.000,00	259.000.000,00	124.058.000,00
24	Dinas Pertanian	496.371.200,00	32.610.400,00	496.371.200,00	32.610.400,00
25	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0,00	52.269.451,00	0,00	52.269.451,00
26	Sekretariat Daerah	1.067.291.495,28	1.261.167.517,62	699.121.487,28	1.629.337.525,62
27	Sekretariat DPRD	1.478.618.916,00	714.699.002,00	1.475.618.916,00	717.699.002,00
28	Kecamatan Sooko	84.176.500,00	35.200.000,00	84.176.500,00	35.200.000,00
29	Kecamatan Trowulan	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kecamatan Puri	224.712.000,00	0,00	188.000.000,00	36.712.000,00
31	Kecamatan Bangsal	85.430.000,00	34.750.000,00	49.430.000,00	70.750.000,00
32	Kecamatan Gedeg	0,00	41.790.000,00	0,00	41.790.000,00
33	Kecamatan Kemlagi	80.000.000,00	48.292.500,00	80.000.000,00	48.292.500,00
34	Kecamatan Jetis	83.113.888,89	29.996.000,00	25.613.888,89	87.496.000,00
35	Kecamatan Dawarblandong	66.386.680,00	73.362.750,00	46.586.680,00	93.162.750,00
36	Kecamatan Mojosari	6.290.434,78	92.900.000,00	6.290.434,78	92.900.000,00
37	Kecamatan Pungging	285.418.686,89	55.915.000,00	285.418.686,89	55.915.000,00
38	Kecamatan Ngoro	60.794.000,00	25.132.500,00	49.294.000,00	36.632.500,00
39	Kecamatan Kutorejo	21.350.000,00	62.837.000,00	21.350.000,00	62.837.000,00
40	Kecamatan Dlanggu	39.438.500,00	14.600.000,00	39.438.500,00	14.600.000,00
41	Kecamatan Gondang	177.874.860,00	23.553.000,00	177.874.860,00	23.553.000,00
42	Kecamatan Jatirejo	134.596.742,06	14.625.000,00	134.596.742,06	14.625.000,00
43	Kecamatan Trawas	8.801.500,00	37.096.428,89	8.801.500,00	37.096.428,89
44	Kecamatan Pacet	23.000.000,00	58.150.000,00	0,00	81.150.000,00
45	Kecamatan Mojoanyar	131.714.000,00	42.376.000,00	107.714.000,00	66.376.000,00
46	Inspektorat	95.863.750,00	218.691.693,19	95.263.750,00	219.291.693,19
47	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	560.664.700,00	532.701.000,00	557.664.700,00	535.701.000,00
48	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	977.775.107,67	994.570.375,00	977.775.107,67	994.570.375,00
49	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPKD)	0,00	23.666.063.334,57	23.453.763.334,57	212.300.000,00
50	Badan Pendapatan Daerah	1.203.136.345,16	1.593.638.854,89	1.110.006.345,16	1.686.768.854,89
51	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	94.782.500,00	230.938.750,00	79.492.500,00	246.228.750,00
	Jumlah	38.445.266.301,58	40.071.014.926,72	48.269.436.374,81	30.246.844.853,49

Adapun Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain -Aset Rusak Berat per 31 Desember 2023 sebesar Rp23.839.544.722,26 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel e. 112 Daftar Penyusutan Aset Lain-lain Aset Rusak Berat per SKPD

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo Per 31 Des 2023	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	Nilai Buku
1	Dinas Pendidikan	1.604.528.000,00	1.044.399.320,00	560.128.680,00
2	Dinas Kesehatan	4.619.299.811,34	1.428.536.610,92	3.190.763.200,42
3	RSUD. Prof. DR. Soekandar (APBD)	5.873.274.540,00	4.822.197.283,05	1.051.077.256,95
4	RSUD. Prof. DR. Soekandar (BLUD)	968.584.000,00	134.641.777,96	833.942.222,04
5	RSUD. RA Basuni (APBD)	2.106.128.166,00	1.562.730.314,66	543.397.851,34
6	RSUD. RA Basuni (BLUD)	-	-	0,00
7	Dinas PU dan Penataan Ruang	285.250.000,00	285.250.000,00	0,00
8	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan	388.276.000,00	388.276.000,00	0,00
9	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	375.811.250,00	375.811.250,00	0,00
10	Satuan Polisi Pamong Praja	400.725.004,00	399.875.004,00	850.000,00
11	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	298.114.900,00	298.114.900,00	0,00

No	Uraian	Saldo Per 31 Des 2023	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	Nilai Buku
12	Dinas Sosial	271.882.100,00	256.327.380,00	15.554.720,00
13	Dinas Tenaga Kerja	64.970.000,00	64.970.000,00	0,00
14	Dinas Pangan dan Perikanan	262.616.037,50	262.616.037,50	0,00
15	Dinas Lingkungan Hidup	1.896.134.000,00	1.893.756.700,00	2.377.300,00
16	Dinas Kependudukan dan Capil	1.052.430.535,98	1.023.477.535,98	28.953.000,00
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat	292.485.500,00	292.485.500,00	0,00
18	Dinas Pengendalian Penduduk KB dan Pembdy.Perempuan	1.324.205.278,08	1.321.305.278,08	2.900.000,00
19	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	-	0,00
20	Dinas Koperasi dan UMKM	146.100.000,00	144.720.000,00	1.380.000,00
21	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	603.316.500,00	592.919.300,00	10.397.200,00
22	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	62.790.000,00	62.790.000,00	0,00
23	Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga	124.058.000,00	122.462.000,00	1.596.000,00
24	Dinas Pertanian	32.610.400,00	32.610.400,00	0,00
25	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	52.269.451,00	52.269.451,00	0,00
26	Sekretariat Daerah	1.629.337.525,62	1.623.336.494,02	6.001.031,60
27	Sekretariat DPRD	717.699.002,00	717.699.002,00	0,00
28	Kecamatan Sooko	35.200.000,00	35.200.000,00	0,00
29	Kecamatan Trowulan	-	-	0,00
30	Kecamatan Puri	36.712.000,00	27.901.120,00	8.810.880,00
31	Kecamatan Bangsal	70.750.000,00	70.750.000,00	0,00
32	Kecamatan Gedeg	41.790.000,00	41.790.000,00	0,00
33	Kecamatan Kemlagi	48.292.500,00	48.292.500,00	0,00
34	Kecamatan Jetis	87.496.000,00	87.496.000,00	0,00
35	Kecamatan Dawarblandong	93.162.750,00	92.326.750,00	836.000,00
36	Kecamatan Mojosari	92.900.000,00	92.900.000,00	0,00
37	Kecamatan Pungging	55.915.000,00	55.915.000,00	0,00
38	Kecamatan Ngoro	36.632.500,00	36.632.500,00	0,00
39	Kecamatan Kutorejo	62.837.000,00	62.837.000,00	0,00
40	Kecamatan Dlanggu	14.600.000,00	14.600.000,00	0,00
41	Kecamatan Gondang	23.553.000,00	23.553.000,00	0,00
42	Kecamatan Jatirejo	14.625.000,00	14.625.000,00	0,00
43	Kecamatan Trawas	37.096.428,89	37.096.428,89	0,00
44	Kecamatan Pacet	81.150.000,00	81.150.000,00	0,00
45	Kecamatan Mojoanyar	66.376.000,00	66.376.000,00	0,00
46	Inspektorat Kabupaten	219.291.693,19	198.402.898,93	20.888.794,26
47	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	535.701.000,00	532.327.200,00	3.373.800,00
48	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)	994.570.375,00	990.756.783,00	3.813.592,00
49	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPKD)	212.300.000,00	212.300.000,00	0,00
50	Badan Pendapatan Daerah	1.686.768.854,89	1.568.140.252,27	118.628.602,62
51	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	246.228.750,00	244.598.750,00	1.630.000,00
	Jumlah	30.246.844.853,49	23.839.544.722,26	6.407.300.131,23

7.e.3).b) Kewajiban

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
<u>76.054.304.435,12</u>	<u>81.764.896.172,67</u>

Saldo Kewajiban Pemerintah Kabupaten Mojokerto per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Selisih Naik/Turun
Kewajiban	76.054.304.435,12	81.764.896.172,67	-5.710.591.737,55

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban dibedakan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban Pemerintah Kabupaten Mojokerto per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp terdiri dari:

Tabel e. 113 Rincian Kewajiban Pemerintah Kabupaten Mojokerto

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Selisih Naik/Turun
Kewajiban Jangka Pendek	76.054.304.435,12	81.764.896.172,67	-5.710.591.737,55
Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00
Jumlah	76.054.304.435,12	81.764.896.172,67	-5.710.591.737,55

7.e.3).b).(1) Kewajiban Jangka Pendek

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
76.054.304.435,12	81.764.896.172,67

Saldo Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Kabupaten Mojokerto per 31 Desember 2023 dan Per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Selisih Naik/Turun
Kewajiban Jangka Pendek	76.054.304.435,12	81.764.896.172,67	-5.710.591.737,55

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam suatu periode akuntansi. Kewajiban Jangka Pendek mencakup Utang Perhitungan Pihak Ketiga, Pendapatan Diterima Dimuka, Utang Belanja dan Utang Jangka Pendek Lainnya. Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2023 menunjukkan jumlah sebesar Rp76.054.304.435,12 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel e. 114 Rincian Kewajiban Jangka Pendek

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik/Turun
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	19.380.087,00	12.514.967,00	6.865.120,00
Pendapatan Diterima Dimuka	3.358.414.638,52	2.280.907.830,67	1.077.506.807,85
Utang Belanja	51.806.947.415,60	56.575.945.975,00	-4.768.998.559,40
Utang Jangka Pendek Lainnya	20.869.562.294,00	22.895.527.400,00	-2.025.965.106,00
Jumlah	76.054.304.435,12	81.764.896.172,67	-5.710.591.737,55

Dari tabel di atas diketahui Kewajiban Jangka Pendek pada Tahun 2023 menurun sebesar Rp, penurunan terbesar pada Utang Jangka Pendek Lainnya, hal ini karena pada Tahun 2023 tidak ada Utang atas Pengadaan Aset Tetap. Sedangkan Utang Perhitungan Pihak Ketiga, Pendapatan Diterima Dimuka, dan Utang Belanja mengalami kenaikan.

7.e.3).b).(1).(a) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Pemerintah Kabupaten Mojokerto per 31 Desember 2023 dan Per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Selisih Naik/Turun
Utang Perhitungan Pihak Ketiga	19.380.087,00	12.514.967,00	6.865.120,00

Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) merupakan Pajak atas belanja yang telah dipungut oleh bendahara yang sampai 31 Desember 2023 belum disetorkan ke Kas Negara. Saldo Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Pemerintah Kabupaten Mojokerto per 31 Desember 2023 sebesar Rp19.380.087,00, dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel e. 115 Rincian Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

(dalam rupiah)

SKPD	Saldo Per 31 Des 2022	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo per 31 Des 2023
Dinas Pendidikan	12.514.967,00	19.380.087,00	12.514.967,00	19.380.087,00
Jumlah	12.514.967,00	19.380.087,00	12.514.967,00	19.380.087,00

Saldo Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2022 sebesar Rp12.514.967,00. Mutasi tambah atas Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) selama tahun 2023 sebesar Rp19.380.087,00, dengan rincian:

- Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp10.620.301,00.
- Pajak Penghasilan pasal 21 (PPh 21) sebesar Rp6.722.950,00.
- Pajak Penghasilan pasal 23 (PPh 23) sebesar Rp2.036.836,00

Sedangkan mutasi kurang sebesar Rp12.514.967,00 merupakan pajak yang dipungut oleh Bendahara pada Tahun Anggaran 2022 dan telah disetorkan ke Kas Negara pada Tahun 2023, dengan rincian:

- Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp11.293.601,00.
- Pajak Penghasilan pasal 21 (PPh 21) sebesar Rp216.000,00.
- Pajak Penghasilan pasal 23 (PPh 23) sebesar Rp1.005.366,00.

Atas mutasi tambah dan mutasi kurang tersebut, saldo Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2023 sebesar Rp22.953.125,00.

7.e.3).b).(1).(b) Pendapatan Diterima Dimuka

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka Pemerintah Kabupaten Mojokerto per 31 Desember 2023 dan Per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Selisih Naik/Turun
Pendapatan Diterima Dimuka	3.358.414.638,52	2.280.907.830,67	1.077.506.807,85

Pendapatan Diterima Dimuka adalah kewajiban yang timbul karena adanya Kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain. Pendapatan Diterima Dimuka Pemerintah Kabupaten Mojokerto per 31 Desember 2023 bersaldo sebesar Rp3.358.414.638,52, terdiri dari:

Tabel e. 116 Rincian Pendapatan Diterima Dimuka

(dalam rupiah)

SKPD	Saldo Per 31 Des 2022	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo per 31 Des 2023
RSUD Prof Dr. Soekandar (BLUD)	110.583.334,00	0,00	79.000.000,00	31.583.334,00
RSUD RA Basoeni (BLUD)	28.350.000,00	3.500.000,00	24.800.000,00	7.050.000,00
Badan Pendapatan Daerah	930.888.240,67	1.162.254.254,42	928.493.644,84	1.164.648.850,25
Dinas Tenaga Kerja	1.135.107.000,00	2.106.678.300,00	1.135.107.000,00	2.106.678.300,00
DPMPTSP	75.979.256,00	5.573.329,27	75.979.256,00	5.573.329,27
Dinas PUPR	0,00	42.880.825,00	0,00	42.880.825,00
JUMLAH	2.280.907.830,67	3.320.886.708,69	2.243.379.900,84	3.358.414.638,52

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp2.280.907.830,67. Mutasi tambah atau penambahan sebesar Rp3.320.886.708,69 terdiri dari:

- (1) RSUD RA. Basoeni sebesar Rp3.500.000,00, merupakan sewa untuk lahan ATM PT Bank BNI (persero) Tbk yang tertuang dalam Perjanjian Sewa Menyewa Lahan ATM Nomor PKS/MJK/2/017 tanggal 13 Pebruari 2022 untuk jangka waktu 3 tahun mulai 1 Maret 2022 sampai dengan 28 Pebruari 2024 dengan harga sewa sebesar Rp21.000.000,00 per tahun dibayar setiap tahun. Atas pendapatan sewa mulai 1 Januari 2023 sampai dengan 28 Pebruari 2024 menjadi Pendapatan diterima Dimuka sebesar Rp3.500.000,00.
- (2) Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp1.162.254.254,42 dengan rincian:
 - Pendapatan Diterima Dimuka atas Pajak Reklame Papan sebesar Rp1.153.220.528,42 atas 2.051 titik reklame papan yang masa pajaknya melebihi tanggal 31 Desember 2023.
 - Pendapatan Diterima Dimuka atas atas Pajak Reklame Kain sebesar Rp9.033.726,00 atas 27 titik reklame kain yang masa pajaknya melebihi tanggal 31 Desember 2023.
- (3) Dinas Tenaga Kerja sebesar Rp2.106.678.300,00 merupakan Pendapatan Diterima Dimuka dari Retribusi IMTA atas 177 Tenaga Kerja Asing.
- (4) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp5.573.329,27 merupakan Pendapatan Diterima Dimuka dari Retribusi Pemakaian Ruas Jalan Tertentu atas 20 titik ijin.
- (5) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp42.880.825,00 merupakan Pendapatan Diterima Dimuka dari Retribusi Pemakaian Ruas Jalan Tertentu atas 38 titik ijin.

Sedangkan mutasi kurang atau pengurangan sebesar Rp2.243.379.900,84 karena telah dilakukan pemenuhan kewajiban sehingga mengurangi saldo Pendapatan Diterima Dimuka, yang terdiri dari:

- (1) RSUD Prof. Dr. Soekandar sebesar Rp79.000.000,00, dengan rincian:
 - Pemenuhan kewajiban atas sewa menyewa lahan ATM PT Bank BNI (persero) Tbk yang tertuang dalam Perjanjian Kerjasama sewa menyewa lahan ATM Nomor 445/11744/416-207/2021 dan Nomor MJK/2/096/PKS/2021 Tanggal 8 Oktober 2021 untuk jangka waktu 3 tahun mulai 20 Januari 2022 sampai dengan 20 Januari 2025 dengan harga sewa sebesar Rp20.000.000,00 per tahun. Pembayaran uang sewa total sebesar Rp60.000.000,00. Sehingga pendapatan diterima dimuka Tahun 2023 berkurang sebesar Rp20.000.000,00.
 - Pemenuhan kewajiban atas sewa menyewa lahan untuk kantor Payment Point PT Bank BNI (persero) Tbk yang tertuang dalam Perjanjian Kerjasama Nomor Nomor 445/11243/416-207/2020 dan Nomor MJK/2/058/2020 tanggal 23 September 2020 tentang Perjanjian Kerjasama Sewa Menyewa Payment Point BNI untuk jangka waktu sewa selama 3 tahun mulai 1 Pebruari 2021 sampai dengan 1 Februari 2024 dengan harga sewa sebesar Rp39.000.000,00 per tahun. Pembayaran sewa diterima pada 6 Nopember 2020 sebesar Rp117.000.000,00. Sehingga pendapatan diterima dimuka Tahun 2023 berkurang sebesar Rp39.000.000,00.
 - Pemenuhan kewajiban atas sewa menyewa lahan ATM PT Bank

Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk yang tertuang dalam Perjanjian Kerjasama Nomor 445/3594/416-207/2021 dan Nomor 060/476/UM/MJK/PKS tanggal 19 April 2021 tentang Perpanjangan Sewa Gerai ATM untuk jangka waktu 3 tahun mulai 26 April 2021 sampai dengan 26 April 2024 dengan harga sewa sebesar Rp20.000.000,00 per tahun. Pembayaran sebesar Rp60.000.000,00, sehingga pendapatan diterima dimuka Tahun 2023 berkurang sebesar Rp20.000.000,00.

- (2) RSUD RA Basoeni sebesar Rp24.800.000,00, dengan rincian:
- Pemenuhan kewajiban atas sewa gerai ATM PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk yang tertuang dalam Perjanjian Kerjasama Nomor 445/580/416-208/2021 dan Nomor 060/210/MJK/UM/PKS tanggal 5 Maret 2021 tentang Penggunaan Lahan untuk Gerai ATM untuk jangka waktu selama 3 tahun mulai 5 Maret 2021 sampai dengan 5 Maret 2024 dengan harga sewa sebesar Rp63.900.000,00, sehingga Pendapatan diterima Dimuka berkurang sebesar Rp21.300.000,00.
 - Pemenuhan kewajiban atas sewa untuk ruang ATM BNI yang tertuang dalam Perjanjian Sewa Menyewa Lahan ATM Nomor PKS/MJK/2/017 tanggal 13 Pebruari 2021 untuk jangka waktu 3 tahun mulai 1 Maret 2021 sampai dengan 28 Pebruari 2024 dengan harga sewa sebesar Rp21.000.000,00 per tahun. Pembayaran dilakukan pada 29 Januari 2022 sebesar Rp21.000.000,00, sehingga Pendapatan Diterima Dimuka berkurang sebesar Rp3.500.000,00.
- (3) Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp928.493.644,84, merupakan Pemenuhan kewajiban atas Pendapatan Diterima Dimuka dari Pajak dengan rincian:
- Pajak Reklame Papan sebesar Rp908.281.208,84 yang masa pajaknya berakhir di tahun 2023 atas 1.810 titik reklame papan.
 - Pajak Reklame Kain sebesar Rp9.696.972,00 yang masa pajaknya berakhir di tahun 2023 atas 13 titik reklame kain.
 - Pajak PBB-P2 sebesar Rp10.515.464,00.
- (4) Dinas Tenaga Kerja sebesar Rp1.135.107.000,00 atas Pendapatan Diterima Dimuka dari Retribusi IMTA atas 72 Tenaga Kerja Asing.
- (5) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp75.979.256,00 atas 57 ijin.

Atas mutasi tambah dan mutasi kurang sebagaimana penjelasan di atas, saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp3.358.414.638,52.

7.e.3).b).(1).(c) Utang Belanja

Saldo Utang Belanja Pemerintah Kabupaten Mojokerto per 31 Desember 2023 dan Per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Selisih Naik/Turun
Utang Belanja	51.806.947.415,60	56.575.945.975,00	-4.768.998.559,40

Utang Belanja Pemerintah Kabupaten Mojokerto per 31 Desember 2023 sebesar Rp51.806.947.415,60 terdiri dari Utang Belanja Pegawai, Utang Belanja Barang Jasa dan Utang Belanja Modal dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel e. 117 Rincian Utang Belanja

(dalam rupiah)

Uraian	Saldo Per 31 Des 2022	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Per 31 Des 2023
Utang Belanja Pegawai	30.325.982.279,00	21.166.488.385,00	31.478.898.518,00	20.013.572.146,00
Utang Belanja Barang dan Jasa	26.249.963.696,00	30.213.595.242,00	25.021.724.502,00	31.441.834.436,00
Utang Belanja Modal	0,00	351.540.833,60	0,00	351.540.833,60
Jumlah	56.575.945.975,00	51.731.624.460,60	56.500.623.020,00	51.806.947.415,60

Adapun penjelasan dari masing-masing Utang Belanja tersebut adalah sebagai berikut:

(1) Utang Belanja Pegawai

Saldo Utang Belanja Pegawai per 31 Desember 2023 sebesar Rp20.013.572.146,00 yang merupakan utang belanja pegawai atas kekurangan gaji pegawai, utang tambahan penghasilan pegawai dan utang belanja pegawai BLUD. Mutasi tambah atau penambahan sebesar Rp21.166.488.385,00 terdiri dari:

- (a) Kekurangan Gaji Pegawai sebesar Rp158.471.406,00, pada 14 OPD yaitu:
- Dinas Pendidikan sebesar Rp87.035.325,00.
 - Dinas Kesehatan sebesar Rp25.544.087,00.
 - RSUD Prof. Dr. Soekandar (APBD) sebesar Rp14.133.063,00.
 - RSUD RA Basoeni (APBD) sebesar Rp3.132.440,00.
 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp650.000,00.
 - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebesar Rp670.100,00.
 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar Rp9.715.160,00.
 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp669.900,00.
 - Sekretariat Daerah sebesar Rp11.975.335,00.
 - Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah sebesar Rp1.338.822,00.
 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp1.379.800,00.
 - Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp1.272.024,00.
 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp669.900,00.
 - Sekretariat DPRD sebesar Rp285.450,00.
- (b) Insentif Pemungutan Pajak Daerah sebesar Rp2.987.504.266,00 atas insentif Pemungutan Pajak Daerah sesuai Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 188.45/18/HK/416-012/2024 tentang Penerima dan Besaran Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah Triwulan III Tahun Anggaran 2023 yang Dibayarkan Pada Tahun Anggaran 2024 dan Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 188.45/19/HK/416-012/2024 tentang Penerima dan Besaran Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah Triwulan IV Tahun Anggaran 2023 yang Dibayarkan Pada Tahun Anggaran 2024, dengan rincian:
- Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp2.768.771.844,00.
 - Sekretariat Daerah sebesar Rp218.732.422,00
- (c) Utang Jasa Pelayanan Kesehatan sebesar Rp18.020.512.713,00 dengan rincian:
- Dinas Kesehatan BOP sebesar Rp1.816.169.099,00.
 - Dinas Kesehatan BLUD sebesar Rp37.177.157,00.
 - RSUD Prof. Dr. Soekandar sebesar Rp6.151.022.200,00.

- RSUD RA. Basoeni sebesar Rp5.170.388.572,00.
- Koreksi kurang saji pada Dinas Kesehatan BLUD sebesar Rp478.544.300,00.
- Koreksi kurang saji utang jasa pelayanan kesehatan Tahun 2022 pada RSUD Prof. Dr. Soekandar sebesar Rp3.398.759.345,00.
- Koreksi kurang saji utang jasa pelayanan kesehatan Tahun 2022 pada RSUD RA. Basoeni sebesar Rp968.452.040,00

Sedangkan mutasi kurang sebesar Rp31.478.898.518,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

(a) Pembayaran kekurangan Gaji Pegawai sebesar Rp82.509.313,00, pada 14 OPD yaitu:

- Dinas Pendidikan sebesar Rp33.775.308,00.
- Dinas Kesehatan sebesar Rp22.550.528,00.
- RSUD Prof. Dr. Soekandar (APBD) sebesar Rp6.271.374,00.
- RSUD RA Basoeni (APBD) sebesar Rp3.209.211,00.
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp888.928,00.
- Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp378.513,00.
- Dinas Pangan dan Perikanan sebesar Rp127.919,00.
- Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sebesar Rp1.928.369,00.
- Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olah Raga sebesar Rp2.925.553,00.
- Sekretariat Daerah sebesar Rp3.024.957,00.
- Inspektorat sebesar Rp2.799.800,00.
- Kecamatan Trowulan sebesar Rp1.026.421,00.
- Kecamatan Trawas sebesar Rp123.800,00.
- Kecamatan Mojoanyar sebesar Rp3.478.632,00

(b) Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp4.401.806.508,00 atas insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun 2022 sesuai Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 188.45/23/HK/416-012/2022 tentang Penerima dan Besaran Pembayaran Kekurangan Insentif Pajak Daerah Triwulan III dan Triwulan IV Tahun Anggaran 2022 yang Dibayarkan Pada Tahun Anggaran 2023

(c) Pembayaran Utang Jasa Pelayanan Kesehatan sebesar Rp26.994.582.697,00 dengan rincian:

- Dinas Kesehatan BOP sebesar Rp63.573.287,00.
- Dinas Kesehatan BLUD sebesar Rp44.000.000,00.
- RSUD Prof. Dr. Soekandar sebesar Rp18.644.162.651,00.
- RSUD RA. Basoeni sebesar Rp8.242.846.759,00.

Dari penjelasan tersebut saldo Utang Belanja Pegawai per 31 Desember 2023 sebesar Rp20.013.572.146,00. Rincian Utang Belanja Pegawai per OPD adalah sebagai berikut:

Tabel e. 118 Rincian Utang Belanja Pegawai

(dalam rupiah)

Uraian	Saldo Per 31 Des 2022	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Per 31 Des 2023
Dinas Pendidikan	33.775.308,00	87.035.325,00	33.775.308,00	87.035.325,00
Dinas Kesehatan	3.344.418.961,00	2.357.434.643,00	130.123.815,00	5.571.729.789,00
RSUD Prof. Dr. Soekandar (APBD)	6.271.374,00	14.133.063,00	6.271.374,00	14.133.063,00
RSUD Prof. Dr. Soekandar (BLUD)	15.245.403.306,00	9.549.781.545,00	18.644.162.651,00	6.151.022.200,00

Uraian	Saldo Per 31 Des 2022	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Per 31 Des 2023
RSUD RA. Basuni (APBD)	3.209.211,00	3.132.440,00	3.209.211,00	3.132.440,00
RSUD RA. Basuni (BLUD)	7.274.394.719,00	6.138.840.612,00	8.242.846.759,00	5.170.388.572,00
Dinas PU dan Penataan Ruang	888.928,00	650.000,00	888.928,00	650.000,00
Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan	0,00	0,00	0,00	0,00
Satuan Polisi Pamong Praja	378.513,00	0,00	378.513,00	0,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Tenaga Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Pangan dan Perikanan	127.919,00	0,00	127.919,00	0,00
Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Kependudukan dan Capil	0,00	670.100,00	0,00	670.100,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	9.715.160,00	0,00	9.715.160,00
Dinas Pengendalian Penduduk KB dan Pembdy.Perempuan	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	1.928.369,00	0,00	1.928.369,00	0,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	669.900,00	0,00	669.900,00
Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga	2.925.553,00	0,00	2.925.553,00	0,00
Dinas Pertanian	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0,00	0,00	0,00	0,00
Sekretariat Daerah	3.024.957,00	230.707.757,00	3.024.957,00	230.707.757,00
Inspektorat Kabupaten	2.799.800,00	0,00	2.799.800,00	0,00
Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	0,00	1.338.822,00	0,00	1.338.822,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	1.379.800,00	0,00	1.379.800,00
Badan Pendapatan Daerah	4.401.806.508,00	2.770.043.868,00	4.401.806.508,00	2.770.043.868,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	669.900,00	0,00	669.900,00
Sekretariat DPRD	0,00	285.450,00	0,00	285.450,00
Kecamatan Puri	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Sooko	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Trowulan	1.026.421,00	0,00	1.026.421,00	0,00
Kecamatan Bangsal	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Gedeg	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Kemlagi	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Jetis	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Dawarblandong	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Pacet	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Pungging	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Ngoro	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Kutorejo	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Dlanggu	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Trawas	123.800,00	0,00	123.800,00	0,00
Kecamatan Mojoanyar	3.478.632,00	0,00	3.478.632,00	0,00
Kecamatan Gondang	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Jatirejo	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Mojosari	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	30.325.982.279,00	21.166.488.385,00	31.478.898.518,00	20.013.572.146,00

(2) Utang Belanja Barang dan Jasa

Saldo Utang Belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2023 sebesar Rp31.441.834.436,00 yang merupakan utang belanja barang seperti obat-obatan dan utang atas pembayaran listrik, air dan telepon serta barang dan jasa pelayanan yang belum dibayarkan pada tahun 2023. Mutasi tambah atau penambahan sebesar Rp30.213.595.242,00 terdiri dari:

(a) Dinas Kesehatan sebesar Rp120.312.388,00 terdiri dari Utang Iuran BPJS

4% BOP sebesar Rp119.663.480,00 dan koreksi kurang saji Iuran BPJS 4% sebesar Rp648.908,00.

- (b) RSUD Prof. Dr. Soekandar sebesar Rp17.528.238.886,00.(c) RSUD RA. Basoeni sebesar Rp4.321.250.527,00.
- (d) Pada 27 (dua puluh tujuh) Puskesmas sebesar Rp821.599.384,00.
- (e) Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Non ASN sebesar Rp1.250.990.242,00.
- (f) Koreksi kurang saji Utang Belanja Barang Jasa pada RSUD Soekandar sebesar Rp4.085.739,00.
- (b) Utang Belanja atas Listrik, Telepon, Air dan Internet pada 48 OPD selain BLUD sebesar Rp6.167.118.076,00.

Sedangkan mutasi kurang sebesar Rp25.021.724.502,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- (a) Dinas Kesehatan sebesar Rp20.716.612,00 terdiri dari pembayaran Utang Iuran BPJS 4% (BOP) sebesar Rp5.893.412,00 dan pembayaran Utang Iuran PBPU sebesar Rp14.823.200,00.
- (b) Pembayaran Utang Belanja Barang dan Jasa pada RSUD Prof. Dr. Soekandar sebesar Rp6.416.313.032,00.
- (c) Pembayaran Utang Belanja Barang dan Jasa pada RSUD RA. Basoeni sebesar Rp7.505.175.937,00.
- (d) Pembayaran Utang Belanja Barang dan Jasa pada 27 (dua puluh tujuh) Puskesmas sebesar Rp1.568.090.525,00
- (e) Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Non ASN sebesar Rp1.569.753.841,00.
- (f) Koreksi lebih saji utang perbekalan farmasi pada RSUD RA Basoeni sebesar Rp57.408.182,00.
- (g) Utang BPJS RSUD RA Basoeni yang terkonfirmasi lunas pada tahun sebelumnya sebesar Rp28.611.600,00.
- (h) Pembayaran utang belanja atas Listrik, Telepon, Air dan Internet pada 48 OPD selain BLUD sebesar Rp7.855.654.773,00.

Dari penjelasan tersebut saldo Utang Belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2023 sebesar Rp31.441.834.436,00. Adapun rincian Utang Belanja Barang dan Jasa per OPD adalah sebagai berikut:

Tabel e. 119 Rincian Utang Belanja Barang dan Jasa

(dalam rupiah)

Uraian	Saldo Per 31 Des 2022	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Per 31 Des 2023
Dinas Pendidikan	17.855.813,00	21.924.589,00	17.855.813,00	21.924.589,00
Dinas Kesehatan	2.842.631.554,00	1.006.048.351,00	1.612.030.721,00	2.236.649.184,00
RSUD Prof. Dr. Soekandar (APBD)	0,00	0,00	0,00	0,00
RSUD Prof. Dr. Soekandar (BLUD)	6.412.227.293,00	17.532.324.625,00	6.416.313.032,00	17.528.238.886,00
RSUD RA. Basuni (APBD)	0,00	0,00	0,00	0,00
RSUD RA. Basuni (BLUD)	7.591.195.719,00	4.321.250.527,00	7.591.195.719,00	4.321.250.527,00
Dinas PU dan Penataan Ruang	22.415.593,00	23.764.481,00	22.415.593,00	23.764.481,00
Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan	14.134.449,00	20.031.244,00	14.134.449,00	20.031.244,00
Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	6.569.787,00	0,00	6.569.787,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	12.923.461,00	13.024.696,00	12.923.461,00	13.024.696,00
Dinas Sosial	6.517.983,00	6.293.279,00	6.517.983,00	6.293.279,00
Dinas Tenaga Kerja	423.914,00	481.914,00	423.914,00	481.914,00
Dinas Pangan dan Perikanan	6.275.324,00	6.419.421,00	6.275.324,00	6.419.421,00
Dinas Lingkungan Hidup	21.749.367,00	23.162.307,00	21.749.367,00	23.162.307,00
Dinas Kependudukan dan Capil	29.734.058,00	16.728.440,00	29.734.058,00	16.728.440,00

Uraian	Saldo Per 31 Des 2022	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Per 31 Des 2023
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	624.100,00	0,00	0,00	624.100,00
Dinas Pengendalian Penduduk KB dan Pembdy.Perempuan	6.563.175,00	5.592.526,00	6.563.175,00	5.592.526,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	7.783.838,00	7.351.510,00	7.783.838,00	7.351.510,00
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	5.620.235,00	4.734.092,00	5.620.235,00	4.734.092,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	8.975.972,00	10.052.218,00	8.975.972,00	10.052.218,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	10.548.938,00	5.684.999,00	10.548.938,00	5.684.999,00
Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga	18.033.983,00	19.677.096,00	18.033.983,00	19.677.096,00
Dinas Pertanian	15.475.442,00	9.245.329,00	15.475.442,00	9.245.329,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	28.215.803,00	28.708.708,00	28.215.803,00	28.708.708,00
Sekretariat Daerah	10.249.612,00	11.094.790,00	10.249.612,00	11.094.790,00
Inspektorat Kabupaten	6.444.819,00	8.287.272,00	6.444.819,00	8.287.272,00
Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	1.060.167,00	1.095.567,00	1.060.167,00	1.095.567,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	7.462.703.677,00	5.715.221.208,00	7.461.603.677,00	5.716.321.208,00
Badan Pendapatan Daerah	1.583.099.881,00	1.263.235.245,00	1.583.099.881,00	1.263.235.245,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.337.603,00	2.279.430,00	2.337.603,00	2.279.430,00
Sekretariat DPRD	45.148.876,00	58.570.989,00	45.148.876,00	58.570.989,00
Kecamatan Puri	3.003.856,00	3.591.052,00	3.003.856,00	3.591.052,00
Kecamatan Sooko	3.003.264,00	2.981.199,00	3.003.264,00	2.981.199,00
Kecamatan Trowulan	3.447.947,00	3.973.102,00	3.447.947,00	3.973.102,00
Kecamatan Bangsal	3.410.579,00	2.597.915,00	3.410.579,00	2.597.915,00
Kecamatan Gedeg	2.874.779,00	3.488.709,00	2.874.779,00	3.488.709,00
Kecamatan Kemlagi	3.685.432,00	5.174.030,00	3.685.432,00	5.174.030,00
Kecamatan Jetis	3.937.579,00	4.485.598,00	3.937.579,00	4.485.598,00
Kecamatan Dawarblandong	3.290.258,00	4.057.327,00	3.290.258,00	4.057.327,00
Kecamatan Pacet	1.619.426,00	2.117.727,00	1.619.426,00	2.117.727,00
Kecamatan Pungging	5.088.310,00	4.062.295,00	5.088.310,00	4.062.295,00
Kecamatan Ngoro	2.117.134,00	3.174.026,00	2.117.134,00	3.174.026,00
Kecamatan Kutorejo	1.112.775,00	226.719,00	1.112.775,00	226.719,00
Kecamatan Dlanggu	2.584.829,00	3.227.064,00	2.584.829,00	3.227.064,00
Kecamatan Trawas	2.426.077,00	2.789.230,00	2.426.077,00	2.789.230,00
Kecamatan Mojoanyar	4.096.049,00	4.058.445,00	4.096.049,00	4.058.445,00
Kecamatan Gondang	4.188.371,00	5.490.722,00	4.188.371,00	5.490.722,00
Kecamatan Jatirejo	4.329.904,00	3.330.131,00	4.329.904,00	3.330.131,00
Kecamatan Mojosari	4.139.671,00	5.242.700,00	4.139.671,00	5.242.700,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	636.807,00	672.611,00	636.807,00	672.611,00
Jumlah	26.249.963.696,00	30.213.595.242,00	25.021.724.502,00	31.441.834.436,00

(3) Utang Belanja Modal

Saldo Utang Belanja Modal per 31 Desember 2023 sebesar Rp351.540.833,60 yang merupakan Utang Belanja Modal Aset Tetap. Mutasi tambah atau penambahan sebesar Rp351.540.833,60 terdiri dari:

- (a) Dinas Pendidikan sebesar Rp309.568.833,60 merupakan utang atas Belanja Modal yang sampai dengan 31 Desember 2023 pekerjaan tersebut baru mencapai 81,5% dan telah dilakukan pembayaran berupa uang muka dan pembayaran termin 1, dengan rincian:
 - Utang Belanja Modal Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 1 Jetis sebesar Rp185.007.461,85.
 - Utang Belanja Modal Pembangunan Lab SMPN 1 Jetis sebesar Rp124.561.371,75.
- (b) Dinas Kesehatan sebesar Rp41.972.000,00 merupakan utang atas Belanja Modal Pembangunan Gedung Puskesmas Gondang berupa Kanopi yang dianggarkan pada Belanja Modal Peralatan Mesin, sehingga atas pekerjaan tersebut belum terbayarkan karena kesalahan penganggaran.

Mutasi kurang atas Utang Belanja Modal adalah nihil. Dari penjelasan tersebut saldo Utang Belanja Modal per 31 Desember 2023 sebesar Rp351.540.833,60.

Adapun rincian Utang Belanja Modal per OPD adalah sebagai berikut:

Tabel e. 120 Rincian Utang Belanja Modal

(dalam rupiah)

Uraian	Saldo Per 31 Des 2022	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Per 31 Des 2023
Dinas Pendidikan	0,00	309.568.833,60	0,00	309.568.833,60
Dinas Kesehatan	0,00	41.972.000,00	0,00	41.972.000,00
Jumlah	0,00	351.540.833,60	0,00	351.540.833,60

Dari total utang belanja sebesar Rp51.806.947.415,60 seperti yang telah diuraikan diatas dapat dilihat bahwa utang belanja paling besar terjadi pada Dinas Kesehatan, RSUD Dr. Sukandar dan RSUD RA. Basoeni. Adapun rincian utang belanja pegawai dan barang jasa pada 3 (tiga) OPD yang bernilai material yaitu Dinas Kesehatan, RSUD Prof. Dr. Soekandar dan RSUD RA Basoeni tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

(1) Dinas Kesehatan

Utang pada Dinas Kesehatan selain Utang Belanja Pegawai atas kekurangan gaji pegawai tahun 2023, utang belanja Listrik, Telepon dan Air juga terdapat utang yang merupakan utang atas klaim jaminan kesehatan dengan Surat Pernyataan Miskin (SPM) yang belum terbayar yang merupakan Kewajiban Pemerintah Daerah atas Pelayanan Kesehatan Masyarakat yang telah diberikan oleh Pihak Rumah Sakit di Lingkup Pemerintah Kabupaten Mojokerto maupun di luar Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Selain itu Utang pada Dinas Kesehatan juga termasuk utang atas belanja barang dan jasa serta pelayanan kesehatan pada 27 (dua puluh tujuh) Puskesmas yang telah menjadi BLUD. Total Utang Belanja Dinas Kesehatan per 31 Desember 2023 sebesar Rp7.850.350.973,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel e. 121 Utang Belanja Dinas Kesehatan

(dalam rupiah)

Uraian	Saldo per 31 Des 2022	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Per 31 Des 2023
Kekurangan Gaji Pegawai	136.620.974,00	25.544.087,00	22.550.528,00	139.614.533,00
Jasa Pelayanan di Puskesmas	3.163.797.987,00	1.816.169.099,00	63.573.287,00	4.916.393.799,00
Utang Belanja Pegawai BLUD pada Puskesmas	44.000.000,00	515.721.457,00	44.000.000,00	515.721.457,00
Insentif Nakes Penanganan Covid	1.085.999.909,00	0,00	0,00	1.085.999.909,00
Iuran BPJS 4%	150.494.336,00	120.312.388,00	5.893.412,00	264.913.312,00
Iuran PBPU	14.823.200,00	0,00	14.823.200,00	0,00
Utang Belanja Listrik, Telepon dan Air, BBM	23.223.584,00	64.136.579,00	23.223.584,00	64.136.579,00
Utang Beban Barjas pada 27 Puskesmas	1.568.090.525,00	821.599.384,00	1.568.090.525,00	821.599.384,00
Utang Belanja Modal	0,00	41.972.000,00	0,00	41.972.000,00
Jumlah	6.187.050.515,00	3.405.454.994,00	1.742.154.536,00	7.850.350.973,00

Saldo Utang Belanja Dinas Kesehatan per 31 Desember 2022 sebesar Rp6.187.050.515,00. Mutasi tambah atau penambahan sebesar Rp3.405.454.994,00 terdiri dari:

- Kekurangan gaji pegawai tahun 2023 sebesar Rp25.544.087,00.
- Jasa Pelayanan Kesehatan untuk pegawai pada 27 puskesmas sebesar Rp1.816.169.099,00.

- Utang Belanja Pegawai BLUD pada puskesmas sebesar Rp37.177.157,00.
- Koreksi kurang saji Utang Iuran BPJS 4% (BLUD) sebesar Rp478.544.300,00.
- Utang Iuran BPJS 4% (BOP) sebesar Rp119.663.480,00.
- Koreksi kurang saji Utang Iuran BPJS 4% (BOP) sebesar Rp648.908,00.
- Utang beban atas listrik, telepon dan air pada Dinas Kesehatan sebesar Rp64.136.579,00.
- Utang belanja barang dan jasa pada 27 (dua puluh tujuh) Puskesmas yang telah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebesar Rp821.599.384,00 yang meliputi utang listrik, telepon, air, internet, jasa pelayanan dan lain-lain.
- Utang Iuran BPJS 4% sebesar Rp150.494.336,00.
- Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp41.972.000,00 merupakan utang atas Belanja Modal Pembangunan Gedung Puskesmas Gondang berupa Kanopi yang dianggarkan pada Belanja Modal Peralatan Mesin, sehingga atas pekerjaan tersebut belum terbayarkan karena kesalahan penganggaran.

Mutasi kurang atau pengurangan sebesar Rp1.742.154.536,00 terdiri dari:

- Pembayaran kekurangan gaji pegawai tahun 2022 sebesar Rp22.550.528,00.
- Pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan untuk pegawai pada 27 puskesmas sebesar Rp63.573.287,00.
- Pembayaran Utang Belanja Pegawai BLUD sebesar Rp44.000.000,00.
- Pembayaran Utang Iuran BPJS 4% (BOP) sebesar Rp5.893.412,00.
- Pembayaran Utang Iuran PBPU sebesar Rp14.823.200,00.
- Pembayaran Utang Belanja atas listrik, telepon dan air Dinas Kesehatan sebesar Rp23.223.584,00.
- Pembayaran Utang Belanja Barang dan Jasa pada 27 (dua puluh tujuh) Puskesmas yang telah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebesar Rp1.568.090.525,00 yang meliputi utang listrik, telepon, air, internet dan jasa pelayanan.

Dari penjelasan tersebut, saldo Utang Belanja per 31 Desember 2023 pada Dinas Kesehatan adalah sebesar Rp7.850.350.973,00. Dari nilai Utang Belanja tersebut, tidak termasuk utang atau kewajiban kepada entitas akuntansi di lingkup Pemerintah Kabupaten Mojokerto sebesar Rp1.100.000,00 pada RSUD Prof. Dr. Soekandar. Atas kewajiban tersebut dilakukan eliminasi karena merupakan akun timbal balik antar entitas akuntansi.

(2) RSUD Prof. Dr. Soekandar (BLUD)

Utang Belanja pada RSUD Prof. Dr. Soekandar merupakan utang atas Jasa Pelayanan Kesehatan, pembelian obat-obatan, pengelolaan limbah, listrik telepon, air serta utang atas jasa kepada pihak ketiga. Saldo Utang Belanja RSUD Prof. Dr. Soekandar per 31 Desember 2023 sebesar Rp23.679.661.086,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel e. 122 Utang belanja RSUD Prof Dr Soekandar

(dalam rupiah)

Uraian	Saldo per 31 Des 2022	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Per 31 Des 2023
Jasa Pelayanan	15.245.403.306,00	9.549.781.545,00	18.644.162.651,00	6.151.022.200,00
Perbekalan Farmasi	5.953.819.878,00	16.259.541.474,00	5.954.005.617,00	16.259.355.735,00
Pengelolaan Limbah B3	70.733.984,00	55.821.178,00	70.733.984,00	55.821.178,00

Uraian	Saldo per 31 Des 2022	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Per 31 Des 2023
Hutang penggantian barang jasa pihak ketiga	177.940.287,00	625.443.308,00	177.940.287,00	625.443.308,00
Pemulasaran Jenazah	900.000,00	400.000,00	900.000,00	400.000,00
APD	0,00	24.918.000,00	3.900.000,00	21.018.000,00
Utang Beban Listrik, Telepon dan Air	208.833.144,00	230.520.579,00	208.833.144,00	230.520.579,00
Utang Pemeliharaan Alat dan Gedung Kantor	0,00	336.080.086,00	0,00	336.080.086,00
Jumlah	21.657.630.599,00	27.082.506.170,00	25.060.475.683,00	23.679.661.086,00

Saldo Utang Belanja RSUD Prof. Dr. Soekandar per 31 Desember 2022 sebesar Rp21.657.630.599,00. Mutasi tambah atau penambahan sebesar Rp27.082.506.170,00 terdiri dari:

- Utang jasa pelayanan tahun 2023 sebesar Rp6.151.022.200,00.
- Koreksi kurang saji atas Utang Jasa Pelayanan sebesar Rp3.398.759.345,00.
- Utang Perbekalan farmasi sebesar Rp16.259.355.735,00.
- Koreksi kurang saji utang perbekalan farmasi sebesar Rp185.739,00.
- Utang Pengelolaan Limbah B3 sebesar Rp55.821.178,00.
- Utang pergantian barang dan jasa oleh pihak ketiga sebesar Rp625.443.308,00.
- Utang pemulasaran jenazah sebesar Rp400.000,00.
- Utang APD sebesar Rp21.018.000,00.
- Koreksi kurang saji atas utang APD sebesar Rp3.900.000,00.
- Utang Belanja atas listrik, telepon dan air sebesar Rp230.520.579,00.
- Utang pemeliharaan alat dan gedung kantor sebesar Rp336.080.086,00.

Mutasi kurang atau pengurangan sebesar Rp25.060.475.683,00 terdiri dari:

- Pembayaran Utang Jasa Pelayanan sebesar Rp18.644.162.651,00.
- Pembayaran Utang Perbekalan farmasi sebesar Rp5.954.005.617,00.
- Pembayaran Utang Pengelolaan Limbah B3 sebesar Rp70.733.984,00.
- Pembayaran Utang pergantian barang dan jasa oleh pihak ketiga sebesar Rp177.940.287,00.
- Pembayaran Utang pemulasaran jenazah sebesar Rp900.000,00.
- Pembayaran Utang APD sebesar Rp3.900.000,00.
- Pembayaran utang beban atas listrik, telepon dan air sebesar Rp208.833.144,00.

Dari penjelasan tersebut saldo utang beban RSUD Prof. Dr. Soekandar per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp23.679.661.086,00.

(3) RSUD RA Basoeni (BLUD)

Utang Belanja pada RSUD RA Basoeni merupakan utang atas Jasa Pelayanan Kesehatan, pembelian obat-obatan, pengelolaan limbah, listrik telepon, air serta utang atas jasa kepada pihak ketiga. Saldo Utang Belanja RSUD RA Basoeni per 31 Desember 2023 sebesar Rp9.491.639.099,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel e.123 Utang Beban RSUD RA. Basoeni

(dalam rupiah)

Uraian	Saldo per 31 Des 2022	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Per 31 Des 2023
Jasa Pelayanan	7.274.394.719,00	6.138.840.612,00	8.242.846.759,00	5.170.388.572,00
Perbekalan Farmasi	7.188.315.768,00	3.616.215.111,00	7.188.315.768,00	3.616.215.111,00
Pembuangan Limbah	29.770.200,00	82.091.880,00	29.770.200,00	82.091.880,00
Utang Oksigen	38.572.500,00	42.000.268,00	38.572.500,00	42.000.268,00
Utang Darah	96.570.000,00	150.300.000,00	96.570.000,00	150.300.000,00
Utang BPJS	28.611.600,00	0,00	28.611.600,00	0,00

Uraian	Saldo per 31 Des 2022	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Per 31 Des 2023
Utang Beban Listrik, Telepon dan Air	209.355.651,00	215.343.228,00	209.355.651,00	215.343.228,00
Utang Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	215.300.040,00	0,00	215.300.040,00
Jumlah	14.865.590.438,00	10.460.091.139,00	15.834.042.478,00	9.491.639.099,00

Saldo Utang Beban RSUD RA Basoeni per 31 Desember 2022 sebesar Rp14.865.590.438,00. Mutasi tambah atau penambahan sebesar Rp10.460.091.139,00 terdiri dari:

- Utang jasa pelayanan tahun 2023 sebesar Rp5.170.388.572,00.
- Koreksi kurang saji atas utang jasa pelayanan sebesar Rp968.452.040,00.
- Utang Perbekalan Farmasi sebesar Rp3.616.215.111,00.
- Utang pembuangan limbah B3 sebesar Rp82.091.880,00.
- Utang tabung oksigen sebesar Rp42.000.268,00.
- Utang darah pada PMI sebesar Rp150.300.000,00.
- Utang beban atas listrik, telepon dan air sebesar Rp215.343.228,00.
- Utang pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor sebesar Rp215.300.040,00

Sedangkan mutasi kurang atau pengurangan sebesar Rp15.834.042.478,00 terdiri dari:

- Pembayaran Utang Jasa Pelayanan sebesar Rp8.242.846.759,00.
- Pembayaran Utang Perbekalan Farmasi sebesar Rp7.130.907.586,00.
- Koreksi lebih saji utang perbekalan farmasi sebesar Rp57.408.182,00.
- Pembayaran Utang pembuangan limbah B3 sebesar Rp29.770.200,00.
- Pembayaran Utang tabung oksigen sebesar Rp38.572.500,00.
- Pembayaran Utang darah pada PMI sebesar Rp96.570.000,00.
- Koreksi kurang Utang BPJS yang terkonfirmasi lunas sebesar Rp28.611.600,00.
- Pembayaran utang beban atas listrik, telepon dan air sebesar Rp209.355.651,00.

Dari penjelasan tersebut, saldo Utang Belanja RSUD RA. Basoeni per 31 Desember 2023 sebesar Rp9.491.639.099,00.

7.e.3).b).(1).(d) Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya Pemerintah Kabupaten Mojokerto per 31 Desember 2023 dan Per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Selisih Naik/Turun
Utang Jangka Pendek Lainnya	20.869.562.294,00	22.895.527.400,00	-2.025.965.106,00

Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada, yang jatuh tempo pada satu periode akuntansi. Kewajiban Jangka Pendek - Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2023 Pemerintah Kabupaten Mojokerto sebesar Rp20.817.421.746,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel e. 124 Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya

(dalam rupiah)

Uraian	Saldo Per 31 Des 2022	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Per 31 Des 2023
Utang Bagi Hasil Pajak ke Desa	19.963.451.000,00	18.293.989.235,00	19.963.451.000,00	18.293.989.235,00
Utang Bagi Hasil Retribusi ke Desa	1.414.332.200,00	1.745.161.210,00	1.414.332.200,00	1.745.161.210,00
Utang Bagi Hasil Parkir	43.919.550,00	42.234.750,00	43.919.550,00	42.234.750,00

Uraian	Saldo Per 31 Des 2022	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Per 31 Des 2023
Utang Bagi Hasil Pengelolaan Obyek wisata	624.874.550,00	342.596.530,00	606.051.550,00	361.419.530,00
Utang Pemprov atas sisa BKK yang harus dikembalikan ke Pemerintah Provinsi	848.950.100,00	374.617.021,00	848.950.100,00	374.617.021,00
Utang Pemerintahan Pusat atas Sisa Dana BOS	0,00	52.140.548,00	0,00	52.140.548,00
Jumlah	22.895.527.400,00	20.850.739.294,00	22.876.704.400,00	20.869.562.294,00

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp22.895.527.400,00. Mutasi tambah sebesar Rp20.850.739.294,00 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari:

- (1) Utang Bagi Hasil Pajak Daerah ke Desa bagian bulan Juli sampai dengan Desember 2023 sebesar Rp18.293.989.235,00.
- (2) Utang Bagi Hasil Retribusi Daerah ke Desa bagian bulan Juli sampai dengan Desember 2023 sebesar Rp1.745.161.210,00.
- (3) Utang Bagi Hasil Retribusi Pengelolaan Parkir sebesar Rp42.234.750,00, terdiri dari Utang Bagi Hasil Retribusi Pengelolaan Parkir pada Bapenda Provinsi sebesar Rp30.502.875,00 dan pada Polres Kabupaten Mojokerto sebesar Rp11.731.875,00.
- (4) Utang Bagi Hasil Retribusi Pengelolaan Obyek Wisata sebesar Rp342.596.530,00, dengan rincian:
 - Perhutani KPH Pasuruan Wana Wisata Padusan sebesar Rp113.312.600,00.
 - Perhutani KPH Pasuruan wisata Jolotundo sebesar Rp28.102.500,00.
 - Desa Seloliman wisata Jolotundo sebesar Rp6.245.000,00.
 - Desa Sentonorejo wisata religi Makam Troloyo sebesar Rp19.804.680,00.
 - Candi Brahu (BPCB) sebesar Rp12.084.750,00.
 - Candi Bajang Ratu (BPCB) sebesar Rp11.446.500,00.
 - Candi Tikus (BPCB) sebesar Rp8.794.500,00.
 - Musium Trowulan (BPCB) sebesar Rp68.065.000,00.
 - Ubalan Waterpark Desa Pacet sebesar Rp74.741.000,00.
- (5) Utang kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur atas sisa Dana Bantuan Keuangan Khusus Tahun 2023 sebesar Rp374.617.021,00 sesuai Berita Acara Rekonsiliasi Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor 900.1.15.3/Kab.Mojokerto/BA-TRIPARTID/2024.
- (6) Utang kepada Pemerintah Pusat atas Sisa Dana BOS sekolah-sekolah yang sudah tutup sebesar Rp52.140.548,00 sesuai surat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemendikbudristek Nomor 11980/C/PR.04.01/2023 tanggal 21 November 2023 perihal Percepatan Pendataan Pengembalian Dana BOSP dengan rincian:
 - SMP PGRI Dlanggu sebesar Rp12.994.916,00.
 - SMP PGRI Dawarblandong sebesar Rp1.680.000,00.
 - SD Islam Al Khotimah sebesar Rp25.985.632,00.
 - SMP Mojopahit Jetis sebesar Rp11.480.000,00.

Mutasi kurang atau pengurangan sebesar Rp22.876.704.400,00, terdiri dari:

- (1) Realisasi pembayaran Utang Bagi Hasil Pajak Daerah ke Desa bagian bulan Juli sampai dengan Desember 2022 yang dibayarkan pada tahun 2023 sebesar Rp19.963.451.000,00.
- (2) Realisasi pembayaran Utang Bagi Hasil Retribusi Daerah ke Desa bagian bulan Juli sampai dengan Desember 2022 yang dibayarkan pada tahun 2023 sebesar Rp1.414.332.200,00.

- (3) Realisasi pembayaran Utang Bagi Hasil Retribusi Pengelolaan Parkir sebesar Rp43.919.550,00 terdiri dari Utang Bagi Hasil Retribusi Pengelolaan Parkir pada Bapenda Provinsi sebesar Rp31.719.675,00 dan pada Polres Kabupaten Mojokerto sebesar Rp12.199.875,00.
- (4) Realisasi pembayaran Utang Bagi Hasil Retribusi Pengelolaan Obyek Wisata sebesar Rp606.051.550,00, dengan rincian:
- Perhutani KPH Pasuruan Wana Wisata Padusan sebesar Rp191.346.400,00.
 - Perhutani KPH Pasuruan wisata Jolotundo sebesar Rp308.643.750,00.
 - Desa Seloliman wisata Jolotundo sebesar Rp65.382.000,00.
 - Desa Sentonorejo wisata religi Makam Troloyo sebesar Rp13.658.400,00.
 - Ubalan Waterpark Desa Pacet sebesar Rp27.021.000,00.
- (5) Realisasi pembayaran Utang kepada Pemerintah Provinsi atas sisa Dana Bantuan Keuangan Khusus sebesar Rp848.950.100,00 sesuai Berita Acara Rekonsiliasi Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor 203.4/Tripartid2022/Kab.Mojokerto/V/2023 tanggal 12 Mei 2023 yang dibayarkan melalui Belanja Tak Terduga.

Dari penjelasan tersebut, saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp20.869.562.294,00.

7.e.3).b).(2) Kewajiban Jangka Panjang

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
0,00	0,00

Saldo Kewajiban Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Mojokerto per 31 Desember 2023 dan Per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Selisih Naik/Turun
Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00

Kewajiban Jangka Panjang adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Panjang biasanya muncul sebagai akibat dari pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menutup defisit anggarannya. Saldo Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2023 adalah nihil.

7.e.3).c) Ekuitas

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
5.899.117.532.351,76	6.008.155.424.164,41

Saldo Ekuitas Pemerintah Kabupaten Mojokerto per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Selisih Naik/Turun
Ekuitas	5.899.117.532.351,76	6.008.155.424.164,41	-109.037.891.812,65

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah. Ekuitas Pemerintah Kabupaten Mojokerto per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp5.899.117.532.351,76. Apabila dibandingkan dengan nilai Ekuitas per 31 Desember 2022, terdapat penurunan Ekuitas atau

kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Mojokerto sebesar Rp109.037.891.812,65 atau 1,81%. Penurunan sebesar Rp109.037.891.812,65 tersebut karena Defisit Laporan Operasional sebesar Rp118.248.155.172,95 dan Koreksi Ekuitas sebesar Rp9.210.263.360,30.

7.e.4) Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional merupakan Laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya ketika dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu periode pelaporan. Adapun realisasi Pendapatan - LO dan Beban Pemerintah Kabupaten Mojokerto selama Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel e. 125 Realisasi Laporan Operasional

(dalam Rupiah)

Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/ Penurunan
Pendapatan - LO	2.312.370.895.698,70	2.206.183.581.385,29	106.187.314.313,41
Beban	2.422.871.087.589,16	2.413.875.488.057,53	8.995.599.531,63

7.e.4).a) Pendapatan LO

Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
2.312.370.895.698,70	2.206.183.581.385,29

Pendapatan - LO tahun 2023 sebesar Rp2.312.370.895.698,70. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pendapatan - LO pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp106.084.621.804,30 atau 4,81% yaitu dengan rincian sebagai berikut:

Tabel e. 126 Rincian Pendapatan – LO Tahun 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/ Penurunan
1.	Pendapatan Asli Daerah - LO	651.890.679.610,70	579.460.131.221,79	72.430.548.388,91
2	Pendapatan Transfer - LO	1.658.566.687.990,00	1.540.367.446.750,00	118.199.241.240,00
3.	Lain-lain pendapatan daerah yang sah - LO	1.913.528.098,00	86.356.003.413,50	-84.442.475.315,50
	Jumlah	2.312.370.895.698,70	2.206.183.581.385,29	106.187.314.313,41

Pendapatan-LO tahun 2023 sebesar Rp2.312.370.895.698,70 jika dibandingkan dengan Pendapatan-LRA Tahun 2023 sebesar Rp2.608.549.958.903,54 terdapat selisih minus sebesar Rp296.179.063.204,84 dengan penjelasan sebagai berikut:

a	Penambahan piutang	Rp	73.987.638.682,00
b	Pengurangan pendapatan diterima dimuka	Rp	2.243.379.900,84
c	Bagian Laba BUMD	Rp	12.627.341.307,22
d	Penambahan TDF-TKD	Rp	23.942.900.000,00
e	Eliminasi Saldo akhir Piutang Blud	Rp	1.100.000,00
f	Penambahan Pendapatan Hibah	Rp	1.913.528.098,00
g	Penambahan pendapatan diterima dimuka	Rp	-3.320.886.708,69
h	Pengurangan piutang	Rp	-94.328.084.120,64
i	Pembagian Dividen	Rp	-6.256.972.185,86
j	Pengurangan TDF-TKD	Rp	-12.447.629.294,00
k	Pembayaran Tagihan TGR	Rp	-162.550.783,71

l	Lelang Aset Rusak Berat	Rp	-181.668.200,00
m	Eliminasi Saldo awal Piutang Blud	Rp	-1.100.000,00
n	Pendapatan Dana Desa yang dikeluarkan dari Pendapatan LO	Rp	-294.196.059.900,00
	Jumlah	Rp	-296.179.063.204,84

7.e.4).a).(1) Pendapatan Asli Daerah - LO

Merupakan Hak Pemerintah Daerah untuk memperoleh Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah - LO Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp651.890.679.610,70 atau mengalami kenaikan sebesar Rp72.430.548.388,91 atau 12,50% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp579.460.131.221,79. Pendapatan Asli Daerah - LO ini memiliki proporsi sebesar 28,19% dari keseluruhan Pendapatan - LO. Kelompok Pendapatan Asli Daerah - LO terdiri dari 4 (empat) jenis pendapatan yang dirinci sebagai berikut:

Tabel e. 127 Rincian Pendapatan Asli Daerah - LO Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/ Penurunan
1	Pajak Daerah - LO	374.685.843.152,42	375.717.460.027,25	-1.031.616.874,83
2	Retribusi Daerah - LO	29.094.206.965,49	25.246.851.091,27	3.847.355.874,22
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LO	16.788.206.402,31	15.460.371.833,78	1.327.834.568,53
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah - LO	231.322.423.090,48	163.035.448.269,49	68.286.974.820,99
	Jumlah	651.890.679.610,70	579.460.131.221,79	72.430.548.388,91

Pendapatan Asli Daerah-LO tahun 2023 sebesar Rp651.890.679.610,70 jika dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah-LRA Tahun 2023 sebesar Rp656.126.287.019,54 terdapat selisih sebesar minus Rp4.235.607.408,84 terdiri dari:

a	Penambahan piutang	Rp	34.650.093.905,00
b	Pengurangan pendapatan diterima dimuka	Rp	2.243.379.900,84
c	Bagian Laba BUMD	Rp	12.627.341.307,22
d	Eliminasi Saldo akhir Piutang Blud	Rp	1.100.000,00
e	Penambahan pendapatan diterima dimuka	Rp	-3.320.886.708,69
f	Pengurangan piutang	Rp	-43.748.156.457,64
g	Dividen yang diterima	Rp	-6.256.972.185,86
h	Pembayaran Tagihan TGR	Rp	-162.550.783,71
i	lelang Aset Rusak Berat	Rp	-181.668.200,00
j	Eliminasi Saldo awal Piutang Blud	Rp	-1.100.000,00
	Jumlah	Rp	-4.235.607.408,84

7.e.4).a).(1).(a) Pendapatan Pajak Daerah – LO

Pendapatan Pajak Daerah - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 sebesar Rp374.685.843.152,42 atau mengalami penurunan sebesar Rp988.522.781,83 atau 0,26% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp1.031.616.874,83. Rincian Pendapatan Pajak Daerah - LO adalah sebagai berikut:

Tabel e. 128 Rincian Pendapatan Pajak Daerah - LO Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/ Penurunan
1	Pajak Hotel - LO	5.535.110.244,00	3.505.990.767,00	2.029.119.477,00
2	Pajak Restoran - LO	11.614.157.990,00	10.080.360.193,00	1.533.797.797,00
3	Pajak Hiburan - LO	1.687.813.293,00	1.434.440.550,00	253.372.743,00
4	Pajak Reklame - LO	3.853.291.561,42	3.320.323.511,25	532.968.050,17
5	Pajak Penerangan Jalan - LO	121.985.904.086,00	117.768.778.983,00	4.217.125.103,00
6	Pajak Parkir - LO	335.191.003,00	341.222.421,00	-6.031.418,00
7	Pajak Air Tanah - LO	35.624.601.296,00	33.892.984.028,00	1.731.617.268,00
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO	22.165.451.000,00	23.513.374.900,00	-1.347.923.900,00
9	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan - LO	109.657.817.812,00	109.204.491.382,00	453.326.430,00
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan - LO	62.226.504.867,00	72.655.493.292,00	-10.428.988.425,00
	Jumlah	374.685.843.152,42	375.717.460.027,25	-1.031.616.874,83

Pendapatan Pajak Daerah-LO tahun 2023 sebesar Rp374.685.843.152,42 jika dibandingkan dengan Pendapatan Pajak Daerah-LRA Tahun 2023 sebesar Rp369.537.744.691,00 terdapat selisih sebesar Rp5.148.098.461,42 dengan penjelasan sebagai berikut:

a	Penambahan piutang	Rp	17.921.171.181,00
b	Pengurangan pendapatan diterima dimuka	Rp	928.493.644,84
c	Penambahan pendapatan diterima dimuka	Rp	-1.162.254.254,42
d	Pengurangan piutang	Rp	-12.453.123.924,00
	Jumlah	Rp	5.148.098.461,42

7.e.4).a).(1).(b) Pendapatan Retribusi Daerah – LO

Pendapatan Retribusi Daerah - LO Pemerintah Kabupaten Mojokerto pada tahun 2023 sebesar Rp29.094.206.965,49 atau mengalami kenaikan sebesar Rp3.847.355.874,22 atau 15,24% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai Rp25.246.851.091,27. Rincian masing-masing Pendapatan Retribusi Daerah - LO adalah sebagai berikut:

Tabel e. 129 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah - LO Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/ Penurunan
1.	Ret.Pelayanan Kesehatan - LO	61.232.000,00	112.625.000,00	-51.393.000,00
2.	Ret.Pelayanan Persampahan/Kebersihan - LO	1.777.540.000,00	1.745.185.500,00	32.354.500,00
3.	Ret.Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO	4.023.624.500,00	4.031.422.500,00	-7.798.000,00
4.	Ret.Pelayanan Pasar - LO	2.645.058.830,40	2.505.791.297,79	139.267.532,61
5.	Ret.Pengujian Kendaraan Bermotor - LO	1.712.388.606,79	1.924.187.600,00	-211.798.993,21
6.	Ret.Pelayanan Tera/Tera Ulang - LO	850.452.300,00	748.147.300,00	102.305.000,00
7.	Ret.Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi - LO	984.039.000,00	878.246.000,00	105.793.000,00
8.	Ret.Pemakaian Kekayaan Daerah - LO	4.625.714.493,57	3.791.112.506,00	834.601.987,57
9.	Ret.Pasar Grosir dan/atau Pertokoan - LO	74.600.000,00	72.500.000,00	2.100.000,00
10.	Ret.Terminal - LO	6.065.000,00	10.820.000,00	-4.755.000,00
11.	Ret.Tempat Khusus Parkir - LO	382.981.100,00	362.784.700,00	20.196.400,00
12.	Ret.Rumah Potong Hewan - LO	81.302.500,00	110.340.000,00	-29.037.500,00
13.	Ret.Tempat Rekreasi dan Olah Raga - LO	7.344.936.147,00	6.732.228.022,98	612.708.124,02
14.	Ret.Penjualan Produksi Usaha Daerah - LO	100.500.600,00	100.544.120,00	-43.520,00
15.	Ret.Izin Mendirikan Bangunan - LO	830.470.731,00	620.593.764,00	209.876.967,00
16.	Ret.Izin Trayek - LO	600.000,00	600.000,00	0,00
17.	Ret.Pengendalian Lalu Lintas - LO	92.702.567,73	129.806.180,50	-37.103.612,77

No	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/ Penurunan
18.	Ret.Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LO	2.309.486.800,00	1.369.916.600,00	939.570.200,00
19.	Ret. Persetujuan Bangunan Gedung	1.190.511.789,00	0,00	1.190.511.789,00
	Jumlah	29.094.206.965,49	25.246.851.091,27	3.847.355.874,22

Pendapatan Retribusi Daerah-LO tahun 2023 sebesar Rp29.094.206.965,49 jika dibandingkan dengan Pendapatan Retribusi Daerah-LRA Tahun 2023 sebesar Rp31.114.926.163,76 terdapat selisih minus sebesar Rp2.020.719.198,27 dengan penjelasan sebagai berikut:

a	Penambahan piutang	Rp	900.305.300,00
b	Pengurangan pendapatan diterima dimuka	Rp	1.211.086.256,00
c	Penambahan pendapaatn diterima dimuka	Rp	-2.155.132.454,27
d	Pengurangan piutang	Rp	-1.976.978.300,00
	Jumlah	Rp	-2.020.719.198,27

7.e.4).a).(1).(c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan –LO

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO Pemerintah Kabupaten Mojokerto pada tahun 2023 sebesar Rp16.788.206.402,31, merupakan hasil dari investasi yang ditanamkan pada Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang lembaga keuangan (perbankan), Perusahaan Daerah Air Minum dan perusahaan swasta. Jika dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp15.460.371.833,78. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp1.327.834.568,53 atau 8,59% dengan rincian:

Tabel e. 130 Rincian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan – LO Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/ Penurunan
1.	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD			
	Perusahaan Daerah Air Minum - LO	5.249.686.796,76	5.370.749.923,38	-121.063.126,62
	PT BPR Majatama - LO	7.377.654.510,46	6.005.563.140,29	1.372.091.370,17
	Bank Jatim - LO	4.160.865.095,09	4.084.058.770,11	76.806.324,98
2.	Bagian Laba Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta			
	Asphalt Mixing Plant dan Pemecah Batu (Stone Crusher) - LO	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	16.788.206.402,31	15.460.371.833,78	1.327.834.568,53

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO tahun 2023 sebesar Rp16.788.206.402,31 jika dibandingkan dengan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA Tahun 2023 sebesar Rp10.417.837.280,95 terdapat selisih sebesar Rp6.370.369.121,36 dengan penjelasan sebagai berikut:

a	Bagian Laba BPR Majatama	Rp	7.377.654.510,46
b	Bagian Laba Perumdam Majapahit	Rp	5.249.686.796,76
c	Pembagian Deviden BPR Majatama	Rp	-3.303.059.728,00
d	Pembagian Deviden Perumdam Majapahit	Rp	-2.953.912.457,86
	Jumlah	Rp	6.370.369.121,36

7.e.4).a).(1).(d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah - LO

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO Pemerintah Kabupaten Mojokerto tahun 2023 sebesar Rp231.322.423.090,48 mengalami kenaikan sebesar Rp68.286.974.820,99 atau 41,88% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai Rp163.035.448.269,49. Rincian Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO Kabupaten Mojokerto, terdiri dari:

Tabel e. 131 Rincian Lain-lain PAD Yang Sah – LO Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/ Penurunan
1.	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan- LO	0,00	7.525.000,00	-7.525.000,00
2.	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	422.838.959,00	351.346.750,00	71.492.209,00
3.	Jasa Giro-LO	3.910.297.908,48	5.810.904.558,77	-1.900.606.650,29
4.	Pendapatan Bunga-LO	271.109.511,36	3.018.928,64	268.090.582,72
5.	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO	767.850.315,37	988.764.165,57	-220.913.850,20
6.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	262.061.249,47	588.935.601,13	-326.874.351,66
7.	Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO	1.449.657.082,00	1.202.656.361,00	247.000.721,00
8.	Pendapatan dari Pengembalian-LO	1.069.513.354,00	551.486.252,43	518.027.101,57
9.	Pendapatan dari BLUD-LO	223.169.094.710,80	153.529.360.651,95	69.639.734.058,85
10.	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO	0,00	1.450.000,00	-1.450.000,00
	Jumlah	231.322.423.090,48	163.035.448.269,49	68.286.974.820,99

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO tahun 2023 sebesar Rp231.322.423.090,48 jika dibandingkan dengan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LRA Tahun 2023 sebesar Rp245.055.778.883,83 terdapat selisih sebesar minus Rp13.733.355.793,35 dengan penjelasan sebagai berikut:

a	Penambahan piutang	Rp	15.828.617.424,00
b	Pengurangan pendapatan diterima dimuka	Rp	103.800.000,00
c	Eliminasi Saldo akhir Piutang Blud	Rp	1.100.000,00
d	Penambahan pendapatan diterima dimuka	Rp	-3.500.000,00
e	Pengurangan piutang	Rp	-29.318.054.233,64
f	Pembayaran Tagihan TGR	Rp	-162.550.783,71
g	Lelang Aset Rusak Besar	Rp	-181.668.200,00
h	Eliminasi Saldo awal Piutang Blud	Rp	-1.100.000,00
	Jumlah	Rp	-13.733.355.793,35

7.e.4).a).(2) Pendapatan Transfer - LO

Pendapatan Transfer - LO yang berasal dari Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan, Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya dan Transfer Pemerintah Provinsi dalam hal ini adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada tahun 2023 adalah sebesar Rp1.658.566.687.990,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp118.199.241.240,00 atau 7,67% jika dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp1.540.367.446.750,00. Rincian Pendapatan Transfer - LO, terdiri dari:

Tabel e. 132 Rincian Pendapatan Transfer - LO Tahun 2023 dan 2022*(dalam rupiah)*

No	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/ Penurunan
1	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan - LO	1.411.442.368.092,00	1.302.708.971.907,00	108.733.396.185,00
2	Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya - LO	0,00	23.003.791.000,00	-23.003.791.000,00
3	Transfer Pemerintah Provinsi- LO	247.124.319.898,00	214.654.683.843,00	32.469.636.055,00
	Jumlah	1.658.566.687.990,00	1.540.367.446.750,00	118.199.241.240,00

Pendapatan Transfer-LO tahun 2023 sebesar Rp1.658.566.687.990,00 jika dibandingkan dengan Pendapatan Transfer-LRA Tahun 2023 sebesar Rp1.952.423.671.884,00 terdapat selisih minus sebesar Rp293.856.983.894,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

a Penambahan piutang	Rp	39.337.544.777,00
b Penambahan Treasury Deposit Facility Transfer ke Daerah	Rp	23.942.900.000,00
c Pengurangan piutang	Rp	-50.493.739.477,00
d Pengurangan Treasury Deposit Facility Transfer ke Daerah	Rp	-12.447.629.294,00
e Pendapatan Dana Desa yang tidak dicatat di Pendapatan LO	Rp	-294.196.059.900,00
Jumlah	Rp	-293.856.983.894,00

Rincian masing-masing jenis penerimaan transfer - LO adalah sebagai berikut:

7.e.4).a).(2).(a) Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan – LO

Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan – LO Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 sebesar Rp1.411.442.368.092,00 mengalami kenaikan sebesar Rp108.733.396.185,00 atau 8,35% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp1.302.708.971.907,00. Rincian Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan – LO adalah sebagai berikut:

Tabel e. 133 Rincian Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan – LO Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/Penurunan
1	Dana Bagi Hasil Pajak - LO	65.766.298.000,00	72.611.247.040,00	-6.844.949.040,00
2	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam - LO	53.212.416.000,00	88.134.631.006,00	-34.922.215.006,00
3	Dana Alokasi Umum - LO	947.516.964.403,00	901.558.022.127,00	45.958.942.276,00
4	Dana Alokasi Khusus - LO	344.946.689.689,00	240.405.071.734,00	104.541.617.955,00
	Jumlah	1.411.442.368.092,00	1.302.708.971.907,00	108.733.396.185,00

Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan – LO Tahun 2023 sebesar Rp1.411.442.368.092,00 jika dibandingkan dengan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LRA Tahun 2023 sebesar Rp1.399.947.097.386,00 terdapat selisih sebesar Rp11.495.270.706,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

a	Penambahan Treasury Deposit Facility Transfer ke Daerah	Rp	23.942.900.000,00
b	Pengurangan Treasury Deposit Facility Transfer ke Daerah	Rp	-12.447.629.294,00
	Jumlah	Rp	11.495.270.706,00

7.e.4).a).(2).(b) Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya – LO

Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya – LO Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 nihil sehingga mengalami penurunan sebesar Rp23.003.791.000,00 atau 100% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Rincian Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya – LO adalah sebagai berikut:

Tabel e. 134 Rincian Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya – LO Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/Penurunan
1	Dana Insentif Daerah (DID) - LO	0,00	23.003.791.000,00	-23.003.791.000,00
2	Dana Desa - LO	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	23.003.791.000,00	-23.003.791.000,00

Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya – LO Tahun 2023 nihil, dan jika dibandingkan dengan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya - LRA Tahun 2023 sebesar Rp294.196.059.900,00 terdapat selisih sebesar minus Rp294.196.059.900,00 yang merupakan Pendapatan Dana Desa yang tidak dicatat di Pendapatan LO.

7.e.4).a).(2).(c) Transfer Pemerintah Provinsi - LO

Transfer Pemerintah Provinsi – LO dalam hal ini adalah pendapatan transfer dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur berupa Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan. Pada tahun 2023 Transfer Pemerintah Provinsi – LO adalah sebesar Rp247.124.319.898,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp32.469.636.055,00 atau 15,13% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp214.654.683.843,00 yang terdiri dari:

Tabel e. 135 Rincian Transfer Pemerintah Provinsi – LO Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/Penurunan
1.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO	240.447.244.777,00	208.767.024.843,00	31.680.219.934,00
2	Bantuan Keuangan - LO	6.677.075.121,00	5.887.659.000,00	789.416.121,00
	Jumlah	247.124.319.898,00	214.654.683.843,00	32.469.636.055,00

Transfer Pemerintah Provinsi – LO Tahun 2023 sebesar Rp247.124.319.898,00 jika dibandingkan dengan Transfer Pemerintah Provinsi – LRA Tahun 2023 sebesar Rp258.280.514.598,00 terdapat selisih minus sebesar Rp11.156.194.700,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

a	Penambahan piutang	Rp	39.337.544.777,00
b	Pengurangan piutang	Rp	-50.493.739.477,00
	Jumlah	Rp	-11.156.194.700,00

7.e.4).a) (3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LO

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO Tahun 2023 sebesar Rp1.913.528.098,00, mengalami penurunan sebesar Rp84.442.475.315,50 atau

97,78% jika dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp86.356.003.413,50. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LO adalah merupakan Pendapatan Hibah berupa uang maupun barang yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya ataupun pihak lainnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel e. 136 Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/ Penurunan
1.	Pendapatan Hibah - LO	1.913.528.098,00	5.571.053.791,50	-3.657.525.693,50
2.	Pendapatan Lainnya - LO	0,00	80.784.949.622,00	-80.784.949.622,00
	Jumlah	1.913.528.098,00	86.356.003.413,50	-84.442.475.315,50

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO Tahun 2023 sebesar Rp1.913.528.098,00 jika dibandingkan dengan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA Tahun 2023 yang nihil, maka terdapat selisih sebesar sebesar Rp1.913.528.098,00 yang merupakan penambahan Pendapatan Hibah dengan penjelasan sebagai berikut:

a	RSUD Prof Dr. Soekandar	Rp	386.557.606,00
b	Dp2KBP2	Rp	1.279.513.886,00
c	Sekretariat Daerah	Rp	247.456.606,00
	Jumlah	Rp	1.913.528.098,00

Rincian masing-masing jenis penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO adalah sebagai berikut:

7.e.4.a).(3).(a) Pendapatan Hibah – LO

Pendapatan Hibah-LO pada Tahun 2023 sebesar Rp1.913.528.098,00, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp5.571.053.791,50, Pendapatan Hibah-LO mengalami penurunan sebesar Rp3.657.525.693,50 atau 65,65%. Pendapatan hibah tersebut merupakan pendapatan hibah dari Pemerintah – LO dan Pendapatan Hibah dari lembaga atau organisasi swasta lainnya yang berupa uang dan barang dengan rincian:

Tabel e. 137 Rincian Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LO Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/ Penurunan
1	Hibah Aset Tetap	634.014.212,00	4.494.185.000,00	-3.860.170.788,00
2	Hibah obat-obatan	1.279.513.886,00	1.076.868.791,50	202.645.094,50
	Jumlah	1.913.528.098,00	5.571.053.791,50	-3.657.525.693,50

Pendapatan Hibah-LO Tahun 2023 sebesar Rp1.913.528.098,00 jika dibandingkan dengan Pendapatan Hibah-LRA Tahun 2023 yang nihil, maka terdapat selisih sebesar Rp1.913.528.098,00 yang merupakan penambahan Pendapatan Hibah dengan penjelasan sebagai berikut:

a	RSUD Prof Dr. Soekandar	Rp	386.557.606,00
b	DP2KBP2	Rp	1.279.513.886,00
c	Sekretariat Daerah	Rp	247.456.606,00
	Jumlah	Rp	1.913.528.098,00

7.e.4).a).(3).(b) Pendapatan Lainnya – LO

Pendapatan Lainnya – LO pada Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 adalah nihil, sehingga jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp80.784.949.622,00, Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundangan–LO mengalami penurunan sebesar Rp80.784.949.622,00 atau 100% dengan rincian:

Tabel e. 138 Rincian Pendapatan Lainnya – LO Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/ Penurunan
1	Pendapatan Hibah Dana BOS	0,00	80.784.949.622,00	-80.784.949.622,00
2	Pengembalian Hibah-LO	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	80.784.949.622,00	-80.784.949.622,00

Pendapatan Lainnya – LO Tahun 2023 adalah nihil, begitu juga dengan Pendapatan Lainnya – LRA Tahun 2023 juga nihil, sehingga tidak terdapat selisih antara LO dan LRA.

7.e.4).b) Beban

Tahun 2023 (Rp)
2.422.871.087.589,16

Tahun 2022 (Rp)
2.413.875.488.057,53

Beban Pemerintah Kabupaten Mojokerto tahun 2023 sebesar Rp2.422.871.087.589,16. Jika dibandingkan dengan Beban tahun 2022 sebesar Rp2.413.875.488.057,53, maka beban Pemerintah Kabupaten Mojokerto mengalami kenaikan sebesar Rp8.995.599.531,63 atau 0,37%. Rincian Beban tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel e. 139 Rincian Beban Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	kenaikan/ Penurunan
1	Beban Pegawai	906.642.767.953,19	922.091.436.536,77	-15.448.668.583,58
2	Beban Persediaan	221.931.568.116,71	245.871.883.298,46	-23.940.315.181,75
3	Beban Jasa	361.533.297.349,00	348.486.519.059,72	13.046.778.289,28
4	Beban Pemeliharaan	19.764.018.535,00	33.267.387.631,02	-13.503.369.096,02
5	Beban Perjalanan Dinas	82.288.442.966,00	80.997.021.454,00	1.291.421.512,00
6	Beban Bunga	0,00	0,00	0,00
7	Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00
8	Beban Hibah	148.564.680.694,00	60.963.857.893,94	87.600.822.800,06
9	Beban Bantuan Sosial	6.459.598.000,00	19.192.300.208,00	-12.732.702.208,00
10	Beban Penyisihan Piutang	9.245.344.878,84	9.571.807.663,23	-326.462.784,39
11	Beban Penyusutan	365.715.125.241,17	378.032.065.353,14	-12.316.940.111,97
12	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	944.645.911,25	1.063.805.761,25	-119.159.850,00
13	Beban Transfer	299.781.597.944,00	313.232.208.500,00	-13.450.610.556,00
14	Beban Lain-lain	0,00	1.105.194.698,00	-1.105.194.698,00
	Jumlah	2.422.871.087.589,16	2.413.875.488.057,53	8.995.599.531,63

Beban Tahun 2023 sebesar Rp2.422.871.087.589,16 jika dibandingkan dengan Belanja di LRA Tahun 2023 sebesar Rp2.344.864.349.370,19 terdapat selisih sebesar Rp78.006.738.218,97 dengan penjelasan sebagai berikut:

a	Penambahan Utang Beban	Rp	66.953.575.020,00
b	Persediaan awal	Rp	49.480.029.665,83
c	Hibah Obat	Rp	1.279.513.886,00
d	Hibah Aset	Rp	634.014.212,00
e	Beban Barang Extracomtable	Rp	379.506.623,52

f	Beban Penyisihan Piutang	Rp	9.245.344.878,84
g	Beban Penyusutan	Rp	365.715.125.241,17
h	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	Rp	944.645.911,25
i	Pengurangan Utang Beban	Rp	-78.442.357.538,00
j	Persediaan Akhir	Rp	-43.085.564.702,64
k	Kapitalisasi Aset Tetap	Rp	-1.325.177.867,00
l	Dana Desa yg tidak masuk LO	Rp	-294.196.059.900,00
m	Jasa Konsultasi	Rp	-36.235.000,00
	Jumlah	Rp	76.006.738.218,97

7.e.4).b).(1) Beban Pegawai - LO

Beban pegawai Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 sebesar Rp906.642.767.953,19 jika dibandingkan dengan tahun 2022 beban pegawai tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp15.448.668.583,58 atau 1,68%. Rincian beban pegawai tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel e.140 Rincian Beban Pegawai Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/ Penurunan
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	501.348.653.334,00	513.608.925.293,00	-12.260.271.959,00
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	113.138.404.326,19	115.757.354.051,00	-2.618.949.724,81
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	175.388.137.431,00	187.287.729.191,00	-11.899.591.760,00
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	31.312.416.482,00	31.118.688.944,00	193.727.538,00
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.045.201.004,00	2.970.879.907,00	-1.925.678.903,00
6	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.357.898.197,00	1.271.238.000,00	86.660.197,00
7	Beban Pegawai BLUD	83.052.057.179,00	70.076.621.150,77	12.975.436.028,23
	Jumlah	906.642.767.953,19	922.091.436.536,77	-15.448.668.583,58

Beban Pegawai Tahun 2023 sebesar Rp906.642.767.953,19 jika dibandingkan dengan Belanja Pegawai di LRA Tahun 2023 sebesar Rp921.800.933.771,19 terdapat selisih minus sebesar Rp15.158.165.818,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

a	Penambahan Utang Belanja Pegawai	Rp	16.320.732.700,00
b	Pengurangan Utang Belanja Pegawai	Rp	-31.478.898.518,00
	Jumlah	Rp	-15.158.165.818,00

7.e.4).b).(2) Beban Persediaan

Beban Persediaan Pemerintah Kabupaten Mojokerto tahun 2023 sebesar Rp221.931.568.116,71 jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp245.871.883.298,46, Beban Persediaan Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp23.940.315.181,75 atau 9,74%. Rincian Beban Persediaan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel e.141 Rincian Beban Persediaan Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/ Penurunan
1	Beban Barang Tak Pakai Habis	221.649.497.140,17	245.301.048.252,46	-13.651.551.112,29
2	Beban Barang Pakai Habis	282.070.976,54	570.835.046,00	-288.764.069,46
	Jumlah	221.931.568.116,71	245.871.883.298,46	-13.940.315.181,75

Beban Persediaan Tahun 2023 sebesar Rp221.931.568.116,71 jika dibandingkan dengan belanja yang menghasilkan persediaan di LRA Tahun 2023 sebesar Rp206.587.058.520,00 terdapat selisih sebesar Rp15.344.509.596,71 dengan penjelasan sebagai berikut:

a	Persediaan awal tahun	Rp	49.480.029.665,83
b	Bertambahnya persediaan karena penerimaan hibah		obat
		Rp	1.279.513.886,00
c	Penambahan Utang Persediaan	Rp	20.667.140.508,00
d	Barang Extracomtable	Rp	327.519.813,52
e	Persediaan akhir tahun	Rp	-43.085.564.702,64
f	Pengurangan Utang Persediaan	Rp	-13.304.586.474,00
g	Kapitalisasi Aset	Rp	-19.543.100,00
	Jumlah	Rp	15.344.509.596,71

7.e.4).b).(3) Beban Jasa

Beban Jasa Pemerintah Kabupaten Mojokerto tahun 2023 sebesar Rp361.533.297.349,00 jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp348.486.519.059,72, Beban Jasa Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp13.046.778.289,28 atau 3,74%. Rincian Beban Jasa tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel e.142 Rincian Beban Jasa Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/ Penurunan
1	Beban Jasa Kantor	263.877.867.007,00	270.581.503.589,72	-6.703.636.582,72
2	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	52.740.607.335,00	29.234.559.328,00	23.506.048.007,00
3	Beban Sewa Tanah	136.920.000,00	164.575.949,00	-27.655.949,00
4	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	3.774.971.528,00	2.680.984.585,00	1.093.986.943,00
5	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	3.531.044.313,00	2.964.864.478,00	566.179.835,00
6	Beban Sewa Jalan Jaringan dan Irigasi	67.700.000,00	0,00	67.700.000,00
7	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	729.049.000,00	558.624.340,00	170.424.660,00
8	Beban Sewa Aset Tak Berwujud	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00
9	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	2.534.301.519,00	3.154.173.747,00	-619.872.228,00
10	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	7.239.253.961,00	7.777.461.478,00	-538.207.517,00
11	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	2.180.000,00	194.700.800,00	-192.520.800,00
12	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Diklat	7.666.000.743,00	6.574.626.572,00	1.091.374.171,00
13	Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN	4.581.568.445,00	4.198.148.072,00	383.420.373,00
14	Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi	468.313.614,00	0,00	468.313.614,00
15	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	12.371.658.000,00	19.193.304.191,00	-6.821.646.191,00
16	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.800.861.884,00	1.208.991.930,00	591.869.954,00
	Jumlah	361.533.297.349,00	348.486.519.059,72	13.046.778.289,28

Beban Jasa Tahun 2023 sebesar Rp361.533.297.349,00 jika dibandingkan dengan belanja yang menghasilkan jasa di LRA Tahun 2023 sebesar Rp364.376.859.520,00 terdapat selisih minus sebesar Rp2.843.562.171,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

a	Penambahan Utang	Rp	9.032.574.711,00
b	Pembayaran Utang	Rp	-11.675.037.796,00
c	Kapitalisasi Ke Aset Tetap	Rp	-128.629.086,00
	Jumlah	Rp	-2.843.562.171,00

7.e.4).b).(4) Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Pemerintah Kabupaten Mojokerto tahun 2023 sebesar Rp19.764.018.535,00, jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp33.267.387.631,02, Beban Pemeliharaan Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp13.503.369.096,02 atau 40,59%. Rincian Beban Pemeliharaan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel e. 143 Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/ Penurunan
1	Beban Pemeliharaan Tanah	41.835.000,00	8.000.000,00	33.835.000,00
2	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	12.301.758.583	20.324.771.699,00	-8.023.013.116,00
3	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.159.697.180,00	7.173.512.259,02	-2.013.815.079,02
4	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.260.727.772,00	5.758.458.673,00	-3.497.730.901,00
5	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0,00	2.645.000,00	-2.645.000,00
	Jumlah	19.764.018.535,00	33.267.387.631,02	-13.503.369.096,02

Beban Pemeliharaan Tahun 2023 sebesar Rp19.764.018.535,00 jika dibandingkan dengan Belanja Pemeliharaan di LRA Tahun 2023 sebesar Rp20.301.422.280,00 terdapat selisih minus sebesar Rp537.403.745,00, dengan penjelasan sebagai berikut:

a	Penambahan Utang Beban Pemeliharaan	Rp	551.380.126,00
b	Kapitalisasi Aset	Rp	-1.088.783.871,00
	Jumlah	Rp	-537.403.745,00

7.e.4).b).(5) Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Pemerintah Kabupaten Mojokerto tahun 2023 sebesar Rp82.288.442.966,00, jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp80.997.021.454,00, Beban Perjalanan Dinas tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp1.291.421.512,00 atau 1,59%. Rincian Beban Perjalanan Dinas tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel e.144 Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/ Penurunan
1	Beban Perjalanan Dinas Biasa	46.192.219.744,00	45.709.821.674,00	482.398.070,00
2	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	33.138.086.529,00	34.164.606.500,00	-1.026.519.971,00
3	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	936.816.291,00	735.655.148,00	201.161.143,00
4	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	2.021.320.402,00	386.938.132,00	1.634.382.270,00
	Jumlah	82.288.442.966,00	80.997.021.454,00	1.291.421.512,00

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2023 sebesar Rp82.288.442.966,00 jika dibandingkan dengan Belanja Perjalanan Dinas di LRA Tahun 2023 sebesar Rp82.288.442.966,00, maka tidak terdapat selisih antara Beban Perjalanan Dinas dengan Belanja Perjalanan Dinas.

7.e.4).b).(6) Beban Hibah

Beban Hibah Pemerintah Kabupaten Mojokerto tahun 2023 sebesar Rp148.564.680.694,00 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp60.963.857.893,94, terdapat kenaikan sebesar Rp87.600.822.800,06 atau 143,69%. Beban Hibah Pemerintah Kabupaten Mojokerto pada Tahun 2023 terdiri dari:

Tabel e. 145 Rincian Beban Hibah Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/ Penurunan
1	Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	392.172.492,94	-392.172.492,94
2	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	128.604.326.486	57.399.010.401,00	71.205.316.085
3	Beban Hibah Dana BOS	16.787.679.208,00	0,00	16.787.679.208,00
4	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	3.172.675.000,00	3.172.675.000,00	0,00
	Jumlah	148.564.680.694,00	60.963.857.893,94	87.600.822.800,06

Beban Hibah Tahun 2023 sebesar Rp148.564.680.694,00 jika dibandingkan dengan Belanja Hibah di LRA Tahun 2023 sebesar Rp147.470.288.694,00, terdapat selisih sebesar Rp1.094.392.000,00, yang merupakan Hibah Alat Peralatan Permainan dan Meubel (peralatan mesin) dan gedung bangunan ke lembaga swasta pada Dinas Pendidikan.

7.e.4).b).(7) Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Mojokerto tahun 2023 sebesar Rp6.459.598.000,00, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp19.192.300.208,00, ada penurunan sebesar Rp12.732.702.208,00 atau 66,34%. Beban Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Mojokerto pada tahun 2023 terdiri dari:

Tabel e. 146 Rincian Beban Bantuan Sosial Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/ Penurunan
1	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu	5.367.400.000,00	18.032.071.700,00	-12.664.671.700,00
2	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Keluarga	0,00	390.000.000,00	-390.000.000,00
3	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat	662.198.000,00	470.228.508,00	191.969.492,00
4	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	430.000.000,00	300.000.000,00	130.000.000,00
	Jumlah	6.459.598.000,00	19.192.300.208,00	-12.732.702.208,00

Beban Bantuan Sosial Tahun 2023 sebesar Rp6.459.598.000,00 jika dibandingkan dengan Belanja Bantuan Sosial di LRA Tahun 2023 sebesar Rp6.459.598.000,00, tidak terdapat selisih antara Beban Bantuan Sosial dan Belanja Bantuan Sosial.

7.e.4).b).(8) Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang tahun 2023 sebesar Rp9.245.344.878,84 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp9.571.807.663,23, ada penurunan sebesar Rp326.462.784,39. Beban Penyisihan Piutang Pemerintah Kabupaten Mojokerto pada tahun 2023 terdiri dari:

Tabel e. 147 Rincian Beban Penyisihan Piutang Tahun 2023 dan 2022*(dalam rupiah)*

No	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/ Penurunan
1.	Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	9.068.694.814,27	9.413.578.910,54	-344.884.096,27
2.	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	143.316.500,00	81.091.400,00	62.225.100,00
3.	Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	21.023.425,20	70.982.283,00	-49.958.857,80
4.	Beban Penyisihan Piutang Lain-lain	12.310.139,37	6.155.069,69	6.155.069,68
	Jumlah	9.245.344.878,84	9.571.807.663,23	-326.462.784,39

Dari tabel di atas diketahui bahwa Beban Penyisihan Piutang tahun 2023 lebih rendah apabila dibandingkan dengan Beban Penyisihan Piutang tahun 2022 sebesar Rp326.462.784,39 atau 3,41%.

7.e.4).b).(9) Beban Penyusutan

Beban Penyusutan tahun 2023 sebesar Rp365.715.125.241,17 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp378.032.065.353,14, ada penurunan sebesar Rp12.316.940.111,97 atau 3,26%. Beban Penyusutan Pemerintah Kabupaten Mojokerto pada tahun 2023 terdiri dari:

Tabel e. 148 Rincian Beban Penyusutan Tahun 2023 dan 2022*(dalam rupiah)*

No	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/ Penurunan
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	128.693.784.004,00	148.041.368.841,41	-19.347.584.837,41
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	31.692.387.585,44	29.002.919.327,98	2.689.468.257,46
3	Beban Penyusutan Jalan Jaringan dan Irigasi	205.293.684.251,73	200.952.507.783,75	4.341.176.467,98
4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	35.269.400,00	35.269.400,00	0,00
	Jumlah	365.715.125.241,17	378.032.065.353,14	-12.316.940.111,97

(1) Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin tahun 2023 sebesar Rp128.693.784.004,00. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin pada tahun 2023 terdiri dari:

Tabel e. 149 Rincian Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Tahun 2023 dan 2022*(dalam rupiah)*

No	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/ Penurunan
1	Beban Penyusutan Alat Besar	6.849.627.929,47	34.678.192.229,61	-27.828.564.300,14
2	Beban Penyusutan Alat Angkutan	12.167.234.194,30	13.382.146.207,38	-1.214.912.013,08
3	Beban Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	341.563.062,29	336.395.854,29	5.167.208,00
4	Beban Penyusutan Alat Pertanian	1.023.892.134,00	1.062.836.714,00	-38.944.580,00
5	Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	24.233.367.193,53	13.547.255.351,88	10.686.111.841,65
6	Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	4.261.695.372,60	2.256.463.106,20	2.005.232.266,40
7	Beban Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	54.369.106.162,05	67.725.158.457,51	-13.356.052.295,46

No	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/ Penurunan
8	Beban Penyusutan Alat Laboratorium	4.079.310.208,13	3.988.096.861,80	91.213.346,33
9	Beban Penyusutan Alat Persenjataan	500.000,00	0,00	500.000,00
10	Beban Penyusutan Komputer	19.587.445.072,53	9.552.882.282,64	10.034.562.789,89
11	Beban Penyusutan Alat Pengeboran	230.000,00	0,00	230.000,00
12	Beban Penyusutan Alat Keselamatan Kerja	240.453.134,00	212.742.660,00	27.710.474,00
12	Beban Penyusutan Rambu-Rambu	1.296.972.596,50	1.228.232.056,10	68.740.540,40
14	Beban Penyusutan Peralatan Olahraga	242.386.944,60	70.967.060,00	171.419.884,60
	Jumlah	128.693.784.004,00	148.041.368.841,41	-19.347.584.837,41

Dari tabel di atas diketahui Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin tahun 2023 lebih rendah atau turun sebesar Rp19.347.584.837,41 atau 13,07% jika dibandingkan dengan Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Tahun 2022.

(2) Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan tahun 2023 sebesar Rp31.692.387.585,44. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan pada tahun 2023 terdiri dari:

Tabel e. 150 Rincian Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/ Penurunan
1	Beban Penyusutan Bangunan Gedung	31.478.739.386,57	28.801.633.084,19	2.677.106.302,38
2	Beban Penyusutan Monumen	127.758.657,59	130.542.489,01	-2.783.831,42
3	Beban Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti	85.889.541,28	70.743.754,78	15.145.786,50
	Jumlah	31.692.387.585,44	29.002.919.327,98	2.689.468.257,46

Dari tabel di atas diketahui Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan tahun 2023 lebih tinggi atau meningkat sebesar Rp2.689.468.257,46 atau 9,27% jika dibandingkan dengan Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Tahun 2022.

(3) Beban Penyusutan Jalan Jaringan dan Irigasi

Beban Penyusutan Jalan Jaringan dan Irigasi tahun 2023 sebesar Rp205.293.684.251,73, Beban Penyusutan Jalan Jaringan dan Irigasi pada tahun 2023 terdiri dari:

Tabel e. 151 Rincian Beban Penyusutan Jalan Jaringan dan Irigasi Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/ Penurunan
1	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	184.719.429.394,90	180.926.135.439,20	3.793.293.955,70
2	Beban Penyusutan Bangunan Air	9.472.017.871,12	8.978.667.808,83	493.350.062,29
3	Beban Penyusutan Instalasi	10.325.309.278,21	10.270.726.828,22	54.582.449,99
4	Beban Penyusutan Jaringan	776.927.707,50	776.977.707,50	-50.000,00
	Jumlah	205.293.684.251,73	200.952.507.783,75	4.341.176.467,98

Dari tabel di atas diketahui Beban Penyusutan Jalan Jaringan dan Irigasi tahun 2023 lebih tinggi atau naik sebesar Rp4.341.176.467,98 atau 2,16% jika dibandingkan dengan Beban Penyusutan Jalan Jaringan dan Irigasi Tahun 2022.

(4) Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya

Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya tahun 2023 sebesar Rp35.269.400,00. Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya pada tahun 2023 terdiri dari:

Tabel e. 152 Rincian Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya Tahun 2023 dan 2022*(dalam rupiah)*

No	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/ Penurunan
1	Beban Penyusutan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	35.269.400,00	35.269.400,00	0,00
	Jumlah	35.269.400,00	35.269.400,00	0,00

Dari tabel di atas diketahui Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya tahun 2023 dan Tahun 2022 sama tidak mengalami kenaikan maupun penurunan.

7.e.4).b).(10) Beban Amortisasi Aset Tak berwujud

Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud tahun 2023 sebesar Rp944.645.911,25. Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud pada tahun 2023 terdiri dari:

Tabel e. 153 Rincian Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud Tahun 2023 dan 2022*(dalam rupiah)*

No	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/ Penurunan
1	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	944.645.911,25	1.063.805.761,25	-119.159.850,00
	Jumlah	944.645.911,25	1.063.805.761,25	-119.159.850,00

Dari tabel di atas diketahui Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud tahun 2023 lebih rendah atau menurun sebesar Rp119.159.850,00 atau 11,20% jika dibandingkan dengan Amortisasi Aset Tak Berwujud Tahun 2022.

7.e.4).b).(11) Beban Transfer

Beban Transfer Pemerintah Kabupaten Mojokerto pada Tahun 2023 sebesar Rp299.781.597.944,00. Terdapat penurunan sebesar Rp13.450.610.556,00 atau 4,29% jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp313.232.208.500,00. Adapun rincian atas Beban Transfer adalah sebagai berikut:

Tabel e. 154 Rincian Beban Transfer Tahun 2023 dan 2022*(dalam rupiah)*

No	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/ Penurunan
1	Beban Bagi Hasil	41.609.554.944,00	40.774.000.100,00	835.554.844,00
2	Beban Bantuan keuangan	258.172.043.000,00	272.458.208.400,00	-14.286.165.400,00
	Jumlah	299.781.597.944,00	313.232.208.500,00	-13.450.610.556,00

Beban Transfer Tahun 2023 sebesar Rp299.781.597.944,00 jika dibandingkan dengan Belanja Transfer di LRA Tahun 2023 sebesar Rp595.579.745.619,00 terdapat selisih minus sebesar Rp295.798.147.675,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

a	Penambahan Utang Bagi Hasil	Rp	20.381.746.975,00
b	Pengurangan Utang Bagi Hasil	Rp	-21.983.834.750,00
c	Dana Desa yang tidak dicatat sebagai Beban	Rp	-294.196.059.900,00
	Jumlah	Rp	-295.798.147.675,00

Rincian dari masing-masing jenis beban transfer adalah sebagai berikut:

(1) Beban Bagi Hasil

Beban Bagi Hasil Pemerintah Kabupaten Mojokerto pada Tahun 2023 sebesar Rp41.609.554.944,00, terdapat kenaikan sebesar Rp835.554.844,00 atau 2,05% jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp40.774.000.100,00. Adapun rincian atas Beban Bagi Hasil adalah sebagai berikut:

Tabel e. 155 Rincian Beban Bagi Hasil Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/ Penurunan
1	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	38.182.694.052,00	38.140.317.400,00	42.376.652,00
2	Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	3.426.860.892,00	2.633.682.700,00	793.178.192,00
	Jumlah	41.609.554.944,00	40.774.000.100,00	835.554.844,00

Beban Bagi Hasil Tahun 2023 sebesar Rp41.609.554.944,00 jika dibandingkan dengan Belanja Bagi Hasil di LRA Tahun 2023 sebesar Rp43.211.642.719,00 terdapat selisih minus sebesar Rp1.602.087.775,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

a	Penambahan Utang Bagi Hasil	Rp	20.381.746.975,00
b	Pengurangan Utang Bagi Hasil	Rp	-21.983.834.750,00
	Jumlah	Rp	-1.602.087.775,00

(2) Beban Bantuan Keuangan

Beban Bantuan Keuangan pada tahun 2023 sebesar Rp258.172.043.000,00, terdapat penurunan sebesar Rp14.286.165.400,00 atau 5,24% jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp272.458.208.400,00. Beban Bantuan Keuangan terdiri dari Bantuan Keuangan untuk Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Keuangan Infrastruktur kepada Desa dan Bantuan Keuangan untuk Pemilihan Kepala Desa. Untuk Bantuan Keuangan Dana Desa (DD) tidak dicatat sebagai Beban Pemerintah Kabupaten Mojokerto karena Dana Desa merupakan bantuan langsung dari Pemerintah Pusat ke Desa, dan Desa merupakan unit pemerintahan yang berdiri sendiri. Adapun rincian Beban Bantuan Keuangan adalah sebagai berikut:

Tabel e. 156 Rincian Beban Bantuan Keuangan Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/ Penurunan
1	Alokasi Dana Desa (ADD)	139.108.298.000,00	139.108.298.000,00	0,00
2	Bantuan Keuangan Infrastruktur ke Desa	119.063.745.000,00	130.750.232.600,00	-11.686.487.600,00
3	Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa	0,00	2.599.677.800,00	-2.599.677.800,00
	Total	258.172.043.000,00	272.458.208.400,00	-14.286.165.400,00

Beban Bantuan Keuangan Tahun 2023 sebesar Rp258.172.043.000,00 jika dibandingkan dengan Belanja Bantuan Keuangan di LRA Tahun 2023 sebesar Rp552.368.102.900,00 terdapat selisih minus sebesar Rp294.196.059.900,00 merupakan Dana Desa yang tidak dicatat sebagai Beban Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

7.e.4).b).(12) Beban Lain-Lain

Beban lain-lain merupakan Beban Pemerintah Kabupaten Mojokerto yang tidak dapat diklasifikasikan ke Beban Operasi yang lain. Beban Lain-lain tahun 2023 adalah nihil. Nilai tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan Beban Lain-lain tahun 2022 yang mencapai Rp1.105.194.698,00 terdapat penurunan sebesar Rp1.105.194.698,00 atau 100%.

Tabel e.157 Rincian Beban Lain-Lain Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/ Penurunan
1	Dinas Pendidikan	0,00	448.378.547,00	-448.378.547,00
2	Dinas Kesehatan	0,00	48.704.156,00	-48.704.156,00
3	RSUD. Prof. Dr. Soekandar (BLUD)	0,00	3.974.999,00	-3.974.999,00
4	RSUD. RA. Basoeni (Rutin)	0,00	5.106.000,00	-5.106.000,00
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	88.942.745,00	-88.942.745,00
6	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Perhubungan	0,00	152.121.120,00	-152.121.120,00
7	Dinas Sosial	0,00	16.640.000,00	-16.640.000,00
8	Dinas Tenaga Kerja	0,00	3.275.200,00	-3.275.200,00
9	Dinas Pangan dan Perikanan	0,00	575.000,00	-575.000,00
10	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	224.000,00	-224.000,00
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	10.295.000,00	-10.295.000,00
12	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan	0,00	273.000,00	-273.000,00
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	86.608.500,00	-86.608.500,00
14	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	0,00	1.605.496,00	-1.605.496,00
15	Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga	0,00	80.860.000,00	-80.860.000,00
16	Dinas Pertanian	0,00	42.676.635,00	-42.676.635,00
17	Dinas Perinsutrian dan Perdagangan	0,00	5.378.950,00	-5.378.950,00
18	Sekretariat Daerah	0,00	49.965.850,00	-49.965.850,00
19	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	374.000,00	-374.000,00
20	Badan Pendapatan Daerah	0,00	2.019.000,00	-2.019.000,00
21	Sekretariat DPRD	0,00	12.690.000,00	-12.690.000,00
22	Kecamatan Sooko	0,00	13.884.000,00	-13.884.000,00
23	Kecamatan Bangsal	0,00	499.500,00	-499.500,00
24	Kecamatan Gedeg	0,00	505.000,00	-505.000,00
25	Kecamatan Kemlagi	0,00	424.000,00	-424.000,00
26	Kecamatan Mojoanyar	0,00	26.499.000,00	-26.499.000,00
27	Kecamatan Mojosari	0,00	2.695.000,00	-2.695.000,00
	Jumlah	0,00	1.105.194.698,00	-1.105.194.698,00

7.e.4).c) Surplus/Defisit dari Operasi

Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
<u>-110.500.191.890,46</u>	<u>-207.691.906.672,24</u>

Surplus/Defisit dari Operasi adalah selisih antara Pendapatan – LO dengan Beban selama tahun 2023. Surplus/Defisit dari Operasi Pemerintah Kabupaten Mojokerto tahun 2023 sebesar minus Rp97.191.714.781,78.

7.e.4).d) Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional - LO

Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
<u>-6.775.597.574,49</u>	<u>0,00</u>

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Pemerintah Kabupaten Mojokerto pada Tahun 2023 sebesar minus Rp6.775.597.574,49, sedangkan Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional tahun 2022 nihil. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional tersebut timbul dari kegiatan penjualan aset lain-lain rusak berat melalui proses lelang.

7.e.4).e) Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa

Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
<u>-117.275.789.464,95</u>	<u>-207.691.906.672,24</u>

Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa merupakan Surplus/Defisit dari Operasi dikurangi dengan Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional. Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa Pemerintah Kabupaten Mojokerto tahun 2023 adalah sebesar defisit Rp117.275.789.464,95.

7.e.4).f) Pos Luar Biasa

Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
<u>972.365.708,00</u>	<u>2.633.870.620,00</u>

Pos Luar Biasa Pemerintah Kabupaten Mojokerto pada tahun 2023 sebesar Rp972.365.708,00. Pos Luar Biasa ini merupakan Pos Luar Biasa Pemerintah Kabupaten Mojokerto yang digunakan untuk penanganan bencana alam dan kejadian tanggap darurat. Realisasi Pos Luar Biasa Tahun 2023 sebesar Rp972.365.708,00 jika dibandingkan dengan Belanja Tak Terduga di LRA sebesar Rp1.394.558.239,00 terdapat selisih minus sebesar Rp422.192.531,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

a	Penambahan Utang BKK Propinsi Jatim dan Utang Pusat pengembalian Dana BOS	Rp	426.757.569,00
b	Pengurangan Utang BKK Propinsi Jatim	Rp	-848.950.100,00
	Jumlah	Rp	-422.192.531,00

7.e.4).g) Surplus / Defisit - LO

Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
<u>-118.248.155.172,95</u>	<u>-210.325.777.292,24</u>

Surplus/Defisit - LO adalah selisih antara Pendapatan – LO dengan Beban dan Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional serta Pos Luar Biasa selama tahun 2023. Surplus/Defisit - LO Pemerintah Kabupaten Mojokerto tahun 2023 sebesar minus Rp118.248.155.172,95 dengan rincian:

Tabel e. 158 Rincian Surplus/Defisit Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/Penurunan
1	Pendapatan LO	2.312.370.895.698,70	2.206.183.581.385,29	106.187.314.313,41
2	Beban	2.422.871.087.589,16	2.413.875.488.057,53	8.995.599.531,63
3	Kegiatan Non Operasional	-6.775.597.574,49	0,00	-6.775.597.574,49
4	Pos Luar Biasa	-972.365.708,00	-2.633.870.620,00	1.661.504.912,00
	Jumlah	-118.248.155.172,95	-210.325.777.292,24	92.077.622.119,29

7.e.5) Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas merupakan laporan yang memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas suatu entitas pelaporan dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, arus kas berdasarkan aktivitas investasi/investasi non keuangan, arus kas dari aktivitas pendanaan/pembiayaan, dan arus kas dari aktivitas transitoris/nonanggaran selama satu periode akuntansi.

7.e.5).a) Arus Kas dari Aktivitas Operasi

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
262.109.383.094,35	257.513.465.121,58

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah daerah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi adalah sebesar Rp262.109.383.094,35. Jumlah tersebut terdiri dari:

Tabel e. 159 Arus Kas dari Aktivitas Operasi TA 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Arus Masuk Kas	2.608.368.290.703,54	2.537.235.424.067,77
Arus Keluar Kas	2.346.258.907.609,19	2.279.721.958.946,19
Jumlah Arus Kas Bersih	262.109.383.094,35	257.513.465.121,58

Terdapat kenaikan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi pada tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp4.595.917.972,77 atau 1,78%. Kenaikan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi ini karena kenaikan Arus Masuk Kas lebih besar dari kenaikan Arus Keluar Kas, yaitu Arus Masuk Kas naik sebesar Rp71.132.866.635,77 sedangkan Arus Keluar Kas naik sebesar Rp66.536.948.663,00.

7.e.5).b) Arus Kas dari Aktivitas Investasi

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
-439.653.219.717,88	-341.126.974.163,51

Arus kas dari aktivitas investasi/investasi non keuangan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat di masa yang akan datang. Aktivitas investasi non keuangan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan Aset Tetap dan aset non keuangan lainnya. Arus kas bersih dari aktivitas investasi non keuangan adalah sebesar minus Rp439.653.219.717,88. Jumlah tersebut terdiri dari:

Tabel e. 160 Arus Kas dari Aktivitas Investasi TA 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Arus Masuk Kas	181.668.200,00	0,00
Arus Keluar Kas	439.834.887.917,88	341.126.974.163,51
Jumlah Arus Kas Bersih	-439.653.219.717,88	-341.126.974.163,51

Terdapat penurunan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi pada tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp98.526.245.554,37 atau 28,88%. Penurunan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi karena kenaikan Arus Keluar Kas sebesar Rp98.707.913.754,37 dan kenaikan Arus Masuk Kas sebesar Rp181.668.200,00.

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi sebesar Rp439.834.887.917,88 dengan rincian sebagai berikut:

- Pembentukan Dana Cadangan	Rp	55.000.000.000,00
- Perolehan Tanah	Rp	451.920.000,00
- Perolehan Peralatan dan Mesin	Rp	71.157.661.706,88
- Perolehan Bangunan dan Gedung	Rp	146.020.359.519,00
- Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	150.499.982.193,00
- Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	Rp	16.000.000.000,00

7.e.5).c) Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
<hr/> 0,00	<hr/> -17.250.034,00

Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran, yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah daerah dan klaim pemerintah daerah terhadap pihak lain di masa yang akan datang. Aktivitas pendanaan adalah aktivitas penerimaan kas yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah piutang jangka panjang dan utang jangka panjang pemerintah daerah sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran. Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan adalah nihil.

Tabel e.161 Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan TA 2023

Uraian	<i>(dalam rupiah)</i>	
	Tahun 2023	Tahun 2022
Arus Masuk Kas	0,00	37.085.750,00
Arus Keluar Kas	0,00	54.335.784,00
Jumlah Arus Kas Bersih	0,00	-17.250.034,00

Terdapat kenaikan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan pada tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp17.250.034,00. Kenaikan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan karena penurunan Arus Masuk Kas lebih kecil dari penurunan Arus Keluar Kas, yaitu Arus Masuk Kas turun sebesar Rp37.085.750,00 sedangkan Arus Keluar Kas menurun sebesar Rp54.335.784,00.

7.e.5) d) Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
<hr/> 0,00	<hr/> 0,00

Arus kas dari aktivitas Transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah daerah. Arus kas dari aktivitas nonanggaran antara lain Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening kas umum daerah. Aktivitas non anggaran adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan,

belanja, transfer dan pembiayaan pemerintah daerah. Arus kas bersih dari aktivitas Transitoris/ non anggaran adalah nihil.

Tabel e. 162 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris TA 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Arus Kas Masuk	133.353.951.168,00	142.348.560.809,45
Arus Kas Keluar	133.353.951.168,00	142.348.560.809,45
Arus Kas Bersih	0,00	0,00

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris tahun 2023 sebesar nol.

Dari arus kas tersebut di atas dapat diperoleh Saldo Akhir Kas sebagaimana tabel berikut.

Tabel e. 163 Kenaikan (Penurunan) Kas selama Periode TA 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Kenaikan/ (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode	-177.543.836.623,53	-83.630.759.075,93
Saldo Awal Kas	426.235.454.984,97	509.866.214.060,90
Saldo Akhir Kas	248.691.618.361,44	426.235.454.984,97

Saldo akhir kas tersebut terdiri dari:

1. Kas di BUD sebesar Rp207.586.133.851,84.
2. Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp222.000,00.
3. Kas di BLUD sebesar Rp37.899.919.116,53.
4. Kas Dana BOS sebesar Rp14.971.714,07.
5. Kas di Bendahara Puskesmas (BOK) sebesar Rp3.190.371.679,00.

7.e.6) Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Fungsi Laporan Perubahan Ekuitas adalah sebagai penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca yang menerangkan tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas Operasional pada tahun pelaporan. Perubahan Ekuitas Pemerintah Kabupaten Mojokerto tahun 2023 dan 2022 tampak dalam tabel berikut:

Tabel e. 164 Laporan Perubahan Ekuitas

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Ekuitas Awal	6.008.155.424.164,41	6.168.327.723.682,56
Surplus LO	-118.248.155.172,95	-210.325.777.292,24
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Lain-lain	9.210.263.360,30	50.153.477.774,09
Ekuitas Akhir	5.899.117.532.351,76	6.008.155.424.164,41

Rincian pos pada Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Saldo Ekuitas Awal Tahun 2023 sebesar Rp6.008.155.424.164,41 merupakan saldo akhir ekuitas tahun 2022, sesuai dengan neraca audited tahun 2022.
- b. Surplus/defisit - LO sebesar Rp118.248.155.172,95 merupakan defisit atas Kegiatan Operasional dan Non Operasional serta Pos Luar Biasa Tahun 2023 yang mengurangi nilai ekuitas pada Neraca Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun 2023.

- c. Sedangkan Lain-lain merupakan Koreksi Ekuitas Lainnya pada beberapa pos laporan tahun sebelumnya sebesar Rp9.210.263.360,30 sehingga menambah nilai ekuitas pada Neraca Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun 2023. Adapun rincian dari Koreksi Ekuitas Lainnya adalah sebagai berikut:

Tabel e. 165 Rincian Lain-lain (Koreksi Ekuitas Lainnya)

(dalam rupiah)

Uraian	Nominal
Koreksi Tambah	
Penambahan karena kurang catat Aset Tetap sesuai hasil inventarisasi	4.284.000,00
Penambahan karena kesalahan penghitungan akumulasi penyusutan	7,70
Penambahan karena koreksi kurang saji Piutang, dengan rincian:	19.110.270.182,00
Penambahan karena koreksi lebih saji utang	86.019.782,00
Penambahan karena koreksi investasi BPR Majatama	4.023.719,02
Penambahan karena adanya barang ekstrakomptabel	115659992
Penambahan karena pengakuan kerugian daerah atas pemeriksaan LKPD 2022	104.527.575,69
Penambahan karena koreksi penyisihan piutang	160.222.923,57
Jumlah Koreksi Tambah	19.585.008.181,98
Koreksi Kurang	
Pengurangan karena Penghapusan Aset	582.469.261,00
Pengurangan karena kapitalisasi KDP menjadi Aset	43.190.999,99
Pengurangan karena koreksi lebih saji piutang	1.159.576.906,23
Pengurangan karena koreksi kurang saji utang, dengan rincian:	4.850.490.332,00
Pengurangan karena penggunaan Laba BUMD untuk Jaspro Dana Sosial dan Lain-lain	2.845.581.158,85
Pengurangan karena Aset Extracomtabel Perolehan Tahun 2022	827.456.419,89
Pengurangan karena Penghapusan kerugian daerah Crash Program	65.979.743,72
Jumlah Koreksi kurang	10.374.744.821,68
Total Koreksi Ekuitas Lainnya	9.210.263.360,30

- d. Sehingga Saldo Akhir Ekuitas tahun 2023 adalah sebesar Rp5.899.177.532.351,76

7.f. PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI KEUANGAN LAINNYA

1) Dana Tugas Pembantuan

Pada tahun 2023 Pemerintah Kabupaten tidak melaksanakan program dan kegiatan yang berasal dari dana-dana non APBD Kabupaten Mojokerto seperti Dana Tugas Pembantuan. Pelaksanaan tugas pembantuan diatur dalam Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 92, Pasal 99, dan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Berikut penjelasan mengenai Dana Tugas Pembantuan yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto pada Tahun Anggaran 2023.

Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan. Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Sedangkan tujuan pemberian tugas pembantuan adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, serta membantu penyelenggaraan pemerintahan, dan pengembangan pembangunan bagi daerah dan desa.

Tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah kepada daerah dan/atau desa meliputi sebagian tugas-tugas Pemerintah yang apabila dilaksanakan oleh daerah

dan/atau desa akan lebih efisien dan efektif. Sampai dengan 31 Desember 2023, tidak terdapat Dana Tugas Pembantuan yang salur ke Kabupaten Mojokerto.

2) Pelaksanaan APBDes

Dalam rangka memenuhi akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa, Bupati/Wali Kota wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa pada pemerintah desa di wilayahnya sesuai dengan Pasal 74 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam kaitan itu, Pemerintah Desa harus menyusun Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes yang disampaikan kepada Bupati/Walikota. Selanjutnya, Pemerintah Daerah menyusun Laporan dimaksud dalam bentuk ikhtisar yang dilampirkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Ikhtisar Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Kabupaten Mojokerto tercantum dalam **lampiran 20**.

7.g. PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

1) Kondisi Geografis

Secara geografis wilayah Kabupaten Mojokerto terletak antara 111 ° 20'13" s/d 111°40'47" Bujur Timur dan antara 7°18'35" s/d 7°47'30" Lintang Selatan dengan luas daerah seluruhnya 969.360 Km² atau sekitar 2,09% dari luas Propinsi Jawa Timur. Secara administratif Kabupaten Mojokerto masuk Wilayah Kerja Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Bojonegoro, sedangkan secara spatial Tata Ruang Jawa Timur adalah masuk dalam kawasan pengembangan "Gerbang Kertosusila". Dengan Jumlah penduduk Kabupaten Mojokerto tahun 2022 mencapai 1.138.262 jiwa, dengan rincian jumlah penduduk laki – laki 537.415 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 564.847 jiwa.

Sekitar 30 % dari keseluruhan wilayah Mojokerto, tingkat kemiringan tanahnya lebih dari 15 derajat, sedangkan sisanya merupakan wilayah dataran dengan kemiringan kurang dari 15 derajat. Topografi wilayah Kabupaten Mojokerto cenderung cekung di tengah dan tinggi di bagian selatan dan utara. Bagian selatan merupakan wilayah pegunungan yang subur, meliputi Kecamatan Pacet, Trawas, Gondang dan Jatirejo. Bagian tengah merupakan wilayah dataran, sedangkan bagian utara merupakan daerah perbukitan kapur yang kurang subur.

Pada umumnya ketinggian di wilayah Mojokerto rata-rata berada kurang dari 500 meter di atas permukaan laut, dan hanya Kecamatan Pacet dan Trawas yang merupakan daerah terluas yang memiliki daerah dengan ketinggian lebih dari 700 meter di atas permukaan laut.

Kabupaten Mojokerto mempunyai sungai sebanyak 39 buah yang sudah mempunyai nama, disamping masih banyak juga saluran tersier maupun kuarter yang tidak mempunyai nama. Sungai besar yang melewati wilayah Kabupaten \Mojokerto adalah Sungai Brantas dengan debit air ± 10.031 liter/detik dan Sungai Marmoyo dengan debit air ± 262 liter/detik.

2) Batas Wilayah Kabupaten Mojokerto

Luas wilayah Kabupaten Mojokerto seluruhnya 969.360 Km² atau sekitar 2,09% dari luas Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Mojokerto memiliki batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Gresik;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Pasuruan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Malang dan Kota Batu;
- Sebelah Barat berbatasan Kabupaten Jombang;
- Sedangkan ditengah-tengah adalah wilayah Kota Mojokerto.

3) Pembagian dan Kebijakan Perwilayahan

Secara administratif wilayah Kabupaten Mojokerto terdiri dari 18 kecamatan, 229 desa dan 5 kelurahan, yakni sebagai berikut:

Tabel g.1 Rekapitulasi Wilayah Administrasi Kabupaten Mojokerto

No	Kecamatan	Jumlah	
		Kelurahan	Desa
1	Sooko	-	16
2	Trowulan	-	15
3	Puri	-	16
4	Bangsals	-	17
5	Mojoanyar	-	12
6	Gedeg	-	14
7	Kemlagi	-	20
8	Dawarblandong	-	18
9	Jetis	-	16
10	Mojosari	5	14
11	Ngoro	-	19
12	Pungging	-	19
13	Kutorejo	-	17
14	Dlanggu	-	16
15	Jatirejo	-	19
16	Gondang	-	18
17	Pacet	-	20
18	Trawas	-	13
	Jumlah	5	299

Sumber data :Bagian Pemerintahan Seida Kab. Mojokerto, Tahun 2022

Rincian penggunaan/ pemanfaatan areal dari luas Kabupaten Mojokerto yang sebesar 969.360 Km² atau sekitar 2,09 % dari luas Propinsi Jawa Timur, adalah sebagai berikut:

- Pemukiman	:	132,440 Km ²
- Pertanian	:	371,010 Km ²
- Hutan	:	289,480 Km ²
- Perkebunan	:	170,000 Km ²
- Rawa/Waduk	:	0,490 Km ²
- Lahan Kritis	:	0,200 Km ²
- Padang Rumput	:	1,590 Km ²
- Semak/Alang-alang	:	0,720 Km ²

Penggunaan lahan di wilayah Kabupaten Mojokerto ini dari tahun ke tahun mengalami perubahan fungsi, misalnya lahan pertanian yang berubah fungsi menjadi lahan permukiman, pekarangan, bangunan dan lahan industri serta sebagian lagi dialihkan menjadi jalan.

4) Penggabungan atau Pemekaran Entitas akuntansi

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik perlu dilakukan reformasi birokrasi guna terciptanya organisasi yang efisien, efektif dan roportional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi serta komunikasi kelembagaann antara pusat dan daerah.

Untuk itu dalam mewujudkan sistem pemerintahan daerah sesuai amanat peraturan perundang-undangan yang ada dan agar dapat menunjang dan memenuhi kebutuhan antar kerja serta memudahkan koordinasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota maka perlu dilakukan kembali pembentukan Perangkat Daerah.

Kabupaten Mojokerto selaku penyelenggara pemerintahan di daerah dalam rangka mewujudkan sistem pemerintahan daerah sesuai yang diamanatkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, bahwa perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas:

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat DPRD;
3. Inspektorat;
4. Dinas;
5. Badan; dan
6. Kecamatan.

Maka Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto pada tanggal 30 Desember 2016 melakukan perubahan struktur organisasi yang semula terdapat 51 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten, dirubah menjadi 48 Perangkat Daerah (PD) sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

5) Penjelasan atas Barang Milik Daerah

Pemerintah Kabupaten Mojokerto memiliki barang milik daerah berupa tanah sebanyak 4.490 bidang tanah dengan luas total 8.828.355,49 m². Dari keseluruhan bidang tanah yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Mojokerto; sejumlah 3.325 bidang tanah telah bersertifikat dan terbit sejumlah 3.096 sertifikat atas nama Pemerintah Kabupaten Mojokerto dengan total luas 5.258.982 m², sejumlah 123 bidang tanah masih bersertifikat hak milik perseorangan dan waqaf, sejumlah 41 bidang tanah bersertifikat hak pakai a.n. instansi vertikal, sejumlah 63 bidang tanah bersertifikat hak guna bangunan, 2 bidang tanah masih letter C, dan 881 bidang tanah masih belum bersertifikat/belum memiliki bukti kepemilikan, secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel g.2 Daftar Tanah yang Bersertifikat

No	Uraian	Jumlah Sertipikat/Bukti Kepemilikan
1.	Tanah Sertipikat Hak Pakai An. Pemkab Mojokerto	3.096
2.	Tanah Sertipikat Hak Milik/Perorangan dan Waqaf	123
3.	Tanah Sertipikat Hak Pakai An. Instansi Vertikal	41
4.	Tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan	63
5.	Letter C	2
	Total	3.325

Dari 4.490 bidang tanah Pemerintah Kabupaten Mojokerto, terdapat 106 bidang tanah yang dimanfaatkan melalui mekanisme sewa dalam rangka memperoleh PAD sebesar Rp225.648.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dan 534 bidang tanah yang digunakan untuk fasilitas pendidikan berupa Sekolah Dasar Negeri (SDN), Puskesmas dan Puskesmas Pembantu .

Data barang milik daerah berupa kendaraan dinas operasional per Desember 2023 sebanyak 2.834 unit, dengan rincian 455 unit kendaraan dinas roda 4, 2.356 unit kendaraan dinas roda 2, dan 23 unit kendaraan dinas roda 3. Terdapat 4 unit kendaraan dinas roda 4 dan 1 unit kendaraan roda 3 yang penggunaannya dioperasikan pihak lain, serta 22 unit kendaraan dinas roda 4 yang dimanfaatkan melalui mekanisme pinjam pakai, secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel g. 3 Daftar Kendaraan Dinas yang Dipinjam Pakai
Untuk Dioperasikan Pihak Lain**

No.	Peminjam Pakai	Jenis	Tahun	No. Polisi	Nomor Perjanjian	Perjanjian	
						Tgl. Perjanjian	Tgl. Berakhir Perjanjian
1	Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kab. Mojokerto	Toyota minibus	2005	S 1133 SP	028/1632/416-116/2019 / 142/13.16-F/2019	16/09/2019	16/09/2024
2	PT. Bank Pasar	Avanza 1300 G	2008	S 1544 SP	028/3138/416-022/2019 / 580/31/416-401/2019	16/09/2019	16/09/2024
3	Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)	Avanza 1300 G	2008	S 1493 SP	028/3139/416-022/2019 / 690/338/416-402/2019	16/09/2019	16/09/2024
4	Badan Amil Zakat Nasional Kab. Mojokerto	Avanza 1300 G	2007	S 435 SP	028/584/416-013/2019 / 069/A-1/BAZNAS KAB. MJK/2019	30/09/2019	30/09/2024
5	Pemerintah Desa Belahan Tengah	V 20 RL	2018	S 3166 NP	028/3717/416-110/2019 / 470/3578/416-309.7/2019	06/09/2019	06/09/2024

Tabel g. 4 Daftar Kendaraan Dinas yang Dipinjam Pakai Forum Komunikasi Pimpinan Daerah

No.	Peminjam Pakai	Type	Tahun	No. Polisi	Nomor	Perjanjian	
					Perjanjian	Tgl. Perjanjian	Tgl. Berakhir Perjanjian
1	Detasemen Polisi Militer V/2 Mojokerto CPM)	Kijang Innova G A/T Bensin	2014	S 1452 SP	315.2/2022 / 132/2022	04/03/2022	20/11/2023 (dalam Proses)
2	Detasemen Polisi Militer V/2 Mojokerto CPM)	Fortuner 2.5 G MT	2014	S 1668 SP	028/02/416-203.4/2024	02-01-2024	02-01-2026
3	Kantor Pertanahan Kab. Mojokerto	K. Innova G XW42	2009	S 1578 SP	028/1355/416-203.4/2019 / 3631/024-35.16/X/2019	16/09/2019	16/09/2021 (dalam proses)
4	Kejaksaan Negeri Kab. Mojokerto	Corolla Altis	2008	S 1495 SP	028/1003.1/416.203.4/2023 2657.A/2023	07/11/2023	07/11/2025
5	Kejaksaan Negeri Kab. Mojokerto	Kijang Innova G	2013	S 61 TP	028/1003.1/416.203.4/2023 2657.A/2023	07/11/2023	07/11/2025
6	Kejaksaan Negeri Kab. Mojokerto	Fortuner 2,5 G M/T TDR Diesel	2014	S 1639 SP	028/1003.1/416.203.4/2023 2657.A/2023	07/11/2023	07/11/2025
7	Kejaksaan Negeri Kab. Mojokerto	Kijang Innova G XW42	2014	S 47 TP	028/1003.1/416.203.4/2023 2657.A/2023	07/11/2023	07/11/2025
8	Kejaksaan Negeri Kab. Mojokerto	All New Pajero Sport 2.4L Dakar (4x2) A/T	2019	S 1657 SP	028/1003.1/416.203.4/2023 2657.A/2023	07/11/2023	07/11/2025
9	Kejaksaan Negeri Kab. Mojokerto	New Avanza 1.3 G M/T	2012	S 84 TP	028/1003.1/416.203.4/2023 2657.A/2023	07/11/2023	07/11/2025
10	Kepolisian Resort Mojokerto Kota	FORTUNER 2.5 G AT	2013	S 1000 SP	320.2/2022 / 01/2022	04/03/2022	01/10/2023 (dalam Proses)
11	Kepolisian Resort Mojokerto Kota	Corolla Altis 1.86 M/T	2015	S 1663 SP	028/1328.1/416-203.4/2023 6/2023	14 /08/2023	14/08/2025

No.	Peminjam Pakai	Type	Tahun	No. Polisi	Nomor	Perjanjian	
					Perjanjian	Tgl. Perjanjian	Tgl. Berakhir Perjanjian
12	Kepolisian Resort Mojokerto Kota	All New Pajero Sport 2.4L Dakar (4x2) A/T	74	S 1655 SP	028/1328.1/416-203.4/2023, 6/2023	14/08/2023	14/08/2025
13	Komando Distrik Militer 0815	NHR 55 E2	2008	S 1023 SP	326.3/2022 / 126/2022	07/03/2022	19/11/2023 (Dalam Proses)
14	Komando Distrik Militer 0815	Kijang Innova G	2012	S 1257 SP	326.3/2022 / 126/2022	07/03/2022	19/11/2023 (Dalam Proses)
15	Komando Distrik Militer 0815	All New Pajero Sport 2.4L Dakar (4x2) A/T	2019	S 1654 SP	028/1326.1/416-203.4/2023, B/1996I/2023	14/08/2023	14/08/2025
16	Komando Garnisun Tetap III/Surabaya (Sub Kogartap 0815/Mojokerto)	Kijang Innova G	2012	S 45 TP	028/1329.1/416-203.4/2023, 90/2023	14/08/2023	14/08/2025
17	Komando Resor Militer 082/CPYJ Mojokerto	Kijang Innova G A/T Bensin	2014	S 1632 SP	028/1251.1/416-203.4/2023, 11/2023	13/10/2023	13/10/2025
18	Pengadilan Negeri Mojokerto	Fortuner 2,5 G M/T TDR Diesel	2014	S 1614 SP	325.3/2022 / 6289/2022	07/03/2022	19/11/2023 (Dalam Proses)
19	Polisi Resort Mojokerto	K. Innova E DSI STD	2009	S 1999 SP	028/1331/416-203.4/2023 1382I/2023	14/08/2023	14/08/2025
20	Polisi Resort Mojokerto	FRONTIER 2.5 A/T	2013	S 58 NP	028/1331/416-203.4/2023 1382I/2023	14/08/2023	14/08/2025
21	Polisi Resort Mojokerto	Fortuner 2,5 G M/T TDR Diesel	2014	S 1999 TP	028/1331/416-203.4/2023 1382I/2023	14/08/2023	14/08/2025
22	Polisi Resort Mojokerto	Corolla Altis 1.86 M/T	2015	S 1667 SP	028/1331/416-203.4/2023 1382I/2023	14/08/2023	14/08/2025

7.h. PENUTUP

Berdasarkan uraian dalam catatan atas laporan keuangan dimuka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- 1). Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2023 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023, terdiri dari:
 - a) Pendapatan Rp 2.607.873.973.959,00.
 - b) Belanja Rp 2.963.109.428.944,00.
 - c) Pembiayaan Rp 355.235.454.985,00.
- 2). Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mojokerto sampai dengan tutup buku Tahun Anggaran 2023 antara lain sebagai berikut:
 - a) Pendapatan Rp 2.608.549.958.903,54.
 - b) Belanja Rp 2.715.093.795.527,07.
 - c) Pembiayaan Rp 355.235.454.984,97.
- 3). Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 248.691.618.361,44 terdiri dari:
 - a) Pelampauan Target Pendapatan Daerah Rp 675.984.944,54.
 - b) Penghematan Belanja Daerah Rp 248.015.633.416,93.
 - c) Pembiayaan minus Rp 0,03.

Berdasarkan angka-angka realisasi dan penjelasan secara garis besar tersebut di atas, maka pelaksanaan APBD Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2023 pada umumnya dapat berjalan lancar. Namun perlu kita ketahui bersama, bahwa disamping hasil yang telah dicapai masih terdapat beberapa kekurangan dan hambatan yang kesemuanya itu harus dihadapi sebagai pelajaran dan tantangan demi tercapainya kesempurnaan tugas-tugas yang akan datang. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan kemudahan dalam membangun Kabupaten Mojokerto yang damai dan sejahtera.

BUPATI MOJOKERTO

dr. IKFINA FAHMAWATI, M.Si